



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

tentang

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018 - 2023



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I 1
1.1 Latar Belakang	I 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I 7
1.4 Maksud dan Tujuan	I 12
1.5 Sistematika Penulisan.....	I 12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II 1
2.1.1. Aspek Geografi	II 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II 6
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II 7
2.1.4. Aspek Demografi	II 8
2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat.....	II 13
2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi...	II 13
2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II 27
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III 1
3.1. Kinerja Keuangan 2013 2017	III 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III 1
3.1.2. Neraca Daerah	III 14
3.2. Kebijakan pengelolaan Keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2017	III 20
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III 20
3.2.2. Analisis Pembentukan	III 25
3.3. Kerangka Pendanaan	III 27
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III 27
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III 32
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV 1
4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Padang Panjang.....	IV 1
4.2. Isu Strategis Pembangunan	IV 10
4.2.1. Isu Internasional	IV 10
4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional	IV 12
4.2.3. Isu atau Kebijakan Provinsi Sumatera Barat	IV 18
4.2.4. Hasil Telahaan RPJMD terhadap RTRW.....	IV 20
4.2.5. Hasil Telahaan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.....	IV 22
4.3. Isu Strategis Kota Padang Panjang	IV 30
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V 1
5.1. Visi	V 2
5.2. Misi	V 5
5.3. Tujuan dan Sasaran	V 9

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI	1
6.1.	Strategi	VI	1
6.2.	Arah Kebijakan	VI	4
6.3.	Program Pembangunan Daerah untuk Pencapaian Visi dan Misi Padang Panjang 2018 – 2023	VI	13
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII	1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII	1
8.1.	Indikator Kinerja Utama	VIII	1
BAB IX	PENUTUP	IX	1

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar		iii
Gambar 1.1	Alur Penyusunan RPJMD Menurut Permendagri 86 Tahun 2017	I 4
Gambar 1.2	Diagram Hubungan Dokumen Perencanaan	I 8
Gambar 1.3	Tahapan Pembangunan	I 9
Gambar 1.4	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	I 10
Gambar 1.5	Hubungan Dokumen RPJMD Kota Padang Panjang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I 11
Gambar 2.1	Peta Kota Padang Panjang	II 2
Gambar 2.2	Persentase Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Padang Panjang Tahun 2017	II 10
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia Tahun 2017 (%)	II 11
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin	II 12
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kota Padang Panjang 2017	II 13
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2013- 2017(%)	II 18
Gambar 2.7	Rerata Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHK Kota Padang Panjang 2013-2017 (%)	II 19
Gambar 2.8	Perkembangan PDRB Perkapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2013-2017 (Rp.Juta)	II 21
Gambar 2.9	Laju Inflasi Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2013-2017	II 22
Gambar 2.10	Gini Ratio Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2011-2017	II 24
Gambar 2.11	Angka Kemiskinan dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II 24
Gambar 2.12	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017	II 25
Gambar 2.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang 2013-2017	II 25
Gambar 2.14	Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang 2013-2017	II 26
Gambar 2.15	IPM Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II 27
Gambar 2.16	IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	II 28

Gambar 2.17	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumbar, 2017	II	28
Gambar 2.18	Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang (Tahun), 2013-2017.....	II	29
Gambar 2.19	HLS Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2013-2017	II	29
Gambar 2.20	Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang 2013-2017 (tahun)	II	30
Gambar 2.21	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 2017	II	31
Gambar 2.22	Angka Harapan Hidup di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	31
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Pengangguran di Kota Padang Panjang dan Prov.Sumbar Tahun 2013-2017 (%)	II	32
Gambar 2.24	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Padang Panjang Tahun 2017	II	34
Gambar 2.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (%)	II	35
Gambar 2.26	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (%)	II	36
Gambar 2.27	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (%)	II	36
Gambar 2.28	AKI dan AKB di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	39
Gambar 2.29	Stunting dan Prevalensi Balita Kurang Gizi, 2013-2017	II	39
Gambar 2.30	Angka UCI di Kota Padang Panjang, 2013-2017	II	40
Gambar 2.31	Persentase Cakupan Perilaku Hidup Bersih Sehat di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	40
Gambar 2.32	Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Tahun 2013-2017	II	67
Gambar 5.1	Hubungan Antar Pokok Visi	V	5
Gambar 5.2	Keterkaitan Antara Visi dan Pilar/Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang 2018-2023	V	8
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	VI	5

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	v
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Padang Panjang Menurut Kelurahan Tahun 2010	II 3
Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Kota Padang Panjang 2017 ...	II 5
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan/Kelurahan dan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk 2017	II 9
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II 10
Tabel 2.5 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Panjang ADHB dan ADHK, Tahun 2013-2017	II 14
Tabel 2.6 Perkembangan PDRB Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	II 15
Tabel 2.7 Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang Berdasarkan Lapangan (Persen) Usaha Tahun 2013-2017	II 17
Tabel 2.8 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHK Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (%)	II 20
Tabel 2.9 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2017	II 33
Tabel 2.10 Jumlah Kelas Menurut Kondisi Tahun 2018	II 37
Tabel 2.11 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Menurut Kondisi, 2018	II 38
Tabel 2.12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (Unit)	II 41
Tabel 2.13 Panjang Jalan Menurut Status, Kondisi dan Jenis di Kota Padang Panjang Tahun 2015-2017	II 42
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II 43
Tabel 2.15 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Padang Panjang 2013-2017	II 44
Tabel 2.16 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2017	II 45
Tabel 2.17 Kinerja Urusan Sosial Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II 45
Tabel 2.18 Kinerja Urusan Pangan di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II 46
Tabel 2.19 Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kota Padang Panjang Tahun 2015-2017	II 48
Tabel 2.20 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017	II 48
Tabel 2.21 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II 49

Tabel 2.22	Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2017	II	50
Tabel 2.23	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2017	II	51
Tabel 2.24	Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	51
Tabel 2.25	Kinerja Urusan Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	53
Tabel 2.26	Kinerja Urusan Komunikasi Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	53
Tabel 2.27	Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	55
Tabel 2.28	Kinerja Urusan Perindustrian di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	55
Tabel 2.29	Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	56
Tabel 2.30	Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	56
Tabel 2.31	Kinerja Urusan Perencanaan di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	57
Tabel 2.32	Kinerja Urusan Statistik di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	58
Tabel 2.33	Kinerja Urusan Perpustakaan di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	59
Tabel 2.34	Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2017	II	59
Tabel 2.35	Jumlah Objek Wisata Tahun 2017	II	60
Tabel 2.36	Jumlah Pengunjung Objek Wisata Yang Paling Banyak Dikunjungi Oleh Para Wisatawan Tahun 2013-2017, (orang)	II	61
Tabel 2.37	Perkembangan Jumlah Industri Pariwisata Menurut Jenis Usaha Tahun 2013-2017	II	62
Tabel 2.38	Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2017	II	63
Tabel 2.39	Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2017	II	63
Tabel 2.40	Produksi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur Organik Tahun 2017	II	64
Tabel 2.41	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Jagung Manis Tahun 2013-2017	II	65
Tabel 2.42	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2013-2017	II	66
Tabel 2.43	Produksi Daging Menurut Jenis Ternak Tahun 2013-2017	II	68
Tabel 2.44	Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2017	II	69
Tabel 2.45	Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol Tahun 2013-2017	II	69
Tabel 2.46	Realisasi Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2013-2017	II	70

Tabel 2.47	Realisasi Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2013-2017	II	71
Tabel 2.48	Realisasi Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2013-2017	II	72
Tabel 2.49	Perkembangan Nilai Location Quotient (LQ) Lapangan Usaha Padang Panjang 2013-2017	II	74
Tabel 2.50	Kuadran Kualifikasi Sektoral Tipologi Klassen	II	77
Tabel 2.51	Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor (Lapangan Usaha) Kota Padang Panjang	II	77
Tabel 2.52	Perkembangan Banyak Pelanggan, Pemakaian Air Minum PDAM Kota Padang Panjang 2013-2017.....	II	80
Tabel 2.53	Perkembangan Daya Terpasang, Produksi Listrik, Listrik Terjual di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	81
Tabel 2.54	Perkembangan Sarana Perdagangan dan Jasa, 2014-2017	II	81
Tabel 2.55	Rasio Lulusan Tenaga Kerja S1/S2/S3 Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	II	82
Tabel 3.1	Perkembangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang (Rp.Juta)	III	4
Tabel 3.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang (Rp. Juta)	III	6
Tabel 3.3	Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang 2013-2017	III	7
Tabel 3.4	Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (persen)	III	8
Tabel 3.5	Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang (Rp. Juta)	III	10
Tabel 3.6	Perkembangan Realisasi Belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	III	11
Tabel 3.7	Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	III	12
Tabel 3.8	Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (persen)	III	13
Tabel 3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)	III	14
Tabel 3.10	Neraca Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)	III	16
Tabel 3.11	Rasio Keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	III	19
Tabel 3.12	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	III	20
Tabel 3.13	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	III	21

Tabel 3.14	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017.....	III	23
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	III	24
Tabel 3.16	Defisit Riil Kota Padang Panjang 2013-2017	III	26
Tabel 3.17	Komposisi Penutup Defisit Riil Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017	III	26
Tabel 3.18	Proyeksi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III	30
Tabel 3.19	Kapasitas Riil Kemampuan dan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III	33
Tabel 3.20	Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023	III	35
Tabel 4.1	Telaahan RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032	IV	20
Tabel 4.2	Telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	IV	23
Tabel 4.3	Keselarasan Antara RPJMD Kota Padang Panjang, RPJMD Provinsi Sumbar dengan SDGs dan Nawacita	IV	37
Tabel 5.1	Pilar Pembangunan/Pokok Misi dan Kalimat Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	V	7
Tabel 5.2	Hubungan Komponen Pilar/Misi Dengan Tujuan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	V	9
Tabel 5.3	Visi, Tujuan dan Target Indikator Tujuan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	V	10
Tabel 5.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	V	19
Tabel 5.5	Keselarasan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	V	22
Tabel 6.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2018-2023	VI	2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	VI	8
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kota Padang Panjang	VI	14
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang	VII	2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Padang Panjang	VIII	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder maupun komponen seluruh bangsa. Hal ini dilakukan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai macam sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhir dari pembangunan itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Sementara itu, pembangunan daerah merupakan upaya yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun upaya secara sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di masyarakat, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan perlunya daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka panjang yaitu selama periode 20 (dua puluh) tahun. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJPD. Konsep ini mengindikasikan bahwa penyusunan RPJMD hendaknya selaras dan serasi serta berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk itu, guna mengantisipasi dan merumuskan berbagai strategi dan kebijakan pembangunan secara sistematis dan terstruktur, maka perlu disusun perencanaan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan terhadap pelayanan publik. Untuk itu, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat (*stakeholders*) melalui perencanaan pembangunan daerah, sehingga demokratisasi, transparansi serta akuntabilitas dapat terwujud. Sekaitan dengan hal tersebut maka rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 diamanatkan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah hendaklah mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun tahapan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu; **Pertama** adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan dilakukan secara terukur. **Kedua**, masing-masing perangkat daerah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. **Ketiga** adalah proses penyusunan rencana pembangunan tersebut hendaklah melibatkan

masyarakat (*stakeholders*) secara partisipatif dan menyelaraskannya dengan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh masing-masing tingkat jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. **Keempat** adalah penyusunan rancangan akhir Rencana Pembangunan yang akan dijadikan pedoman oleh setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) masing-masingnya.

b. Penetapan Rencana Pembangunan

Penetapan rencana pembangunan daerah adalah penetapan rencana pembangunan yang akan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan berbagai kegiatan pembangunan.

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

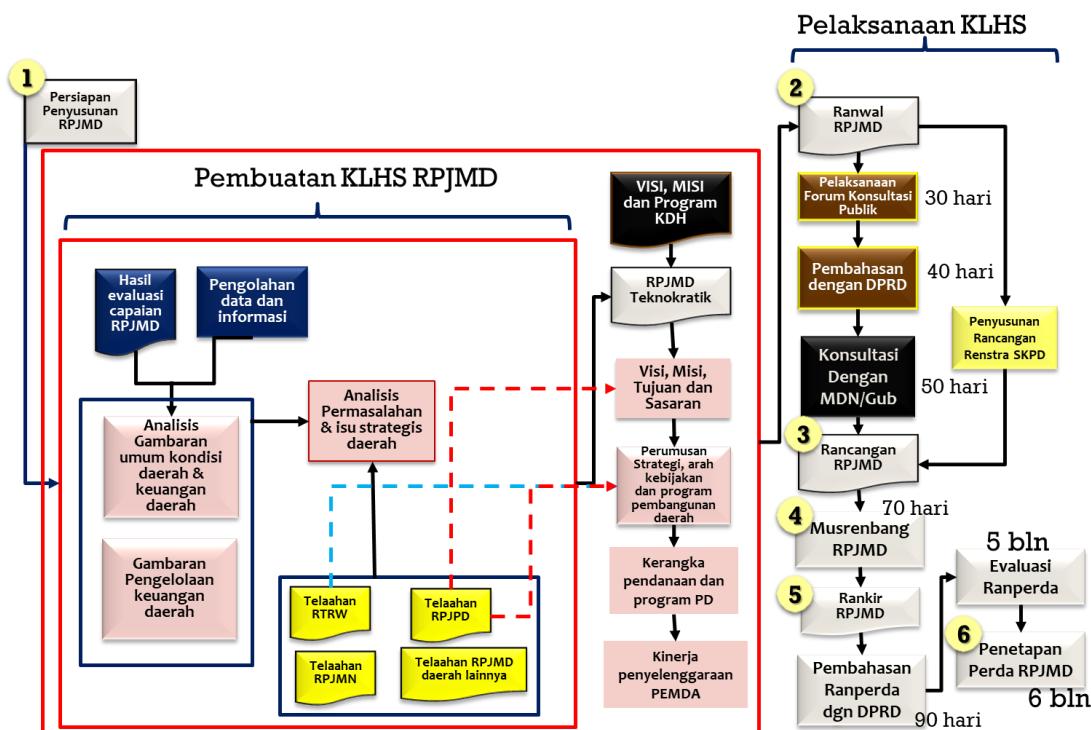
Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan daerah. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Sasaran dan indikator kinerja tersebut mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran kinerja yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana pembangunan.

Keempat tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut di atas diselenggarakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga dapat membentuk satu siklus perencanaan pembangunan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas, menyeluruh dan merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara dan proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah dokumen

perencanaan Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023 berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, yang secara resmi dilantik pada tanggal 8 Oktober 2018. Adapun tahapan penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan alur sebagai berikut.

**Gambar 1.1
Alur Penyusunan RPJMD Menurut Permendagri 86 Tahun 2017**



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 962);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dapo erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 - l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - m. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27)
 - v. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 - w. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
- x. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 - y. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 - z. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 11 Seri A.3);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

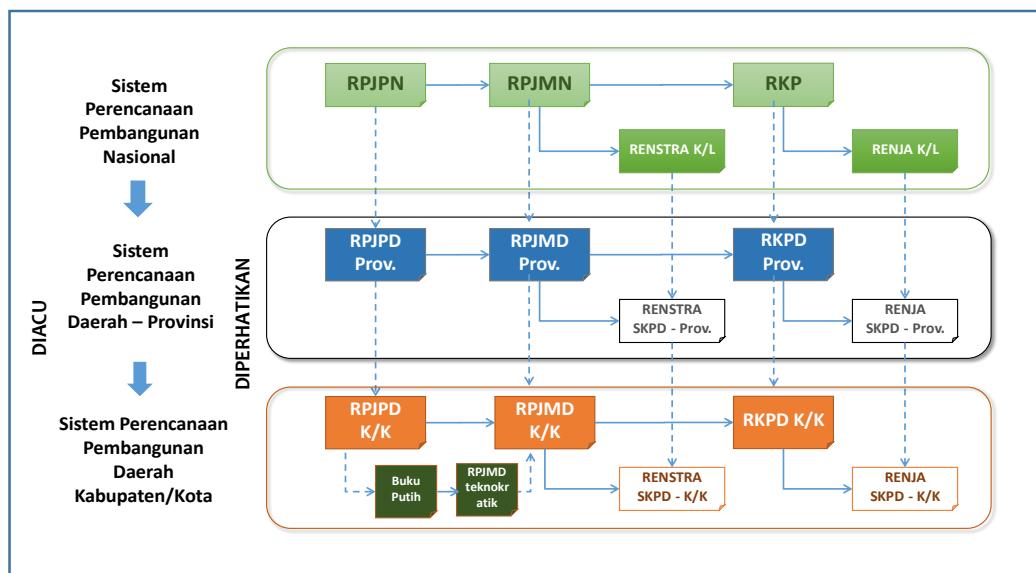
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara setiap komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

Berkaitan dengan hal itu maka sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025, RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kota Padang Panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD Kota Padang Panjang tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan nasional yang memandatkan tiga strategi pengarusutamaan meliputi pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender. Terkait dengan hal itu maka penyusunan RPJMD tersebut berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan dokumen terkait lainnya.

Keterkaitan antar dokumen RPJPD dan RPJMD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan dokumen perencanaan provinsi perlu diwujudkan dan dijaga sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas antara dokumen perencanaan pusat, perencanaan provinsi dan perencanaan pembangunan kota di masa mendatang. Selanjutnya pada tahap yang lebih operasional, dokumen

RPJMD Kota Padang Panjang akan diacu dan dipedomani sebagai bahan dasar untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.2
Diagram Hubungan Dokumen Perencanaan



Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

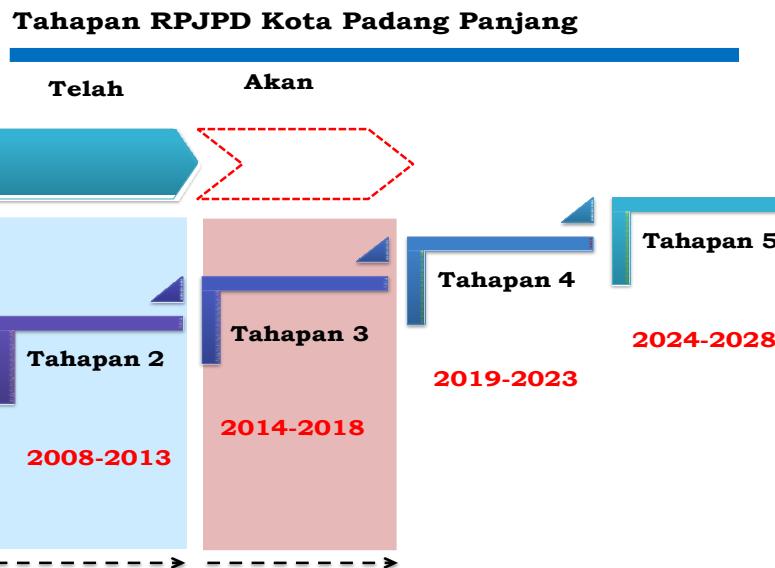
a. RPJMD Kota Padang Panjang dengan RPJPD Kota Padang Panjang

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2018-2023, juga berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025. Artinya adalah dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun.

Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1.3
Tahapan Pembangunan



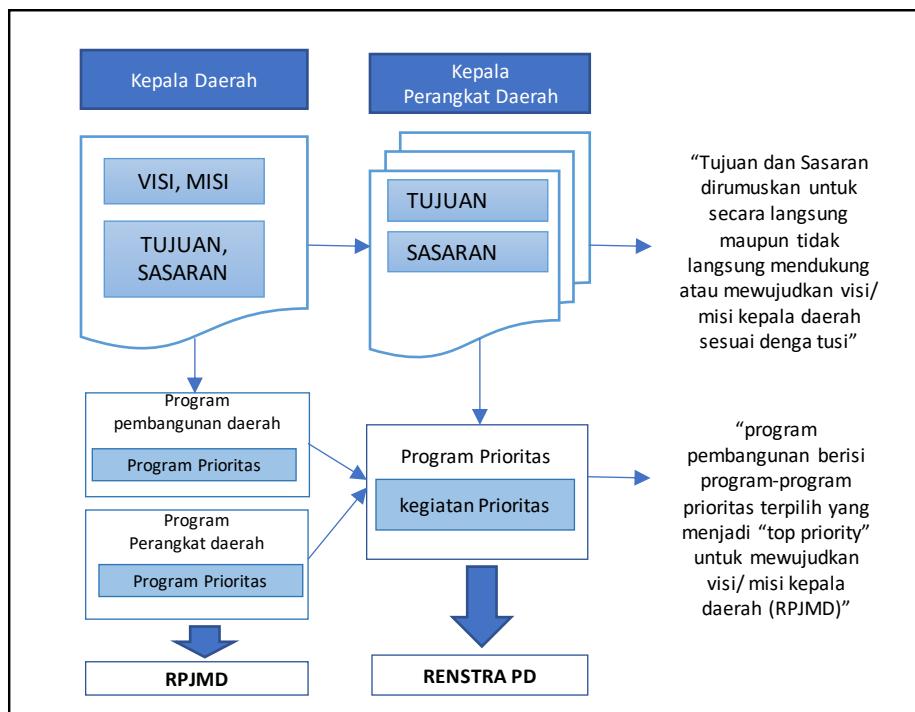
b. RPJMD Kota Padang Panjang dengan Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1), Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir

Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Gambar 1.4
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



c. RPJMD Kota Padang Panjang dengan RKPD Kota Padang Panjang

Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD dibahas bersama pihak-pihak berkepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Padang Panjang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang, hal ini bertujuan untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

d. RPJMD Kota Padang Panjang dengan Perencanaan Lainnya

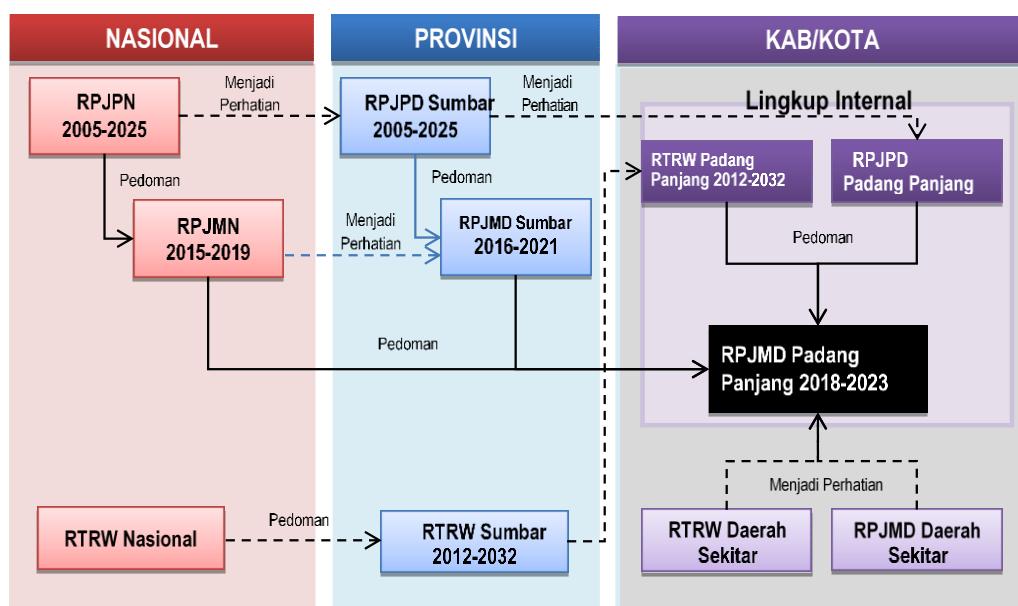
Sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka menengah, maka

berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 juga perlu ditelaah untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, baik dokumen perencanaan nasional, Provinsi Sumatera Barat, ataupun daerah di sekitar Kota Padang Panjang. Dokumen perencanaan tersebut meliputi :

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang;
- 4) RPJMD Kabupaten Tanah Datar yang merupakan daerah berbatasan langsung dengan Kota Padang Panjang;
- 5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 6) Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Skema hubungan antara RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1.5
Hubungan Dokumen RPJMD Kota Padang Panjang
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang berpedoman pada RTRW Kota Padang Panjang yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan mempertimbangkan struktur dan pola ruang Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi : 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional ; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya ; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu

1.4 Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan keterpaduan dan kebersamaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pembangunan daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Menyediakan pedoman dalam menyusun RKPD;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Mewujudkan Sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- e. Menyediakan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan daerah untuk 5 (lima) lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| BAB III | Gambaran Keuangan Daerah |
| BAB IV | Permasalahan dan Isu Strategis Daerah |
| BAB V | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran |
| BAB VI | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah |

BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX	Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografi

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara $0^{\circ} 27' - 0^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 27'$ Bujur Timur (BPS), atau terletak pada $0^{\circ} 26' 48,30'$ Lintang Selatan sampai dengan $0^{\circ} 29' 31,94'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20'$ sampai dengan $100^{\circ} 27'$ Bujur Timur sampai dengan $100^{\circ} 27'$ Bujur Timur (data peta RTRW). Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

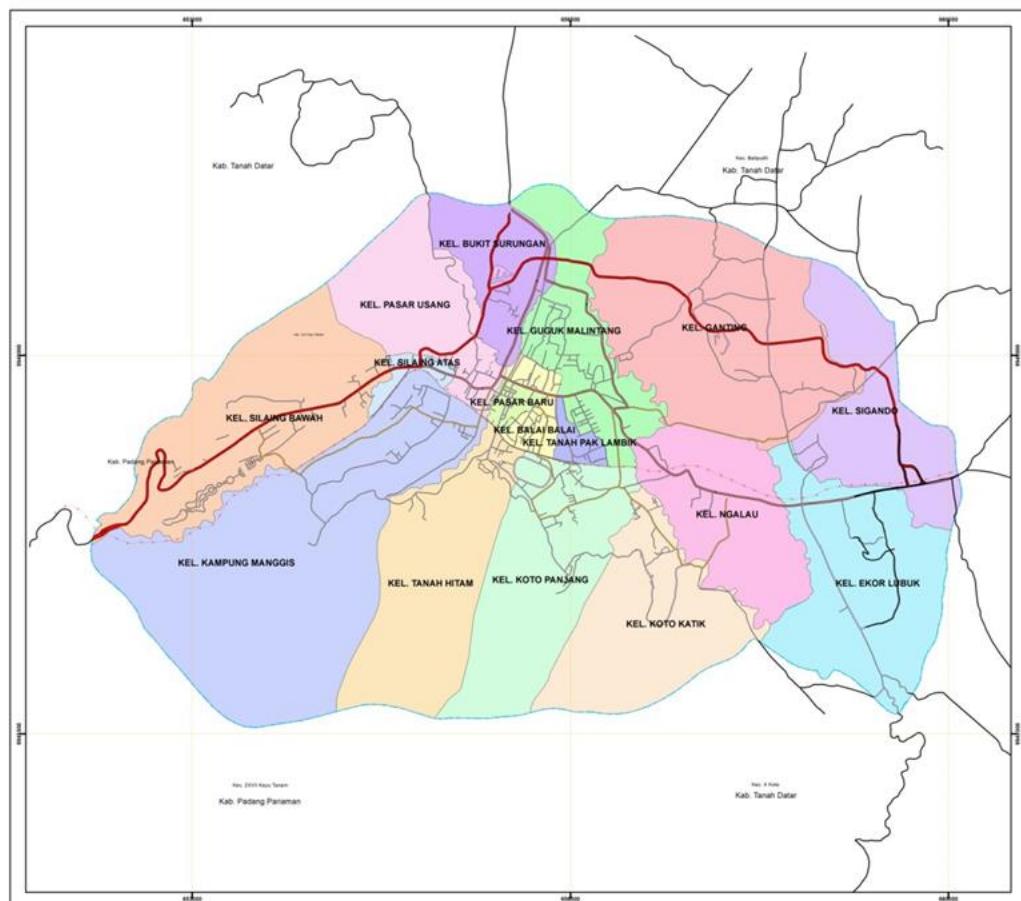
Mengingat belum disepakatinya batas wilayah administrasi Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar, maka luas wilayah Kota Padang Panjang disajikan melalui perbandingan dua data.

Kota Padang Panjang memiliki luas $\pm 23,00 \text{ km}^2$ setara dengan $\pm 2.300 \text{ Ha}$ (BPS) dan $\pm 2.973,54 \text{ Ha}$ (Peta wilayah perencanaan RTRW yang bersumber dari peta Rupa Bumi Indonesia ditambah sebagian daerah Kelurahan Sigando dan Kelurahan Ekor Lubuk), yang mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Berdasarkan peta wilayah perencanaan RTRW, Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar) dan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kayu Tanam (Kabupaten Padang Pariaman)
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)

Peta batas administrasi Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Gambar 2.1, Sedangkan luas wilayah Kota Padang Panjang menurut kelurahan berdasarkan data dari BPS dan dari hasil perhitungan secara planimetris (Peta RTRW) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Gambar 2.1
Peta Kota Padang Panjang



Sumber : RTRW Kota Padang Panjang 2012-2032

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Padang Panjang menurut Kelurahan Tahun 2010

No	Wilayah	Luas (BPS)		Luas (RTRW)	
		Ha	%	Ha	%
I	Kecamatan Padang Panjang Barat	975.00	42.39	1,369.83	46.07
1	Kel. Silaing Bawah	261.00	11.35	286.42	9.63
2	Kel. Silaing Atas	54.00	2.35	16.60	0.56
3	Kel. Pasar Usang	59.00	2.57	155.45	5.23
4	Kel. Kampung Manggis	316.00	13.74	526.24	17.70
5	Kel. Tanah Hitam	72.00	3.13	236.67	7.96
6	Kel. Pasar Baru	23.00	1.00	14.82	0.50
7	Kel. Bukit Surungan	121.00	5.26	102.90	3.46
8	Kel. Balai-balai	69.00	3.00	30.73	1.03
II	Kecamatan Padang Panjang Timur	1,325.00	57.61	1,603.71	53.93
1	Kel. Koto Panjang	133.00	5.78	235.66	7.93
2	Kel. Koto Katik	101.00	4.39	220.57	7.42
3	Kel. Ngalau	145.00	6.30	180.54	6.07
4	Kel. Ekor Lubuk	280.00	12.17	254.07	8.54
5	Kel. Sigando	140.00	6.09	179.82	6.05
6	Kel. Ganting	310.00	13.48	362.66	12.20
7	Kel. Guguk Malintang	190.00	8.26	154.18	5.19
8	Kel. Tanah Pak Lambik	26.00	1.13	16.21	0.55
	Jumlah	2,300.00	100.00	2,973.54	100.00

Sumber : Data BPS dan Hasil Perhitungan secara Planimetris (Peta RTRW)

B. Topografi

Secara topografis Kota Padang Panjang terletak di dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter diatas permukaan laut. Topografi Kota Padang Panjang yang tidak rata mengakibatkan sebagian besar lahan yang ada tidak mungkin dimanfaatkan untuk pemukiman. Kondisi fisik permukaan tanah Kota Padang Panjang terdiri dari mikro relief yang miring dari Utara ke Selatan dan sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan. Tanahnya merupakan tanah jenis andosol yang subur dan merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian.

C. Geologi

Secara umum formasi geologi Kota Padang Panjang terdiri dari batuan malihan, batuan tufaan aliran piroklastik, batuan tufaan, dan lahar II. Kemudian dari struktur geologinya terdapat satu sesar aktif yang melewati Kota Padang Panjang yaitu sesar Bukit Jarat dan satu lagi berdekatan dengan Kota Padang Panjang (pada bagian timur) yaitu Sesar Sumatera.

D. Kondisi Klimatologi

Letak Kota Padang Panjang yang berada pada dataran tinggi, maka Kota Padang Panjang beriklim sejuk dengan suhu rata-rata maksimum mencapai 28,6°C dan minimum 17,6°C. Curah hujan tahunan juga cukup tinggi rata-rata berkisar 253 hari per tahun atau 5236,8,7 mm. Kelembaban rata-rata udara paling tinggi adalah 98,17°C dan terendah rata-rata 60,17°C. Rata-rata temperatur udara di Kota Padang Panjang adalah 22,00°C. Selama tahun 2017, curah hujan di Kota Padang Panjang adalah 3801,7 mm dengan total hari hujan 260 hari. Curah hujan tertinggi terjadi bulan November dengan jumlah curah hujan 748,9 mm dengan total hari hujan 29 hari. Curah hujan terendah terjadi bulan Februari dengan jumlah curah hujan 229,8 mm dengan total hari hujan 16 hari. Kota Padang Panjang mempunyai tekanan udara rata-rata 930,98 mbar dan penguapan air rata-rata 3,40 mm. Penyinaran matahari di Kota Padang Panjang selama tahun 2017 mencapai 39,42. Kecepatan rata-rata angin di tahun 2017 adalah 4,2 knot.

E. Kondisi Hidrologi

Sungai yang melintasi wilayah administrasi Kota Padang Panjang sebanyak 8 sungai, sebagian besar memiliki hulu dan hilirnya di luar Kota Padang Panjang. Sungai terpanjang adalah Sungai Batang Anai yang melalui wilayah Kota Padang Panjang 7,23 km. Sungai yang alirannya paling pendek adalah Sungai Batang Sitabak dengan panjang aliran 1,74 km. Sungai-sungai di Kota Padang Panjang juga memiliki luas penampang yang tidak terlalu besar. Sungai Batang Anai memiliki luas penampang paling besar $\pm 4,86 \text{ m}^2$, sementara sungai dengan penampang paling kecil adalah Sungai Batang Sikakeh dengan luas rata-rata penampangnya $\pm 0,35 \text{ m}^2$. Dengan kondisi yang demikian sebagian orang berpendapat bahwa badan air tersebut tidak tepat disebut sungai, melainkan saluran terbuka perkotaan

Dari segi debit air yang mengaliri sungai-sungai tersebut juga sangat fluktuatif. Rata-rata debit air sungai relatif kecil, terutama diluar musim penghujan. Sungai dengan debit maksimum paling tinggi adalah Sungai Batang Anai dengan debit 5,346 m³/dt. Sedangkan sungai dengan debit maksimum terendah adalah sungai Batang Sitabak dengan debit 0,219 m³/dt. Sementara debit minimum yang paling tinggi adalah Sungai Batang Anai dengan debit 4,374 m³/dt dan debit minimum paling rendah adalah Sungai Batang Sibunian dengan debit 0,106 m³/dt.

Secara lokal Kota Padang Panjang ini terbagi atas 4 daerah aliran sungai (DAS) yang meliputi : DAS Batang Anai berlokasi dibagian barat seluas ± 376,23 Ha, DAS Sungai Andok berlokasi dibagian tengah seluas ± 935,83 Ha, DAS Batang Rupit berlokasi dibagian tengah seluas ± 942,98 Ha dan DAS Batang Sikakeh berlokasi di bagian timur seluas ± 545,07 Ha. Secara regional (konteks Provinsi), Kota Padang Panjang termasuk dalam 2 wilayah sungai (WS) yaitu WS Akuaman pada bagian barat dan WS Indragiri pada bagian timur.

Kondisi saat ini sebagian besar sungai yang melalui Kota Padang Panjang telah menunjukkan indikasi pencemaran dengan status cemar berat. Indikasi pencemara ini disumbang oleh tekanan tinggi dari sektor domestik dan pertanian.

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang didominasi oleh lahan pertanian sebesar 1.428 Ha, sedangkan lahan non pertanian sebesar 872 Ha. Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2
Penggunaan Lahan di Kota Padang Panjang Tahun 2017**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A	Lahan Pertanian	1,428	62.09
1	Sawah	630	27.39
2	Tegalan/ Kebun	264	11.48
3	Ladang/ Huma	95	4.13
4	Kolam/ Tebat/ Empang	87	3.78
5	Hutan Rakyat	213	9.26
6	Tanah Tidak diusahakan	139	6.04
B	Lahan Bukan Pertanian	872	37.91
Total		2,300	100.00

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2017, BPS

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Perda Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain :

- 1) Pusat pelayanan kota meliputi :
 - Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
 - Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.
- 2) Sub pusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi :
 - Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
 - Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
 - Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
 - Kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
 - Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.
- 3) Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi :
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Ekor Lubuk;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;
 - Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;

- Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
- Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, maka Kota Kecil Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja tanggal 25 September Tahun 1957 Nomor 12/K/DPRD-PP/57, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administrative yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Hasil kajian penilaian resiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang yang dilaksanakan tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang) dan hasil observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kota Padang Panjang terdiri dari :

A. Bencana Gempa Bumi

Kota Padang Panjang dapat dibagi atas lima zona kerentanan yakni :

- Zona I (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sangat tinggi)
Bentang alam lajur ini merupakan bagian dari bentang alam struktural vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng 2° - 15° yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik dan Guguk Malintang.
- Zona IA (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi)
Bentang alam lajur ini merupakan bagian bentang alam struktural vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng bervariasi 0 - 15% yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.
- Zona IB (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi – sedang)
Bentang alamnya merupakan bagian dari bentang alam bentukan asal vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng yang bervariasi antara 0 - 12% dan 2 - 15% yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Ganting, Sigando dan kelurahan Ekor Lubuk.
- Zona II (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang)

Zona II ini secara dominan berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai-Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalaau dan kelurahan Koto Panjang.

- Zona III (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang – rendah)
Zona III ini secara dominan berlokasi pada seluruh Kelurahan di Kota Padang Panjang, kecuali kelurahan Silaing Atas dan kelurahan Tanah Pak Lambik

B. Bencana Letusan Gunung Api

Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8–14Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Daerah potensi resiko bahaya aliran Gunung Marapi yang akan datang ditentukan berdasarkan kondisi bentang alam wilayah yang dicerminkan konfigurasi topografi masa kini. Daerah-daerah tersebut dicirikan oleh lembah-lembah sungai yang berhulu langsung dari puncak Marapi. Di Kota Padang Panjang daerah-daerah potensi tersebut dapat dijumpai disepanjang aliran Sungai Batang Anai (DAS Anai), Sungai Pasar Baru dan Sungai Tanang (DAS Andok), Sungai Kendangan-Sibunian (DAS Rupit), Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Sikakeh (DAS Sikakeh).

C. Bencana Longsor (Gerakan Tanah)

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan >40%. Kemudian berdasarkan data wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2010 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 potensi gerakan tanah yaitu potensi menengah-tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan potensi menengah di Kecamatan Padang Panjang Timur. Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah akan mengalami pergerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah, akan mengalami pergerakan tanah jika curah hujan diatas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

2.1.4. Aspek Demografi

Aspek demografi merupakan aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena demografi menggambarkan

komposisi dan distribusi penduduk, yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka informasi tentang aspek demografi berperan penting dalam penentuan kebijakan.

Penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 berjumlah 52.422 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 26.202 jiwa dan penduduk perempuan 26.220 jiwa. Dari tahun 2013-2017 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 2,80 persen dengan luas wilayah 2.300 ha, maka kepadatan penduduk Kota Padang Panjang adalah 2.279 jiwa/km². Berikut ini adalah rincian jumlah penduduk Kota Padang Panjang per Kecamatan menurut jenis kelamin tahun 2017.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan/Kelurahan dan Jenis Kelamin
dan Kepadatan Penduduk Tahun 2017

No	Kecamatan/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas wilayah km ²	Kepadatan (jiwa/km ²)	Distribusi (%)	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan					
1	Padang Panjang Barat	14,471	14,577	29,048	9.75	2,979.28	55.41	99.27
	Silaing Bawah	2,550	2,721	5,271	2.61	2,019.54	10.05	93.72
	Silaing Atas	1,093	963	2,056	0.54	3,807.41	3.92	113.50
	Pasar Usang	1,807	2,111	3,918	0.59	6,640.68	7.47	85.60
	Kampung Manggis	2,920	2,717	5,637	3.16	1,783.86	10.75	107.47
	Tanah Hitam	1,605	1,611	3,216	0.72	4,466.67	6.13	99.63
	Pasar Baru	684	634	1,318	0.23	5,730.43	2.51	107.89
	Bukit Surungan	1,173	1,106	2,279	1.21	1,883.47	4.35	106.06
	Balai-Balai	2,639	2,714	5,353	0.69	7,757.97	10.21	97.24
2	Padang Panjang Timur	11,731	11,643	23,374	13.25	1,764.08	44.59	100.76
	Koto Panjang	2,627	2,501	5,128	1.33	3,855.64	9.78	105.04
	Koto Katik	441	433	874	1.01	865.35	1.67	101.85
	Ngalau	1,338	1,319	2,657	1.45	1,832.41	5.07	101.44
	Ekor Lubuk	1,271	1,213	2,484	2.80	887.14	4.74	104.78
	Sigando	772	743	1,515	1.40	1,082.14	2.89	103.90
	Ganting	1,038	1,084	2,122	3.10	684.52	4.05	95.76
	Guguk Malintang	3,291	3,473	6,764	1.90	3,560.00	12.90	94.76
	Tanah Pak Lambik	953	877	1,830	0.26	7,038.46	3.49	108.67
	Jumlah/ Total	26,202	26,220	52,422	23.00	2,279.22	100.00	99.93

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2018

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara fluktuatif. Tahun 2013 penduduk Kota Padang Panjang berjumlah 48.792 jiwa, kemudian bertambah menjadi 52.422 jiwa pada tahun 2017. Sedangkan jika dilihat dari distribusi dan kepadatan penduduk dapat dijelaskan bahwa kepadatan penduduk Kota Padang Panjang mencapai tahun 2017 adalah 2.279 jiwa/km² dengan kecamatan yang paling padat adalah Padang Panjang Barat yakni sebesar 2.979 jiwa/km². Sedangkan distribusi penduduk terbesar berada di Kelurahan Guguk Malintang. Berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan bahwa penduduk laki-laki di Kota Padang

Panjang pada tahun 2017 berjumlah 26.202 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 26.220 jiwa. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perbandingan jenis kelamin (sex ratio), yaitu sebesar 99,93 SR. Sehingga setiap 99 jiwa penduduk laki-laki berbanding lurus dengan 100 jiwa jumlah penduduk perempuan.

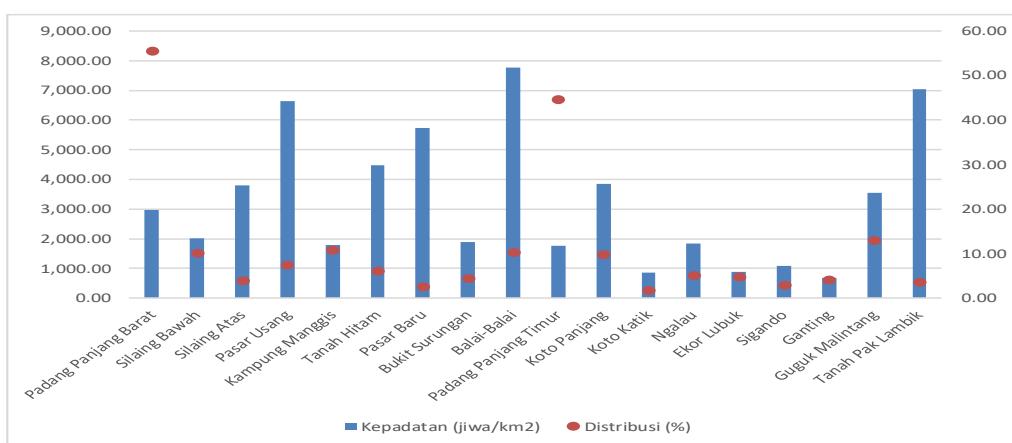
Untuk lebih jelasnya persentase distribusi dan kepadatan penduduk serta perkembangan jumlah penduduk Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Tabel. 2.4
Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2017

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2013	49.536	2,80
2014	50.208	2,90
2015	50.883	1,34
2016	51.712	1,63
2017	52.422	1,37
Rata – rata		1,43

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018, diolah

Gambar. 2.2
Persentase Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Padang Panjang Tahun 2017



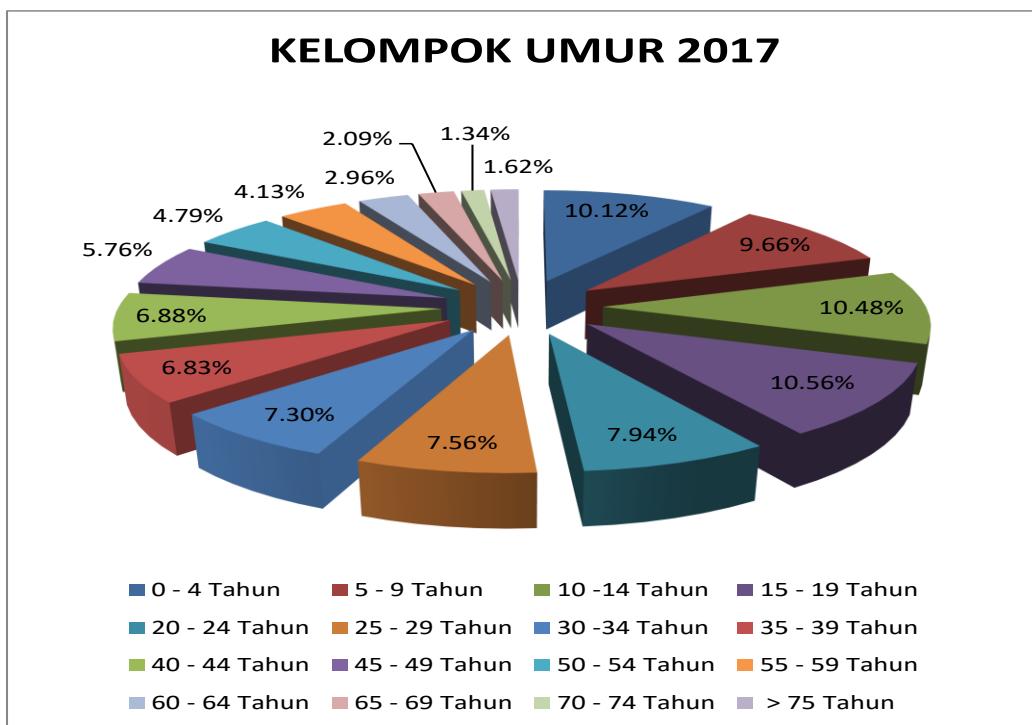
Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018, diolah

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Padang Panjang disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni akibat pertumbuhan secara alami

(fertilitas) dan adanya migrasi penduduk disekitar wilayah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) yaitu sebanyak 33.913 jiwa (64,69 persen). Realita ini merupakan bonus demografi dalam pembangunan, dimana Pemerintah Kota Padang panjang perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia baik pendidikan, kesehatan sehingga dapat mewujudkan penduduk usia produktif yang benar-benar produktif serta memiliki kualitas yang unggul. Disamping penduduk usia produktif, penduduk usia balita menempati urutan selanjutnya setelah penduduk usia 10-14 tahun. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat Gambar berikut :

Gambar 2.3
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang
Menurut Kelompok Usia Tahun 2017 (%)



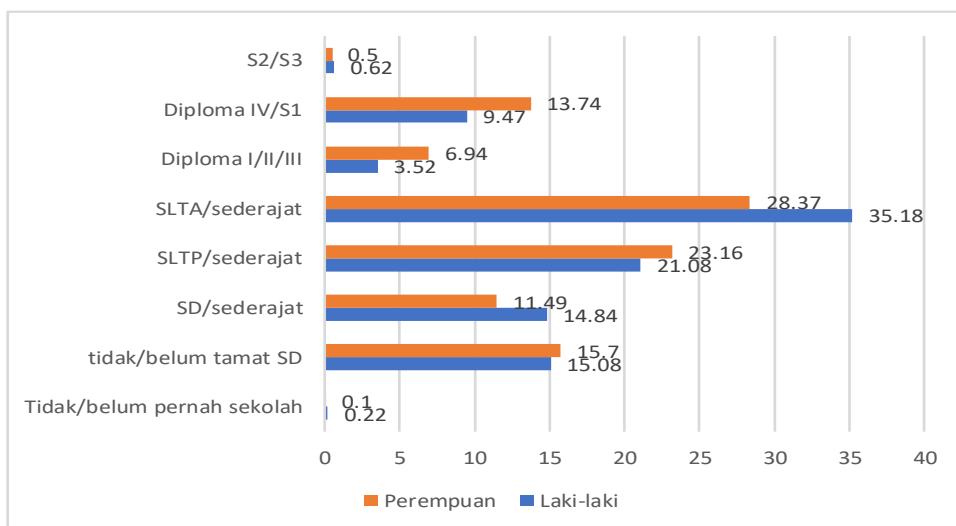
Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Selanjutnya Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif adalah sebesar 54,58 persen. Artinya dalam setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55 jiwa penduduk dengan usia non-produktif. Rasio sebesar 54,58 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan

penduduk muda sebesar 46,77 persen dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 7,81 persen. Ini artinya penduduk Padang Panjang masih dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk tua.

Jumlah ataupun persentase penduduk menurut kelompok pendidikan juga perlu dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Hal ini dibutuhkan untuk perencanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bila diperhatikan secara cermat di Kota Padang Panjang, ternyata sekarang ini jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SLTA sederajat. Kondisi yang demikian memberikan gambaran bahwa secara umum kinerja pengelolaan pendidikan di Kota Padang Panjang sudah bagus. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Padang Panjang dapat dirinci pada gambar berikut :

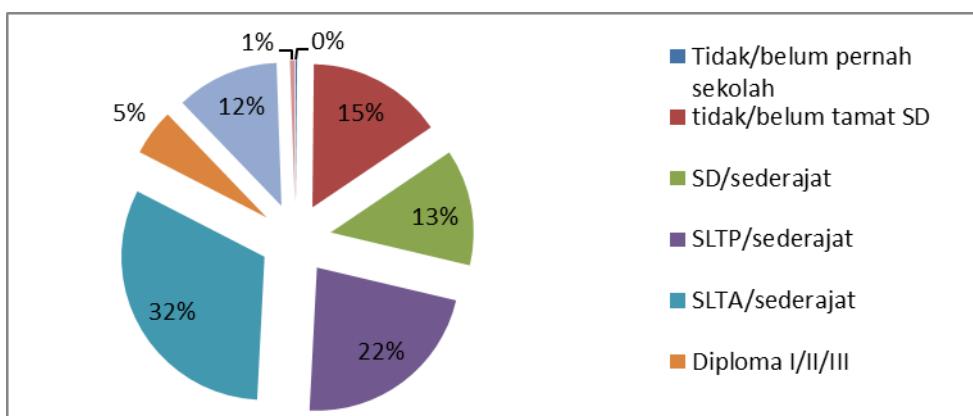
Gambar 2.4
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin



Sumber : Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SLTA/sederajat) yaitu mencapai 32 persen, kemudian diikuti oleh SLTP/sederajat sebesar 22 persen dan SD/sederajat sebanyak 13 persen. Sedangkan sisanya adalah tidak/belum tamat SD sebesar 15 persen. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada diagram berikut :

Gambar 2.5
Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kota Padang Panjang, 2017



Sumber : BPS Padang Panjang, Tahun 2018

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada di daerah, maka dibutuhkan pengertian dan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah.

A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah (Mudradjad Kuncoro, 2004 dan Brojonegoro, 2006). Terjadinya peningkatan dan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tim peneliti LPEM FE-UI, 2009).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Semakin tinggi perkembangan PDRB pada suatu daerah maka semakin maju perekonomian daerah tersebut.

Perkembangan PDRB Kota Padang Panjang, baik PDRB-ADHB maupun PDRB-ADHK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, selama periode 2013-2017. Pada tahun 2013, nilai PDRB-ADHB Kota Padang Panjang baru sebesar 2,09 triliun rupiah dan kemudian meningkat menjadi 3,03 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini berarti secara rata-rata pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama periode 2013-2017 mencapai 9,79 persen per tahun. Selama periode 2013-2017 ternyata laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 dimana mencapai 12,06 persen. Relatif tingginya laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku pada tahun 2014 itu menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi di kota Padang Panjang cukup bagus. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi yang terendah menurut ADHB terjadi pada tahun 2015, dimana hanya mencapai sebesar 7,89 persen. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan juga pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun tersebut juga relatif rendah dan malahan cenderung turun dari tahun ketahun. Kenyataan ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang.

Adapun perkembangan PDRB menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan tahun 2010 di Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 dapat dilihat seperti dalam Tabel berikut :

**Tabel. 2.5
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota
Padang Panjang ADHB dan ADHK, Tahun 2013-2017**

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
2013	2.095.243,70	10,30	1.839.183,10	6,29
2014	2.347.905,10	12,06	1.951.004,30	6,08
2015	2.533.045,00	7,89	2.066.248,20	5,91
2016	2.774.350,10	9,53	2.186.151,60	5,80
2017	3.028.806,70	9,17	2.313.117,00	5,81
Rata-rata	9,79			5,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018, data diolah

Selanjutnya, bila dilihat perkembangan PDRB ADHK ternyata nilainya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2013, PDRB ADHK Kota Padang Panjang baru mencapai 1,84 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,31 triliun rupiah di tahun 2017. Hal ini berarti PDRB ADHK tahun 2010 untuk Kota Padang

Panjang selama periode 2013-2017 mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 5,98 persen per tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang secara rata-rata selama periode tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Sebab selama periode tersebut laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun Sumatera Barat secara rata-rata hanya mencapai 4,96 persen dan 5,72 persen. Adapun perkembangan PDRB ADHK Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	104.922,30	108.455,30	110.993,90	113.203,10	116.362,8
B	Pertambangan dan Penggalian	5.326,80	5.616,30	6.021,40	6.045,50	6.073,6
C	Industri Pengolahan	209.059,20	224.183,60	228.831,40	239.094,50	244.336,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.142,80	1.283,50	1.328,20	1.460,10	1.520,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.475,00	5.708,90	5.993,10	6.011,20	6.135,8
F	Konstruksi	165.941,50	176.536,80	189.281,70	199.101,60	215.198,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	345.216,90	364.634,30	383.006,10	406.635,90	425.207,7
H	Transportasi dan Pergudangan	240.286,90	258.684,00	278.941,00	297.272,30	317.000,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.364,40	41.660,00	45.068,10	48.333,40	51.946,4
J	Informasi dan Komunikasi	167.526,20	184.239,20	204.188,90	220.217,70	239.765,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	77.181,90	82.627,90	86.711,70	92.217,40	94.205,1
L	Real Estat	67.759,40	70.961,80	74.126,20	76.742,80	80.200,9
M, N	Jasa Perusahaan	1.428,30	1.551,90	1.657,70	1.761,20	1.870,5
O	Administrasi Pemerintaha, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	176.383,80	178.275,80	184.855,60	193.303,50	202.883,8

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
P	Jasa Pendidikan	132.604,20	141.669,00	155.247,80	167.900,50	184.883,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24.232,00	26.084,30	27.949,20	29.399,80	31.423,0
R,S ,T, U	Jasa lainnya	76.331,70	78.831,60	82.046,20	87.451,10	94.102,2
Produk Domestik Regional Bruto		1.839.183,10	1.951.004,30	2.066.248,20	2.186.151,60	2.313.117,00

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadinya peningkatan atau pertumbuhan PDRB menurut harga konstan yang relatif cukup tinggi tersebut didukung oleh peningkatan beberapa nilai dari sektor lapangan usaha yaitu ; sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp.406,64 miliar pada tahun 2016 dan kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.425,21 pada tahun 2017. Sementara itu nilai sektor Transportasi dan Pergudangan mencapai sebesar Rp.297,27 miliar pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp.317,00 miliar pada tahun 2017. Sedangkan untuk sektor Industri Pengolahan dengan nilai Rp.239,09 miliar pada tahun 2016 dan kemudian meningkat menjadi Rp.244,34 miliar pada tahun 2017.

Disamping ketiga sektor tersebut, sektor PDRB lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PDRB Kota Padang Panjang adalah sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai Rp.220,22 miliar pada tahun 2016 dan kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.239,76 pada tahun 2017. Selanjutnya untuk sektor Konstruksi dengan nilai sebesar Rp.199,10 miliar pada tahun 2016 dan kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.215,20 miliar pada tahun 2017.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 ternyata mengalami penurunan. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mencapai 6,29 persen, dan kemudian menurun menjadi 6,08 persen pada tahun 2014. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2015 dan 2016 hingga mencapai 5,91 persen dan 5,80 persen. Akan tetapi pada tahun 2017 sedikit mengalami perubahan sebesar 0,01 persen hingga menjadi 5,81 persen.

Secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 tersebut adalah sebesar 5,98

persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 tersebut mengalami kecenderungan penurunan, akan tetapi secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang lebih besar dari laju pertumbuhan rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Barat maupun PDB Indonesia, dimana laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat dan Indonesia selama periode 2013-2017 tersebut secara rata-rata masing-masingnya hanya mencapai sebesar 5,72 persen dan 4,96 persen.

Selanjutnya bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, selama periode 2013-2017 terdapat beberapa lapangan usaha utama yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, antara lain : Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan rata-rata 7,69 persen, sektor Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata 8,37 persen, dan sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 8,59 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa beberapa sektor lapangan usaha tersebut memiliki potensi yang bagus untuk ditumbuhkembangkan pada masa yang akan datang. Disamping beberapa sektor PDRB seperti di atas, sektor PDRB lain yang juga memiliki potensi dan prospek yang cerah untuk dikembangkan dimasa mendatang adalah sektor Jasa konstruksi dengan pertumbuhan rata-rata 7,73 persen, sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan rata-rata 7,53 persen serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,33 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang
Berdasarkan Lapangan (Persen) Usaha Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,28	3,37	2,34	1,99	2,79	2,55
B	Pertambangan dan Penggalian	6,96	5,43	7,21	0,40	0,46	4,09
C	Industri Pengolahan	5,83	7,23	2,07	4,49	2,19	4,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,56	12,31	3,48	9,93	4,14	7,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,79	4,27	4,98	0,30	2,07	4,08
F	Konstruksi	11,77	6,38	7,22	5,19	8,08	7,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	5,62	5,04	6,17	4,57	5,56

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
H	Transportasi dan Pergudangan	8,97	7,66	7,83	6,57	6,64	7,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,15	8,59	8,18	7,25	7,48	7,33
J	Informasi dan Komunikasi	4,31	9,98	10,83	7,85	8,88	8,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,51	7,06	4,94	6,35	2,16	5,40
L	Real Estat	4,04	4,73	4,46	3,53	4,51	4,25
M,N	Jasa Perusahaan	7,85	7,64	7,15	5,19	6,88	6,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,48	8,65	6,82	6,24	6,21	7,28
P	Jasa Pendidikan	1,74	1,07	3,69	4,57	4,96	3,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,29	6,84	9,58	8,15	10,11	8,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,03	3,28	4,08	6,59	7,61	5,72
Produk Domestik Regional Bruto		6,29	6,08	5,91	5,80	5,81	5,98

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2018

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang naik menjadi 5,81 persen pada tahun 2017 dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat naik menjadi 5,69 persen ternyata akselerasi kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik dibandingkan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dan Nasional selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang, Sumatera Barat
dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)

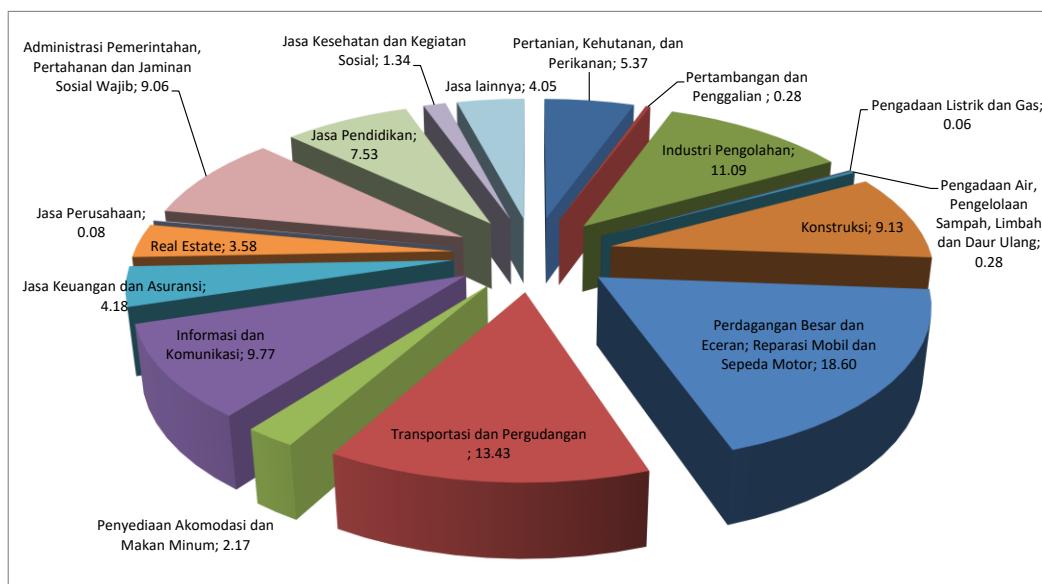


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018, data diolah

2) Perkembangan Struktur Ekonomi

Perkembangan struktur ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Industri Pengolahan. Kenyataan ini adalah wajar dan rasional sebab sebagai salah satu daerah perkotaan, maka ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang selalu cepat perkembangan pembangunannya dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Perkembangan beberapa sektor ekonomi yang cepat ini memberikan indikasi bahwa sektor ini merupakan sektor yang potensial untuk menjadi daya unggul bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dimasa mendatang. Adapun kontribusi masing-masing ketiga sektor tersebut mencapai di atas 10 persen dimana secara rata-rata masing-masingnya adalah sebesar 18,60 persen, 13,43 persen dan 11,09 persen seperti terlihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.7
Rerata Kontribusi Lapangan Usaha terhadap
PDRB ADHK Kota Padang Panjang 2013-2017 (%)**



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2018

Disamping ketiga sektor yang memberikan kontribusi yang paling besar tersebut terhadap PDRB, beberapa sektor lapangan usaha lainnya yang juga cukup tinggi kontribusinya adalah sektor Informasi dan komunikasi sebesar 9,77 persen, sektor konstruksi sebesar 9,13 persen serta sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,06 persen. Sedangkan beberapa sektor lainnya seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Jasa Keuangan dan

Asuransi serta sektor Real Estate kontribusi masing-masingnya lebih kecil dari 6 persen. Hal ini berarti untuk beberapa sektor yang kontribusinya tidak begitu besar tersebut tentu akan kurang menarik bagi para calon investor untuk berinvestasi di sektor lapangan usaha tersebut.

Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi yang rendah bersamaan dengan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dimana masing-masingnya hanya memberikan kontribusi sebesar 0,28 persen. Sedangkan disisi lain, sektor Pengadaan Listrik dan Gas disamping pertumbuhannya yang kurang stabil, kontribusinya terhadap PDRB juga sangat rendah sekali, dimana hanya mencapai 0,06 persen saja. Adapun pekembangan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.8
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHK
Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2017 (%)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.70	5.56	5.37	5.18	5.03	5.37
B	Pertambangan dan Penggalian	0.29	0.29	0.29	0.28	0.26	0.28
C	Industri Pengolahan	11.37	11.49	11.07	10.94	10.56	11.09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27	0.28
F	Konstruksi	9.02	9.05	9.16	9.11	9.30	9.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.77	18.69	18.54	18.60	18.38	18.60
H	Transportasi dan Pergudangan	13.06	13.26	13.50	13.60	13.70	13.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.09	2.14	2.18	2.21	2.25	2.17
J	Informasi dan Komunikasi	9.11	9.44	9.88	10.07	10.37	9.77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.20	4.24	4.20	4.22	4.07	4.18
L	Real Estate	3.68	3.64	3.59	3.51	3.47	3.58
M,N	Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.59	9.14	8.95	8.84	8.77	9.06
P	Jasa Pendidikan	7.21	7.26	7.51	7.68	7.99	7.53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.32	1.34	1.35	1.34	1.36	1.34
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.15	4.04	3.97	4.00	4.07	4.05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

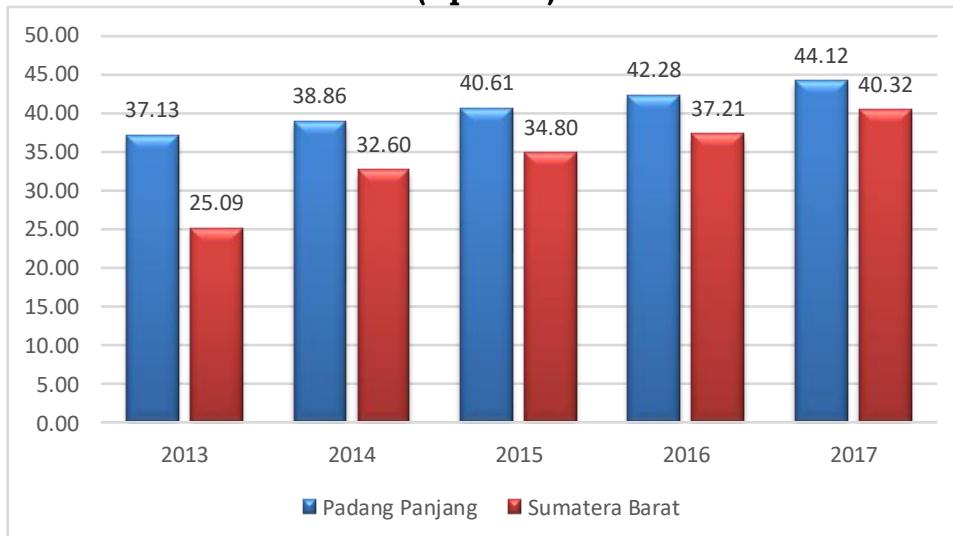
Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018, data diolah

B. PDRB Per Kapita

Selama periode 2013-2017, PDRB per kapita Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB per-kapita Kota Padang Panjang ini juga cukup besar dan lebih tinggi dari PDRB per-kapita pada beberapa Kota di Sumatera Barat. Kenyataan yang demikian menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang juga meningkat cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, PDRB per kapita Kota Padang Panjang adalah sebesar 37,13 juta rupiah dan kemudian meningkat menjadi 44,12 juta rupiah pada tahun 2017.

Adapun perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.8
Perkembangan PDRB Perkapita Kota Padang Panjang
dan Sumatera Barat Tahun 2013-2017
(Rp.Juta)



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2018

Meskipun perkembangan PDRB Perkapita Kota Padang Panjang dibandingkan dengan PDRB Perkapita pada beberapa kota di Provinsi Sumatera Barat ternyata jauh lebih besar, namun demikian melihat potensi ekonomi masyarakat Kota Padang Panjang terutama potensi UMKM dan sektor pariwisata maka pendapatan perkapita Kota Padang Panjang masih bisa lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

C. Laju Inflasi

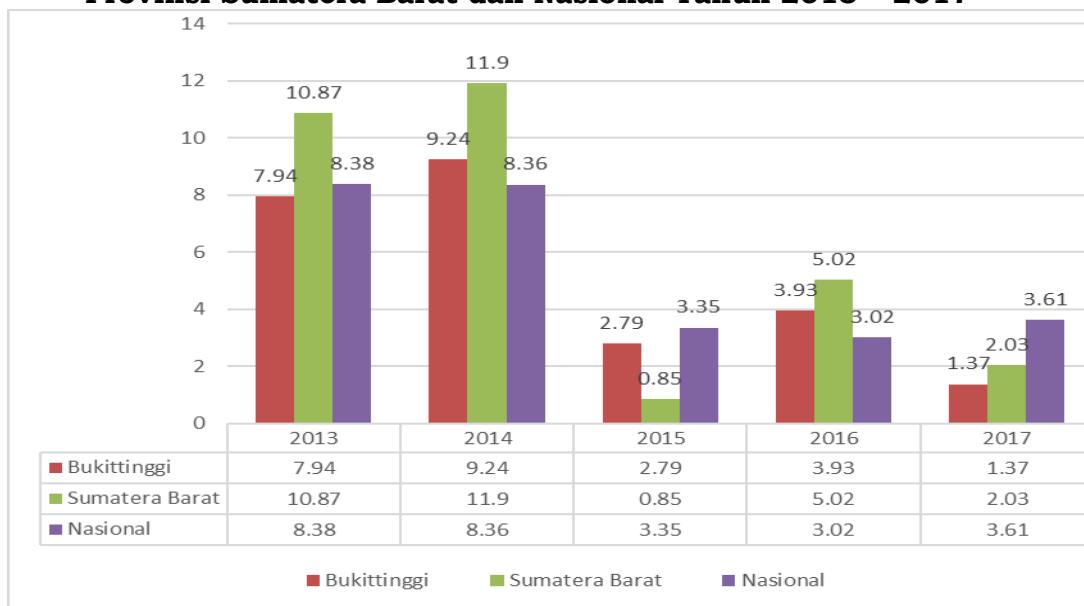
Inflasi di Kota Padang Panjang mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi dan Kota Padang. Inflasi di Kota Bukittinggi dan Kota Padang selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami

fluktuasi, dimana tahun 2014 inflasi Kota Bukittinggi menunjukkan angka 9,24 persen dan Kota Padang 11,9 persen, dan mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai angka 2,79 di Kota Bukittinggi dan di Kota Padang 0,85 persen pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 3,93 persen di Kota Bukittinggi dan 5,02 persen di Kota Padang. Pada bulan November tahun 2017 Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,48 persen dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi 0,32 persen.

Laju inflasi tahun kalender sampai bulan November 2017 Kota Padang dan Kota Bukittinggi masing-masing sebesar 1,39 persen dan 1,00 persen. Laju inflasi year on year 2017 di Kota Padang sebesar 2,11 persen dan Kota Bukittinggi sebesar 1,37 persen. Sebagai akibatnya masyarakat Kota Padang Panjang lebih banyak berbelanja ke Kota Bukittinggi, sebab disamping bisa menghemat biaya transportasi, tingkat harga juga lebih murah dibandingkan dengan di kota Padang.

Sebagai bahan perbandingan, maka tingkat inflasi Provinsi Sumatera Barat juga perlu dijadikan barometer. Berdasarkan data dari Bank Indonesia bahwa laju inflasi di Sumatera Barat 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Kondisi ini tampaknya juga tidak jauh berbeda dengan laju inflasi di tingkat nasional. Perkembangan inflasi Kota Padang, Bukittinggi, Provinsi Sumbar dan Nasional dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Gambar 2.9
Laju Inflasi Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Padang,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun, 2018

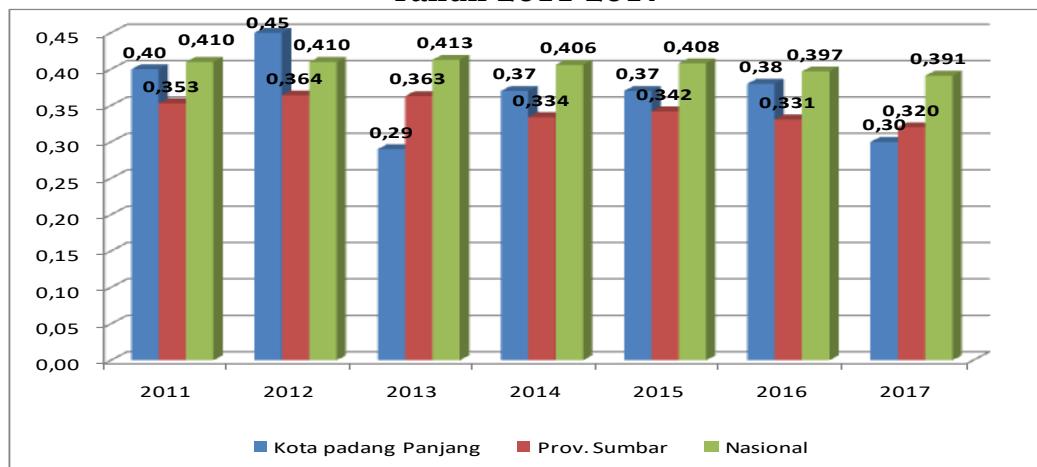
D. Distribusi Pendapatan/ Gini Ratio

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka GR berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). GR bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan GR bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian GR diupayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adapun klasifikasi ketimpangan pendapatan dibagi atas kategori *rendah* (<0,45), kategori *sedang* (0,35-0,5) dan kategori *tinggi* (>0,5).

Gini Ratio di Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 tampaknya berfluktuasi. Pada tahun 2011 GR Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,40, dan kemudian turun menjadi 0,29 pada tahun 2013. Namun demikian pada tahun 2014 sampai dengan 2016 naik kembali menjadi 0,37 dan 0,38. Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran penduduk di Kota Padang Panjang hampir sama dengan GR Provinsi Sumbar yang masih tergolong GR kategori “rendah”. Namun jika dibandingkan dengan GR Provinsi Sumatera Barat, tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 GR Kota Padang Panjang lebih tinggi dari GR Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga jika dibandingkan dengan GR beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, dimana GR Kota Padang Panjang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Pada tahun 2016 GR Kota Padang Panjang menunjukkan angka tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, namun pada tahun 2017 GR Kota Padang Panjang turun hingga tercatat pada angka 0,30. Meskipun terjadi penurunan angka Gini Rasio, namun kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Padang Panjang beserta stakeholders lainnya, sehingga indeks GR bisa dipertahankan pada kategori yang rendah. Adapun perbandingan GR Kota Padang Panjang, Provinsi Sumbar dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.10
Gini Ratio Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2011-2017

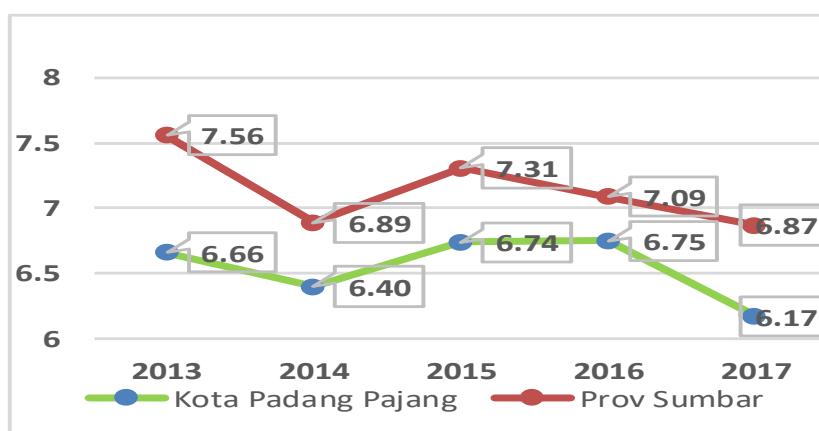


Sumber : BPS Provinsi Sumbar, Tahun 2018

E. Angka Kemiskinan

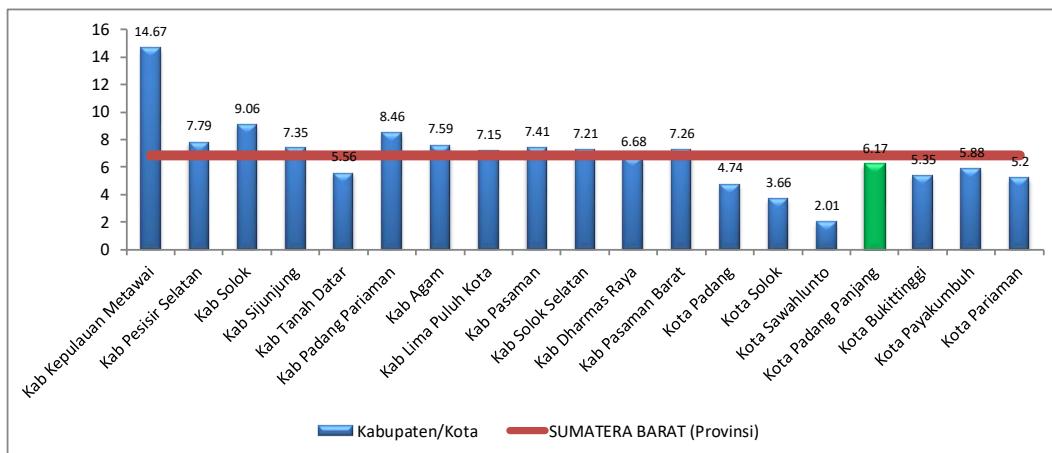
Angka kemiskinan Kota Padang Panjang selama tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2013 Angka kemiskinan mencapai 6,66 persen dan kemudian naik mencapai 6,75 persen pada tahun 2016. Namun demikian pada tahun 2017 turun kembali menjadi sebesar 6,17 persen. Selanjutnya bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, ternyata angka kemiskinan di Kota Padang Panjang lebih tinggi dibanding dengan kabupaten/kota yang relatif memiliki karakteristik wilayah yang sama dengan Kota Padang Panjang. Berikut perkembangan angka kemiskinan Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2013-2017 dan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.11
Angka Kemiskinan dan Persentase Penduduk di atas garis
Kemiskinan di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Gambar 2.12
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017

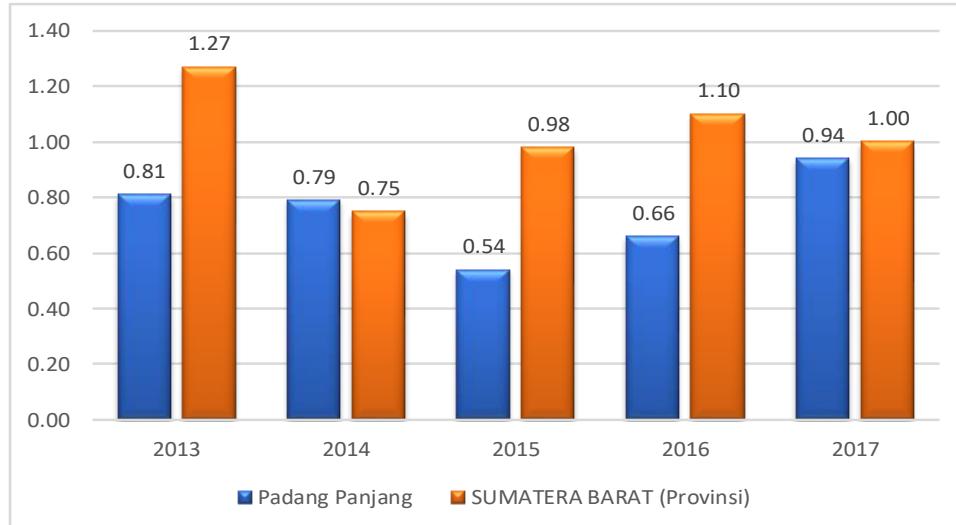


Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan gab pendapatan penduduk miskin dengan Garis kemiskinan. Indeks Kedalam Kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin jika diambil tolok ukurnya dari garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks, maka kedalaman kemiskinan makin jauh, artinya jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin semakin besar. Berikut dapat dilihat indeks P1 Kota Padang Panjang.

Gambar 2.13
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang
2013-2017**



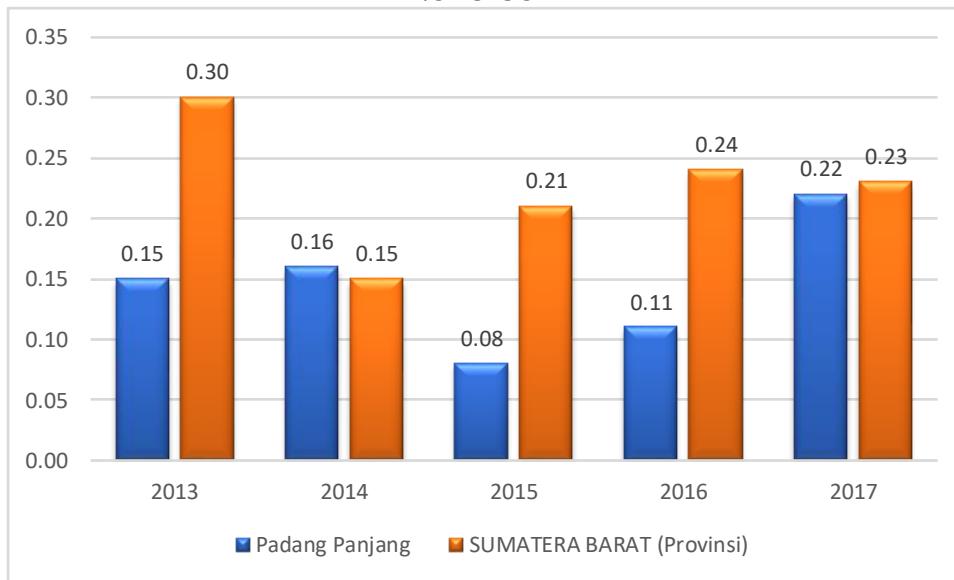
Sumber : BPS Provinsi Sumbar, Tahun 2018

Pada grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Padang Panjang adalah sebesar 0,94. Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat dengan Indeks P1 adalah 1, berarti penduduk miskin di Kota Padang Panjang secara rata-rata pengeluarannya cukup jauh dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menjelaskan penyebaran pengeluaran antara Penduduk Miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini merupakan nilai rata-rata jarak masing-masing pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan bobot masing-masing pengeluaran penduduk miskin. Kriteria penilaiannya, semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang dan Indeks P2 Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.14
Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kota Padang Panjang
2013-3017



Sumber : BPS Provinsi Sumbar, Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padang Panjang tahun 2017 sebesar 0,22. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, indeks keparahan kemiskinan dengan angka 0,23. Artinya gab pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Padang Panjang tidak jauh berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan kedua gambar di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum penduduk miskin di Kota Padang Panjang memiliki jarak yang cukup jauh dengan garis kemiskinan,

begitu juga dengan jarak pengeluaran antara sesama penduduk miskin pun juga dikategorikan sedang.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

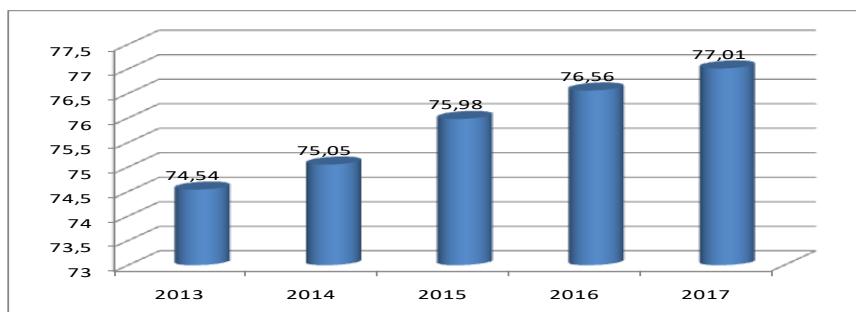
A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan capaian kinerja pembangunan manusia pada suatu wilayah. IPM meliputi sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang meliputi 3 dimensi mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Hal ini merupakan pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indek Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu termasuk kategori “**tinggi**” dan berada pada urutan kelima dari 19 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun angka IPM Kota Padang Panjang termasuk dalam kategori tinggi (77,01 pada tahun 2017), tetapi masih berada di bawah angka IPM Kota Bukittinggi (79,80) dan Kota Payakumbuh (77,91). Karena itu agar angka IPM Kota Padang Panjang paling tidak dapat mengikuti angka IPM Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, maka dibutuhkan beberapa program yang memiliki daya ungkit untuk peningkatan angka IPM tersebut. Secara umum, selama 5 (lima) tahun terakhir IPM Kota Padang Panjang berada pada urutan kelima di Provinsi Sumbar.

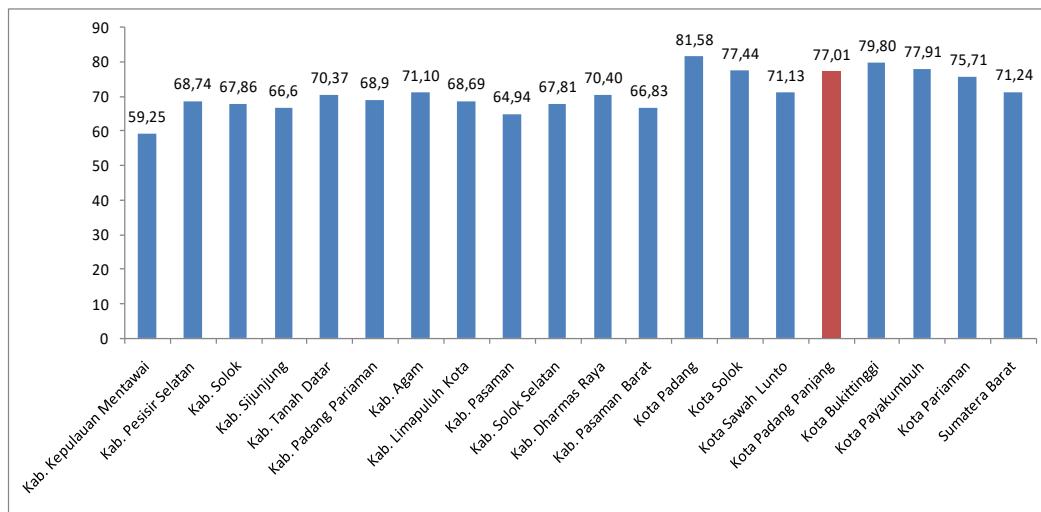
Perkembangan angka IPM Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 2.7 dan 2.8 sebagai berikut.

**Gambar 2.15
IPM Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Prov Sumbar, 2018

Gambar 2.16
IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

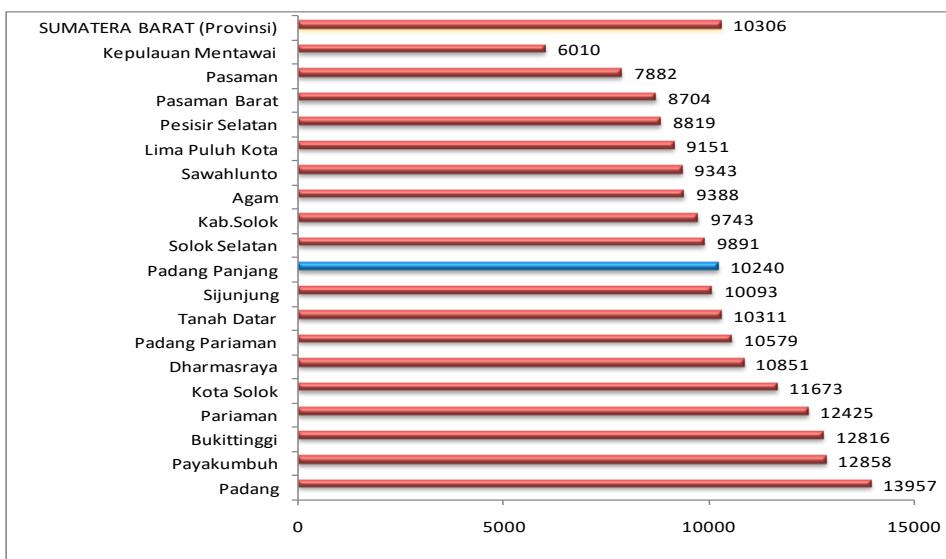


Sumber : BPS Prov.Sumbar, 2018

B. Pengeluaran Per Kapita

Meskipun indikator pendidikan dan kesehatan Kota Padang Panjang cukup baik, namun tidak sama halnya dengan indikator ekonomi. Dimana indikator tingkat daya beli masyarakat yang diukur melalui rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Padang Panjang lebih rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya, yakni urutan ke 9 di Sumatera Barat yaitu Rp.10.240.000. IPM Kota Padang Panjang dan komponennya tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Gambar 2.17
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumbar, 2017



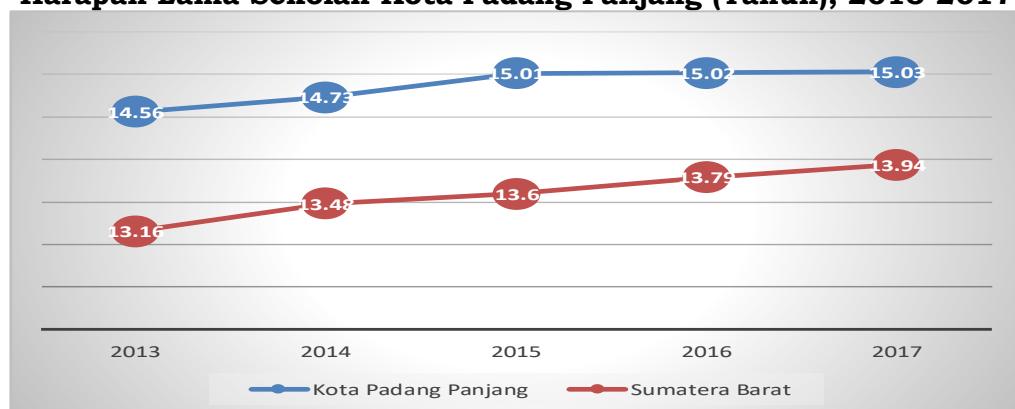
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2018

C. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu komponen IPM. HLS merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, dengan asumsi peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

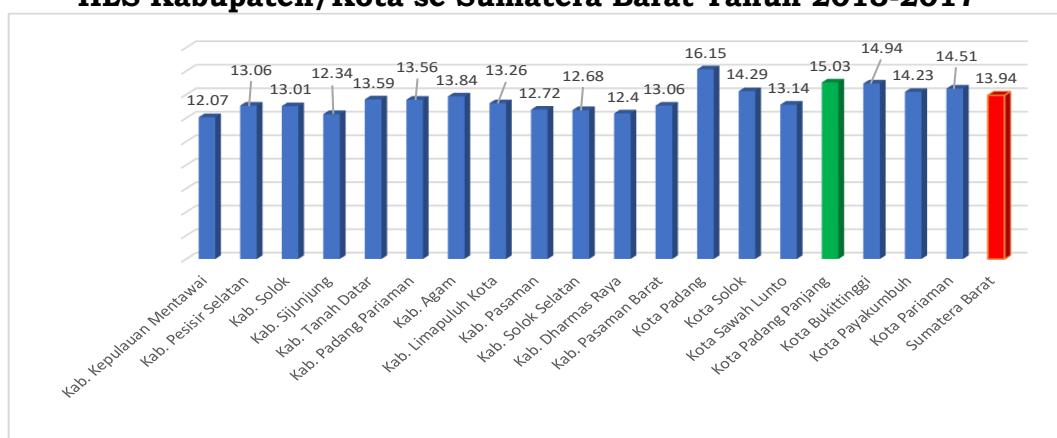
HLS di Kota Padang Panjang cukup tinggi dibanding dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat, dimana Angka HLS Tahun 2017 mencapai 15,03 tahun. Artinya tingkat harapan pendidikan penduduk di Kota Padang Panjang rata-rata adalah menamatkan SLTA. Angka ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi Sumatera Barat yakni 13,94 tahun. Perkembangan Angka HLS Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 dan perbandingan HLS Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.18
Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang (Tahun), 2013-2017**



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2018

**Gambar 2.19
HLS Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2013-2017**



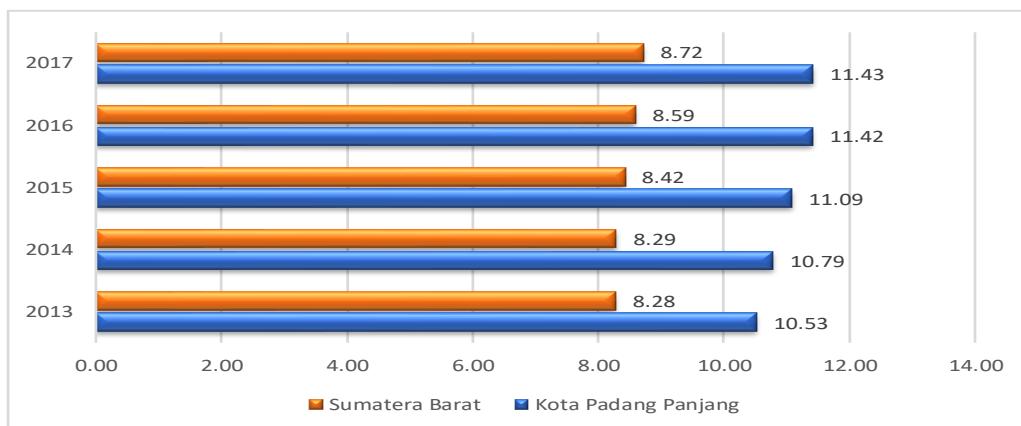
Sumber : BPS Sumatera Barat, 2018

Angka HLS yang cukup tinggi ini merupakan indikasi dari pendapatan masyarakat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mengenyam pendidikan yang layak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Disamping itu juga mengindikasikan kinerja pemerintah Kota Padang Panjang dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Bagi warganya.

D. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang 2013-2017 dan Angka RLS Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dijelaskan melalui gambar berikut.

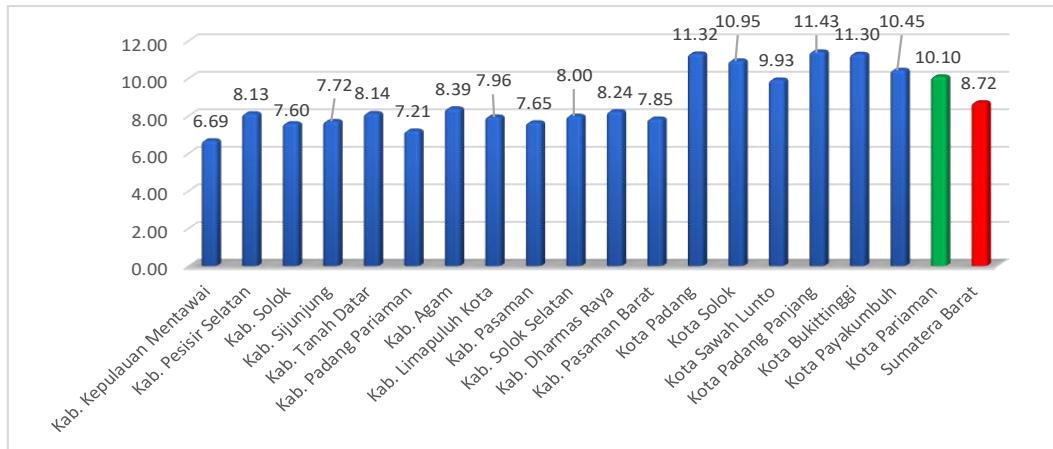
**Gambar 2.20
Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang 2013-2017 (tahun)**



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 Angka Rata Rata Lama Sekolah 10.53 Tahun dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 11,43 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Kota Padang Panjang adalah pada jenjang Pendidikan SLTA kelas 3, ini berarti. Ini menunjukan sebuah kinerja yang baik bagi Kota Padang Panjang.

Gambar 2.21
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 2017



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2018

E. Angka Harapan Hidup

Dari aspek kesehatan yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup (AHH). Tahun 2017 AHH Kota Padang Panjang berada pada urutan kelima dari seluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dengan angka 72,46 tahun, artinya terjadi peningkatan dari tahun 2013 dengan AHH 72,44 tahun. Gambaran perkembangan angka harapan hidup dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.22
Angka Harapan Hidup di Kota Padang Panjang Tahun 2013–2017



Sumber : BPS Provinsi Sumbar, 2018

F. Pengangguran

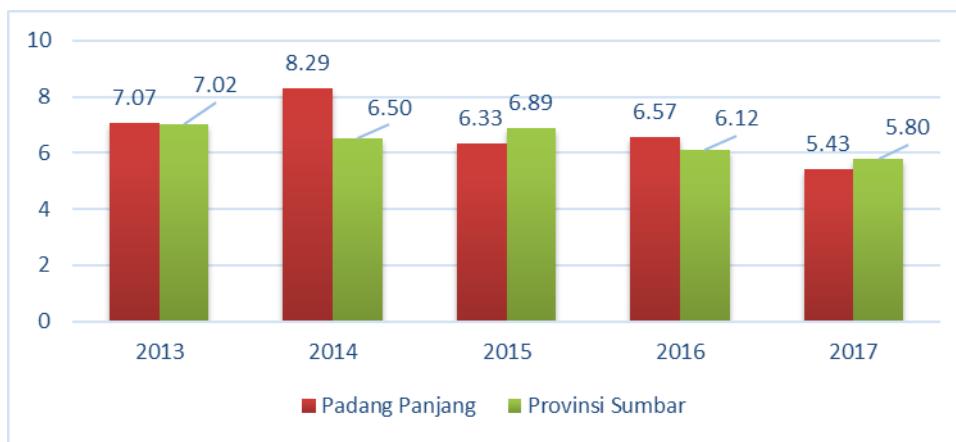
Angka pengangguran di Kota Padang Panjang selama periode tahun 2013-2017 secara umum cenderung menurun. Pada tahun 2013 persentase angka pengangguran di Kota Padang Panjang adalah sebesar 7,07 persen dan kemudian turun menjadi 5,43 persen pada tahun 2017. Artinya selama periode 2013-2017 tersebut terjadi

penurunan angka pengangguran di Kota Padang Panjang sebesar 1,64 persen. Sementara itu di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 persentase angka pengangguran adalah sebesar 7,02 persen dan kemudian turun menjadi 5,80 persen pada tahun 2017. Artinya terjadi akselerasi penurunan angka pengangguran di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,22 persen.

Relatif tingginya angka pengangguran di Kota Padang Panjang terutama dalam beberapa tahun terakhir adalah disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran terdidik. Pada umumnya tingkat pengangguran terdidik ini hanya bersifat sementara sampai mereka mendapat pekerjaan. Pada umumnya tenaga kerja terdidik ini memilih-milih pekerjaan yang sesuai dan cocok dengan keinginan mereka. Sebagai konsekuensinya tenaga kerja terdidik itu untuk beberapa tahun menjadi pengangguran.

Meskipun kondisi umumnya seperti itu, tetapi Pemerintah Kota Padang Panjang perlu memperhatikan secara lebih cermat sehingga dapat menyusun perencanaan yang tepat pada masa yang akan datang untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut termasuk persentase pengangguran terdidik. Adapun gambaran perkembangan persentase tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Pengangguran di Kota Padang Panjang dan Prov. Sumbar Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2018

Sementara itu penyerapan tenaga kerja di Kota Padang Panjang tampaknya juga didominasi oleh penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 24,47 persen atau sekitar 5.762 orang. Kemudian disusul oleh penduduk bekerja

dengan tingkat pendidikan pendidikan tinggi/ universitas sebesar 19,51 persen, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana masing-masingnya adalah 18,20 persen dan 17,92 persen, seperti terlihat pada tabel berikut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk kota Padang Panjang termasuk cukup baik, namun demikian dimasa mendatang masih harus tetap ditingkatkan mengingat persaingan global didunia kerja saat ini yang semakin ketat. Adapun persentase penduduk angkatan kerja yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2017

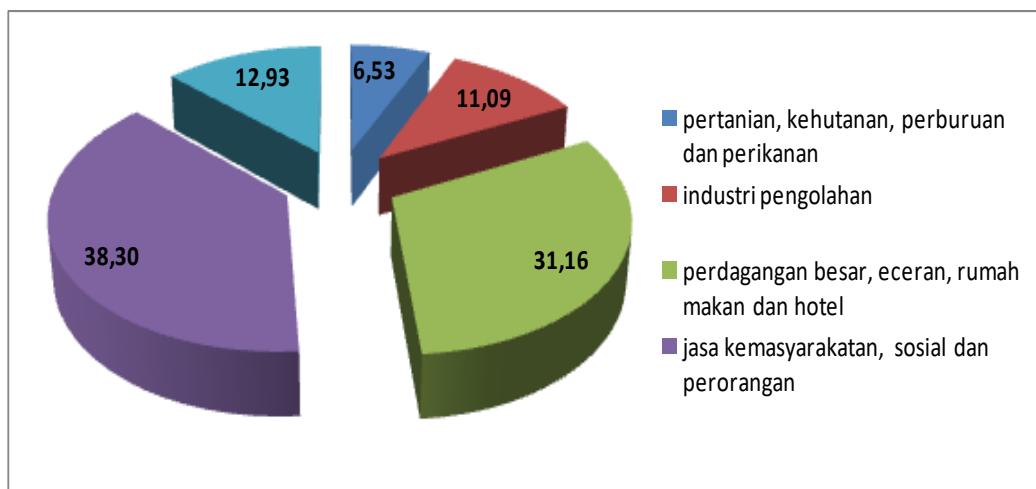
No	Pendidikan Tertinggi	Jumlah (jiwa)	%
1	Tidak/belum pernah sekolah	1.430	6,07
2	SD ke Bawah	1.912	18,12
3	Sekolah Menengah Pertama	4.219	17,92
4	Sekolah Menengah Atas	5.762	24,47
5	Sekolah Menengah Kejuruan	4.281	18,20
6	Diploma I/II/III	1.343	5,70
7	Universitas	4.593	19,51
JUMLAH		23.543	100,00

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Selanjutnya berdasarkan lapangan usaha yang ada, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja berusaha/bekerja pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebesar 38,3 persen dan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 31,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur lapangan pekerjaan di Kota Padang Panjang di dominasi oleh sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial serta perorangan.

Kenyataan yang demikian memberikan gambaran bahwa untuk menciptakan lapangan kerja serta sekaligus mengatasi pengangguran maka perencanaan yang matang untuk pengembangan sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel beserta sarana dan parasarana pendukungnya perlu dilakukan secara tepat. Adapun persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di kota Padang Panjang adalah seperti dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.24
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Padang Panjang Tahun 2017



Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2018

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

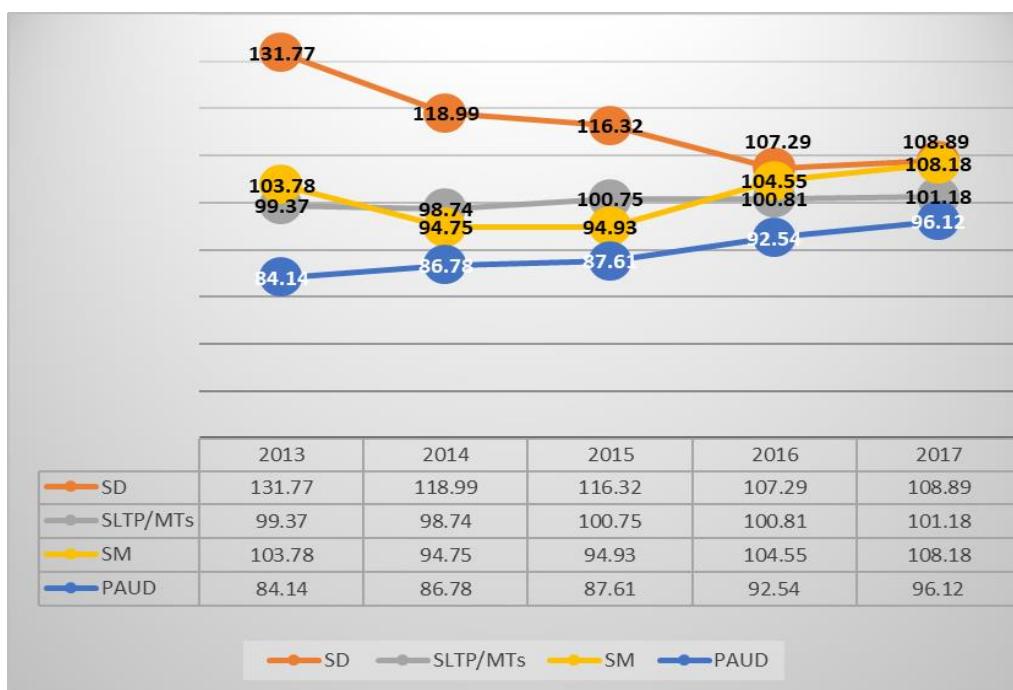
A. Urusan Pendidikan

Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan prioritas utama dalam pembangunan.

1) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan APK pada setiap jenjang Pendidikan di Kota Padang Panjang berada pada angka yang cukup bagus, meskipun dengan angka berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang Panjang masih menjadi salah satu Kota tujuan Pendidikan yang menarik bagi masyarakat tidak saja bagi masyarakat di Sumatera Barat tetapi juga dari luar Sumatera Barat. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Gambar 2.25
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Padang Panjang Tahun 2013–2017 (%)



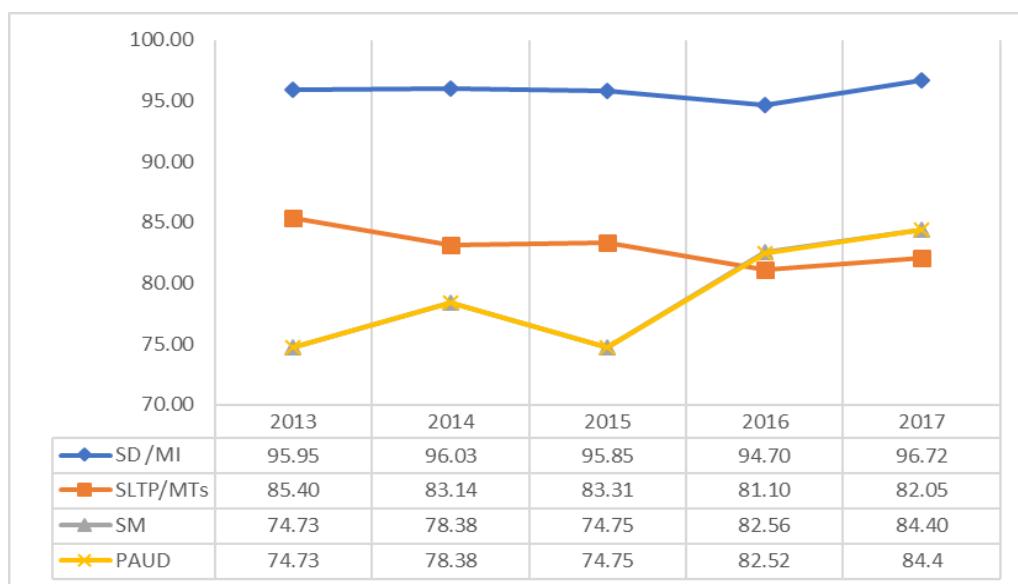
Sumber : www.data.kemdikbud.go.id, 2018

2) Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APM Kota Padang Panjang cenderung mengarah kepada angka menuju seratus persen. APM tingkat SLTA cenderung lebih tinggi dibanding Tingkat SD dan SMP sederajat pada tahun 2013-2015. Sedangkan pada tahun 2016 APM tertinggi adalah pada jenjang Pendidikan SLTP dan tahun 2017 APM tertinggi adalah pada jenjang Pendidikan SD, sedangkan APM pada jenjang Pendidikan SLTA justru mengalami penurunan. Namun demikian, secara umum APM pada setiap jenjang Pendidikan di Kota Padang Panang sudah cukup tinggi, artinya kepedulian masyarakat untuk sekolah sesuai usia sekolah pada masing-masing jenjang sudah cukup tinggi.

Untuk jelasnya perkembangan APM Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 dapat digambarkan melalui gambar berikut.

Gambar 2.26
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Padang Panjang Tahun 2013–2017 (%)

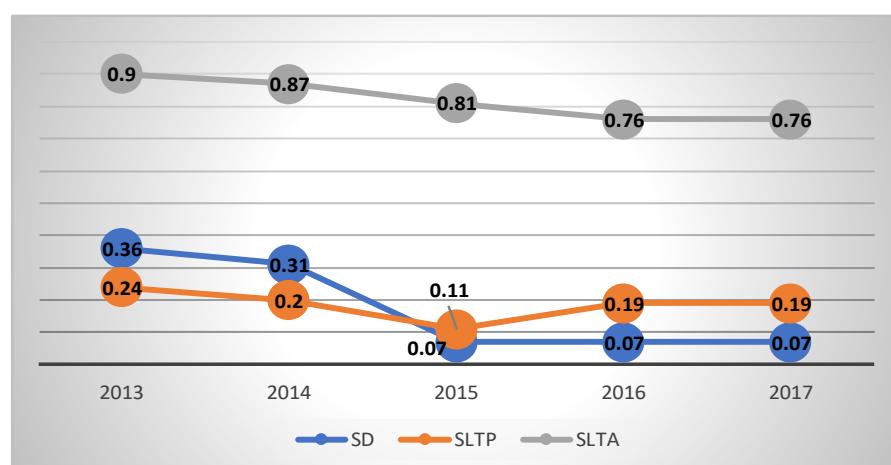


Sumber : www. data.kemdikbud.go.id, 2018

3) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah di Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan yang cukup drastis. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.27
Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Padang Panjang Tahun 2013–2017 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Padang Panjang, 2018

Angka putus sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan angka yang cukup rendah (<1%) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 itu angka putus sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan adalah SD sebesar 0,07 persen, SLTP sebesar 0,19 persen dan SLTA sebesar 0,76 persen dari jumlah murid. Relatif kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya karena didukung oleh adanya kebijakan sekolah gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Disamping itu juga semakin tingginya tingkat minat dan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4) Sarana Prasarana Sekolah

Dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan, faktor ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan ketersediaan tenaga pendidik merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Sarana dan prasarana pendidikan ini akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Begitu juga dengan tenaga pendidik yang profesional sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Pada tabel berikut dijelaskan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kota Padang Panjang kondisi tahun 2018.

Tabel 2.10
Jumlah Kelas Menurut Kondisi Tahun 2018

No.	Kondisi	PAUD		SD		SMP	
		jml	%	jml	%	jml	%
1	Baik	32	56,17	83	29,75	123	61,19
2	Rusak Ringan	16	27,58	94	33,69	65	32,34
3	Rusak Sedang	8	13,78	47	16,85	3	1,49
4	Rusak Berat	2	3,47	55	19,71	10	4,98
5	Rusak Total	0	0	0	0	0	0
Jumlah		58		279		201	

Sumber : Profil Pendidikan Kota Padang Panjang Tahun 2018, Dinas Dikpora

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ruang kelas di Kota Padang Panjang, sebagian/ jenjang pendidikan memiliki ruang kelas yang rusak berat. Jumlah ruang kelas dengan kondisi “baik” terbanyak di jenjang SMP yakni 123 ruang. Sedangkan ruang kelas dengan kondisi “baik” terkecil pada jenjang PAUD yakni 32 ruang. Untuk jumlah ruang kelas dengan kondisi “rusak ringan” yang terbanyak di jenjang SD yakni 94 ruang, sedangkan ruang kelas dengan kondisi “rusak ringan” yang terkecil di jenjang PAUD sebanyak

16 ruang. Jumlah ruang kelas “rusak sedang” yang terbanyak di jenjang SD sebanyak 47 ruang, sedangkan ruang kelas “rusak sedang” yang terkecil di jenjang SMP sebanyak 3 ruang. Jumlah ruang kelas rusak berat yang terbanyak di jenjang SD sebanyak 55 ruang, sedangkan ruang kelas “rusak berat” yang terkecil di jenjang PAUD sebanyak 2 ruang. Sebaliknya, ruang kelas “rusak total” tidak ada pada semua jenjang atau sebesar 0 ruang.

Jadi, untuk pendidikan dasar terdapat ruang kelas seluruhnya 538 ruang dengan rincian ruang kelas baik 238 ruang, rusak ringan 175 ruang, rusak sedang 58 ruang, rusak berat 68 ruang, dan rusak total sebesar 0 ruang. Dengan kondisi seperti ini berarti, sebagian sekolah masih membutuhkan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas dengan jumlah yang bervariasi.

Tabel 2.11
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Menurut Kondisi, 2018

No.	Jenis Sarana	Kondisi	PAUD		SD		SMP	
			jml	%	jml	%	jml	%
1	Perpustakaan	Layak	2	3,45	23	65,71	12	87,50
		Tidak Layak	56	96,55	15	34,29	2	12,50
		Jumlah	58		38		14	
2	Sarana Olahraga	Baik	54	93,10	36	93,55	14	100,00
		Rusak	4	6,90	2	6,45	0	-
		Jumlah	58		38		14	
3	Laboratorium	Baik					12	84,62
		Rusak	-	-	-	-	2	15,38
		Jumlah					14	

Sumber : Profil Pendidikan 2018, Disdikpora Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sarana perpustakaan terutama di tingkat PAUD 96,55 persen masih dalam kondisi tidak layak sedangkan pada tingkat SD perpustakaan dengan kondisi tidak layak sebanyak 34,29 persen. Sedangkan untuk sarana olahraga sebagian besar sudah dalam kondisi baik. Begitu juga untuk Laboratorium, di tingkat SMP terdapat 2 unit labor yang dalam keadaan rusak. Dengan demikian kedepan akan dijadikan prioritas pembangunan daerah sehingga pemenuhan sarana prasarana Pendidikan dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan.

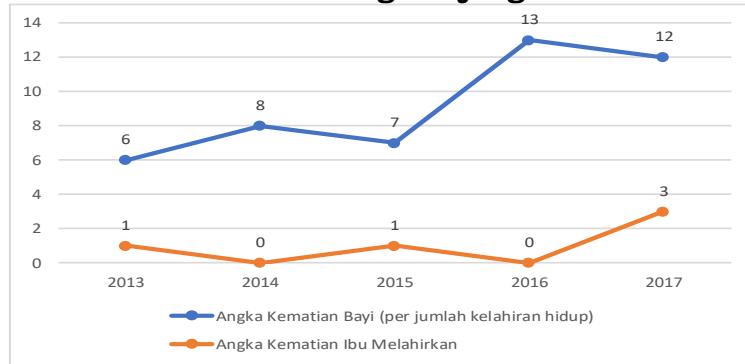
B. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Selama periode 2013-2017 angka kematian bayi di Kota Padang Panjang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 angka kematian bayi 6 per jumlah kelahiran hidup dan kemudian meningkat menjadi 12 tahun 2017. Begitu juga dengan angka kematian ibu

melahirkan dimana pada tahun 2013 angka kematian ibu melahirkan 1 dan meningkat menjadi sebesar 3 pada tahun 2017. Perkembangan AKI dan AKB di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Gambar 2.28
AKI dan AKB di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017**

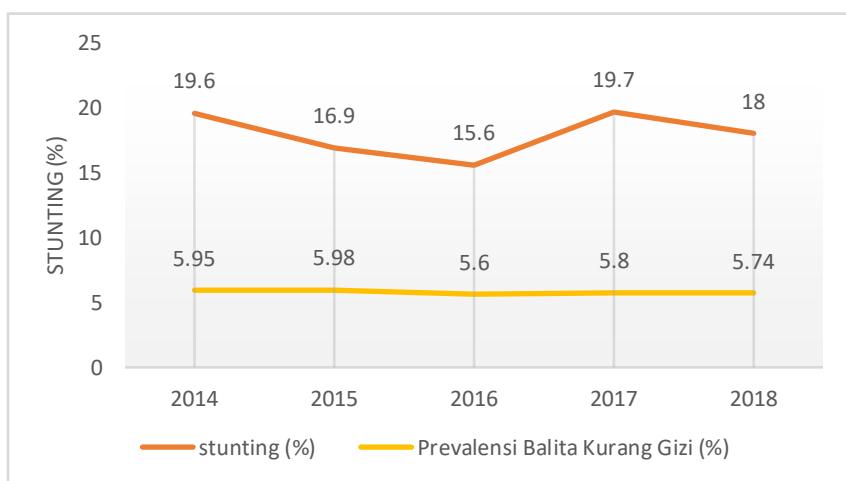


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2018

2) Balita Pendek (Stunting) dan Prevalensi Balita Kurang Gizi

Persentase balita pendek (Stunting) di Kota Padang Panjang termasuk kategori tinggi di Sumatera Barat. Tahun 2014 tercatat 19,6 % dan naik menjadi 19,7 % tahun 2017. Sedangkan Angka Prevalensi Balita Kurang Gizi juga mengalami fluktuasi. Berikut gambaran perkembangan angka stunting dan prevalensi balita gizi buruk di Kota Padang Panjang 2013-2017.

**Gambar 2.29
Stunting dan Prevalensi Balita Kurang Gizi, 2013-2017**

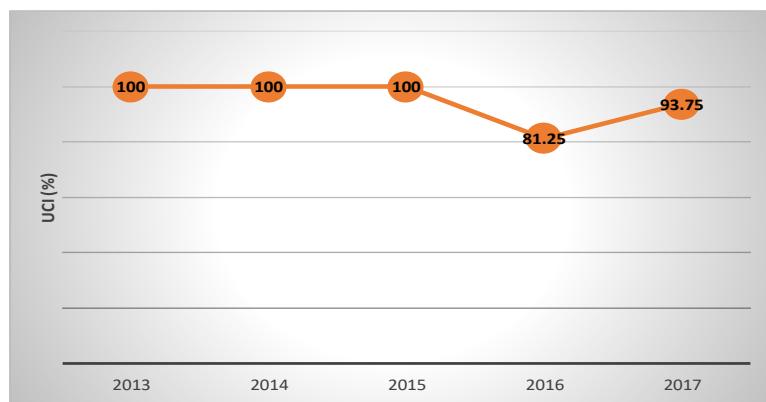


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2018

3) Universal Child Immunization (UCI)

Angka UCI di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, dimana tahun 2013 tercatat 100%, namun turun hingga menjadi 93,75% tahun 2017. Berikut digambarkan angka UCI tahun 2013-2017 di Kota Padang Panjang.

**Gambar 2.30
Angka UCI di Kota Padang Panjang, 2013-2017**

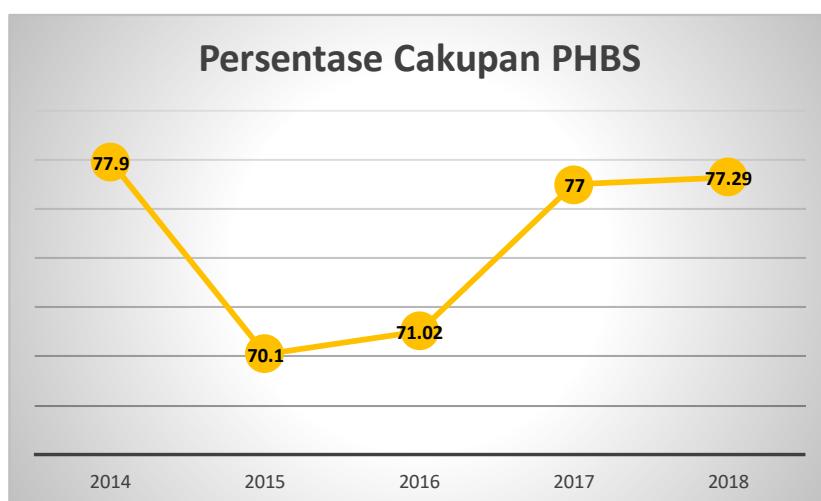


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2018

4) Persentase Cakupan Perilaku Hidup Bersih Sehat

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan angka harapan hidup. Berikut perkembangan cakupan perilaku hidup bersih sehat serta Persentase Keluarga Sehat di Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

**Gambar 2.31
Persentase Cakupan Perilaku Hidup Bersih Sehat
di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2018

5) Sarana Prasarana Kesehatan

Pencapaian kinerja kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas terwujud melalui pelayanan dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang ada, baik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang maupun oleh swasta. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017 (unit)

No	Sarana Kesehatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1
3	Poliklinik	2	2	2	2	2
4	Puskesmas	4	4	4	4	4
5	Puskesmas Pembantu	7	7	7	7	7
6	Poskeskel	16	16	15	15	14
7	Posyandu	91	91	91	92	92

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, BPS, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kota Padang Panjang terdapat 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Pemerintah, yaitu RSUD Kota Padang Panjang. RSUD ini adalah rumah sakit dengan type C. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit bahwa kelengkapan sarana RSUD Kota Padang Panjang sudah mencapai 100 persen. Namun mengingat komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan, maka kelengkapan sarana RSUD ditingkatkan sesuai dengan master plan RSUD yang telah disusun, dimana kondisi kelengkapan sarana RSUD sesuai dengan master plan RSUD Kota Padang Panjang kondisi saat ini baru mencapai 69,57 persen, sehingga hal ini akan menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di antaranya dapat diukur melalui indikator panjang jalan menurut status jalan, panjang jalan menurut kondisi jalan dan panjang jalan menurut jenis jalan. Bila diperhatikan secara cermat mengenai

perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Padang Panjang terutama dari sisi indikator panjang jalan menurut kondisi jalan ternyata panjang jalan yang mantap cenderung mengalami peningkatan. Artinya selama periode tahun 2015-2017 capaian indikator kinerjanya selalu mencapai sebesar 100 persen. Selanjutnya bila diperhatikan capaian ketiga indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, ternyata capaian kinerjanya hampir semuanya mencapai 100 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini ternyata cukup bagus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.13
Panjang Jalan Menurut Status, Kondisi dan Jenis
di Kota Padang Panjang, Tahun 2015-2017.**

No	Urusan/Indikator	2015		2016		2017	
		Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)
1	Panjang jalan menurut status jalan:	94,72	100	106,285	100	106,285	100
	- Negara	11,00	11,61	11,829	11,13	11,83	11,13
	- Propinsi	0	0	0	0	0	0
	- Kota	83,72	88,39	94,456	88,87	94,456	88,87
2	Panjang jalan menurut kondisi jalan:	94,72	100	106,28	100	106,28	100
	- Baik/mantap	80,69	85,19	96,038	90,36	93,97	88,42
	- Sedang	5,53	5,84	0,920	0,87	1,814	1,93
	- Rusak	2,49	2,63	3,467	3,26	4,641	4,37
	- Rusak berat	6,01	6,35	5,86	5,51	5,86	5,51
3	Panjang jalan menurut jenis jalan:	94,86	100	106,28	100	106,285	100
	- Aspal	87,86	92,61	96,89	91,16	97,024	91,29
	- Kerikil	0,41	0,43	0,075	0,07	0,075	0,07
	- Tanah	6,6	6,96	9,32	8,64	9,19	8,65

Sumber : Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jalan di Kota Padang Panjang secara keseluruhan pada tahun 2017 adalah sepanjang 106,285 km yang terdiri atas 11,829 km jalan Negara (11,12 persen) dan 94,46 km jalan Kota (88,88 persen). Sedangkan menurut kondisi jalan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atau

penambahan panjang jalan yang mengalami penurunan kualitas dari kondisi baik atau mantap menjadi sedang dan rusak.

Pada tahun 2016 jalan dengan kondisi mantap tercatat 96,038 km dan tahun 2017 berkurang menjadi 93,97 atau 88,42 persen. Jalan dengan kondisi sedang juga mengalami peningkatan dari 0,92 km (0,87 persen) tahun 2016 menjadi 1.814 km atau 1,93 persen pada tahun 2017. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak juga mengalami peningkatan dari 3,47 km atau 3,26 persen tahun pada 2016 menjadi 4,641 km atau 4,37 persen pada tahun 2017. Sementara itu, jalan dengan kondisi rusak berat tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yakni 5,86 km atau 5,51 persen.

Ditinjau dari jenis jalan tercatat bahwa 96,89 km jalan aspal (91,16 persen), 0,075 km jalan kerikil (0,07 persen) dan 9,32 km jalan tanah (8,77 persen). Meskipun secara keseluruhan panjang jalan yang mantap dan bagus sudah mencapai di atas 90 %, namun demikian masih ada beberapa jalan yang masih perlu lebih disempurnakan. Untuk mewujudkan hal itu, maka program dan kegiatannya perlu dimasukkan didalam RPJMD periode mendatang, sehingga benar-benar bisa direalisasikan.

Dari totalitas jalan yang ada di kota Padang Panjang sebagaimana dijelaskan di atas, belum dilengkapi dengan trotoar yang ramah disabilitas. Hal ini merupakan hal yang perlu jadi perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan pada lima tahun ke depan, terutama sekali trotoar pada jalur utama.

Dalam hal penataan ruang, indikator kinerjanya difokuskan pada rasio ruang terbuka hijau (RTH) dan rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan. Realisasi rasio Ruang Terbuka Hijau masih relatif rendah dimana pada tahun 2016 baru hanya sebesar 6,88 dan kemudian meningkat menjadi 6,92. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kota Padang Panjang 2013-2017

No	Urusan/ Indikator	Realisasi Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemetaan jaringan jalan dan jembatan setiap tahun	-	100% (83.715km)	-	100% (94.456 Km)	-
2	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi (%)			69%	70%	71.72%
3	Persentase rumah tangga mendapatkan akses air minum yang aman (%)			87%	89%	91,09%
4	Jumlah advice planning yang dikeluarkan (buah)	126	111	97	106	118

No	Urusan/ Indikator	Realisasi Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
5	Keberadaan PERDA RTRW (Dokumen)	1	-	-	-	-
6	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan	966 / 8258	1128 / 8420	1272 / 8564	1724 / 8716	1602 / 8894
7	Rasio Ruang Terbuka Hijau				6.88	6.92
8	Penyelesaian konflik pertanahan (kasus)	1	1	2	2	2

Sumber : Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel diatas, meskipun rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan keseluruhan meningkat dari 966/8258 pada tahun 2013 menjadi 1602/8894 (18,01) pada tahun 2017, namun demikian rasio tersebut masih relatif sangat rendah. Berkaitan dengan hal itu Pemerintah Kota Padang Panjang perlu meningkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman di Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 antara lain : persentase rumah layak huni dan persentase pengurangan kawasan kumuh. Bila diperhatikan perkembangan masing-masing realisasi capaian indikator kinerja tersebut secara umum tampaknya sudah berhasil dengan bagus. Sebab pada umumnya realisasi capaian kinerja sudah mendekati target yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	1.444	1.444	1.012	1.012	841
2	Luas kawasan kumuh (HA)	53,06	53,06	53,06	53,06	47,22

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2018

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga memiliki beberapa indikator kinerja yaitu tingkat penyelesaian penyelenggaraan Ketertiban, Ketentraman Keindahan (K3), cakupan pelayanan bencana kebakaran kota, tingkat waktu

tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, dan persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Secara umum capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah relatif cukup bagus. Hal ini terbukti dari capaian kinerja penegakan Perda selama periode tersebut mencapai 100 Perda. Adapun perkembangan capaian indikator kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	na	33	50	91	39
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	na	18	25	25	25
3	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	na	4 menit	5 menit	5 menit	6 menit
4	Persentase penegakan PERDA	na	129 (100%)	172 (100%)	162 (100%)	124 (100%)
5	Persentase pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani	91,7%	98,8%	81,1%	96,8%	95,2%

Sumber : Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang, Tahun 2018

F. Urusan Sosial

Kinerja urusan sosial diantaranya adalah keberhasilan dalam mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan peningkatan jaminan sosial kepada sasaran penerima jaminan sosial. Meskipun persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta Lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi untuk urusan sosial masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang harus diatasi dalam waktu yang relatif cepat. Adapun indikator kinerja Urusan sosial selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Kinerja Urusan Sosial Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penurunan jumlah PMKS per tahun	na	na	2%	5,46%	2,94%
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	na	na	25,44	36,95	84,10

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	na	na	32,59	33,42	33,43
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	na	na	-	-	100
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	na	na	16,93	17,36	20,92
6	Persentase Penyandang disabilitas yang tertangani	8,5%	17%	25%	34%	42,5%
7	Persentase Penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase penanganan gelandangan, PMKS, dan korban penyalahgunaan Napza	na	na	na	na	100%

Sumber : Dinas Sosial, PPKB PPPA Kota Padang Panjang, Tahun 2018

G. Urusan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan faktor yang sangat penting untuk diwujudkan, sehingga urusan pangan telah ditetapkan sebagai salah satu urusan wajib pemerintah. Hal ini memberi peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu : (1) setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman,merata dan terjangkau dan (2) setiap rumah tangga, setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif.

Kinerja urusan pangan dapat dilihat antara lain pada ketersediaan pangan utama dan skor pola pangan harapan yang mencerminkan pola konsumsi pangan masyarakat. Indikator tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.18
Kinerja Urusan Pangan di Kota Padang Panjang Tahun 2013- 2017**

No	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan pangan utama (Kg/kap/th)	109,30	100,89	116,89	125,54	138,93
2	Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	79	81,1	83,3	85	84,1 ^{*)}
3	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	94,14	94,53	95,44	98,22	109,07

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, 2018

Pangan utama yang dimaksudkan indikator Kinerja pada tabel di atas adalah beras. Karena hingga saat ini secara umum makanan pokok (utama) untuk penduduk Indonesia termasuk penduduk Padang Panjang adalah beras. Berdasarkan data yang disajikan bahwa Ketersediaan pangan utama secara umum memiliki trend peningkatan. Hal ini terkait dengan meningkatnya produktivitas padi di Kota Padang Panjang.

Pola Pangan Harapan (PPH) mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan. Konsumsi pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, yang pada tingkat makro ditunjukkan oleh tingkat produksi nasional dan cadangan pangan yang mencukupi dari pada tingkat regional dan lokal ditunjukkan oleh tingkat produksi dan distribusi pangan. Ketersediaan pangan sepanjang waktu, dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau. Skor PPH ideal dapat dicapai salah satunya dengan penerapan konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi seimbang dan Aman). Dalam lima tahun terakhir secara umum skor PPH memiliki trend meningkat. Pada Tahun 2017 terjadi penurunan skor PPH karena adanya perbedaan dalam pengolahan data. Dimana pada empat tahun terakhir data konsumsi berasal dari survey langsung ke masyarakat sedangkan pada tahun 2017 sumber data berasal dari data Susenas.

H. Urusan Tenaga kerja

Permasalahan tenaga kerja selama ini terutama terkait dengan masalah pengangguran adalah merupakan masalah yang sangat penting pada setiap daerah termasuk di Kota Padang Panjang. Kinerja urusan Tenaga Kerja diantaranya adalah keberhasilan dalam mengurangi pengangguran serta membuka dan atau bekerjasama menyediakan lapangan kerja bagi pencari kerja.

Meskipun indikator rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan juga mengalami peningkatan, namun demikian permasalahan tenaga kerja di Kota Padang Panjang tetap saja masih ada. Masih tingginya angka pengangguran terutama angka pengangguran terdidik merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sekarang ini. Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel 2.19
Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kota Padang Panjang
Tahun 2015-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,73	12,16	11,69	12,45	12,19
2	Besaran tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	na	na	20 orang	20 orang	20 orang

Sumber : BPS, Dinas PMPTSP Kota Padang Panjang, Tahun 2018

I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam beberapa tahun terakhir ini isu masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta munculnya masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Disamping itu masalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD juga harus mencapai minimum 20%. Berkaitan dengan hal itu maka kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya adalah keberhasilan dalam memberdayakan perempuan, anak, dan organisasi perempuan serta anak untuk menurunkan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.

Masalah kasus perempuan dan anak korban kekerasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, begitu juga dengan rasio KDRT ternyata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena perkembangan kemajuan teknologi informasi yang tidak disikapi secara bijak dan kurangnya peran serta ketahanan keuarga. Kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase perempuan dilembaga pemerintahan.	na	na	19,59	18,94	15,75
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	na	20%	20%	20%	20%
3	Rasio KDRT	na	na	0,06	0,03	0,40
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan.	na	na	56,60	NA	54,95
5	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu.	na	na	10 kasus	25 kasus	62 kasus

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
6	IDG	80,15	76,67	73,30	74,70	76,10
7	Persentase Forum Anak yang aktif	10%	15%	20%	20%	25%

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang, Tahun 2018

J. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup diantaranya adalah keberhasilan dalam menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran lingkungan. Perkembangan capaian indikator kinerja lingkungan hidup di Kota Padang Panjang tampaknya mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator antara lain; adanya penanaman pohon yang baru, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), meningkatnya indeks kualitas air, meningkatnya indeks kualitas udara, adanya pengelolaan timbunan sampah serta ditingkatnya operasionalisasi TPA. Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diantaranya adalah keberhasilan dalam menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran lingkungan. Adapun Indikator yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penanaman Pohon yang Baru	na	na	2000 batang	5750 batang	2110 batang
2	Volume sampah yang masuk TPA	na	na	81%	79%	76,99%
3	Indeks Kualitas Air	na	na	37,37	36,67	44,04
4	Indeks Kualitas Udara	na	na	97,05	99,68	99,57
5	Timbunan sampah yang ditangani	na	na	na	Na	76,99%
6	Operasionalisasi TPA	na	na	74,11	74,03	74,16

Sumber : Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang, Tahun 2018

K. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyusunan administrasi kependudukan yang baik capaian kinerjanya akan mendukung kualitas layanan pada urusan lain yang terkait dengan masalah kependudukan. Oleh karena itu capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dari beberapa indikator utama menjadi sangat penting. Sehubungan dengan hal itu capaian kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya adalah keberhasilan dalam melayani penduduk dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP). Meskipun kualitas pelayanan yang diberikan

terhadap penduduk baik dalam pengurusan KTP maupun indikator lainnya sudah semakin bagus namun bukan berarti tidak ada permasalahan lagi dalam administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. Perkembangan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	na	na	na	79.98	81.33
2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	0.592	0.608	0.664	0.660	0.628
3	Kepemilikan akte kelahiran per-1000 penduduk (Orang)	0.058	0.092	0.035	0.729	0.731
4	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penetapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Jumlah laporan pendaftaran penduduk yang dihasilkan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Persentase permohonan pembuatan dokumen akte kelahiran yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	5.759	9.202	3.568	72.983	62.847
8	Persentase permohonan pembuatan dokumen akte perkawinan yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	0.736	0.718	0.749	27.752	
9	Persentase permohonan pembuatan KTP/KK yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	59.295	60.844	66.423	66.041	73.10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018

L. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dan desa ini secara umum indikatornya meliputi rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Persentase LPM berprestasi, serta persentase posyandu aktif. Meskipun capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa

cukup bagus, namun saat ini di Kota Padang Panjang masih terdapat beberapa permasalahan di dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.23
Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	18	18	18	18	18
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	32	32	32	32	54
3	Persentase lembaga adat aktif	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
4	Persentase LPM berprestasi	na	0	0	0	18,75
5	Persentasi PKK aktif	100	100	100	100	100
6	Persentase posyandu aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang, Tahun 2018

M. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana kelihatannya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari perkembangan masing-masing indikator kinerja yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara umum sudah berhasil namun demikian masih tetap saja dijumpai beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Adapun perkembangan capaian indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Di Kota Padang Panjang Tahun 2015-2017

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Angka kelahiran	1,98	1,61	na
2	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB baru	77,95	110	124,08
3	Cakupan sasaran PUS menjadi pesert KB aktif	70,40	64,84	72,24
4	Cakupan anggota sasaran BKB,BKR,BKL,dan UPPKS untuk ber KB	86	74,5	87,16
5	Laju pertumbuhan penduduk	0,18	1,58	1,58
6	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui program KB	na	34,78	34,78
7	Unmeetneed	13,01	17,24	11,68

No	Indikator	2015	2016	2017
8	Cakupan anggota BKB ber-KB	75,68	85,09	87,37
9	Cakupan anggota BKR ber-KB	83,72	66,21	74,79
10	Cakupan anggota BKL ber-KB	73,33	70,28	80,11
11	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS	84,28	83,42	83,33

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang, Tahun 2018

N. Urusan Perhubungan

Capaian kinerja urusan perhubungan meliputi masalah peningkatan kualitas lalu lintas, kelancaran arus barang serta masalah jasa perparkiran. Bila diperhatikan secara cermat perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Padang Panjang selama 2013-2017 ternyata cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah arus penumpang atau pengguna transportasi umum adalah 753.535 orang. Kemudian mengalami penurunan menjadi 580.125 orang pada tahun 2016. Terjadinya penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum ini adalah akibat dari semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan.

Dilihat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah penduduk,tahun 2013 rasio izin trayek di Kota Padang Panjang sebesar 0,33 persen dan kemudian meningkat menjadi 2,24 persen pada tahun 2017.Selanjutnya bila diperhatikan secara cermat tentang realisasi capaian indikator kinerja lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) ternyata juga cukup bagus. Hal ini terbukti dimana pada tahun 2013 lama KIR kendaraan adalah 70 menit,dan kemudian pada tahun 2017 turun menjadi hanya 30 menit. Hal ini berarti terjadi percepatan layanan KIR selama lebih kurang 40 menit untuk setiap kendaraan. Kenyataan yang demikian memberikan gambaran bahwa kualitas layanan urusan Perhubungan di Kota Padang Panjang cukup baik.

Apabila diperhatikan secara cermat tentang kinerja pemasangan rambu-rambu di Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 ternyata juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah pemasangan rambu-rambu adalah sebanyak 745 buah dan kemudian meningkat menjadi sebanyak 797 buah pada tahun 2017. Kenyataan yang demikian menunjukkan secara rata-rata terjadi peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 12 buah per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Kinerja Urusan Perhubungan Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum(org)	753.535	694.875	637.500	580.125	567.000
2	Rasio Izin Trayek (%)	0.00239	0.00236	0.00230	0.00237	0.00194
3	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	70	50	30	30	30
4	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum					
	1.4.1 PNP (Rp)	60.000	60.000	60.000	60.000	70.000
	1.4.2 Bus dan Barang (Rp)	70.000	70.000	70.000	70.000	80.000
5	Angkutan darat (%)	151	115	112	112	110
6	Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang (%)	2	2	2	2	2
7	Persentase Perlengkapan FASKES (%)	72,47	78,30	79,22	79,32	79,73
8	Pemasangan rambu-rambu (buah)	745	753	807	797	797

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, Tahun 2018

O. Urusan Komunikasi dan Informasi

Di era pembangunan yang tumbuh dan berkembang secara pesat sekarang ini, urusan komunikasi dan informasi merupakan salah satu sarana yang cukup penting. Namun perkembangan pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Padang Panjang tampaknya relatif masih terbatas. Hal ini terbukti dari belum optimalnya capaian kinerja dari masing-masing indikator dalam urusan komunikasi dan informasi. Beberapa indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informasi diantaranya adalah keberhasilan dalam pemanfaatan sistem informasi dalam media kerja dan peningkatan pelayanan publik. Indikator selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan	Belum ada				

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	public (Ada/ Tidak)					
2	Jumlah SKPD yang mempunyai sistem TIK (skpd)					13 OPD
3	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (Ada/ Tidak)	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
4	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau,bebas diperoleh dan tepat waktu (Ada/ Tidak)	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
5	Website milik Pemerintah Daerah (Ada/ Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Jumlah surat kabar nasional/ lokal (buah)					2 nasional dan 45 lokal
7	Jumlah penyiaran radio/ TV lokal (buah)	7	6	8		2 radio local dan 2 TV local
8	Tersedianya jaringan fiber optic (FO) (jaringan)	-	-	-	6 titik jaringan	44 titik jaringan
9	Tersedianya Masterplan E-Government (Ada/ Tidak)	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
10	Ketersediaan sarana teknologi informasi di area publik (Ada/ Tidak)	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada
11	Jumlah SDM Urusan Komunikasi dan Informasi yang berkompetensi (org)					42 orang (38 orang PNS dan 4 orang Non PNS)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang, Tahun 2018

P. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah merupakan unit pembangunan ekonomi masyarakat yang menjadi dasar pembangunan ekonomi pada suatu daerah termasuk di Kota Padang Panjang. Artinya, bila Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka ekonomi daerah juga akan tumbuh dan berkembang secara signifikan. Sebab pertumbuhan UMKM tersebut memiliki efek pengganda terhadap pembangunan ekonomi di Kota Padang Panjang. Berkaitan dengan hal tersebut maka kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah diantaranya adalah keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan koperasi dan

Usaha Kecil Menengah. Indikator selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.27
Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase koperasi aktif (%)	84	86	87	87,71	89,47
2	Jumlah BPR/LKM (unit)	50	50	54	57	57
3	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	4.723	4.768	4.826	13.436	13.446
4	Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.47	99.47	99.48	99.80	99.81
5	Jumlah usaha dan kerjasama koperasi (unit)	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Q. Urusan Industri

Sektor industri merupakan sektor yang dominan dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDRB Kota Padang Panjang, dalam hal ini kontribusinya diatas 10%, hal ini memperlihatkan bahwa sektor industri mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi sektor unggulan di Kota Padang Panjang. Salah satu yang juga mempunyai potensi adalah sektor industri kecil yang mempunyai banyak unit usaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan industri menengah dan besar. Unit usaha industri kecil dan menengah menunjukkan masyarakat tidak terpaku dalam harapan menjadi pegawai dan bekerja, namun membuka usaha dan memberikan lapangan kerja.

Adapun industri yang memiliki potensi untuk ditumbuh-kembangkan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat adalah industri kulit dan industri sulaman bordir. Sedangkan industri makanan ringan terdapat di wilayah Padang Panjang Timur. Adapun perkembangan capaian Indikator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.28
Kinerja Urusan Perindustrian di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	jumlah IKM unggulan: • bordir • kulit • makanan ringan	20 19 110	28 23 122	28 23 134	40 18 174	52 15 180
2	Jumlah pelaku industri pariwisata	24	28	32	78	78
3	Kapasitas produksi penyamakan kulit	60 ton/thn	72 ton/thn	76 ton/thn	30 ton/thn	16,6 ton/th
4	Operasional sentra	25%	45%	51 %	65%	75%

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	barang jadi kulit					
5	Kontribusi sektor industri pada PDRB	11,37	11,49	11,07	10,94	10,56

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Padang Panjang, 2018

R. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Artinya semakin meningkat investasi yang masuk ke suatu daerah termasuk ke Kota Padang Panjang maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kinerja urusan Penanaman Modal diantaranya adalah keberhasilan dalam meningkatkan nilai investasi. Indikator selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai Investasi	na	na	565 milyar	717 milyar	750 milyar
2	Jumlah investor berskala nasional	na	na	na	na	2 investor

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Padang Panjang, Tahun 2018

S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan untuk memajukan generasi penerus bangsa. Dalam capaiannya di Kota Padang Panjang, peningkatan peran serta serta sarana dan prasarana untuk pengembangan kepemudaan dan olah raga masih perlu ditingkatkan dengan adanya kerjasama masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah organisasi pemuda	18	19	21	24	24
2	Jumlah organisasi olahraga	-	3	7	11	32
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	na	na	5	5	5
4	Jumlah kegiatan olahraga	na	na	6	8	7
5	Jumlah Lapangan olahraga			5	5	6

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
6	Persentase peningkatan pengetahuan organisasi kepemudaan	60	60	60	60	75
7	Persentase berkurangnya dampak narkoba dikalangan generasi muda					75
8	Persentase peningkatan SDM generasi muda			55	75	75
9	Persentase peningkatan ketrampilan tenaga pelatih/pembina olahraga			10	10	10
10	Jumlah kegiatan kesegaran jasmani		66	66	66	66
11	Jumlah event olahraga rekreasi sepeda santai			2	-	-
12	Jumlah kegiatan olahraga		12	12	12	12
13	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		50	60	70	80
14	Jumlah Gedung Olah Raga	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Padang Panjang, Tahun 2018

T. Urusan Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan urusan pendukung yang mengakomodir proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara umum realisasi capaian kinerja urusan perencanaan sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja urusan perencanaan antara lain : (a) adanya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Perda, (b) adanya dokumen perencanaan RPJMD 2013-2018 yang ditetapkan dengan Perda (c) penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD mencapai 100% pada tahun 2017, (d) keberadaan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah seperti Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, (e) persentase Renja Perangkat Daerah yang diakomodir di dalam RKPD mencapai 100% pada tahun 2017, (f) persentase program Renja Perangkat Daerah yang diakomodir di dalam RKA SKPD mencapai 90% pada tahun 2017, (g) persentase program Renja Perangkat Daerah yang diakomodir di dalam APBD mencapai 90% pada tahun 2017, (h) persentase program SKPD yang diakomodir di dalam APBD mencapai 85% pada tahun 2017.

Adapun realisasi capaian kinerja urusan perencanaan selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Kinerja Urusan Perencanaan di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	ada	-	-	revisi	-

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
2	Dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	92	94	96	98	100
4	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah seperti Renstra SKPD Renja PD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase Renja SKPD yang diakomodir dalam RKPD	92	94	96	98	100
6	Persentase program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	90	90	90	90	90
7	Persentase program RKPD yang diakomodir dalam APBD	90	90	90	90	90
8	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam APBD	85	85	85	85	85
9	Jumlah laporan pemerintah daerah yang disusun	4	4	4	4	4

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2018

U. Urusan Statistik

Urusan statistik terkait dengan masalah penyediaan data yang *up to date* dan valid. Berkaitan dengan hal itu kinerja urusan statistik memiliki beberapa indikator antara lain terkait dengan ketersediaan buku daerah dalam angka, penyusunan buku PDRB. Adapun kinerja urusan statistik diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32
Kinerja Urusan Statistik di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku “Daerah Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2018

V. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan memiliki peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan dan menyegarkan. Perpustakaan memberikan kontribusi yang penting untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan hal itu, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dan sumber tentang ilmu pengetahuan serta hal-hal yang baru. Adapun indikator kinerja urusan perpustakaan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Kinerja Urusan Perpustakaan di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (org)	na	na	21.900/ 28.053	21.930/ 40.785	21.965/ 39.238
2	Koleksi buku perpustakaan yang tersedia di perpustakaan daerah	na	na	6.285/ 18.852	7.673/ 21.959	8.105/ 23.279
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	na	na	6.285	7.673	8.105
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	na	na	21.900	21.930	21.965

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota padang Panjang, 2018

W. Urusan Kearsipan

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal yang tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk tracking surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat serta menjaga data tersimpan dengan baik. Kinerja urusan kearsipan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.34
Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengelolaan arsip secara baku	11.11	18.52	25.93	33.33	37.04

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, 2018

Berdasarkan tabel realisasi capaian kinerja urusan kearsipan terlihat masih belum optimal. Berdasarkan indikator pengelolaan arsip secara baku terlihat memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi peningkatan pengelolaan arsip secara baku tersebut tampaknya belum optimal dan bahkan masih di bawah 50 persen pada tahun 2017. Disamping itu dilihat dari indikator peningkatan SDM

pengelolaan kearsipan boleh dikatakan tidak ada sampai dengan tahun 2017.

2) Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah

Urusan pemerintahan pilihan di Kota Padang Panjang terdiri atas 8 (delapan) urusan, yaitu pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian. Berikut ini dijelaskan perkembangan dari capaian indikator kinerja urusan pilihan di Kota Padang Panjang.

a) Urusan Pariwisata

Tujuan pembangunan pariwisata yang paling utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan sumberdaya alam dan budaya yang potensial untuk pengembangan sektor pariwisata. Berkaitan dengan hal itu, pembangunan pariwisata suatu wilayah dilaksanakan melalui penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana induk pembangunan pariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya, alam dan lingkungan serta kebutuhan masyarakat untuk berwisata. Menurut pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pariwisata, pembangunan pariwisata itu haruslah terdiri dari pembangunan destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan pariwisata ini haruslah melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dan Kota, yang harus disyahkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Adapun beberapa objek wisata yang terdapat di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.35
Jumlah Objek Wisata Tahun 2017**

No	Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari pusat kota (Km)	Jenis Objek Wisata
1	Minang Fantasi (MIFAN) Water Park	Silaing Bawah	3,0	Budaya Alam
2	Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDKIM)	Silaing Bawah	3,0	Budaya
3	Pemandian Lubuk Mata Kucing	Pasar Usang	2,0	Alam
4	Sarasah Tujuh Tingkat	Silaing Bawah	5	Alam
5	Goa Batu Batirai	Kampung Manggis	4	Alam

No	Objek Wisata	Lokasi	Jarak dari pusat kota (Km)	Jenis Objek Wisata
6	Desa Wisata dan Agro Wisata	Silaing Bawah	2	Alam
7	Jembatan Tinggi	Silaing Bawah	3	Alam
8	Masjid Azazi Sigando	Sigando	4,0	Sejarah
9	Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Guguk Malintang	0,5	Pendidikan
10	Diniyyah Putri	Pasar Usang	0,5	Pendidikan
11	SMA Unggul	Guguk Malintang	0,5	Pendidikan
12	Perguruan Thawalib	Pasar Usang	0,5	Pendidikan
13	Rumah Makan Pak Datuk	Silaing Bawah	3,0	Kuliner
14	Sate Mak Syukur	Silaing Bawah	3,0	Kuliner

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang, 2018

Pada tahun 2017 jumlah pengunjung wisata yang datang ke Kota Padang Panjang mencapai 576.000 orang yang terdiri dari jumlah Wisatawan Nusantara 550.847 orang dan Wisatawan mancanegara 25.153 orang. Jumlah objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di Kota Padang Panjang adalah MIFAN dengan jumlah pengunjung juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke MIFAN adalah sebanyak 326.614 orang dengan rinciannya jumlah wisatawan umum sebanyak 326.566 orang dan sisanya 48 orang adalah wisatawan mancanegara.

Sementara itu jumlah objek wisata yang kedua paling banyak dikunjungi adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau mencapai sebanyak 156.233 orang yang terdiri dari jumlah Wisnu sebanyak 131.256 orang dan Wisman 24.977 orang. Disamping itu objek wisata Pemandian Lubuk Mata Kucing juga cukup banyak dikunjungi oleh para wisatawan dimana jumlah pengunjungnya mencapai sebanyak 10.876 orang. Namun beberapa tahun belakang jumlah wisatawan yang berkunjung ke pemandian Lubuk Mata Kucing mengalami penurunan. Adapun jumlah kunjungan masing-masing objek wisata yang terdapat di Kota Padang Panjang pada tahun 2017 adalah seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.36
Jumlah Pengunjung Objek Wisata Yang Paling Banyak Dikunjungi Oleh Para Wisatawan Tahun 2013-2017, (orang)

No	Objek Wisata	2013	2014	2015	2016	2017
1	Minang Fantasi	301,254	312,829	278,541	260,699	326,614

No	Objek Wisata	2013	2014	2015	2016	2017
2	PDIKM	51,496	21,009	18,788	21,791	156,233
3	Pemandian Lubuk Mata Kucing	19,629	14,845	19,521	10,896	72,554
4	Institut Seni Indonesia	1,963	2,530	3,807	3,302	20,556
5	Mesjid Azazi	381,461	893	927	1,525	43
	Total	755,803	352,106	321,584	298,213	576,000

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, BPS Kota Padang Panjang, 2018

Disamping memiliki beberapa objek wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan, Kota Padang Panjang juga memiliki jumlah industri pariwisata yang dapat mendukung untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang berkunjung. Akan tetapi sampai sekarang ini sarana dan prasarana hotel berbintang III keatas memang belum tersedia di Kota Padang Panjang.

Adapun perkembangan industri pariwisata yang dapat mendukung untuk kelancaran dan kesuksesan serta kenyamanan para wisatawan untuk tinggal di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Industri Pariwisata
Menurut Jenis Usaha Tahun 2013 – 2017

No	Jenis usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Hotel Bintang	1	1	1	-	1
2	Hotel Non Bintang	5	5	5	6	9
3	Penginapan	13	13	14	13	20
4	Biro Perjalanan					5
5	Agen Perjalanan	12	12	12	12	15
6	Toko Souvenir	8	8	8	8	9
7	Rumah Makan dan Restoran	36	37	37	34	34
	Jumlah/ Total	75	77	78	73	92

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, BPS, 2018

Dalam dua tahun terakhir kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ternyata mengalami peningkatan. Disamping itu Kota Padang Panjang juga mengadakan berbagai macam event dan festival yang menarik minat para wisatawan seperti festival Serambi Mekkah, festival silek lanyah, festival tari rumpun melayu dan musik, festival bunga, dan paket wisata makan bajamba.

Kinerja Urusan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

**Tabel 2.38
Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013 - 2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kunjungan wisata (org)	762.190	352.116	321.584	298.213	576.000
2	Jumlah Hotel/ Penginapan (unit)	19	19	20	19	29

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kunjungan wisata mengalami penurunan yang tajam hingga mencapai 298.213 orang tahun 2016, dari angka 762.190 orang pada tahun 2013 dan tahun 2017 naik hingga tercatat berjumlah 576.000 orang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian sektor kepariwisataan Kota Padang Panjang untuk terus berbenah diri. Disamping jumlah pengunjung, perkembangan kepariwisataan di Kota Padang Panjang juga dapat dilihat dari jumlah penginapan. Jumlah penginapan di Kota Padang Panjang di Kota Padang Panjang pada tahun 2016 sudah mencapai 19 buah berkurang 1 buah jika dibandingkan dengan Tahun 2015, namun tahun 2017 bertambah kembali menjadi 20 buah.

b) Urusan Pertanian

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang masih bisa ditumbuh kembangkan. Meskipun beberapa capaian indikator urusan pertanian mengalami peningkatan akan tetapi capaian peningkatan indikator kinerja tersebut tampaknya belumlah optimal. Indikator kinerja urusan layanan pertanian dapat dilihat antara lain dari keberhasilan dalam produktivitas pertanian dan peningkatan peran kelembagaan tani. Adapun capaian indikator kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.39
Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2017**

No	Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produktivitas padi (ton)	Na	4,96	5,62	5,77	6,4
2	Populasi sapi perah (ekor)	Na	292	353	372	421
3	Kelembagaan tani yang aktif (kelompok)	Na	64	70	76	81
4	Produksi Tanaman Hias (tangkai)	52.566	54.010	61.496	88.258	71.584

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, 2018

Bebberapa potensi pengembangan pertanian di Kota Padang Panjang antara lain :

1) Pengembangan Sayur Organik

Salah satu komoditi pertanian yang memiliki keunggulan untuk dikembangkan dimasa mendatang di Kota Padang Panjang adalah komoditi sayur organik. Hal ini adalah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Kota Padang Panjang maupun daerah disekitarnya seperti Kabupaten Tanah Datar. Artinya Padang Panjang memiliki potensi untuk mengembangkan komoditi ini termasuk dalam memasarkan produk sayur ini. Produk sayur organik Padang Panjang tidak hanya terkenal untuk pemasaran ke Kota Padang, tetapi juga ke daerah Provinsi Riau dan Provinsi Jambi dan bahkan ke Jakarta. Beberapa produk komoditi pertanian yang dimasukkan kedalam kelompok sayuran organik selain dari kelompok jenis sayur-sayuran adalah produk jagung manis dan ubi jalar.

Bila diperhatikan perkembangan kelompok jenis tanaman sayur organik antara lain bawang daun, sawi, cabai, tomat, terong, dan buncis ternyata produktivitasnya juga relatif cukup tinggi. Beberapa jenis komoditi sayur organik ini memiliki prospek yang cerah untuk ditumbuhkembangkan di Kota Padang Panjang terutama oleh para calon investor lokal/daerah. Hal ini disatu sisi disebabkan oleh kondisi lahan dan iklim serta cuaca yang cocok untuk tanaman sayur organik di Kota Padang Panjang. Sementara itu disisi lain juga disebabkan oleh permintaan terhadap produk sayur organik dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Kenyataan yang demikian bila para calon investor terutama calon investor lokal difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkannya, maka sudah tentu hasil produksinya juga akan semakin meningkat. Adapun jumlah produksi dari beberapa jenis sayur organik di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.40
Produksi Luas Tanam, Luas Panen, dan
Produksi Tanaman Sayur Organik Tahun 2017

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (kg)
1	Bawang Daun	169	167	1.902.700
2	Sawi	166	169	2.384.200
No	Jenis Tanaman	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (kg)
3	Cabe	182	184	1.857.000
4	Tomat	20	23	432.900
5	Terung	50	52	1.108.700
6	Buncis	24	26	428.500

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018.

Adapun perkembangan produksi komoditi jagung manis di Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 adalah seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.41
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Jagung Manis Tahun 2013 -2017

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2013	90	79	415	5,25
2014	74	80	436	5,45
2015	72	71	347	4,89
2016	69	67	364	5,43
2017	69	65	375	5,77

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun, BPS, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan produksi jagung manis di Kota Padang Panjang selama periode tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 produksi jagung manis di Kota Padang Panjang mencapai sebesar 415 ton dan kemudian turun menjadi sebesar 375 ton pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa selama periode 2013-2017 laju pertumbuhan produksi jagung manis di Kota Padang Panjang secara rata-rata adalah sebesar 1,58 persen pertahun. Terjadinya penurunan total produksi jagung manis ini adalah karena adanya penurunan luas panen dari 79 Ha pada tahun 2013 menjadi 65 Ha pada tahun 2017. Meskipun jumlah produksi total mengalami penurunan, akan tetapi produktivitas per-hektarnya malahan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 angka produktifitas jagung manis baru sebesar 5,2 ton per hektar, kemudian meningkat menjadi sebesar 5,77 ton per hektar pada tahun 2017.

Disamping komoditi jagung manis, di Padang Panjang juga tumbuh dan berkembang hasil produksi ubi jalar. Bila diperhatikan perkembangan produksi ubi jalar di Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun relative cukup besar. Pada tahun 2013 jumlah produksi ubi jalar mencapai diatas 800 ton per tahun. Akan tetapi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 jumlah produksinya mengalami penurunan, dimana hanya sebesar lebih kurang 250 ton. Terjadinya penurunan produksi ubi jalar tersebut, karena disekitar tahun tersebut harga produksi ubi jalar menurun secara drastis, sehingga para petani sebagian tidak menanam ubi jalar dan berpindah ke komoditi lain. Disamping itu, pada tahun itu juga terjadi penurunan luas produksi dari ubi jalar. Terjadinya penurunan luas produksi ubi jalar ini adalah disebabkan oleh karena terjadinya penurunan luas tanam dan luas

panen. Meskipun nilai produksinya mengalami penurunan tetapi dari segi produktivitas luas panen ternyata tidak mengalami penurunan. Pada tahun 2013 jumlah produktivitas luas panen ubi jalar mencapai sebesar 28,23 ton per hektar dan kemudian turun menjadi 15,11 ton per hektar pada tahun 2014 dan kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 27,68 ton per hektar pada tahun 2017 Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan produksi ubi jalar di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Ubi Jalar
Tahun 2013 -2017

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2013	34	30	847	28,23
2014	29	38	574	15,11
2015	13	10	252	25,20
2016	10	9	245	27,22
2017	10	10	276	27,68

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018

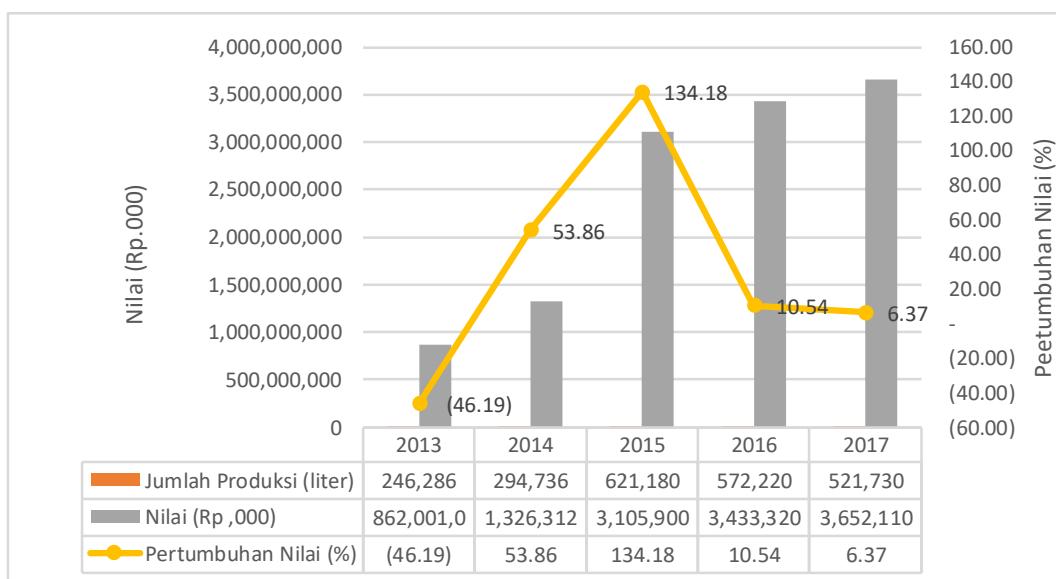
Berdasarkan uraian di atas ternyata secara keseluruhan luas area pertanian terutama luas sawah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2012 luas sawah di Kota Padang Panjang menurut Dikjen PLA masih mencapai 630 Ha, akan tetapi pada tahun 2014 luas lahan sawah turun menjadi 603 Ha. Sedangkan menurut rencana LP2B berdasarkan RTRW Tahun 2012-2032 alokasi lahan sawah hanya sebesar 556 Ha. Terjadinya penurunan luas lahan sawah tersebut jelas akan menurunkan produksi padi. Berkaitan dengan hal itu untuk meningkatkan produksi maka upaya estensifikasi lahan pertanian jelas tidak mungkin dilakukan. Tetapi, kebijakan untuk meningkatkan produksi tidak lain dilakukan dengan jalan kebijakan intesifikasi.

2) Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah

Hasil produksi susu sapi perah Padang Panjang merupakan satu-satunya produksi susu sapi yang terdapat di wilayah Sumatera. Kalaupun ada produksi susu sapi yang dihasilkan di daerah lain seperti Provinsi Bengkulu, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan, tetapi hasil produksinya belum untuk dipasarkan, tetapi masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi didaerah tersebut. Sementara itu hasil produksi susu sapi Kota Padang Panjang telah dipasarkan ke beberapa provinsi di wilayah Sumatera antara lain provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan bahkan beberapa konsumen ada yang membawanya ke Jakarta.

Perkembangan produksi susu sapi perah ini sangat ditentukan oleh jumlah sapi dan kondisi dari sapi. Saat sekarang ini paling tidak ada lebih kurang 30 petani sapi perah yang memproduksi susu sapi. Petani sapi perah tersebut tergabung pada beberapa kelompok yang menyebar pada beberapa kelurahan di Kota Padang Panjang. Pada tahun 2013 jumlah produksi susu sapi perah di Kota Padang Panjang mencapai 246.286 liter dengan nilai lebih kurang Rp.862,00juta. Kemudian pada tahun 2017 jumlah produksi susu sapi perah meningkat menjadi 521.730liter dengan nilai Rp.3,65 miliar. Selama periode tersebut terjadi pertumbuhan nilai produksi susu sapi perah secara rata-rata sebesar 31,75% pertahun. Adapun perkembangan hasil produksi susu sapi di Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut :

Gambar 2.32
Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Tahun 2013 – 2017



Sumber : Dinas Pangan Pertanian Kota Padang Panjang, 2018

3) Perkembangan Produksi Daging

Produksi daging di Kota Padang Panjang sudah terkenal sejak lama, bahkan sudah menjadi ikon Kota Padang Panjang meskipun belum dinyatakan secara resmi. Hal ini disebabkan karena daging di Kota Padang Panjang sangat empuk untuk dimasak dan enak rasanya. Kenyataan ini mencerminkan bahwa daging produksi Kota Padang Panjang sangat diminati oleh para konsumen. Meskipun di Kota Padang Panjang ada tiga jenis ternak yang berkembang dari tahun ke tahun (sapi, kerbau, kambing) tetapi produksi daging yang terkenal tersebut adalah daging sapi. Perkembangan jumlah produksi daging

sapi sangat ditentukan oleh ketersediaan jumlah sapi serta kesiapan sapi yang akan disembelih.

Perkembangan jumlah produksi daging, khususnya daging sapi tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 jumlah produksi daging sapi adalah 617.672 kg, kemudian meningkat mencapai 798.048 kg pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan dan terus turun hingga mencapai 482.645 pada tahun 2017. Sedangkan untuk produksi daging kerbau terus mengalami peningkatan dari angka 290.277 kg terus meningkat hingga mencapai 468.600 kg pada tahun 2017. Begitu juga halnya dengan produksi daging kambing, juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 dengan jumlah produksi sebesar 165 kg meningkat mencapai 792 kg pada tahun 2017, meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2016 dan 2017 hingga mencapai 792 kg.

Adapun perkembangan produksi daging menurut jenis ternak tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.43
Produksi Daging menurut Jenis Ternak
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Sapi (kg)	Kerbau (kg)	Kambing (kg)
2013	617.672	290.277	165
2014	798.048	340.012	626
2015	725.977	370.760	550
2016	458.708	446.285	778
2017	482.645	468.600	792

Sumber: Padang Panjang Dalam Angka, BPS Kota Padang Panjang, 2018

c) Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan di Kota Padang Panjang sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Sektor perdagangan di Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini diiringi dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana, kejelian pemasaran dari masyarakat dalam membaca peluang pasar, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang ada serta pembinaan pemerintah dalam memotivasi aneka ragam usaha masyarakat.

Kinerja urusan perdagangan antara lain terlihat dari peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang terdiri dari pasar tradisional, pasar swalayan, toko dan kios serta pedagang kaki lima.

Terkait dengan hal itu Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarannya, sehingga layanan urusan perdagangan makin berkualitas. Keberhasilan kinerja urusan perdagangan ini ditunjukkan oleh realisasi capaian kinerja urusan perdagangan pada tabel berikut :

**Tabel 2.44
Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasar (Pasar Tradisional, modern, swalayan, kios, toko)					
	Pasar Tradisional (unit)	2	2	2	2	2
	Pasar Lokal (Pusat Pertokoan) (unit)	1	1	1	1	1
	Pasar Swalayan	9	12	14	15	15
	Toko/warung/kios (unit)	1.205	1.297	1.280	1.280	1.280
	Kaki lima (unit)	1.206	1.208	1.502	1.550	1.555
2	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (kelompok)	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kota Padang Panjang, 2018

Dengan semakin meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan tersebut, maka dimasa mendatang perlu dilakukan penataan yang lebih bagus dan berkualitas. Sehingga dengan demikian akan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap masyarakat yang berbelanja ke pasar.

d) Urusan Penanggulangan Bencana dan KESBANGPOL

Secara umum realisasi capaian kinerja urusan layanan Kesbangpol relatif cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kinerja, misalnya seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.45
Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana
dan Kesbangpol Tahun 2013-2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penanggulangan Bencana (kali)	2	4	4	2	2
2	Jumlah Sarana dan Prasarana tanggap darurat (jenis/unit)	15	4	11	1	15
3	Tim Reaksi Cepat (org)	133	133	137	137	142
4	Jumlah Pengkajian Pemulihan Pasca Bencana (kasus)	15	22	10	13	16
5	Cakupan pelayanan Bencana (kecamatan)	2	2	2	2	2
6	Persentase penanganan dampak bencana (%)	85	85	85	85	85

Sumber : BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, 2018.

e) Urusan Pengawasan

Tujuan dan sasaran dari pengawasan adalah untuk mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja dan sistem pengendalian interen pemerintah daerah pada semua perangkat daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah agar meningkatnya tata kelola administrasi dan aset daerah. Berdasarkan indikator yang ada ternyata ada beberapa realisasi capaian kinerja yang sudah bagus antara lain (a) tersedianya laporan keuangan berbasis akrrual, (b) jumlah pengawasan internal secara berkala, (c) jumlah pengawasan kasus dan khusus, (d) persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun demikian masih ada beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditargetkan, antara lain; (a) Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan KDH, (b) Persentase aparatur negara yang profesional, (c) Persentase peningkatan fungsi pengawasan

Beberapa indikator yang belum tercapai tersebut tentu menjadi permasalahan yang perlu diatasi kedepan. Adapun perkembangan realisasi capaian indikator kinerja urusan pengawasan selama periode 2013-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.46
Realisasi Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai Evaluasi LAKIP (nilai)			CC	CC	CC
2	Tersedianya laporan keuangan berbasis akrual	CTA	CTA	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah pengawasan internal secara berkala (obrik)	77	77	75	75	61
4	Jumlah pengawasan kasus dan khusus (kasus)	6	14	19	19	13
5	Jumlah aparatur pengawa-san yang mengikuti Pela-tihan Kantor Sendiri (org)	4	35	32	33	30
6	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) (%)			114.29	100	120
7	Jumlah aparatur pemeriksa dan pengawasan yang profesional (org)	13	13	12	13	13
8	Nilai pencapaian ukuran keberhasilan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (nilai)			Hijau	Hijau	Hijau

Sumber : Inspektorat Kota Padang Panjang, 2018

f) Urusan Keuangan

Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.47
Realisasi Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	82.66	74.66	77.91	77.79	80.47
2	Persentase Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu terhadap total pendapatan (%)	16.21	17.13	29.71	26.91	24.64
3	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada
4	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
5	Konstribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	109.74	110.26	126.45	104.62	99.28
6	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah (%)	99.57	106.54	109.24	104.62	100.61
7	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah (%)	14.70	16.84	102.98	91.27	81.29
8	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Pajak=8 Retribusi =12	Pajak=9 Retribusi =15	Pajak=9 Retribusi =18	Pajak=9 Retribusi =18	Pajak=9 Retribusi =17
9	Penetapan APBD tepat waktu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Tersedianya standarisasi biaya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang, 2018

g) Urusan Kepegawaian

Secara umum kinerja urusan kepegawaian relatif sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari realisasi capaian kinerja beberapa indikator antara lain: (a) tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian, (b) jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional, (c) jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural, (d) jumlah pegawai yang telah mengikuti tes uji kompetensi, (d) meningkatnya persentase pejabat struktural yang telah lulus diklat, (e) jumlah PNS yang naik pangkat relatif cukup banyak. Meskipun kinerja layanan urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKPSDM sudah baik, namun dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan agar capaian kinerja benar-benar optimal. Adapun capaian kinerja urusan layanan kepegawaian di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Realisasi Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Pegawai Berpendidikan setara SMA	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21
2	Rasio Pegawai Berpendidikan setara S1	0.47	0.48	0.47	0.49	0.46
3	Rasio Pegawai Berpendidikan setara S2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
4	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat Fungsional (org)	15	10	10	13	11
5	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat Struktural (org)	40	40	20	15	15
6	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti tes uji kompetensi (org)	-	-	18	50	35
7	Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklat struktural (%)	77	79	80	80	82
8	Jumlah PNS yang naik pangkat (org)	512	324	500	381	326
9	Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BKPSDM Kota Padang Panjang, Tahun 2018.

c. Aspek Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing suatu daerah kota menjadi salah satu ukuran untuk menentukan apakah suatu daerah tersebut memiliki potensi untuk pengembangan investasi atau tidak. Secara umum tingkat daya saing daerah ini berlaku global sehingga kota-kota di seluruh negara termasuk di Indonesia berupaya meningkatkan daya saing kotanya. Tingkat persaingan tidak hanya berlaku pada level nasional, namun juga di level internasional. Pada dasarnya tidak ada pengertian yang baku tentang *competitiveness* atau tingkat daya saing. kota-kota yang kompetitif menarik bagi orang-orang yang kreatif dan untuk menjadi kota yang kompetitif. Tingkat daya saing (*Competitiveness*) daera kota merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daera kota, maka menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga semakin tinggi.

Daya saing daerah merupakan salah satu isu utama dalam percepatan pembangunan daerah. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah kota serta wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan (Porter, 2006). Selanjutnya daya saing suatu daerah juga diartikan sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan disamping kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan (Santoso,

2009). Dengan kata lain kemampuan suatu daerah ataupun wilayah untuk menciptakan peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi yang terlihat pada daya saing eksternal.

Oleh karena itu daya saing perkotaan perlu diperhatikan dalam menciptakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan memiliki daya saing yang tinggi, maka kota dapat terus tumbuh dan berkembang dengan keunggulan masing-masing dan dapat mengantisipasi dan sekaligus mengikuti perubahan global. Dengan demikian faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan daya saing perlu diidentifikasi. Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Abullah, et al, 2002). Secara umum ada beberapa aspek penting yang perlu jadi perhatian dalam meningkatkan daya saing daerah yaitu: (1). Fokus kemampuan ekonomi daerah, (2) Fasilitas wilayah/infrastruktur, dan (3) sumber daya manusia. Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa aspek daya saing daerah di Kota Padang Panjang.

1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah dilakukan untuk mengetahui secara konkret sektor dan sub-sektor yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maksimal dapat diwujudkan. Potensi pengembangan ekonomi suatu kota dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektoral pada tingkat provinsi. Menurut teori ilmu ekonomi alat analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan komparatif sektor dan sub-sektor lapangan usaha daerah adalah Indeks Koefisien Lokasi (*Location Quotient*)

Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada tingkat yang lebih luas (provinsi). Teknik mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah pada sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor mana yang bukan sektor basis. Secara umum LQ juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sektor unggulan daerah. Dalam

perhitungannya nilai LQ diperoleh dengan membandingkan PDRB Kota Padang Panjang untuk sektor yang sama dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa sektor yang menjadi basis dan menjadi sektor unggulan di kota Padang Panjang adalah sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai LQ rata-rata = 2,85, sub sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai LQ rata-rata 2,13, sektor Jasa Pendidikan dengan LQ rata-rata 2,09, sektor real estat dengan nilai LQ rata-rata 1,84, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan LQ rata-rata 1,61, sektor informasi dan komunikasi 1,51, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai LQ rata-rata = 1,21, sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai LQ rata-rata 1,17, serta sektor jasa lainnya dengan nilai LQ sebesar 2,55. Adapun hasil perhitungan LQ nya adalah sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Perkembangan Nilai Location Quotient (LQ) Lapangan Usaha
Kota Padang Panjang Tahun 2013- 2017

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,23
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,07
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,99	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,65	0,63	0,62	0,61	0,61	0,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,91	2,92	2,88	2,70	2,64	2,85
F	Konstruksi	1,05	1,05	1,05	1,03	1,03	1,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,22	1,21	1,21	1,21	1,18	1,21
H	Transportasi dan Pergudangan	1,19	1,18	1,17	1,15	1,14	1,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,10	2,14	2,16	2,10	2,07	2,13
J	Informasi dan Komunikasi	1,49	1,51	1,53	1,50	1,50	1,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	1,40	1,41	1,38	1,37	1,39
L	Real Estat	1,88	1,86	1,84	1,80	1,79	1,84

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
M,N	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,64	1,62	1,59	1,58	1,58	1,61
P	Jasa Pendidikan	2,08	2,08	2,11	2,10	2,09	2,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,02	1,01	1,00	0,98	1,01
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,72	2,61	2,47	2,39	2,37	2,55
Produk Domestik Regional Bruto		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Data PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, Data Diolah

Angka koefisien LQ di atas memperlihatkan bahwa beberapa sektor tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama secara rata-rata di tingkat provinsi Sumatera Barat dan merupakan sektor basis di Kota Padang Panjang. Dari semua sektor yang menjadi basis perekonomian, sektor yang dapat diintervensi secara langsung oleh pemerintah daerah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Pendidikan, sektor real estat, sektor inormasi dan komunikasi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor transportasi dan pergudangan.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan pembangunan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, di bawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan klasifikasi sektor ekonomi berdasarkan perkembangan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Salah satu metode yang cukup baik dan sering digunakan untuk digunakan adalah analisis Tipologi Klassen (Apriliyanto: 2003)

Tipologi klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha, atau komoditi suatu daerah dengan nilai rataratanya di tingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional).

Analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan ekonomi secara sektoral (yang dapat diperluas tidak hanya di tingkat sektor tetapi juga

subsektor, usaha ataupun komoditi) menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.

1. *Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat* (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan g_i lebih besar dari g dan s_i lebih besar dari s . Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.
2. *Sektor maju tapi tertekan* (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan g_i lebih kecil dari g dan s_i lebih besar dari s . Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.
3. *Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat* (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (s_i) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan g_i lebih besar dari g dan s_i lebih kecil dari s . Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.
4. *Sektor relatif tertinggal* (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (s_i) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s).

Tabel 2.50
Kuadran Klasifikasi Sektoral Tipologi Klassen

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$g_i \geq g$	$g_i < g$
$s_i \geq s$	(Kuadran 1) Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat	(Kuadran 2) Sektor maju tapi tertekan
$s_i < s$	(Kuadran 3) Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	(Kuadran 4) Sektor relatif tertinggal

Keterangan:

- g_i = pertumbuhan sektor daerah analisis
 g = pertumbuhan sektor daerah acuan
 s_i = kontribusi sektor daerah analisis
 s = kontribusi sektor daerah acuan

Dalam Analisis Tipologi Klassen, daerah acuan yang digunakan adalah daerah yang lebih tinggi. Misalnya, bila daerah yang digunakan sebagai objek analisis adalah kabupaten/kota, maka daerah acuan yang digunakan adalah provinsi. Kalau daerah analisis adalah provinsi, maka daerah acuan bisa menggunakan nasional atau pulau, ataupun wilayah pembangunan tertentu dimana daerah analisis merupakan bagian dari wilayah tersebut. Dari hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan pada sektor atau lapangan usaha di Kota Padang Panjang diperoleh hasil perhitungannya sebagai berikut.

Tabel 2.51
Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor (lapangan usaha)
Kota Padang Panjang

No	Lapangan Usaha	Daerah Analisis (Padang Panjang)		Daerah Acuan (Sumbar)		Kua dran
		Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,55	5,37	3,87	23,57	II
B	Pertambangan dan Penggalian	4,09	0,28	3,58	4,33	III
C	Industri Pengolahan	4,36	11,09	3,86	11,05	I
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,69	0,06	7,67	0,10	III
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	4,08	0,28	5,03	0,10	II

No	Lapangan Usaha	Daerah Analisis (Padang Panjang)		Daerah Acuan (Sumbar)		Kuadran
		Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	7,73	9,13	7,49	8,78	I
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,56	18,60	5,83	15,43	II
H	Transportasi dan Pergudangan	7,53	13,43	7,95	11,52	II
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,33	2,17	7,51	1,03	II
J	Informasi dan Komunikasi	8,37	9,77	8,96	6,48	II
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,40	4,18	4,89	3,02	I
L	Real Estat	4,25	3,58	5,24	1,95	II
M,N	Jasa Perusahaan	7,28	0,08	6,06	0,44	III
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	9,06	3,67	5,65	II
P	Jasa Pendidikan	8,60	7,53	8,18	3,60	I
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,94	1,34	7,46	1,33	II
R,S,T, U	Jasa lainnya	5,72	4,05	7,98	1,61	II

Sumber : Data PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor ekonomi/lapangan usaha yang tergolong ke dalam kelompok *sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat* di Kota Padang Panjang adalah :

- Industri Pengolahan
- Konstruksi
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Jasa Pendidikan

Selanjutnya yang termasuk ke dalam kelompok yang *sektor maju tapi tertekan* adalah:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Real Estate
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
- Jasa Lainnya

Sedangkan *sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat* di Kota Padang Panjang adalah:

- Pertambangan dan Penggalian
- Pengadaan Listrik dan Gas

Jasa Perusahaan

2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor pertimbangan bagi stakeholders untuk ikut berperan dalam meningkatkan daya saing daerah. Artinya semakin baik dan lengkap ketersediaan infrastrukrtur yang dimiliki oleh suatu daerah maka akan semakin tinggi daya saing daerah tersebut. Berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur itu, ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah yaitu masalah aksesibilitas daerah, ketersediaan air minum, fasilitas listrik dan jaringan komunikasi, serta fasilitas perdagangan dan jasa.

a) Aksesibilitas Daerah

Kota Padang Panjang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki lokasi strategis, yaitu merupakan Kota sebagai jalur perlintasan antara Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah datar. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Padang merupakan ibu Kota Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Padang Pariaman merupakan lokasi tempat Bandara Internasional Minangkabau. Sedangkan Kota Bukittinggi merupakan pusat perdagangan grosir serta daerah tujuan wisata yang paling ramai dikunjungi wisatawan.

Sebagai akibatnya frekwensi jalur transportasi menuju lokasi tersebut dan melewati Kota Padang Panjang cukup tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota Padang Panjang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian diwilayah tersebut. Salah satu sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah Kota Padang Panjang adalah sarana jalan

yang terdiri dari jalan nasional dengan panjang 11,829 km dan jalan Kota dengan total panjang 94,456 km, dengan kondisi 92,27 persen dalam kondisi baik, 1,43 persen sedang, 1,62 persen rusak dan 4,67 rusak berat. Disamping itu juga tersedia terminal angkutan dengan type c.

Meskipun sarana dan prasarana jalan yang mantap di Kota Padang Panjang sudah cukup memadai, namun dari sisi luas jalan tamoaknya masih terbatas. Sebagai akibatnya sering terjadi kemacetan di Kota Padang Panjang. Disamping itu terminal angkutan yang ada sekarang ini pengelolaannya juga terlihat belum optimal.

b) Ketersediaan Air Minum

Fasilitas air minum di Kota Padang Panjang sudah cukup memadai, ini terlihat dari data jumlah pemakaian air melalui PDAM Kota Padang Panjang pada tahun 2017 tercatat sebanyak 2.570.493 m³. Perkembangan banyaknya pelanggan dan pemakaian air PDAM dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.52
Perkembangan Banyak Pelanggan, Pemakaian Air Minum PDAM
Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pelanggan	Na	7.004	7.108	7.177	7.399
2	Pemakaian air (m ³)	Na	2.320.392	2.318.997	2.510.688	2.570.493

Sumber : PDAM Kota Padang Panjang, 2018

c) Fasilitas Listrik dan Jaringan Komunikasi

Kondisi fasilitas listrik yang tersedia di Kota Padang Panjang terlihat dari jumlah pelanggan listrik yang berjumlah 14.502 pada tahun 2017, dengan daya terpasang 39.910.350. Meskipun sebagian besar rumah tangga di kota Padang Panjang sudah mendapat fasilitas listrik dan jaringan komunikasi, namun ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai macam kegiatan industri rumah tangga serta UMKM. Karena itu dalam RPJMD mendatang pemanfaatan listrik dan jaringan komunikasi untuk mendukung industri rumah tangga dan pengembangan UMKM perlu dimasukkan. Adapun perkembangan daya terpasang, produksi listrik, listrik terjual di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Daya Terpasang, Produksi Listrik, Listrik Terjual
di Kota Padang Panjang Tahun 2015-2017

Tahun	Daya Terpasang	Produksi Listrik	Listrik Terjual	Jumlah Pelanggan
2015	35.641.100	62.166.958 kwh	58.805.029 kwh	13.608
2016	37.232.100	64.434.642 kwh	61.617.121 kwh	13.709
2017	39.910.350	65.464.972 kwh	62.137.850 kwh	14.502

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Sedangkan untuk jaringan komunikasi baik telepon maupun telepon seluler mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meskipun ketersediaan fasilitas listrik dan jaringan komunikasi di Kota Padang Panjang sudah cukup memadai tetapi di dalam operasionalnya belum dapat mendorong pengembangan UMKM serta sektor pariwisata.

d) Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Di Kota Padang Panjang terdapat 2 (dua) buah pasar yang merupakan fasilitas perdagangan, yaitu pasar pusat sebagai pusat perdagangan dan pasar sayur Bukit Surungan yang merupakan sentra perdagangan hasil bumi yang meliputi wilayah Padang Panjang dan sebagian wilayah Tanah Datar. Disamping itu juga tersedia beberapa fasilitas jasa yang cukup memadai seperti restoran, hotel, fasilitas pendidikan dan tempat wisata.

Walaupun perkembangan sarana perdagangan dan jasa di Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat sudah cukup memadai, namun beberapa sarana pendukung lainnya tampaknya belum optimal seperti sarana tempat parkir dan pedagang kaki lima yang layak dan memadai masih belum tersedia. Begitu juga dengan hotel berbintang yang dibutuhkan oleh para wisatawan juga belum tersedia untuk mendukung pengembangan pariwisata. Adapun perkembangan sarana perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Perkembangan Sarana Perdagangan dan Jasa, 2014-2017

Tahun	Pasar	Toko	Kios	Warung	Rumah Makan/ Restoran	Hotel Non Bintang	Penginapan
2014	2	41	25	22	15	5	13
2015	2	42	23	25	14	5	14
2016	2	43	26	25	15	6	13
2017	2	320	725	35	69	6	13

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2018

3) Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan. Karena itu, peningkatan sumber daya manusia perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menghadapi kompetisi pasar kerja. Disamping itu sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, karena dalam suatu proses produksi, SDM adalah berperan penting yaitu sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai pengusaha yang bertugas dalam mengkombinasikan beberapa faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan baik nasional maupun daerah.

Kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat diukur dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk, dimana untuk kualitas tenaga kerja salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur adalah tingkat pendidikan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Rasio lulusan lulusan tenaga kerja S1/S1/S3 dan rasio ketergantungan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.55
Rasio Lulusan Tenaga Kerja S1/S2/S3 Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	3.927	6.108	5.948	5.458	4.593
2	Jumlah penduduk	49.536	50.208	50.883	51.712	52.422
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,93 %	12,16 %	11,69 %	10,55 %	8,76 %

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa rasio lulusan pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat Kota Padang Panjang masih tergolong rendah, sehingga implikasi kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah adalah perlunya mendorong masyarakat untuk mengikuti pendidikan sampai pada jenjang pendidikan sarjana atau pasca sarjana. Disamping itu Pemda Kota Padang Panjang juga perlu menyediakan pelatihan bagi para sarjana baik untuk kebutuhan lokal, nasional maupun untuk mencari kerja

keluar negeri. Hal ini perlu dilakukan agar mereka dapat memenuhi tuntutan persaingan dunia kerja di sektor formal serta mereka tidak menjadi penganggur terdidik.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan 2013-2017

Pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; Permedagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara yang direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Kota Padang Panjang, maka dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir beserta kebijakan umum yang menjadi acuannya. Analisis kinerja keuangan meliputi analisis kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, kinerja pemberian daerah, serta neraca daerah.

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan jumlah anggaran pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan capaian kinerja riil yang dihasilkan, seberapa efektif capaian kinerja anggaran dan realisasi pendapatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan perbandingan realisasi dan anggaran. Penilaian kinerja juga bisa dilakukan berdasarkan kontribusi atau proporsi elemen pendapatan dan belanja terhadap totalnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pemberian daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2013-2017 ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mengalokasikan belanja daerah secara efektif dan efisien serta

mengalokasikan dana pada pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah adalah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu komponen pendapatan dalam APBD, selain Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah. Penyerahan otonomi tersebut memberi peluang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kemampuan daerah dalam menggali PAD-nya dapat mengindikasikan kinerja daerah dalam melaksanakan otonomi daerah

2) Dana Perimbangan

Sebagaimana ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola dalam APBD. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah melalui penerapan formulasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan keseluruhan pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri, sedangkan dana darurat merupakan bantuan pemerintahan dari APBN kepada pemerintah

daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

a. Target Pendapatan

Pendapatan Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 masih mengharapkan pendanaan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat, sekalipun usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah diupayakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahun PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari Dana Perimbangan dan sumber Pendapatan Daerah Lainnya. Jika pada tahun 2013 jumlah PAD berjumlah Rp.37.828,20 Juta dan meningkat menjadi Rp.87.942,93 Juta, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 23,48%. Sedangkan perkembangan jumlah Dana Perimbangan jauh lebih rendah, yaitu dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,75%, dimana pada tahun 2013 jumlah Dana Perimbangan yang berjumlah Rp.341.027,62 Juta dan meningkat menjadi Rp.459.607,84 Juta pada tahun 2017. Namun demikian, pertumbuhan rata-rata pertahun anggaran PAD yang jauh lebih besar tersebut belum mampu mengurangi secara berarti ketergantungan Kota Padang Panjang dari Pemerintah Pusat.

Pertumbuhan rata-rata pertahun penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD lainnya. Pada tahun 2013 jumlah pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah adalah Rp.24.513,50 Juta dan meningkat menjadi Rp.68.298,87 Juta pada tahun 2017, atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 29,20%. Sedangkan sumber target PAD yang terendah berasal dari Retribusi Daerah. Jika pada tahun 2013 jumlah Retribusi Daerah yang ditargetkan Rp.5.114,96 Juta dan turun menjadi Rp.5.085,97 Juta, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 0,14%. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah dan lebih tingginya Lain-Lain PAD yang Sah disebabkan adanya perubahan status Rumah Sakit Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pendapatan yang dihasilkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sebelum menjadi BLUD diakui sebagai Retribusi Daerah namun setelah menjadi BLUD diperlakukan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.

Sumber penerimaan PAD lainnya, yaitu Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertahun yang tidak jauh berbeda. Pertumbuhan target Pajak Daerah adalah 13,90% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan adalah 16,89%. Anggaran Pajak Daerah meningkat dari Rp.4.078,50 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.6.864,65 Juta pada tahun 2017. Sedangkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat dari Rp.4.121,24 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.7.693,43 Juta pada tahun 2017.

Dari 3 sumber Dana Perimbangan, sumber anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus menunjukkan pertumbuhan pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Anggaran pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada tahun 2013 berjumlah Rp.22.732,66 Juta dan meningkat menjadi Rp.71.620,60 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 33,23%. Sedangkan pertumbuhan sumber Dana Perimbangan terendah berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 9,37%, mengalami penurunan dari Rp.15.448,41 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.2.550,88 Juta pada tahun 2017. Tabel 3.1 berikut menjelaskan perkembangan anggaran Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

**Tabel 3.1
Perkembangan Anggaran Pendapatan Daerah
Kota Padang Panjang (Rp. Juta)**

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN	418.067,24	478.219,62	497.538,43	560.907,76	609.996,06	9,91
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.828,20	46.724,33	53.068,56	67.242,23	87.942,93	23,48
a	Pendapatan Pajak Daerah	4.078,50	5.051,00	5.086,74	6.323,34	6.864,65	13,90
b	Pendapatan Retribusi Daerah	5.114,96	4.307,56	4.358,85	5.574,92	5.085,97	(0,14)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.121,24	4.495,82	5.780,33	7.035,00	7.693,43	16,89
d	Lain-lain PAD Yang Sah	24.513,50	32.869,95	37.842,64	48.308,98	68.298,87	29,20
2	PENDAPATAN TRANSFER	379.146,40	430.336,23	444.469,87	493.565,53	521.653,13	8,30
	DANA PERIMBANGAN	341.027,62	386.554,10	391.404,25	476.895,76	459.607,84	7,75
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.448,41	12.971,22	14.473,03	11.880,81	12.550,88	(5,06)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	302.846,55	341.743,15	343.008,70	382.149,49	375.436,36	5,52
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	22.732,66	31.839,72	33.922,52	82.865,45	71.620,60	33,23
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi	28.620,18	30.186,59	37.681,33	-	42.836,37	10,61
4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.498,60	13.595,55	15.384,29	16.669,77	19.208,93	19,25
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092,63	1.159,05	-	100,00	400,00	(22,21)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

b. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah selama periode 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang dianggarkan. Jika untuk periode tersebut telah

dianggarkan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 9,90%, tetapi yang dapat direalisasikan hanya sebesar 9,11%. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013 berjumlah Rp.417.015,12 Juta dan meningkat menjadi Rp.591.062,89 Juta pada tahun 2017. Sekalipun terjadi pertumbuhan yang berfluktuasi namun peningkatan yang terjadi pada 2 tahun terakhir relatif sama.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 berjumlah Rp.41.513,49 Juta dan meningkat menjadi Rp.88.837,03 Juta pada tahun 2017. Dengan demikian, dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 20,95%. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan meningkat dari Rp.336.164,74 Juta pada tahun 2013 dan menjadi Rp.439.519,04 Juta pada tahun 2017. Dengan demikian, dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,93%.

Dari 4 sumber Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan pertumbuhan penerimaannya pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan PAD lainnya. Pendapatan yang berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2013 berjumlah Rp.27.837,14 Juta dan meningkat menjadi Rp.70.102,81 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 25,97%. Sedangkan pertumbuhan sumber penerimaan PAD terendah berasal dari Retribusi Daerah, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 6,27%, mengalami penurunan dari Rp.5.355,48 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.4.134,30 Juta pada tahun 2017.

Sejalan dengan anggaran pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sumber realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus menunjukkan pertumbuhan pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada tahun 2013 berjumlah Rp.17.049,50 Juta dan meningkat menjadi Rp.53.108,35 Juta pada tahun 2017, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 32,85%. Sedangkan pertumbuhan sumber Dana Perimbangan terendah berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 9,37%, mengalami penurunan dari Rp.16.268,69 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.10.974,34 Juta pada tahun 2017. Tabel 3.2 berikut menunjukkan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Padang Panjang (Rp. Juta)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN	417.015,12	475.208,49	505.170,04	549.936,36	591.062,89	9,11
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.513,49	51.529,09	67.035,65	70.357,12	88.837,03	20,95
a	Pendapatan Pajak Daerah	4.060,96	5.388,06	5.556,83	6.134,35	6.906,48	14,20
b	Pendapatan Retribusi Daerah	5.355,48	4.602,13	4.488,80	5.095,65	4.134,30	(6,27)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.259,91	4.453,82	5.760,14	5.067,98	7.693,43	15,93
d	Lain-lain PAD Yang Sah	27.837,14	37.085,08	51.229,89	54.059,14	70.102,81	25,97
2	PENDAPATAN TRANSFER	374.409,00	422.520,35	435.531,88	479.479,24	501.825,86	7,60
	DANA PERIMBANGAN	336.164,74	378.738,22	381.194,55	461.720,10	439.519,04	6,93
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.268,69	13.115,27	11.047,83	10.940,82	10.974,34	(9,37)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	302.846,55	341.743,15	343.008,70	382.149,49	375.436,36	5,52
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	17.049,50	23.879,79	27.138,02	68.629,78	53.108,35	32,85
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi	28.620,18	30.186,59	37.681,33	-	42.836,37	10,61
4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.624,08	13.595,55	16.656,00	17.759,14	19.470,45	19,26
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092,63	1.159,05	2.602,50	100,00	400,00	(22,21)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

c. Perbandingan Realisasi dan Anggaran

Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2013 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017. Jika pada tahun 2013 dapat direalisasikan anggaran pendapatan sebesar 99,75%, tetapi pada tahun 2017 hanya dapat terealisasi sebesar 96,20%. Namun secara keseluruhan realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Padang Panjang relatif baik karena mampu merealisasikan anggarannya di atas 90,00%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah relatif lebih baik dibandingkan sumber pendapatan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai sebesar 110,40% dan realisasi Dana Perimbangan rata-rata sebesar 97,28%. Baik pada tahun 2013 maupun tahun 2017, sumber pendapatan daerah yang menunjukkan kinerja kurang baik hanya Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata realisasinya hanya sebesar 77,39%. Sedangkan untuk jenis pendapatan lainnya menunjukkan realisasi anggaran lebih di atas 90,00%.

Relatif masih rendahnya kinerja sumber pendapatan daerah ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Padang Panjang kedepannya. Realisasi anggaran penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar 81,29%. Retribusi Daerah terkait dengan pelayanan, sehingga rendahnya capaian realisasi anggaran ini secara tidak langsung mengambarkan belum optimalnya pelayanan. Penurunan sumber pendapatan dari Bagi Hasil Pajak disebabkan oleh pengalihan kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke Daerah, meskipun penurunan Bagi Hasil Pajak

dengan peningkatan Pajak Daerah sebagai akibat pengalihan kewenangan pemungutan PBB, juga tidak sebanding. Disamping itu dimungkinkan karena adanya penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Persentase realisasi anggaran pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan
Daerah Kota Padang Panjang 2013-2017

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN	99,75	99,37	101,53	98,04	96,90	99,12	(0,72)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109,74	110,28	126,32	104,63	101,02	110,40	(2,05)
a	Pendapatan Pajak Daerah	99,57	106,67	109,24	97,01	100,61	102,62	0,26
b	Pendapatan Retribusi Daerah	104,70	106,84	102,98	91,40	81,29	97,44	(6,13)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103,36	99,07	99,65	72,04	100,00	94,82	(0,82)
d	Lain-lain PAD Yang Sah	113,56	112,82	135,38	111,90	102,64	115,26	(2,50)
2	PENDAPATAN TRANSFER	98,75	98,18	97,99	97,15	96,20	97,65	(0,65)
	DANA PERIMBANGAN	98,57	97,98	97,39	96,82	95,63	97,28	(0,76)
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105,31	101,11	76,33	92,09	87,44	92,46	(4,54)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	75,00	75,00	80,00	82,82	74,15	77,39	(0,28)
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi	100,00	100,00	100,00			100,00	(100,00)
4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101,32	100,00	108,27	106,53	101,36	103,50	0,01
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

d. Proporsi Elemen Pendapatan

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk lebih memberdayakan daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan, maka Kota Padang Panjang telah menunjukkan kinerja yang baik. Bila diperhatikan secara lebih cermat ternyata dari tahun ke tahun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah selalu menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2013, kotribusi PAD hanya sebesar 9,95%, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 15,03%. Peningkatan ini terutama berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah, yang mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dalam periode yang sama, yaitu dari 6,68% pada tahun 2013 menjadi 11,86% pada tahun 2017.

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi pertumbuhan negatif atas Retribusi Daerah. Akibatnya, proporsi Retribusi Daerah mengalami penurunan dari 1,28% pada tahun 2013 menjadi 0,70% pada tahun 2017.

Hal yang sama juga terjadi untuk sumber pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam. Kedua-dua sumber dana transfer dari pusat yang dihasilkan dari kinerja atau potensi daerah juga menunjukkan proporsi yang mengalami penurunan. Jika pada tahun 2013, kontribusi Bagi Hasil Pajak adalah 3,68%, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1,67%. Demikian juga dengan kontribusi Bagi Hasil Sumberdaya Alam yang mengalami penurunan dari 0,22% pada tahun 2013 menjadi 0,18% pada tahun 2017. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan penurunan perekonomian Kota Padang Panjang sehingga pajak yang bisa dipungut pemerintah pusat mengalami penurunan.

Tabel 3.4. berikut menunjukkan perkembangan proporsi sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

**Tabel 3.4
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (persen)**

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN						
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,05	9,77	10,67	11,99	14,42	12,35
a	Pendapatan Pajak Daerah	0,98	1,06	1,02	1,13	1,13	3,64
b	Pendapatan Retribusi Daerah	1,22	0,90	0,88	0,99	0,83	(9,14)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,99	0,94	1,16	1,25	1,26	6,35
d	Lain-lain PAD Yang Sah	5,86	6,87	7,61	8,61	11,20	17,55
2	PENDAPATAN TRANSFER	90,69	89,99	89,33	87,99	85,52	(1,46)
	DANA PERIMBANGAN	81,57	80,83	78,67	85,02	75,35	(1,97)
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,70	2,71	2,91	2,12	2,06	(13,62)
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	72,44	71,46	68,94	68,13	61,55	(3,99)
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5,44	6,66	6,82	14,77	11,74	21,22
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi	6,85	6,31	7,57	-	7,02	0,64
e	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2,27	2,84	3,09	2,97	3,15	8,50
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,26	0,24	-	0,02	0,07	(29,23)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah yang

efisien, efektifit, transparan, akuntabel serta meningkatkan penetapan prioritas alokasi anggaran.

1) Anggaran Belanja

Perkembangan kinerja anggaran belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 cendrung baik karena pertumbuhan belanja langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan belanja tidak langsung. Tahun 2013 anggaran belanja berjumlah Rp.475.637,93 Juta, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.755.647,40 Juta, artinya mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,27%. Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan minus sebesar 1,43%, yaitu dari Rp.230.423,79 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.217.539,29 Juta. Sedangkan Belanja Langsung mengalami peningkatan dari Rp.245.214,14 Juta tahun 2013 menjadi Rp.538.108,11 Juta ditahun 2017. Artinya dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 21,71% per tahun.

Kinerja anggaran belanja yang lebih baik juga ditunjukkan dari perkembangan jumlah Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dibandingkan dengan belanja lainnya. Pertumbuhan rata-rata pertahun Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung lebih rendah dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang lebih mengutamakan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih banyak menggunakan belanja barang dan jasa serta belanja modal dibandingkan belanja pegawai.

Anggaran belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,35%, yaitu dari Rp.199.448,81 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.210.427,10 Juta pada tahun 2017. Sedangkan anggaran belanja pegawai pada belanja langsung mengalami pertumbuhan minus sebesar 20,25%, yaitu dari Rp.43.762,79 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.17.705,96 Juta pada tahun 2017. Penurunan jumlah belanja pegawai pada belanja langsung ini tidak hanya direncanakan pada tahun-tahun terakhir saja, tetapi secara bertahap dari tahun 2013 jumlah belanja pegawai pada belanja langsung ini selalu menunjukkan penurunan.

Anggaran belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan sebesar 19,49% selama 5 tahun, yaitu dari Rp.107.796,13 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.219.786,65 Juta ditahun 2017. Sedangkan anggaran belanja modal mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 33,85%, yaitu dari Rp.93.655,22 Juta pada tahun 2013 menjadi

Rp.300.615,50 Juta pada tahun 2017. Relatif tingginya pertumbuhan anggaran belanja modal merupakan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tabel 3.5 berikut menjelaskan perkembangan anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017.

Tabel 3.5
Perkembangan Anggaran Belanja Daerah
Kota Padang Panjang (Rp. Juta)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
B	BELANJA	475.637,93	544.621,70	630.804,76	705.483,83	755.647,40	12,27
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	230.423,79	238.512,76	250.946,18	254.110,69	217.539,29	(1,43)
a	Belanja Pegawai	199.448,81	227.877,02	247.919,53	249.805,94	210.427,10	1,35
b	Belanja Hibah	13.163,00	7.733,00	757,30	1.111,50	5.291,04	(20,38)
c	Belanja Bantuan Sosial	4.149,40	1.398,03	125,50	50,50	261,15	(49,91)
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,	500,00	500,00	760,00	560,00	560,00	2,87
e	Pemerintahan Desa dan Partai Politik						
f	Belanja Tidak Terduga	13.162,58	1.004,71	1.383,85	2.582,75	1.000,00	(47,50)
2	BELANJA LANGSUNG	245.214,14	306.108,94	379.858,08	451.373,14	538.108,11	21,71
a	Belanja Pegawai	43.762,79	19.673,67	41.841,19	14.855,21	17.705,96	(20,25)
b	Belanja Barang dan Jasa	107.796,13	150.161,93	165.040,69	182.363,24	219.786,65	19,49
c	Belanja Modal	93.655,22	136.273,35	172.976,20	254.154,69	300.615,50	33,85

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

2) Realisasi Belanja

Realiasi Total Belanja mengalami peningkatan dari Rp.393.183,73 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.608.108,21 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,52%. Realiasi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari Rp.196.971,43 Juta ditahun 2013 menjadi Rp.197.210,15 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,03%. Sedangkan realiasi Belanja Langsung mengalami peningkatan dari Rp.196.212,30 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.410.898,06 Juta di tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 20,30%. Lebih besarnya pertumbuhan realisasi Belanja Langsung dibandingkan Belanja Tidak Langsung ini menunjukkan bahwa kinerja realiasi belanja Kota Padang Panjang relatif Baik.

Kinerja belanja yang lebih baik juga ditunjukkan oleh pertumbuhan rata-rata per tahun untuk setiap elemen belanja langsung. Pertumbuhan rata-rata per tahun dari realisasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan belanja pegawai pada belanja langsung lebih rendah

dibandingkan dengan belanja barang dan jasa serta dengan belanja modal.

Realisasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari Rp.186.229,47 Juta pada tahun 2013, menjadi Rp.192.156,86 Juta di tahun 2017, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,79%. Sedangkan realisasi belanja pegawai pada belanja langsung mengalami penurunan dari Rp.37.906,69 Juta pada tahun 2013, menjadi Rp.14.820,27 Juta di tahun 2017, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun minus 20,93%. Penurunan belanja pegawai pada belanja langsung ini dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja.

Sebaliknya, realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari Rp.90.089,89 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.184.568,54 Juta pada tahun 2017, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,64%. Sedangkan realisasi belanja modal mengalami peningkatan dari Rp.68.215,72 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.211.509,25 Juta pada tahun 2017, atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 32,70% per tahun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi belanja aparatur dan lebih meningkatkan alokasi belanja untuk pembangunan atau untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 3.6 berikut menyajikan perkembangan realisasi belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017.

**Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Belanja Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)**

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
B	BELANJA	393.183,73	406.617,04	491.459,79	548.861,09	608.108,21	11,52
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	196.971,43	209.288,91	215.295,75	234.745,28	197.210,15	0,03
a	Belanja Pegawai	186.229,47	203.655,17	214.697,80	233.177,66	192.156,86	0,79
b	Belanja Hibah	9.017,58	4.069,16	35,64	1.013,96	4.466,79	(16,11)
c	Belanja Bantuan Sosial	968,70	1.071,83	-	50,50	108,40	(42,16)
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,	449,64	492,75	562,31	503,16	478,11	1,55
e	Pemerintahan Desa dan Partai Politik	-	-	-	-	-	-
f	Belanja Tidak Terduga	306,04	-	-	-	-	-
2	BELANJA LANGSUNG	196.212,30	197.328,13	276.164,04	314.115,81	410.898,06	20,30
a	Belanja Pegawai	37.906,69	16.050,28	31.365,60	12.795,77	14.820,27	(20,93)
b	Belanja Barang dan Jasa	90.089,89	116.565,18	133.608,03	154.420,12	184.568,54	19,64
c	Belanja Modal	68.215,72	64.712,67	111.190,41	146.899,92	211.509,25	32,70

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, diolah

3) Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja

Realisasi anggaran belanja Kota Padang Panjang pada tahun 2013 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017. Tahun 2013 dapat direalisasikan anggaran belanja sebesar 82,66%, tetapi pada tahun 2017 hanya dapat direalisasikan sebesar 80,480%. Secara keseluruhan realisasi anggaran belanja Kota Padang Panjang relatif kurang baik karena hanya mampu merealisasikan anggaran belanja di bawah 90,00%. Kecuali Belanja Pegawai-tidak langsung, semua jenis belanja menunjukkan realisasi anggaran di bawah 90,00%.

Namun, jika dibandingkan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasi anggaran belanja tidak langsung menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan belanja langsung. Realiasi anggaran rata-rata belanja tidak langsung selama 5 tahun adalah sebesar 88,41% dan belanja langsung menunjukkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 72,63%.

Adapun persentase realisasi anggaran belanja daerah dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

**Tabel 3.7
Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja
Kota Padang Panjang 2013-2017**

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata	Rata-Rata Pertumbuhan
B	BELANJA	82,66	74,66	77,91	77,80	80,48	78,70	(0,67)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	85,48	87,75	85,79	92,38	90,65	88,41	1,48
a	Belanja Pegawai	93,37	89,37	86,60	93,34	91,32	90,80	(0,55)
b	Belanja Hibah	68,51	52,62	4,71	91,22	84,42	60,30	5,36
c	Belanja Bantuan Sosial	23,35	76,67	-	100,00	41,51	48,30	15,47
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,	89,93	98,55	73,99	89,85	85,38	87,54	(1,29)
e	Pemerintahan Desa dan Partai Politik							
f	Belanja Tidak Terduga	2,33					2,33	-
2	BELANJA LANGSUNG	80,02	64,46	72,70	69,59	76,36	72,63	(1,16)
a	Belanja Pegawai	86,62	81,58	74,96	86,14	83,70	82,60	(0,85)
b	Belanja Barang dan Jasa	83,57	77,63	80,95	84,68	83,98	82,16	0,12
c	Belanja Modal	72,84	47,49	64,28	57,80	70,36	62,55	(0,86)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, diolah

4) Proporsi Elemen Belanja

Proporsi belanja tidak langsung sedikit lebih besar dibandingkan belanja langsung dengan perbandingan 50,10% dengan 40,90% pada tahun 2013. Akan tetapi pada tahun 2017 perbandingan ini berubah secara signifikan menjadi 32,43% untuk belanja tidak langsung dan

67,57% untuk belanja langsung. Proporsi belanja pegawai tidak pada belanja langsung yang mengalami penurunan dari 47,36% pada tahun 2103 menjadi 31,60% pada tahun 2017. Demikian juga dengan proporsi belanja pegawai pada belanja langsung, yang mengalami penurunan dari 9,64% pada tahun 2013 menjadi 2,44% pada tahun 2017.

Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari 22,91% pada tahun 2013 menjadi 30,35% pada tahun 2017. Sedangkan proporsi belanja modal meningkat dari 17,35% pada tahun 2013 menjadi 34,78% pada tahun 2017. Untuk jenis belanja lainnya menunjukkan proporsi belanja yang mengalami penurunan. Artinya proporsi belanja lainnya tersebut pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 atau terjadi penurunan proporsi belanja.

Tabel 3.8 berikut memperlihatkan persentase proporsi belanja daerah dan tingkat pertumbuhan rata-rata belanja daerah per tahun.

**Tabel 3.8
Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2013 – 2017 (persen)**

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
B	BELANJA						
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	50,10	51,47	43,81	42,77	32,43	(10,30)
a	Belanja Pegawai	47,36	50,09	43,69	42,48	31,60	(9,62)
b	Belanja Hibah	2,29	1,00	0,01	0,18	0,73	(24,77)
c	Belanja Bantuan Sosial	0,25	0,26	-	0,01	0,02	(48,14)
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,	0,11	0,12	0,11	0,09	0,08	(8,94)
e	Pemerintahan Desa dan Partai Politik	-	-	-	-	-	
f	Belanja Tidak Terduga	0,08	-	-	-	-	
2	BELANJA LANGSUNG	49,90	48,53	56,19	57,23	67,57	7,87
a	Belanja Pegawai	9,64	3,95	6,38	2,33	2,44	(29,09)
b	Belanja Barang dan Jasa	22,91	28,67	27,19	28,13	30,35	7,28
c	Belanja Modal	17,35	15,91	22,62	26,76	34,78	18,99

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, diolah

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk pelunasan hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Kebijakan untuk menutup defisit yang terjadi di Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 hanya ditutupi dengan memanfaatkan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (penerimaan pemberian). Sedangkan pengeluaran pemberian yang terjadi hanya untuk menambah penyertaan modal. Realisasi pemberian APBD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Pemberian Daerah APBD Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2013 – 2017 (Rp.juta)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
C	PEMBIAYAAN	57.570,69	81.402,08	-	144.576,07	145.651,34	26,12
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	67.577,69	81.402,08	-	147.976,07	145.651,34	21,17
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	67.577,69	81.402,08	-	147.976,07	145.651,34	21,17
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
1	Penyertaan Modal/Investasi	10.007,00	-	15.800,00	3.400,00	-	(100,00)
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGETUARAN	10.007,00	-	15.800,00	3.400,00	-	(100,00)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2013 dan 2017

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca mengambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pemberian. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pemberian maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pemberian maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Neraca daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 78,54%, 11,70%, dan 5,13%, sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2013 dengan tahun 2017.

Berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 nilai aset hanya sebesar Rp.842.727,46 Juta dan kemudian meningkat menjadi Rp.1.232.511,11 Juta pada tahun 2017, yang berarti dalam kurun selama tahun 2013-2017 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,97%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Dari 3 sumber peningkatan aset Kota Padang Panjang tersebut, peningkatan jumlah

aset tetap jauh lebih tinggi dibandingkan 2 kelompok aset lainnya. Namun dari segi pertumbuhan rata-rata per tahun, peningkatan nilai Aktiva Lancar lebih tinggi dibandingkan peningkatan aset tetap dan aset lancar. Nilai aset tetap meningkat dari Rp.654.352,95 Juta pada tahun 2013 menjadi Rp.979.243,41 Juta pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,60%. Sedangkan pertumbuhan aset lancar relatif lebih besar yaitu sebesar 15,71%, dan pertumbuhan Investasi jangka panjang sebesar 4,18%.

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga akan sama dengan jumlah pertumbuhan kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan ekuitas per tahun adalah 9,07%, pertumbuhan kewajiban sebesar 115,11%. Namun karena komposisi ekuitas jauh lebih besar (lebih kurang 99%) dibandingkan kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas.

Tabel 3.10 berikut menyajikan perkembangan jumlah elemen/pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.

Tabel 3.10
Neraca Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	28,256.69	92,559.88	66,574.62	73,359.61	116,522.50	42.50
Kas di Bendahara Pengeluaran	19.54	7.54	104.60	79.52	136.26	62.51
Kas di Bendahara Penerima	12.04	27.76	905.95	2,026.01	17.78	10.24
Kas di Bendahara BLUD	3,784.87	8,148.41	10,943.79	5,253.55	4,375.46	3.69
Kas Lainnya			857.83	977.46	874.16	
Setara Kas	49,350.00	49,968.68	70,350.00	67,000.00	9,000.00	(34.65)
Piutang Pajak Daerah	221.20	513.75	3,362.21	3,279.93	3,547.37	100.12
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih				(2,481.18)	(2,691.42)	
Piutang Pajak Daerah Neto				798.75	131,782.10	
Pajak Retribusi Daerah	444.83	519.75	693.08	803.04	1,542.10	36.45
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih				(696.94)	(1,408.61)	
Piutang Retribusi Daerah Neto				106.09	263,697.70	
Piutang Dana Bagi Hasil	153.96	659.21	1,029.94	5,060.36	1,136.11	64.82
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				183.55	183.55	
Piutang lain-lain PAD yang Sah				7,393.75	9,735.47	
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tak Tertagih				(2,147.44)	(799.86)	
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto				5,246.32	8,935.62	
Piutang Lain-Lain	1,416.31	9,543.97	3,076.51	-		
Penyisihan Piutang			(2,855.68)	-		
Persediaan	4,606.88	4,935.02	6,348.57	6,737.26	6,868.89	10.50
Beban Dibayar Dimuka	255.94	255.94	513.57	212.09	9,638.26	147.72
Jumlah Aset Lancar	8,522.25	167,139.90	161,904.99	167,040.56	158,678.02	15.71

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya (dana Bergulir)	5,102.83	3,821.74	4,541.86	3,449.21	3,263.66	(10.57)
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	-	-	(1,943.34)	(1,752.06)	(2,393.47)	
Jumlah Investasi Non Permanen	5,102.83	3,821.74	2,598.52	1,697.15	870.19	(35.74)
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	42,811.91	42,163.84	56,988.67	59,748.03	55,570.62	6.74
Jumlah Investasi Permanen	42,811.91	42,163.84	56,988.67	59,748.03	55,570.62	6.74
Jumlah Investasi Jangka Panjang	7,914.74	45,985.58	59,587.19	61,445.17	56,440.81	4.18
ASET TETAP						
Tanah	162,644.90	169,140.30	191,718.43	238,021.16	264,113.22	12.89
Peralatan dan Mesin	166,525.35	180,805.17	206,256.09	225,126.00	250,813.86	10.78
Gedung dan Bangunan	291,926.43	314,507.04	332,445.79	326,172.66	345,176.17	4.28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	256,183.20	279,939.13	309,945.85	343,268.22	406,796.67	12.26
Aset Tetap Lainnya	7,578.74	9,380.64	11,700.00	11,338.67	10,670.37	8.93
Konstruksi dalam Pengerjaan	8,427.71	2,639.86	16,771.37	66,120.37	216,185.79	125.05
Akumulasi Penyusutan	(238,933.40)	(301,104.82)	(397,488.08)	(489,279.03)	(514,512.67)	21.14
Jumlah Aset Tetap	654,352.95	655,307.32	671,349.46	720,768.05	979,243.41	10.60
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan						
ASET LAINNYA						
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi				44.78	44.78	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24,430.56	24,430.56	24,430.56	24,430.56	24,430.56	
Aset Tak Berwujud			303.18	666.08	1,997.90	
Aset Lain-lain	27,506.97	21,199.53	14,193.33	85,191.72	28,781.17	1.14

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			(8,226.36)	(24,212.19)	(17,105.53)	
Jumlah Aset Lainnya	1,937.52	45,630.09	30,700.71	86,120.96	38,148.87	(7.42)
TOTAL ASET	842,727.46	914,062.89	923,542.36	1,035,374.75	1,232,511.11	9.97
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	9.02	0.15	-	48.90	119.12	90.62
Utang Jangka Pendek			5,028.94	3,387.66		
Utang Belanja			5,686.23	2,394.50	34,618.21	
Pendapatan Diterima Dimuka			3.00	95.21	78.51	
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,995.44	5,098.06			8,104.73	41.96
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	2,004.46	5,098.21	5,739.52	5,926.26	42,920.56	115.11
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Jumlah Kewajiban Jk. Panjang						
JUMLAH KEWAJIBAN	2,004.46	5,098.21	5,739.52	5,926.26	42,920.56	115.11
EKUITAS			917,802.84	1,029,448.48		
JUMLAH EKUITAS	840,723.00	908,964.67	917,802.84	1,029,448.48	1,189,590.55	9.07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	842,727.46	914,062.89	923,542.36	1,035,374.75	1,232,511.11	9.97

Sumber: LKPD (Neraca) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017, diolah

Berdasarkan hasil Analisa keuangan daerah Kota Padang Panjang, maka dapat dijelaskan bahwa baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, namun semua rasio ini menunjukkan penurunan. Penurunan ini bukan berarti adanya penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban Kota Padang Panjang, tetapi lebih disebabkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapakan pada tahun 2013 dengan tahun 2017. Pada tahun 2013, perlakuan akuntansi masih menggunakan basis kas akrual dan tidak ada pengakuan hutang belanja. Tetapi, dengan pemberlakukan basis akrual dari tahun 2015, maka pada setiap akhir tahun harus diakui hutang-hutang belanja yang akan dilunasi pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2017 jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2013.

Rasio lancar mengalami penurunan dari 4.416,26% pada tahun 2013 menjadi 369,70 % pada tahun 2017. Sedangkan rasio quick turun dari 4.186,43% pada tahun 2013 menjadi 353,70% pada tahun 2017. Hal yang sama ditunjukkan oleh rasio kas; turun dari 4.062,10% pada tahun 2013 menjadi 305,04% pada tahun 2017. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar puluhan kali lipat, dan atau jumlah hutang yang sangat kecil sekali. Namun dari sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini kurang baik dari fungsi pemerintah sebagai penggerak pembangunan. Pada masa datang, saldo kas pada akhir tahun hanya sebatas kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin tahun berikut.

Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dana dan atau total aset, yaitu berkisar di bawah 1% saja pada tahun 2013 dan menjadi mendekati 4%. Artinya, hutang yang dimiliki Kota Padang Panjang hanya kurang dari 4% dari jumlah aset atau ekuitas. Dengan demikian, ke 4 (empat) rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota Padang Panjang yang sangat baik dalam melunasi seluruh hutangnya. Tabel berikut menyajikan rasio keuangan Kota Padang Panjang.

**Tabel 3.11
Rasio Keuangan Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan %
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rasio lancar (current ratio)	4,416.26	3,278.40	2,820.88	2,818.65	369.70	(46.21)

No	Uraian	Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan %
		2013	2014	2015	2016	2017	
2	Rasio quick (quick ratio)	4,186.43	3,181.60	2,710.27	2,704.96	353.70	(46.09)
3	Kas Rasio	4,062.10	2,956.18	2,608.87	2,509.10	305.04	(47.65)
4	Rasio total hutang terhadap total aset	0.24	0.56	0.62	0.57	3.48	95.61
5	Rasio hutang terhadap modal	0.24	0.56	0.63	0.58	3.61	97.23

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (diolah)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 - 2017

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah Kota Padang Panjang dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung memiliki delapan komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

**Tabel 3.12
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017**

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Proporsi Rata2
BELANJA TIDAK LANGSUNG	48,45%	43,79%	39,78%	36,02%	28,79%	39,37%
Belanja Pegawai	41,93%	41,84%	39,30%	35,41%	27,85%	37,27%
Belanja Hibah	2,77%	1,42%	0,12%	0,16%	0,70%	1,03%
Belanja Bantuan Sosial	0,87%	0,26%	0,02%	0,01%	0,03%	0,24%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	0,11%	0,09%	0,12%	0,08%	0,07%	0,09%
Belanja Tidak Terduga	2,77%	0,18%	0,22%	0,37%	0,13%	0,73%
BELANJA LANGSUNG	51,55%	56,21%	60,22%	63,98%	71,21%	60,63%
Belanja Pegawai	9,20%	3,61%	6,63%	2,11%	2,34%	4,78%
Belanja Barang dan Jasa	22,66%	27,57%	26,16%	25,85%	29,09%	26,27%
BELANJA MODAL	19,69%	25,02%	27,42%	36,03%	39,78%	29,59%

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Padang Panjang 2013-2017 menunjukkan bahwa dari

tahun ke tahun proporsi belanja langsung terhadap anggaran belanja memiliki proporsi lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Hingga tahun 2017 proporsi belanja tidak langsung menurun mencapai 28,79% dan belanja langsung terus meningkat hingga mencapai 71,21%. Sedangkan jika dilihat dari rata-ratanya, proporsi penggunaan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 39,37 % sedangkan belanja langsung mencapai 60,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2013-2017 secara umum belanja langsung berhubungan dengan program-program pembangunan, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik telah berada dalam kondisi yang optimal yang ditunjukkan dengan proporsi Belanja Langsung yang selalu diatas Proporsi Belanja Tidak Langsung. Sementara itu, pada komponen belanja tidak langsung proporsi terbesar digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar untuk belanja modal.

A. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selain gambaran mengenai belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung, perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Padang Panjang. Kebutuhan belanja aparatur meliputi Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi fluktuatif dimana proporsi tertinggi di tahun 2013 sebesar 50,08%, tahun 2014 turun menjadi 44,24 dan kembali naik di tahun 2015 sebesar 44,74%. Angka ini semakin menurun di setiap tahunnya hingga mencapai 30,19% pada Tahun Anggaran 2017.

**Tabel 3.13
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017**

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan Daerah)	%
2013	243.211.601.231,00	485.644.931.961,17	50,08%
2014	247.550.682.571,00	559.621.698.906,64	44,24%
2015	289.760.719.095,00	647.604.257.350,47	44,74%
2016	264.661.157.489,00	708.883.834.833,89	37,33%
2017	228.133.060.459,39	755.647.398.631,39	30,19%

Sumber : LKPD (Neraca) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 (diolah)

B. Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, perlu diketahui juga bagaimana gambaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Pengeluaran wajib dan mengikat mencakup pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Tabel berikut adalah rincian pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017:

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

Urusan	Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tidak Langsung	189.739.499.597,68	204.147.920.436,00	215.191.459.404,00	233.680.827.498,00	192.634.964.792,00
Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	186.229.468.354,00	203.655.166.724,00	214.697.804.190,00	233.177.663.249,00	192.156.856.414,00
Belanja Bantuan Keuangan	449.641.143,68	492.753.712,00	493.655.214,00	503.164.249,00	478.108.378,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	3.060.390.100,00	-	-	-	-
Belanja Langsung	18.057.743.014,30	52.428.747.610,00	64.995.756.810,00	73.545.936.089,26	71.244.096.531,80
Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.	18.057.743.014,30	52.428.747.610,00	64.995.756.810,00	73.545.936.089,26	71.244.096.531,80
Total	207.797.242.611,98	256.576.668.046,00	280.187.216.214,00	307.226.763.587,26	263.879.061.323,80

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Anggaran					Rata2 Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	186.679.109.497,68	204.147.920.436,00	215.191.459.404,00	233.680.827.498,00	192.634.964.792,00	1,45%
	Belanja Gaji, Tunjangan dan termasuk (Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH)	186.229.468.354,00	203.655.166.724,00	214.697.804.190,00	233.177.663.249,00	192.156.856.414,00	1,45%
	Belanja Bantuan Keuangan	449.641.143,68	492.753.712,00	493.655.214,00	503.164.249,00	478.108.378,00	1,68%
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
B	BELANJA LANGSUNG	18.057.743.014,30	52.428.747.610,00	64.995.756.810,00	73.545.936.089,26	71.244.096.531,80	56,08%
	Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan	18.057.743.014,30	52.428.747.610,00	64.995.756.810,00	73.545.936.089,26	71.244.096.531,80	56,08%
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.007.000.000,00		15.800.000.000,00	3.400.000.000,00		-44,62%
	Penyertaan Modal	10.007.000.000,00	-	15.800.000.000,00	3.400.000.000,00	-	-44,62%
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	214.743.852.511,98	256.576.668.046,00	295.987.216.214,00	310.626.763.587,26	263.879.061.323,80	6,18%

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang 2013-2017 (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Padang Panjang ditinjau berdasarkan surplus atau pun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Kondisi keuangan daerah Kota Padang Panjang pada periode 2013 – 2017 mengalami dua kali surplus riill dan tiga kali defisit riil berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan defisit anggaran terjadi pada tahun 2015-2017. Pada tahun 2013, terdapat surplus anggaran sebesar 13.824 miliar rupiah, kemudian surplus meningkat menjadi 68.663 miliar rupiah pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi defisit anggaran yang sebesar 2.089 miliar rupiah. Kemudian naik sedikit menjadi 2.324 miliar rupiah tahun 2016 dan kembali naik menjadi 17.045 miliar rupiah tahun 2017.

Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit di Kota Padang Panjang tahun 2013-2017. Dan komposisi penutup defisit riil yang terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

Tabel 3.16
Defisit Rill Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Realisasi Pendapatan Daerah	417.015.118.681,83	475.280.788.657,33	505.170.035.889,81	549.936.359.823,02	591.062.889.679,67
Dikurangi Realisasi Belanja :						
1	Realisasi Belanja Daerah	393.183.728.547,36	406.617.041.960,00	491.459.794.814,00	548.861.092.707,41	608.108.212.415,99
2	Realisasi Pengeluaran Pembentukan Modal	10.007.000.000,00	-	15.800.000.000,00	3.400.000.000,00	-
B	Surplus/ Defisit rill	13.824.390.134,47	68.663.746.697,33	(2.089.758.924,19)	(2.324.732.884,39)	(17.045.322.736,32)

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.17
Komposisi Penutup Defisit Rill Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	67.577.692.601,17	81.402.082.735,64	150.065.829.432,97	147.976.070.508,78	145.651.337.624,39
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
C	Total Realisasi Penerimaan Pembentukan Modal	67.577.692.601,17	81.402.082.735,64	150.065.829.432,97	147.976.070.508,78	145.651.337.624,39
	Sisa lebih pembentukan anggaran tahun berkenaan (A-B) + C	81.402.082.735,64	150.065.829.432,97	147.976.070.508,78	145.651.337.624,39	128.606.014.888,07

Sumber : LKPD Kota Padang Panjang 2013-2017 (diolah)

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 9,11%, dengan rincian pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,95%, Dana Perimbangan rata-rata sebesar 6,93% dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah rata-rata sebesar -22,21%.

Berdasarkan pertumbuhan rata-rata penerimaan pendapatan daerah 2013 sampai dengan 2017, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan di Kota Padang Panjang maka penerimaan pendapatan daerah tahun 2019-2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,62% per tahunnya. Pendapatan Asli Daerah akan meningkat kondisinya dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 10,26% per tahun. Dana Perimbangan juga akan terus meningkat kondisinya dengan rata-rata pertumbuhan 4,84% per tahun dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah yang diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,21% per tahun.

Sementara itu, jika dilihat dari masing-masing komponen untuk jenis komponen Pendapatan Asli Daerah, diprediksikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah diprediksi mengalami peningkatan dengan rata-rata masing-masingnya sebesar 10,26% per tahun. Untuk jenis komponen Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak diprediksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,56% per tahun. Dana Alokasi Umum akan meningkat rata-rata sebesar 5% per tahun dan Dana Alokasi Khusus diasumsikan akan meningkat rata-rata sebesar 5,97% per tahun. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan DAU, maka proyeksi DAU yang ditetapkan dalam RPJMD ini bersifat dinamis, serta mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan penerimaan dalam negeri neto.

Pos Dana Insentif Daerah tahun 2019 dianggarkan Rp.34.482.183.000,- karena predikat WTP yang diperoleh di tahun 2017 dan berbagai komponen perhitungan DID, dan pada tahun 2020 sampai dengan 2023 diasumsikan DID tetap sama dengan tahun 2019. Selanjutnya untuk pendapatan Hibah dari pos Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diasumsikan sama.

B. Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai belanja langsung atau belanja program untuk RPJMD. Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2013-2017, prioritas pembangunan serta proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut kebijakan terkait dengan Belanja daerah Kota Padang Panjang :

- 1) Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 rata-rata akan meningkat sebesar 4,68% per tahun, dengan rincian pertumbuhan Belanja tidak langsung rata-rata sebesar 1,74% per tahun dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 6,60% per tahun.
- 2) Prosentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah rata-rata 60,92%, sehingga porsi belanja langsung selalu lebih besar dari belanja tidak langsung.
- 3) Dana BOS tercatat dalam kerangka belanja langsung, walaupun berupa anggaran *in & out*.
- 4) Belanja Langsung menjadi prioritas utama pembangunan yang meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan

Analisis proyeksi belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Hasil proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat Kota Padang Panjang tahun 2019-2023 dapat terlihat pada tabel berikut.

- 1) Pertumbuhan belanja tidak langsung diproyeksikan sebagai berikut:
 - Besaran belanja pegawai dirata-rata diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 1,77% per tahun
 - Belanja hibah diasumsikan sama per tahun
 - Belanja bantuan sosial diprediksi naik 10% per tahun

- Belanja bantuan keuangan sampai dengan tahun 2023 diperkirakan sama per tahunnya.
- 2) Belanja langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus dilaksanakan diperkirakan sebesar rata-rata 22,47% per tahun.
- 3) Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat dan prioritas utama diproyeksikan pertumbuhannya rata-rata 9,33% per tahun.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, yakni:

- 1) Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
- 2) Asumsi indikator makro ekonomi
- 3) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan potensi penerimaan pendapatan.

D. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pada pembiayaan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023, penerimaan pembiayaan pada penggunaan Silpa diperkirakan diasumsikan maksimal 6 % dari total belanja daerah. Sadangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal untuk mendukung serta pembentukan perusahaan daerah yang nantinya akan bergerak dibeberapa bidang usaha.

Berikut digambarkan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Tabel 3.18
Proyeksi APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023

Rek	Uraian	Rata2 Pertumbuhan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.	PENDAPATAN	5.62%	573,797,764,728	619,867,811,922	656,096,872,131	692,071,940,167	730,457,775,747	771,435,700,902
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.26%	84,612,013,881	94,981,535,405	104,726,640,936	115,471,594,295	127,318,979,873	140,381,907,208
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	10.26%	8,078,000,000	8,330,000,000	9,184,658,000	10,127,003,910	11,166,034,512	12,311,669,653
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	10.26%	5,103,577,000	5,336,577,000	5,884,109,800	6,487,819,465	7,153,469,743	7,887,415,739
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.26%	5,795,081,205	5,795,081,205	6,389,656,536	7,045,235,297	7,768,076,439	8,565,081,081
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	10.26%	65,635,355,676	75,519,877,200	83,268,216,600	91,811,535,623	101,231,399,179	111,617,740,735
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.84%	462,540,835,517	499,182,265,000	523,396,171,145	548,626,285,822	575,164,735,824	603,079,733,644
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	6.56%	11,542,013,517	10,262,734,000	11,116,302,294	11,779,945,541	12,483,208,290	13,228,455,825
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.00%	375,436,356,000	388,615,652,000	408,046,434,600	428,448,756,330	449,871,194,147	472,364,753,854
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.97%	67,562,466,000	65,821,696,000	69,751,251,251	73,915,400,951	78,328,150,388	83,004,340,966
4.2.4.	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00%	8,000,000,000	34,482,183,000	34,482,183,000	34,482,183,000	34,482,183,000	34,482,183,000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.21%	26,644,915,330	25,704,011,517	27,974,060,050	27,974,060,050	27,974,060,050	27,974,060,050
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0.00%	7,480,000,000	7,480,000,000	7,480,000,000	7,480,000,000	7,480,000,000	7,480,000,000
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.46%	19,164,915,330	18,224,011,517	20,494,060,050	20,494,060,050	20,494,060,050	20,494,060,050
4.9	JUMLAH PENDAPATAN	5.62%	573,797,764,728	619,867,811,922	656,096,872,131	692,071,940,167	730,457,775,747	771,435,700,902
5.	BELANJA	4.68%	702,403,779,616	682,367,811,922	694,996,872,131	734,771,940,167	777,057,775,747	820,635,700,902
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.74%	285,470,750,453	281,992,967,924	277,977,469,698	286,308,742,340	294,816,835,139	302,006,772,431
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.77%	263,493,335,847	271,169,147,924	269,030,457,698	276,781,219,140	283,700,749,619	290,793,268,359
5.1.4.	Belanja Hibah	0.15%	19,764,549,300	8,531,900,000	6,581,900,000	7,081,900,000	8,581,900,000	8,581,900,000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.00%	659,754,000	731,920,000	805,112,000	885,623,200	974,185,520	1,071,604,072

Rek	Uraian	Rata2 Pertumbuhan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	0.00%	553,111,306	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	0.00%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.60%	416,933,029,163	400,374,843,998	417,019,402,433	448,463,197,827	482,240,940,608	518,628,928,471
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.50%	4,684,920,750	6,879,351,500	7,051,335,288	7,227,618,670	7,408,309,136	7,593,516,865
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.38%	264,727,707,959	271,616,286,874	270,968,692,720	294,281,191,124	319,421,076,322	346,908,271,426
5.2.3.	Belanja Modal	7.45%	147,520,400,453	121,879,205,624	138,999,374,426	146,954,388,033	155,411,555,149	164,127,140,180
5.8	JUMLAH BELANJA	4.68%	702,403,779,616	682,367,811,922	694,996,872,131	734,771,940,167	777,057,775,747	820,635,700,902
5.9	SURPLUS/(DEFISIT)	-4.50%	(128,606,014,888)	(62,500,000,000)	(38,900,000,000)	(42,700,000,000)	(46,600,000,000)	(49,200,000,000)
6.	PEMBIAYAAN	-4.12%	128,606,014,888	62,500,000,000	38,900,000,000	42,700,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-4.12%	128,606,014,888	62,500,000,000	41,900,000,000	44,200,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	-4.12%	128,606,014,888	62,500,000,000	41,900,000,000	44,200,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
6.29	JUMLAH PENGELOUARAN PEMBIAYAAN		0	0	3,000,000,000	1,500,000,000	0	0
6.299	PEMBIAYAAN NETO	-4.12%	128,606,014,888	62,500,000,000	38,900,000,000	42,700,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0	0	0	0	0	0

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang sebagaimana tabel 3.19.

Berdasarkan proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Padang Panjang menunjukkan angka yang fluktuatif, dan angka tahun 2019 sampai dengan 2023 yang semakin meningkat menandakan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah.

Tabel 3.19
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Realisasi 2017	Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan pendapatan	591,062,889,680	573,797,764,728	619,867,811,922	656,096,872,131	692,071,940,167	730,457,775,747	771,435,700,902
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA)	145,651,337,624	128,606,014,888	62,500,000,000	41,900,000,000	44,200,000,000	46,600,000,000	49,200,000,000
Pengeluaran Pembiayaan				3,000,000,000	1,500,000,000		
Total Penerimaan	736,714,227,304	702,403,779,616	682,367,811,922	694,996,872,131	734,771,940,167	777,057,775,747	820,635,700,902
Dikurangi							
Belanja Tidak Langsung	197,210,153,892	285,470,750,453	281,992,967,924	277,977,469,698	286,308,742,340	294,816,835,139	302,006,772,431
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	3,000,000,000	1,500,000,000	-	-
Kapasitas riil kemampuan keuangan	539,504,073,412	416,933,029,163	400,374,843,998	414,019,402,433	446,963,197,827	482,240,940,608	518,628,928,471

Dari total alokasi pagu indikatif yang tersedia, selanjutnya dialokasikan ke berbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program dan kegiatan dikelompokkan atas 3 prioritas, yakni prioritas I, prioritas II dan prioritas III. Prioritas I merupakan program/ kegiatan pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang dilaksanakan melalui beberapa program unggulan, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10%. Program prioritas I merupakan program dan kegiatan yang memberikan dampak luas pada masyarakat serta memberikan daya ungkit yang tinggi untuk capaian visi/misi daerah, serta juga diperuntukkan untuk prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan yang berdampak luas pada masing-masing segementasi public yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Uraian		2019		2020		2021		2022		2023	
Belanja Prioritas I	34.36	234,466,047,675		43.15	299,872,850,544	44.26	325,235,245,519	44.04	342,199,829,409	45.70	375,070,071,801
Belanja Daerah untuk Membayai program pembangunan		234,466,047,675			299,872,850,544		325,235,245,519		342,199,829,409		375,070,071,801
Belanja Prioritas II	24.31	165,908,796,323		16.86	117,146,551,889	16.77	123,227,952,308	18.02	140,041,111,199	17.49	143,558,856,671
Belanja Langsung OPD		165,908,796,323			117,146,551,889		123,227,952,308		140,041,111,199		143,558,856,671
Belanja Prioritas III	41.33	281,992,967,924		40.00	277,977,469,698	38.97	286,308,742,340	37.94	294,816,835,139	36.80	302,006,772,431
Belanja Pegawai		271,169,147,924			269,030,457,698		276,781,219,140		283,700,749,619		290,793,268,359
Belanja Hibah		8,531,900,000			6,581,900,000		7,081,900,000		8,581,900,000		8,581,900,000
Belanja Bantuan Sosial		731,920,000			805,112,000		885,623,200		974,185,520		1,071,604,072
Belanja Bantuan Keuangan		560,000,000			560,000,000		560,000,000		560,000,000		560,000,000
Belanja Tidak Terduga		1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000
Belanja Daerah	100.00	682,367,811,922		100.00	694,996,872,131	100.00	734,771,940,167	100.00	777,057,775,747	100.00	820,635,700,902

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh suatu daerah tidak terlepas dari kondisi dan potensi sumber daya yang ada di daerah serta hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dilakukan untuk menentukan isu-isu strategis yang relevan sebagai acuan untuk menentukan program prioritas pembangunan daerah yang tepat, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan pada dasarnya disebabkan oleh terjadinya perbedaan atau kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang telah direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi yang ada saat ini.

Program prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis. Berkaitan dengan hal itu, maka identifikasi dan rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis sangat memperhatikan cakupan efek dari masalah, intensitas kemunculan masalah dalam masyarakat dari efek beruntun yang berpengaruh pada kinerja sektor lain, dan adanya kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan tapi menimbulkan dampak negatif pada pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang.

4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Padang Panjang

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Permasalahan utama pembangunan Kota Padang Panjang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

a. Belum optimal dan stabilnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Hal ini terbukti dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dan malahan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dibawah 6% tiap tahun. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Disamping itu masalah pemerataan pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka Gini Ratio ternyata angkanya juga berfluktuasi, namun pada tahun 2017 angkanya sudah relatif rendah yakni 0,30. Angka gini rasio yang sudah rendah ini perlu dipertahankan secara berkelanjutan dimasa mendatang.

Tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi dan cenderung relatif menurun disebabkan karena masih rendahnya kontribusi sektor unggulan daerah seperti sektor perdagangan, sektor industri, sektor pariwisata dan sektor pertanian.

Adapun akar permasalahan belum optimalnya kontribusi sektor unggulan daerah di Kota Padang Panjang antara lain:

1) Permasalahan Pengembangan Pasar dan Kawasan Perdagangan.

Kondisi Pasar Pusat yang telah dibangun dan telah beroperasi tentunya belum berjalan dengan optimal karena masih ada sarana prasarana yang perlu dilengkapi agar tercapai pasar yang ber SNI sehingga dapat dwujudkan kondisi pasar yang sehat dan nyaman buat masyarakat untuk melakukan aktifitas perdagangan. Selain itu pasar ini juga perlu dikelola dengan profesional sehingga kondisi pasar dapat lebih representative. Untuk mewujudkan pasar sehat juga perlu dilakukan penertiban dan penataan disekitar lingkungan pasar. Kondisi saat ini kondisi pasar masih belum tertata dengan baik.

Selain dari pasar pusat, Kota Padang Panjang juga memiliki Pasar Induk hasil pertanian Bukit Surungan. Permasalahan utama di pasar ini adalah belum adanya kejelasan mengenai pengelolaan pasar tersebut. Disamping itu lahan untuk bongkar muat barang yang menjadi syarat utama bagi sebuah pasar induk masih sangat terbatas, areal bagi pedagang kaki lima atau pedagang musiman/petani yang menggelar hasil panennya masih minum dan belum tertata rapi sehingga kesan semrawut masih dominan.

2) Permasalahan dalam Pengembangan Kepariwisataan

Kota Padang Panjang memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi. Namun belum semua tergarap dengan baik, di antaranya

adalah Mesjid Asasi di Sigando sebagai objek wisata agama serta beberapa pesantren ternama yang memiliki historis sebagai tempat mendidik para pejuang dan ulama, kawasan SMA Super Unggul sebagai objek pendidikan. Pemandian Lubuk Mata Kucing memiliki sumber air jernih. Namun semua itu belum terkelola secara optimal sebagai objek-objek yang bernilai kepariwisataan. Peluang untuk menumbuhkan dan membangun objek wisata baru perlu terus dilakukan, sepanjang hal itu memungkinkan dan peluangnya terbuka luas. Sekecil apapun peluang, untuk lokasi-lokasi yang bernilai wisata, perlu dilakukan sentuhan program pembangunan kepariwisataan, supaya lokasi tersebut bernilai dan layak untuk dijadikan sebagai objek wisata.

Beberapa lokasi yang memungkinkan diantaranya kawasan sungai andok, yang saat ini menjadi tempat pembuangan sampah akhir. Di pinggang bukit di kawasan tersebut terdapat Goa Batu Batirai, yang sudah memiliki masterplan, namun belum dibangun sebagai objek wisata yang pantas dikunjungi. Termasuk juga pengembangan dan pembangunan objek wisata air terjun tujuh tingkat di Kelurahan Silaing Bawah yang bisa dicapai dari gerbang kota.

Permasalahan lainnya terkait dengan pengembangan pariwisata di Kota Padang Panjang adalah permasalahan promosi yang belum optimal, sehingga belum sepenuhnya pariwisata Padang Panjang dikenal dan menjadi tujuan wisata.

3) Permasalahan dalam Pengembangan Pertanian

Mengelola usaha di bidang pertanian merupakan kegiatan yang cukup dominan dilakukan oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Kondisi yang ada saat ini adalah tingginya tingkat kebutuhan akan lahan pertanian, sementara areal yang layak untuk diolah sangat terbatas. Setiap tahun luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Diperkirakan lahan pertanian mengalami penyusutan rata-rata sebesar 6,6 Ha setiap tahun. Lahan sawah yang tersisa berkisar pada angka 630 Ha (BPS). Sebagian besar diantaranya berada di Kecamatan Padang Panjang Timur. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Barat, keberadaan lahan pertanian terutama sawah mulai hilang. Perubahan fungsi lahan ini, hendaknya menjadi pemikiran untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian yang bernilai ekonomi tinggi, seperti pertanian organik untuk beberapa produk pangan

atau palawija, pengembangan tanaman hias, atau jenis-jenis lain yang memang secara ekonomi akan menguntungkan bagi petani.

Selain pertanian salah satu potensi untuk dikembangkan di Kota Padang Panjang, adalah usaha peternakan yang memang sudah banyak digeluti masyarakat. Diantaranya usaha peternakan sapi perah, dengan produk ikutan susu segar dan produk hilir berbagai produk yang dihasilkan dari susu sapi. Kemudian peternakan itik, perlu digalakkan untuk menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga-keluarga miskin. Sedangkan untuk usaha peternakan kambing, memang butuh penanganan khusus, karena perlu strategi yang pas bila ingin hasilnya maksimal. Namun saat ini keberadaan usaha peternakan di Kota Padang Panjang masih belum Nampak geliatnya dan belum unggul untuk kawasan Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pengelolaan peternakan sapi perah ini belum optimal.

4) Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Bidang Industri

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional seharusnya dapat menjadi rujukan terhadap berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan dunia usaha. Terlebih bagi para anggotanya yang mendukung keberadaan koperasi, sehingga berbagai masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha setidaknya dapat diakomodir oleh koperasi.

Untuk saat ini keberadaan koperasi di Kota Padang Panjang masih belum berani melakukan ekspansi usaha di luar bidang usaha yang digelutinya. Padahal peluang untuk menambah unit-unit usaha baru terbuka luas. Keberadaan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional sangat jelas yakni untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan beberapa dorongan, penguatan permodalan, maupun perluasan kesempatan usaha bagi koperasi agar mampu berkembang dengan baik. Koperasi yang harus dikembangkan di Kotas Padang Panjang adalah koperasi syariah. Namun saat ini sebagian dari koperasi belum berpola syariah.

Sedangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang juga merupakan salah satu tugas pokok pemerintah untuk melakukan pembinaan. Keberadaan industri di Kota Padang Panjang juga belum optimal hasilnya, ada beberapa potensi industri yang perlu dikembangkan antara lain industry pengolahan susu, industri kulit yang pengembangannya belum dilakukan secara optimal sehingga belum begitu berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Berikut

permasalahan dibidang UMKM, Koperasi dan Industri antara lain : rendahnya tingkat penguasaan teknologi, keterbatasan jangkauan pemasaran produk, keterbatasan akses permodalan, kurang optimalnya pengembangan industri kulit yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Padang Panjang, namun saat ini pengembangan sektor ini belum optimal.

b. Belum optimal upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama periode 2013-2017.

Meskipun angka kemiskinan sudah berada dibawah angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat, akan tetapi dilihat dari akselerasi penurunan angka kemiskinan Kota Padang Panjang ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan akselerasi penurunan angka kemiskinan di beberapa Kota di Sumatera Barat. Selanjutnya bila diperhatikan angka pengangguran di Kota Padang Panjang ternyata juga berfluktuasi dimana angkanya secara rata-rata juga masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran di beberapa Kota di Sumbar. Kenyataan ini menurut informasi dari BPS Kota Padang Panjang, tingkat pengangguran tersebut adalah tingkat pengangguran terdidik dimana mereka cenderung untuk memilih lapangan pekerjaan.

c. Belum optimalnya kualitas layanan dan pemerataan pendidikan serta kesehatan.

Meskipun Kota Padang Panjang sudah sejak lama dijuluki sebagai kota pendidikan dan angka Wajar Sembilan Tahun sudah dapat dipenuhi, akan tetapi permasalahan pokok pada urusan pendidikan adalah belum meratanya kualitas pendidikan dan belum terpenuhinya kebutuhan dunia kerja. Belum maksimalnya pemerataan pendidikan disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat untuk masuk sekolah dengan kualitas bagus dan berlokasi di pusat kota, sedangkan di sisi lain masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan siswa terutama sekolah swasta dan sekolah yang berada di lingkup Kementerian Agama.

Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan diperlukan tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga untuk pendidikan swasta terutama pendidikan swasta agama, sehingga pelayanan pendidikan terlihat tidak diskriminatif. Di samping itu program pembangunan urusan pendidikan selama periode RPJMD sebelumnya ternyata belum sepenuhnya dapat membentengi moral siswa, serta belum mampu memunculkan jiwa kewirausahaan terhadap peserta

didik. Hal ini terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi perkelahian antar siswa serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan pada tamatan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tersebut.

Upaya pembangunan pendidikan melalui wajar 12 tahun sudah dimulai lima tahun yang lalu dan upaya ini harus terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang meskipun saat ini kewenangan untuk pendidikan tingkat SMA berada di Propinsi. Permasalahan yang diidentifikasi di urusan pendidikan adalah belum meratanya kualitas lulusan pendidikan serta lulusan pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja).

Adapun akar permasalahan belum optimalnya kualitas layanan dan pemerataan pendidikan di Kota Padang Panjang antara lain:

- 1) Masih relatif rendahnya kelayakan sarana dan prasarana terutama baik itu di tingkat SD maupun SD, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, sarana olah raga dan laboratorium yang belum mencapai 100%.
- 2) Masih ada anak usia 2-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini, hal ini dapat dilihat dari APK dan APM Paud yang belum mencapai 100%

Sementara itu kualitas layanan kesehatan juga perlu lebih dioptimalkan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya personil baik dari kuantitas maupun kualitas layanan kesehatan. Selanjutnya masalah kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat selama ini dianggap capaiannya belum optimal. Terkait dengan target SDGs untuk Kota Padang Panjang pada urusan kesehatan terutama terkait dengan angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi/angka balita kurang gizi dan penyakit menular pada umumnya sudah mencapai angka yang relatif rendah di Kota Padang Panjang dibanding daerah lain di Indonesia. Namun tetap harus menjadi perhatian ke depan untuk dapat semaksimal mungkin. Permasalahan lainnya bidang kesehatan ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya olahraga. Hal ini disebabkan karena belum adanya kualitas infrastruktur olah raga yang representative. Adapun akar permasalahan belum optimalnya kualitas layanan dan pemerataan kesehatan di Kota Padang Panjang antara lain:

- 1) relatif rendahnya kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat.
 - 2) Masih adanya “*stunting*” (balita pendek) dan balita kurang gizi, dimana pada tahun 2015 angka *stunting* di Kota Padang Panjang sebesar 16,9%, tahun 2016 sebesar 15,6% dan tahun 2017 sebesar 19,6%.
 - 3) Cakupan *Universal Coverage Immunisation* (UCI) belum optimal.
 - 4) Belum optimalnya sarana prasarana kesehatan, hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah sakit yang keberadaanya belum sesuai dengan masterplan yang telah disusun.
- d. Belum optimalnya Penyelenggaraan tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.**

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability, transparency, predictability, and participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang yang belum optimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) yang dalam beberapa tahun terakhir masih memperoleh predikat CC.

- e. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat dan Sosial Budaya.**

Terkait dengan masalah aspek peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat dan sosial budaya ada beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran beragama untuk menjaga kelangsungan dan kualitas masyarakat Kota Padang Panjang sebagai masyarakat kota Serambi Mekkah.
- 2) Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan budaya dalam mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan nilai sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi pergeseran dan perubahan yang berdampak negatif terhadap kondisi social budaya masyarakat yang bercirikan ABS-SBK.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan seni dan budaya serta aset daerah untuk mendukung pembangunan khususnya dalam pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata daerah.

f. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan maka permasalahan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian, dengan semakin pesatnya pembangunan tentunya akan berdampak kepada kualitas lingkungan hidup, ada beberapa hal permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang antara lain masih tingginya pencemaran air sungai. Indeks kualitas air kota Padang Panjang pada tahun 2017 menunjukkan angka 44,04. Angka ini menunjukkan kualitas air yang rendah disebabkan oleh pencemaran yang cukup. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain debit air sungai yang relatif kecil sementara material pencemar relatif tinggi dan beragam. Sumber pencemar yang cukup dominan antara lain limbah domestik, perdagangan, industri dan pertanian.

Permasalahan lainnya terkait lingkungan hidup adalah keterbatasan daya tampung TPA sampah. TPA Sampah Sungai Andok yang digunakan saat ini secara teknis telah melewati umur pakai. Namun, karena adanya program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih bisa digunakan. Kedepannya perlu disiapkan lahan TPA baru sebagai pengganti TPA Sungai Andok. Permasalahan utama dari permasalahan lingkungan hidup ini adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Tingkat partisipasi masyarakat dan pengelolaan lingkungan dapat dilihat dari berbagai hal, diantaranya dalam pengurangan sampah dari sumbernya, penyediaan ruang terbuka hijau jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan perizinan lingkungan,

penyediaan sarana pengelahan limbah domestik dan sebagainya. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong juga dirasakan semakin berkurang. Disamping itu Indeks Kualitas Air (IKA) yang masih rendah (sebesar 44,02) juga dapat menjadi indikasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber air terutama sungai.

g. Belum Optimalnya Pembangunan Tata Ruang Dan Penyediaan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Kondisi saat ini sebagian infrastuktur kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang belum menyentuh seluruh warga kota, tempat parkir yang sangat terbatas seeperti di pasar pusat, terminal yang belum berfungsi dengan baik, sistem drainase yang tidak baik sehingga sebagian wilayah kota Padang Panjang tergenang air jika terjadi hujan yang cukup lama, sistem air limbah kota yang belum terpadu. Permasalahan lainnya terkait infrastruktur kota juga belum adanya strandarisasi dari infrastruktur, seperti trotoar yang tidak standar dan tidak ramah disabilitas dan lansia.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

g. Daerah Rawan Bencana

Sebagaimana telah diuraikan pada kondisi umum daerah bahwa berdasarkan hasil kajian resiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang, maka potensi bencana alam di Kota

Padang Panjang terdiri dari bencana gempa bumi dengan kerentanan resiko bahaya gempa bumi mulai dari rendah sampai sangat tinggi, selain itu Padang Panjang juga rentan terhadap bencana letusan gunung api dimana Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8–14Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Selain itu Padsang Panjang juga rentan terjadi Bencana Longsor (Gerakan Tanah). Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan >40%.

4.2 Isu Strategis Pembangunan

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

4.2.1 Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbaharui yang merupakan bahan bakar untuk energi. Isu strategis tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kota Padang Panjang antara lain : pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global

warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu *Milenium Development Goals (MDG's)*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 meluncurkan *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang merupakan agenda global yang melanjutkan *MDGs*. SDGs tidak terpisah dari *MDGs* dan merupakan penyempurnaan dari *MDGs*. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (*SDGs*). Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan *SDGs* tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
- 10) Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;

- 11) Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju. Rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik.

4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

a. Telaahan RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kota Padang Panjang pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat periodesasi RPJMD Kota Padang Panjang mengikuti periode RPJMN III, maka arah kebijakan RPJMD Kota Padang Panjang menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015- 2019) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019).

Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN tahap III, ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjadinya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihannya untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan

secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kota Padang Panjang harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- 1) Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
- 2) Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjadinya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- 3) Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
- 4) Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

b. Telaahan Visi dan Misi RPJMN 2015- 2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima

tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gorong Royong.

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; serta
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa- bangsa Asia lainnya;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar

yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan.

Mengingat saat ini RPJMN tahun 2014-2019 hampir berakhir maka dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Padang Panjang juga memperhatikan RPJMN Teknokratik tahun 2020-2025. Dalam RPJMN teknokratik telah dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan antara lain:

Arah Kebijakan Pembangunan Manusia :

- 1) Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi :

- 1) Pangan dan Pertanian
- 2) Energi, Mineral, dan Pertambangan
- 3) Kelautan dan Kemaritiman
- 4) Pariwisata
- 5) Ekonomi Kreatif dan Digital
- 6) Industri Manufaktur

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur :

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar Infrastruktur
- 2) Dukungan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

Arah Kebijakan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan :

- 1) Penguatan Implementasi Doktrin Poros Maritim Dunia yang lebih berorientasi keluar, seperti aktif dalam kerjasama negara-negara pesisir Samudera Hindia (IORA)
- 2) Penguatan Kepemimpinan pada forum internasional dan regional
- 3) Mengoptimalkan Peran Indonesia di Dewan HAM PBB dan di Dewan Keamanan PBB
- 4) Penguatan kapasitas mengantisipasi ancaman perang terbuka, narkoba, terorisme, dan bencana alam
- 5) Memperkuat aktualisasi ideologi negara
- 6) Penguatan kapasitas keamanan dalam negeri, termasuk pengamanan perbatasan antar negara

- 7) Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, dan penguatan desentralisasi
- 8) Penguatan peran serta *stakeholders* dalam kebijakan, perluasan kemitraan pembangunan (Prinsip *No One Left Behind*), dan peningkatan profesionalitas dan netralitas ASN
- 9) Penguatan penegakan hukum dengan mengoptimalkan *restorative justice*
- 10) Penguatan kapasitas pencegahan korupsi melalui penguatan pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan :

- 1) Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
- 3) Peningkatan konektivitas antar-wilayah
- 4) Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN)
- 5) Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)
- 6) Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal
- 7) Peningkatan inovasi pemerintahan daerah
- 8) Peningkatan kemudahan perizinan
- 9) Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM
- 10) Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah
- 11) Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan
- 12) Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah

4.2.3 Isu atau Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang dengan RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatra Barat. Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

- e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Adapun isu strategis pembangunan daerah RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama
- 2) Penanganan Bencana alam
- 3) Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah.

- 4) Penguatan struktur ekonomi daerah.
- 5) Penguatan infrastruktur
- 6) Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 8) Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi
- 9) Peningkatan ketahanan pangan
- 10) Pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman
- 11) Pengurangan pengangguran
- 12) Globalisasi dan peningkatan daya saing daerah
- 13) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

4.2.4 Hasil Telaahan RPJMD terhadap RTRW

Kajian RTRW terdiri dari kajian struktur ruang dan pola ruang yang bermuara pada indikasi program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait. Secara umum seluruh indikasi program yang sudah dirumuskan dalam RTRW Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 sudah diakomodir dalam Indikasi program RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023, baik secara langsung maupun yang tertuang dalam renstra OPD 2018-2023 sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1
Telaahan RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032**

No	Indikasi Program RTRW	Indikasi Program RPJMD
1	TATA BATAS KOTA	Program Penataan Daerah Otonomi Baru (Renstra Setdako)
2	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KOTA	
a	Perwujudan sistem pusat pelayanan: Penyusunan RDTR	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
b	Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi :	
	✓ Pengembangan Jaringan Jalan : - Jalan Lingkar Barat - Jalan Lingkar Selatan	Program Peningkatan struktur dan kapasitas Jalan : - Jalan Lingkar Selatan
	✓ Pengembangan sistem terminal	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ : Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (Renstra Dinas Perhubungan)
	✓ Pengembangan sarana & prasarana angkutan umum	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (Renstra Dinas Perhubungan)
	✓ Pengembangan Sistem Perparkiran	Program Pembangunan sarana dan prasarana publik : Pembangunan Gedung Parkir Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (Renstra Dinas Perhubungan)

No	Indikasi Program RTRW	Indikasi Program RPJMD
c	Sistem jaringan sumber daya air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya
d	Perwujudan infrastruktur perkotaan:	
	✓ Air Bersih & Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	✓ Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan
	✓ Drainase	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Renstra Dinas PUPR) Pembangunan drainase lingkungan permukiman (Renstra Dinas Perkim LH)
	✓ Pedestrian	Program Pembangunan trotoar : Pedestrian Ramah disabilitas
	✓ Jalur evakuasi bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam (Renstra BPBD)
	✓ Bencana Kebakaran : Penyusunan RISPK	Program Pencegahan Dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (Renstra BPBD) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Renstra Pol PP Damkar)
2	PERWUJUDAN POLA RUANG KOTA	
a	Perwujudan kawasan lindung : ✓ Kawasan Rawan Longsor	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	✓ Kawasan Perlindungan Setempat : Sempadan sungai, sempadan rel kereta, sempadan SUTT	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	✓ RTH	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
b	Perwujudan kawasan budidaya:	
	✓ Penataan kawasan perumahan baru, Penataan lingkungan perumahan kumuh dan Peningkatan lingkungan perumahan	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman
	✓ Pembangunan, revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan perdagangan dan jasa	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	✓ Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi kawasan perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	✓ Pengembangan, revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan industri	Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
	✓ Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi kawasan Pendidikan	Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan
	✓ Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi kawasan peribadatan	Program koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, Sosial dan budaya
	✓ Intensifikasi kawasan persawahan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Indikasi Program RTRW	Indikasi Program RPJMD
	✓ Intensifikasi kawasan peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	✓ Intensifikasi kawasan perkebunan	Perogram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Renstra Dinas Pangan Pertanian)
	✓ Intensifikasi kawasan perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	✓ Pengembangan ruang terbuka non hijau (pedestrian, plaza, kolam, dll)	Program Pembangunan sarana dan prasarana publik
	✓ Penetapan dan sosialisasi ruang evakuasi bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam (Renstra BPBD)
	✓ Penetapan dan pengelolaan ruang sektor informal	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA	
	Penyusunan RDTR Kawasan Strategis	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rincian kegiatan berdasarkan program-program dimaksud akan dijabarkan detail dalam Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

4.2.5 Hasil telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”.

Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang sudah mengakomodir hasil analisa dan rekomendasi KLHS mulai dari penyusunan isu strategis sampai ke penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program. Beberapa rekomendasi berupa kegiatan akan ditindaklanjuti dalam penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ringkasan telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang dapat digambarkan dalam skema berikut :

Tabel 4.2
Telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
I	Ketersediaan SDA a. Kualitas dan Kuantitas Air b. Alih Fungsi Lahan	Gambaran Kinerja urusan lingkungan hidup, termasuk kualitas air dan penanganan sampah	Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Strategi: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Arah Kebijakan <ul style="list-style-type: none">- Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi- Pembangunan dengan kesesuaian tata ruang- Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	- Program Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Program perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang - Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Penataan RTH
II	Konsumsi SDA : sampah					
III	Pencapaian TPB					
	Tujuan 2 : Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	Kinerja urusan pertanian	Pertumbuhan ekonomi	Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Strategi: Peningkatan produktivitas sektor pertanian:	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan, Peningkatan produksi sub sektor peternakan

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
				<p>Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan</p>	<p>Arah Kebijakan Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias Peningkatan produksi sub sektor peternakan</p>	- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Tujuan 3 :Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	Kinerja layanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	<p>Tujuan: Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul</p> <p>Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Strategi : Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan</p> <p>Arah Kebijakan : Gerakan Padang Panjang Sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemasyarakatan Olah Raga; - Program Upaya Kesehatan Masyarakat, - Program Pembekalan Gizi Masyarakat - Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah
	Tujuan 4 :Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	Kinerja urusan pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	<p>Tujuan: Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul</p> <p>Sasaran: Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan</p>	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Budaya Baca - Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan - Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, - Program Padang Panjang Juara - Program Waji Belajar Dasar 9 Tahun - Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Pendidikan Non Formal

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
						<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
	Tujuan 6 :Air Bersih dan Sanitasi	Kinerja Urusan Kesehatan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pembenahan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Kota	<p>Tujuan: Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul</p> <p>Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan 	<p>Strategi: Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Padang Panjang Sehat - Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana pelayanan kesehatan - Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pengendalian Penceramanan dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Tujuan 11 :Kota Inklusif dan Berkelanjutan	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	Pembenahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	<p>Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</p>	<p>Strategi: Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Trotoar trotoar ramah disabilitas, - Peningkatan Pelayanan Angkutan : Smart Bus

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
				<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas infratruktur berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis</p> <p>Sasaran: Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Arah Kebijakan: Pemanfaatan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi</p> <p>Strategi: Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial</p> <p>Arah Kebijakan: Gerakan Kota Sayang Lansia dan Ramah Disabilitas</p>	Program Sayang Lansia dan Disabilitas
	Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kinerja pertanian urusan	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan</p>	<p>Strategi: Peningkatan produktivitas sektor pertanian</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias - Peningkatan produksi sub sektor peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan - Program Pengembangan Budi Daya Perikanan - Program Peningkatan Produksi Peternakan

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
	Tujuan 15 :Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelaanjutan Ekosistem Darat	Kinerja urusan lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Strategi : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Arah Kebijakan: Pengendalian kualitas lingkungan hidup	- Program Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Program perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (terkait LP2B)
	Tujuan 17 :Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	Kinerja urusan penanaman modal	Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Strategi : meningkatkan peluang investasi; Arah Kebijakan: Fasilitasi kemudahan investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
IV	Kemandirian Daerah	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan</p>	<p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produktivitas sektor perdagangan, - Peningkatan produktivitas sektor industri, koperasi dan UMKM - Meningkatnya jumlah wirausaha - Peningkatan produktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum/pariwisata - Peningkatan produktivitas sektor pertanian, <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan pasar, pedagang, dan barang beredar - Penguatan industri kulit, pengolahan susu dan makanan ringan - Penguatan sektor UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri - Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Program Pengembangan Rumah Wirausaha - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
					<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi - Pengembangan wisata dan kuliner (edu-eco-culture tourism) - Penyelenggaraan even tahunan Gelar Karya dan Prestasi Warga “Pesona Padang Panjang Kota serambi Mekkah” - Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias - Peningkatan produksi sub sektor peternakan - Fasilitasi kemudahan investasi 	

4.3 Isu Strategis Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Sumatera Barat, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Padang Panjang dan telaahan RTRW, maka isu dan kebijakan serta permasalahan pembangunan yang ada selama beberapa periode pembangunan perlu dikaji kembali untuk penetapan isu strategis Kota Padang Panjang pada pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi

Bila diperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang secara rata-rata selama periode 2013-2017 tampaknya berada diatas laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi Kota Padang Panjang lebih bagus dibandingkan dengan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi Sumatera Barat. Akan tetapi perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang berfluktuasi selama periode 2013-2017.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mencapai sebesar 6,29%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hanya sebesar 6,02%. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami penurunan sampai tahun 2016 dimana hanya mencapai sebesar 5,80%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat ternyata juga turun menjadi 5,40%. Pada tahun 2017 perkonomian Kota Padang Panjang naik kembali menjadi 5,81% dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga naik menjadi 5,69%.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang naik menjadi 5,81% pada tahun 2017 dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar naik menjadi 5,69% ternyata akelerasi kenaikan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik dibandingkan dengan akelerasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang.

2) Peningkatan dan Pengembangan Urusan kepariwisataan, Perdagangan,

Urusan kepariwisataan yang mulai menggeliat dalam beberapa tahun terakhir ini, tampaknya masih perlu pemberahan dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Kota Padang Panjang harus memiliki karakter dan ciri yang kuat sebagai daerah wisata. Karena itu citra kota sebagai “Serambi Mekah” harus terus dibangun dan dikembangkan serta dijadikan ikon

pariwisata daerah yang diikuti dengan upaya pembenahan berbagai destinasi wisata yang potensial serta dukungan sarana dan prasaranaanya. Selanjutnya salah satu sarana pariwisata yang perlu dibangun dan dikembangkan adalah “*Rest Area*”.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, bidang usaha perdagangan perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari isu strategis kota. Hal ini dikarenakan posisi Kota Padang Panjang yang strategis dan memiliki potensi ekonomi yang layak untuk dikembangkan. Untuk itu pengembangan pasar rakyat yang modern dan nyaman harus dilakukan sejalan dengan peningkatan kualitas pelaku usaha lokal, agar mereka mampu bersaing dengan pelaku ekonomi dari daerah lainnya.

Pengelolaan pasar secara profesional oleh pelaku yang kompeten juga menjadi salah satu kondisi yang harus dipenuhi dan menjadi perhatian serius agar pasar yang moderen, aman dan nyaman mampu diwujudkan sebagai ikon kota dalam menghadapi persaingan pasar regional dan nasional .

3) Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi Syariah dan industri

Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKM) menjadi isu pembangunan Kota Padang Panjang karena bahagian besar yang menggerakkan ekonomi Padang Panjang adalah usaha mikro kecil menengah dan koperasi syariah. Jika UMKM tidak mengalami perkembangan, maka perlambatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi di Padang Panjang. Oleh sebab itu isu pemberdayaan UMKM dan koperasi syariah perlu dikaitkan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas, pembenahan manajemen, dan kelembagaan, penggunaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan akses produk dan perluasan pasar, dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Bidang industri juga menjadi isu pembangunan Kota Padang Panjang, mengingat ada beberapa sektor unggulan yang perlu menjadi perhatian dalam bidang industri yakni industri pengolahan susu dan industri kulit yang merupakan potensi untuk dikembangkan.

4) Penurunan Angka Pengangguran Dan Kemiskinan Serta Peningkatan Daya Saing Kota

Angka pengangguran yang cukup tinggi di Kota Padang Panjang menyebabkan angka kemiskinan juga meningkat. Untuk itu perlu peningkatan efisiensi serta perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan minat kewirausahaan terutama kaum muda guna peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga hal tersebut secara langsung dapat menurunkan tingkat pengangguran dan sekaligus meningkatkan daya saing kota. Disamping itu pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan dan keahlian (skill) bagi para penganggur terdidik juga perlu dilakukan.

Masalah kemiskinan juga masih menjadi isu strategis baik di daerah maupun nasional, karena masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, pada lima tahun ke depan, masalah kemiskinan tetap menjadi isu strategis di Kota Padang Panjang, sehingga nantinya dibutuhkan berbagai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan harus diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Sementara itu bila diperhatikan dari sisi daya saing Kota Padang Panjang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir meskipun dunia mengalami krisis ekonomi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk asal Kota Padang Panjang masih sulit bersaing di pasar lokal maupun nasional. Berkaitan dengan hal itu peningkatan akses untuk mendapatkan modal serta peningkatan kualitas SDM bagi UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya di Kota Padang Panjang perlu dilakukan dalam periode lima tahun mendatang.

5) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Karena masih belum optimalnya capaian kinerja urusan pendidikan, maka perlu upaya Pemda untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan akses melalui pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur dengan jalan meningkatkan manajemen pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat disemua jalur, jenjang dan satuan pendidikan.

Bantuan peningkatan manajemen untuk pendidikan swasta khususnya manajemen pendidikan sekolah islam perlu lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Untuk urusan kesehatan belum terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan merata membutuhkan upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara lebih mandiri, yang diikuti oleh peningkatan akses dan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan untuk setiap lapisan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

6) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu strategis yang pertama di Kota Padang Panjang, paradigma pemerintahan disadari telah bergeser dari *rule government* menjadi *good governance*. Membangun *good governance* bukan hanya semata-mata memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun etika, sikap dan perilaku penyelenggara pemerintahan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dimaksud meliputi aspek transparansi pemerintahan, profesionalitas aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Reformasi birokrasi adalah upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari tata kelola sumber daya manusianya, karena sebaik apapun sistem yang dibuat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcome*. Jadi menjajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah prima. Baru setelah itu pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.

Selanjutnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Untuk itu kesiapan beberapa faktor pendukung penerapan teknologi informasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi serta partisipasi *stakeholder* lainnya.

Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan di Kota Padang Panjang, juga disebabkan oleh struktur organisasi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menganut sistem hemat struktur kaya fungsi. Kemudian permasalahan yang juga muncul adalah masih adanya sebagian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang saling tumpang tindih. Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga masih belum optimal.

Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, ditunjukkan oleh belum fokus dan optimalnya pemanfaatan sumber-

sumber penerimaan daerah, belum efektifnya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional.

Akhirnya, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan pengembangan budaya kerja.

7) Pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan budaya

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Kota Padang Panjang selama ini sudah terkenal dengan julukan “Kota Serambi Mekah”. Kenyataan ini haruslah didukung dengan kondisi masyarakat yang memiliki pemahaman yang utuh tentang agama, budaya dan adat. Pemahaman agama, budaya dan adat tersebut ditujukan untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat Kota Padang Panjang.

Meskipun selama ini kegiatan keagamaan dan budaya telah berkembang dengan baik di tengah masyarakat, namun dalam implementasinya ternyata dinamika sosial bergerak sangat cepat dan dinamis. Hal ini terbukti masih adanya kenakalan remaja serta belum optimalnya pemahaman dan pengamalan para generasi muda terhadap agama dan adat istiadat. Disamping itu dengan diberlakukannya MEA serta dalam era globalisasi sekarang ini maka pengaruh budaya asing yang kontra produktif sangat cepat masuk dan berkembang di tengah masyarakat melalui berbagai media.

Oleh karena itu, aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah dengan basis sumber daya manusia yang religius dan berbudaya sebagaimana diharapkan dalam pembangunan jangka panjang. Berkaitan dengan hal itu maka dalam penyusunan RPJMD ini perlu dioptimalkan mengenai pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan adat istiadat tersebut terutama bagi generasi muda.

8) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh penurunan kualitas air sungai, rendahnya proporsi Ruang Terbuka Hijau, berkurangnya area resapan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Padang Panjang mengindikasikan pengelolaan lingkungan yang belum

optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya terpadu dan perubahan perilaku yang mendasar dari masyarakat. Upaya ini perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan dan Penegakan Peraturan hukum yang berlaku (Perda Trantibum dan Perda Bangunan).

9) Pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota

Infrastruktur kota dalam konteks ini adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat Kota Padang Panjang sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tersedianya infrastruktur kota yang baik diharapkan mampu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Padang Panjang.

Kondisi saat ini sebagian infrastuktur Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang belum menyentuh seluruh warga kota, tempat parkir yang sangat terbatas seperti di pasar pusat, terminal yang belum berfungsi dengan baik, trotoar yang belum layak dan belum ramah disabilitas, sistem drainase yang tidak baik sehingga sebagian wilayah Kota Padang Panjang terdapat genangan air jika terjadi hujan yang cukup lama, sistem air limbah kota yang belum terpadu, tempat pembuangan sampah yang belum dikelola dengan baik, infrastruktur kawasan perdagangan dan jasa seperti pasar pusat yang belum optimal, trotoar yang belum baik, pasar sayur Bukit Surungan yang belum jelas status pengelolaannya adalah bagian dari isu strategis infrastruktur Kota Padang Panjang yang perlu di benahi dalam 5 tahun kedepan.

Khusus untuk infrastruktur sanitasi diperlukan adanya perubahan perilaku mendasar dari masyarakat seperti dalam pengelolaan sampah diperlukan perubahan paradigma “kumpul-angkut-buang” menjadi 3R (*reduce, reuse, recycle*). Perubahan perilaku tersebut dapat dilakukan melalui edukasi secara berkesinambungan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah ketersediaan master plan untuk masing-masing sektor lapangan usaha perekonomian.

10) Penataan Ruang Kota

Sebagai kota yang cukup strategis dan terletak di jalur perlintasan, namun dibatasi oleh luas wilayah yang sangat kecil, pertambahan penduduk adalah sesuatu yang sulit dihindari. Untuk menyikapi hal ini, tentu saja diperlukan kebijakan penataan ruang kota yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh stakeholder kota. Pemerintah Kota Padang Panjang harus menyediakan sarana dan

prasaranan perkotaan dan aksesibilitas yang merata ke seluruh wilayah kota. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengembangan ruang kota yang dapat menampung fungsi kota sekaligus mampu menjadi ciri khas Kota Padang Panjang, baik untuk fungsi pendidikan, perdagangan, pariwisata, industri, pemerintahan maupun permukiman;
- b. Peningkatan nilai ekonomi kota melalui pengembangan fungsi-fungsi ekonomi khusus seperti pengembangan kawasan industri kapur, kawasan industri kulit, makanan ringan, destinasi wisata baru, rest area dan sentra oleh-oleh serta pengembangan jasa pendukung pariwisata lainnya.

11) Aspek Pembangunan Pengarusutamaan Gender.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini Isu Gender merupakan salah satu isu yang cukup strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai stakeholders bertanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kesetaraan Gender itu. Sebab sampai sekarang ini masih terjadi ketidakstabilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara termasuk di kota Padang Panjang. Padahal di kota Padang Panjang jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan boleh dikatakan hampir seimbang jumlahnya. Jauh sebelumnya Bappenas (2010) mengemukakan bahwa salah satu tujuan pembangunan manusia (*human development*) adalah untuk mencapai Kesetaraan Gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Sehubungan dengan hal itu, maka Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan terutama dalam proses perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan publik sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar aspirasi dan kepentingan perempuan juga tertampung dalam proses maupun dalam pelaksanaan pembangunan, sebab PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki terhadap proses dan hasil pembangunan. Oleh karena itu maka dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Padang Panjang periode 2018-2023 ini Isu Gender perlu dimasukkan, sehingga Kesetaraan Gender yang diharapkan dapat diwujudkan dimasa mendatang.

12) Penanganan Bencana Alam

Kota Padang Panjang yang termasuk daerah rawan terhadap berbagai bencana alam dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Posisi demografis kota

Padang Panjang yang terletak di daerah patahan, daerah kelerengan dan ketinggian menyebabkan padang Panjang harus siap dengan segala akibat apabila terjadi bencana alam. Untuk mempersiapkan diri ketika terjadi bencana maka dalam dokumen perencanaan perlu dijadikan salah satu isu strategis terkait dengan penanganan bencana agar Kota Padang Panjang memang tanggap terhadap pengurangan resiko bencana, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang terkena bencana.

Untuk melihat bagaimana keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD Kota Padang Panjang, RPJMD Propinsi Sumatera Barat terutama berkaitan dengan isu strategis masing masing, serta bagaimana keselarasan dengan SDGs dan Nawacita dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.3
Keselarasan antara RPJMD Kota Padang Panjang, RPJMD Provinsi Sumbar dengan SDGs dan Nawacita

RPJMD Kota Padang Panjang	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	SDGs	Nawacita
9) Pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan budaya	1) Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat	3) Kesehatan dan Kesejahteraan 4) Kualitas Pendidikan yang baik 11) (Pembangunan Berkelanjutan)	8) Melakukan revolusi karakter bangsa
1) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	1>>17	3) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
3) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan Masyarakat	3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

RPJMD Kota Padang Panjang	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	SDGs	Nawacita
3) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan Masyarakat	4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
2) Pertumbuhan Ekonomi	5) Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	2) Mengakhiri Kelaparan 3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5) Peningkatan dan Pengembangan Urusan Kepariwisataan dan Perdagangan	6) Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	1>>10	6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
	7) Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	1>>5 8) Pertumbuhan Ekonomi 9) Inovasi dan Infrastruktur 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic
4) Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan serta peningakatan daya saing kota	8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1>>11	2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
7) Pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur Kota	9) Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6) Kualitas Lingkungan Hidup	10) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

RPJMD Kota Padang Panjang	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	SDGs	Nawacita
12) Aspek Pembangunan Pengarus utamaan gender		3) Kesehatan dan Kesejahteraan 10) Mengurangi Ketimpangan 16) Perdamaian dan Keadilan 17) Revitalisasi dan Kemitraan Global	1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
		5) Kesetaraan Gender 10) Mengurangi Ketimpangan 16) Perdamaian dan Keadilan 17) Revitalisasi dan Kemitraan Global	9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, RPJMD 2018-2023 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun 2025 adalah "**Kota Yang Maju, Lestari dan Islami**".

- Maju** ditandai dengan sarana dan prasarana dengan standar kota antar bangsa/internasional, sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; serta produktivitas yang makin tinggi; perekonomian ditandai dengan struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan masyarakat meningkat, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; sosial politik ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, menurunnya tingkat kriminalitas, meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatnya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi.
- Lestari**, dimaksudkan sebagai kondisi dimana penyelenggaraan pembangunan tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berpijakan pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota berdasarkan berbagai sumberdaya yang tersedia.
- Islami** akan menjadi prinsip dasar yang menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Padang Panjang telah menetapkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, yakni :

1. Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat
2. Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian

3. Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari
4. Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Padang Panjang pada Tahap ke-3 tahun 2019-2023, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada Persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian; pembentukan sumberdaya manusia berkualitas.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah, salah satu hal yang penting adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*). Kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, permasalahan, serta isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan menjadi satu komponen penting dalam arsitektur kinerja, hal ini dikarenakan *impact* merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Kota Padang Panjang adalah kota dengan luas terkecil di Sumatra Barat, yang secara geografis berada di kawasan regional Provinsi Sumatra Barat sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018 – 2023 harus disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan kendala yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang dengan mempertimbangkan dan menyelaraskannya dengan Rencana Pembangun Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat 2016-2021, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang 2012-2032 serta regulasi lainnya baik yang diatur secara nasional maupun secara regional serta pengaruh lingkungan lainnya (global, nasional, regional dan lokal), maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan

pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Padang Panjang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Padang Panjang, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang. Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kota Padang Panjang di atas adalah :

Untuk Kejayaan Padang Panjang : Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan

Tingkat perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.

Bermarwah

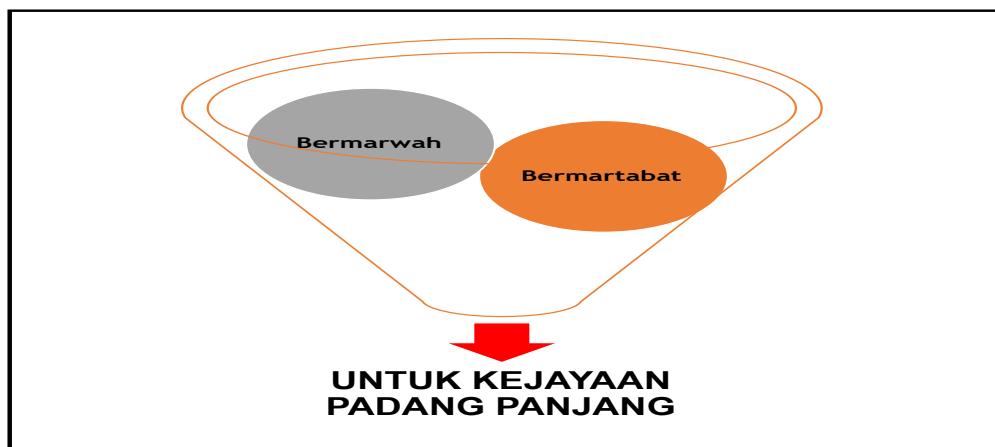
- : Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia kota Padang Panjang yang ditandai dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi dan berbudaya.

Bermartabat

- : Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Bermartabat ditandai dengan kota yang aman dan tertib, kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terlaksananya reformasi birokrasi

Dengan merujuk pernyataan pokok visi Kota Padang Panjang di atas maka hubungan antar elemen visi jangka menengah Kota Padang Panjang terlihat pada gambar berikut:

Gambar. 5.1
Hubungan Antar Pokok Visi



Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kota Padang Panjang, maka pembangunan Kota Padang Panjang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dalam pencapaian tersebut pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang harus terus bergerak bersama pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata. Selain itu perlunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkeadilan sosial untuk sebesar-besarnya “Untuk Kejayaan Padang Panjang”

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan.

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskan empat pilar pembangunan Kota Padang Panjang, sebagai berikut :

1) EKONOMI

Untuk mewujudkan pilar ekonomi ini melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Rumah Wirausaha, Bedah warung, SATIMISAKE (Rp 1 Milyar sampai Rp 3 Milyar per Kelurahan) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Kelurahan di Kota Padang Panjang, koperasi syariah, *smart* warung

Di bidang infrastruktur juga direncanakan beberapa kegiatan strategis antara lain pembangunan gedung parkir, penataan pedestrian pasar dan wisata kuliner, revitalisasi rest area, pelebaran jalan St. Syahrir, melengkapi sarana prasarana pasar, *Smart Transportasi*, Rehab rumah tak layak huni, dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

2) PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pendidikan, sosial, keagamaan pada bidang pendidikan diprioritaskan pada beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Guru dan Murid Para Juara, yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi guru, program *reward* guru dan siswa berprestasi, *Smart Teacher* dan *Smart Student*, beasiswa bagi siswa miskin dan prestasi, revitalisasi bangunan sekolah sehingga nantinya seluruh sekolah di Kota Padang Panjang memiliki standar yang sama baik itu pustaka, mushalla, kantin dan toilet sekolah. Diharapkan dengan berbagai kegiatan strategis di bidang pendidikan seluruh sekolah di Padang Panjang akan menjadi sekolah unggul dan terdepan. Kegiatan strategis lainnya untuk mendukung misi kedua adalah wisata rakyat dan pacu kudo, serta pembangunan *Learning Knowledge Centre* dan museum digital, melanjutkan pembangunan kawasan *Islamic Center* dan *convention hall*.

Tak kalah pentingnya adalah pembangunan bidang sosial keagamaan melalui beberapa program dan kegiatan strategis antara lain Padang Panjang sayang disabilitas dan lansia dengan memberi pelayanan dan penghormatan kepada disabilitas dan lanjut usia, melalui penyediaan layanan khusus di bidang kesehatan, sosial dan keluarga serta kegiatan lansia bermakna. Disamping itu juga ada program Gelora Serambi Mekah melalui beberapa kegiatan antara lain Pejuang Subuh dan Shubuh Mubarakah, Magrib Mengaji, *Smart* Surau, Kampung Tahfidz dan Muzakarah Ulama.

3) KESEHATAN

Pembangunan pilar kesehatan diprioritaskan pada beberapa

kegiatan strategis antara lain Dokter Warga, merupakan pelayanan langsung dokter kepada masyarakat di tingkat kelurahan, program Waliny Siaga (siaga melindungi) melalui pelayanan kesehatan darurat (PSC 119), program pendampingan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta Padang Panjang bergoro. Untuk mendukung misi kesehatan juga disukung dengan sarana prasarana olahraga sehingga direncanakan pembangunan *sport centre*,

4) PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Selanjutnya untuk mewujudkan pilar pelayanan umum dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan partisipatif ada beberapa program dan kegiatan strategis yang direncanakan antara lain program e-governance dengan kegiatan *command centre* dan program zona integritas dan gratifikasi dengan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan melalui program ini nantinya dapat terwujud Padang Panjang *Smart City*, Kota Cerdas dan Berintegritas.

Pada pilar ini juga perlu ditingkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kerifan lokal dan kegotong-royongan, termasuk dengan menggalang kemiraan dengan dunia usaha/koperasi dalam pembangunan kota.

Mengingat bahwa dalam dokumen visi dan misi Kepala Daerah, empat pilar tersebut dijadikan sebagai pokok misi, kemudian pokok-pokok misi tersebut diuraikan dalam kalimat misi dalam penyajian dokumen RPJMD Kota Padang Panjang, sebagai berikut :

**Tabel 5.1
Pilar Pembangunan/Pokok Misi dan Kalimat Misi
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

No.	Pilar/Pokok Misi	Kalimat Misi Pembangunan Daerah
1	EKONOMI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlik dan Berbudaya
3	KESEHATAN	
4	PELAYANAN UMUM DAN PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsive, Inovatif dan Partisipatif

Untuk mencapai Visi di lakukan melalui beberapa misi pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang.

Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

Misi 2: Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhhlak dan Berbudaya.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsive, professional, efisian dan efektif, tranparan, visioner dan partispatif serta supremasi hokum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

**Gambar. 5.2
Keterkaitan Antara Visi dan Pilar/Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang 2018-2023**



5.3 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* tersebut harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kota Padang Panjang.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang, perlu dibangun suatu kerangka pembangunan strategis yang terintegrasi dengan setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih. Kerangka pembangunan strategis tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai rumusan tujuan dan sasaran pembangunan melalui pengelompokan pilar/misi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang 2018-2023. Pengelompokan pilar/misi pembangunan telah disusun menjadi 4 (empat) komponen yakni terkait dengan Ekonomi, Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Kesehatan serta Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Keempat komponen tersebut inilah kemudian di kelompokkan ke dalam 3 (tiga) kalimat misi yang nantinya akan membentuk rumusan tujuan pembangunan dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 5.2
Hubungan Komponen Pilar/Misi Dengan Tujuan Pembangunan
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No.	Pilar/ Pokok Misi	Tagline	Kalimat Misi Pembangunan Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan
1	EKONOMI	Padang Panjang Assalam	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Padang Panjang Fathonah	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas	Meningkatnya pemerataan dan kualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3	KESEHATAN	Padang Panjang Sehat	daya Saing SDM masyarakat yang Berakhhlak dan Berbudaya	daya saing SDM yang sehat, berakhhlak dan unggul	

No.	Pilar/ Pokok Misi	Tagline	Kalimat Misi Pembangunan Daerah	Tujuan	Indikator Tujuan
				Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum
4	PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Padang Panjang Melayani	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsive, Inovatif dan Partisipatif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keberhasilan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang dilihat dari kondisi akhir perencanaan pada tiap-tiap capaian indikator tujuan. Keberhasilan pencapaian tujuan akan menggambarkan keberhasilan pencapaian visi pembangunan Kota Padang panjang. Berikut keterkaitan visi dan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 :

Tabel 5.3
Visi, Tujuan dan Target Indikator Tujuan RPJMD
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2017)	Target Akhir (2023)
1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	6,30%
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita (Rp.juta)	44,12	58,05
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlik dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,01	80,72
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenraman, Keamanan (%)	95,16	100
5	Meningkanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	54,94	70
6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)	2,29	2,34

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut :

1) Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan

Pengembangan ekonomi daerah yang berbasis potensi unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global. Peningkatan daya saing ekonomi juga tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, selaras dengan pemajuan aktivitas rakyat dalam menghasilkan produk-produk unggulan daerah di bidang pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan berbagai karya lokal sesuai potensi yang ada.

Kota Padang Panjang sebuah kota kecil yang relatif tidak memiliki potensi sumber daya alam, namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, pemerintah Kota Padang Panjang menitikberatkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah sejak lama mempersiapkan diri untuk dapat menjadi salah satu pusat industri kulit di wilayah Sumatera dan pusat pengolahan susu dalam mendorong meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Selain perdagangan dan jasa, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi daerah. Di Kota Padang Panjang terdapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau baik berupa buku-buku, microfilm, foto dan sebagainya.

Selain itu juga terdapat kawasan rekreasi keluarga yaitu Mifan yang terdiri dari taman air dengan wahana kelompok ombak, kolam arus, kolam renang khusus wanita, kolam renang khusus anak-anak, ember tumpah dan *slide tower*. Kota Padang Panjang juga terkenal dengan wisata religinya dengan mesjid asasi Sigando dan Islamic Centre, dan juga yang tak kalah menariknya adalah wisata pendidikan dengan Diniyyah Puteri, Thawalib, Pesantren Serambi Mekah dan pesantren lainnya yang memang sudah sangat terkenal dari dulunya dalam hal pendidikan islam.

Guna mewujudkan tujuan meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan, maka sasaran pembangunan yang hendak dicapai adalah :

a. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.

Peningkatan perekonomian berbasis kerakyatan terbukti cukup tanggung dalam menghadapi krisis ekonomi. Pembangunan ekonomi ke depan di harapkan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi-ekonomi yang melibatkan pelaku ekonomi secara masif terutama masyarakat lokal. Sehingga masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan di Kota Padang Panjang. Sektor perdagangan perlu di kembangkan sebagai wujud implementasi ekonomi kerakyatan. Keberhasilan Kota Padang Panjang dalam meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,56 persen; laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,92 persen; laju pertumbuhan ekonomi sektor industri sebesar 2,46 persen; laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,86 persen.

b. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur kerap di kaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah Kota Padang Panjang dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun sosial lainnya. Selain itu pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan dampak terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Keberhasilan pada sasaran di dapat dilihat pada persentase kenaikan indek kualitas layanan infrastruktur sebesar 1,5 persen dan Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 66,33-67,65 pada tahun 2023.

2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat adalah mutu tenaga kerja. Mutu tenaga kerja yang baik/tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga akan mempengaruhi capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat dapat hidup secara mandiri dengan pendapatan yang semakin meningkat.

Peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah

untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta program pembangunan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri (termasuk industri kecil dan menengah), jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha meningkatkan investasi sebanyak-banyaknya terutama sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui sasaran sebagai berikut :

a. Menurunnya angka kemiskinan

Kemiskinan menjadi fenomena yang perlu diatasi segera agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu dilakukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, sejahtera, dan bisa terus menjaga perekonomiannya menjadi stabil agar tidak kembali dalam lingkaran kemiskinan. Berbagai program penganggulangan dilakukan untuk upaya pengentasan kemiskinan ini antara lain juga melalui gerakan urang mudo berwirausaha, gerakan warga berdaya kota berjaya. Dengan berbagai program pengentasan kemiskinan diharapakan kemiskinan dapat diturunkan sebesar 3,75 persen pada tahun 2023.

Disamping itu, ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan. Pembangunan ekonomi masyarakat akan menjadi suatu keniscayaan apabila terjadi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Harapannya pembangunan Kota Padang Panjang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian indeks gini sebesar 0,24 pada tahun 2023; dan

b. Menurunnya tingkat pengangguran

Salah satu penyebab banyaknya pengangguran adalah minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian dari pencari kerja, termasuk pencari kerja terdidik. Untuk mengatasi tingginya angka

pengangguran di Kota Padang Panjang tentunya perlu program untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya melalui gerakan urang mudo kreatif berwirausaha yang nantinya akan mendorong kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,34 persen pada tahun 2023.

c. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial. Pendapatan masyarakat secara nyata berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan berbagai program yang ada terutama dalam pengembangan kewirausahaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan daya beli masyarakat meningkat sebesar 10,39 ribu rupiah tahun 2023;

3) Meningkatnya pemerataan dan kualitas daya saing sumber daya manusia yang sehat, berakhlak dan unggul

Kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, salah satu fokus Pendidikan di Kota Padang Panjang adalah dengan gerakan literasi Padang Panjang bergerak yakni memberikan dukungan fasilitasi pembangunan gerakan anak dan remaja gemar membaca, beraktifitas dan mengembangkan potensi bakat serta hobinya dalam rangka generasi masa depan Kota Padang Panjang yang lebih berkarakter dan mandiri agar masyarakat Kota Padang Panjang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Di samping terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tagline Padang Panjang sehat. Selain Pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat, pembangunan karakter masyarakat juga perlu dilakukan melalui Pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Minangkabau dalam aktifitas masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing Pendidikan

Pembangunan kualitas Pendidikan tidak hanya fokus pada prestasi siswa, peningkatan karakter juga menjadi salah satu point penting dalam menghadapi persaingan global. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian rata-rata lama sekolah sebesar 12,78; dan harapan lama sekolah sebesar 15,74 pada tahun 2023;

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pembangunan kesehatan yang berlangsung komprehensif dan berkesinambungan telah berdampak terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan tercapainya sasaran Sustainable development goals (SDGs). peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan bertambahnya angka harapan hidup, dan diperkirakan menjadi sebesar 72,49 tahun pada tahun 2023;

4) Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan Agamis

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis tentunya ditandai dengan berkurangnya pelanggaran pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merjalela dalam kehidupan masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang tentunya juga berpengaruh terhadap ketentraman dalam kehidupan masyarakat, permasalahan sosial dan permasalahan penyakit masyarakat ini tentunya tidak lepas dari norma dan nilai agama yang berkembang di masyarakat. Dengan semakin meningkatnya penerapan norma dan nilai agama dalam masyarakat akan semakin tenteram kehidupan sosial masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis maka sasaran pembangunan yang akan dicapai antara lain:

a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis dan pelaksanaan berlangsung dengan lancar. Ketentraman dan ketertiban umum ditandai salah satunya dengan berkurangnya pelanggaran pelanggaran terkait penyakit masyarakat yang saat ini tengah merjalela dalam kehidupan masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang tentunya juga berpengaruh terhadap ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari

pencapaian tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban

b. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial

Pelayanan sosial merupakan salah satu urusan wajib dasar yang harus di selenggarakan oleh pemerintah daerah, selain terkait pelayanan sosial aktivitas keagamaan juga menjadi salah satu prioritas pemerintahan periode ini untuk membangun nilai-nilai keagamaan di dalam masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari pencapaian persentase penurunan jumlah PMKS sebesar 1,13 persen tahun 2023;

c. Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat

Kota Padang Panjang yang sudah sangat terkenal dengan julukan kota Serambi Mekah merupakan sebuah kota yang dalam kehidupan sehari-hari diwarnai dengan nuansa islami, yang tercermin dari kehidupan bermasyarakat yang diwarnai dengan syariah Islam. Guna mempertahankan julukan ini maka perlu dilakukan upaya upaya peningkatan pengamalan ajaran agama islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatnya aktifitas keagamaan di masyarakat diharapkan akan terwujud tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis. Sasaran ini diharapkan meningkat sebesar 100 persen pada tahun 2023.

5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola pemerintahan secara umum di Indonesia khususnya di Kota Padang Panjang. Hal tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsive, professional, efisian dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum. Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dimulai dengan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berdasarkan uraian di atas, sasaran pembangunan ini adalah:

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Kinerja aparatur yang baik merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, semakin baik kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin baik juga penyelenggaraan pemerintahannya. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari pencapaian predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dengan nilai 80,02 (A) pada tahun 2023; dan pada tujuan ini juga dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian pembangunan dapat berhasil dimulai dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Semakin baik pengelolaan keuangan daerah dan senakin sedikit kebocoran anggaran akan semakin banyak banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan kinerja sasaran ini dilihat dari penilaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023; dan

b. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani

Salah satu tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat saat ini mendapatkan aparatur yang melayani, keberhasilan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas ditandai dengan tidak adanya keluhan terhadap pelayanan publik oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dengan nilai 82 (baik) Pada tahun 2023.

6) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi suatu keharusan. Masyarakat harus menjadi subyek pembangunan dan tidak hanya menjadi obyek pembangunan saja. Peran masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah menjadi suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Pembangunan daerah selain menuntut peran aktif masyarakat juga harus memberdayakan masyarakat tanpa memihak suatu

golongan tertentu. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan sinergi peran serta berbagai kelompok sosial kemasyarakatan, masyarakat adat, pemuda dan kaum perempuan serta pemanfaatan nilai kearifan lokal dan kegotongroyongan. Berdasarkan uraian di atas keberhasilan tujuan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dicapai melalui sasaran :

a. Meningkatnya peran serta kelompok lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melibatkan segenap unsur masyarakat dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah, harapannya masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan dapat menentukan mana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang nyata dibutuhkan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan pencapaian persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif sebesar 90 persen pada tahun 2023.

b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

Pembangunan dewasa ini harus memperhatikan kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam melakukan berbagai aktifitas Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan pencapaian Indeks Pemberdayaan perempuan (IDG) sebesar 83,10 pada tahun 2023; dan

Berikut ini di sajikan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran serta terget keberhasilan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 :

Tabel 5.4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023

VISI: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT											
PILAR	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					
						2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir Perencanaan
PILAR 1	MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan										
EKONOMI	1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indeks	5,81	5,96	6,04	6,11	6,19	6,30
		1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,79	3,05	3,17	3,30	3,43	3,56
				2 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	%	4,57	5,02	5,24	5,47	5,69	5,92
				3 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri	%	2,19	2,28	2,33	2,37	2,42	2,46
				4 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7.48	7.61	7.67	7.73	7.80	7.86
		2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5 Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	%	na	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
				6 IKLH	Indeks	66.17	65.25-66.57	65.52-66.84	65.79-67.14	66.09-67.38	66.33-67.65
											66.33-67.65

PILAR	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					
						2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir Perencanaan
	2 Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat		PDRB Perkapita	Rp.juta	44.12	48.19	50.42	52.80	55.34	58.05	58.05
		3 Menurunnya Angka Kemiskinan	7 Angka Kemiskinan	%	6.17	5.45	5.03	4.6	4.18	3.75	3.75
			8 Indek Gini	Indeks	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24
		4 Menurunnya tingkat pengangguran	9 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,43	4,84	4,72	4,59	4,47	4,34	4,34
		5 Meningkatnya pendapatan masyarakat	10 Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	(Ribu Rupiah)	10.24	10.29	10.31	10.34	10.36	10.39	10.39
PILAR 2 & 3 MISI 2: Menigkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhhlak dan berbudaya											
PENDIDIKAN,	3 Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhhlak dan unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,01	78,25	78,86	79,48	80,10	80,72	80,72
		6 Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan	11 Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,43	11,88	12,11	12,33	12,56	12,78	12,78
			12 Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,03	15,27	15,38	15,50	15,62	15,74	15,74
KESEHATAN		7 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	13 Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	72,46	72,47	72,48	72,48	72,49	72,49	72,49
SOSIAL DAN KEAGAMAAN	4 Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tetram dan agamis		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum	%	95.16	96.37	97.28	98.19	99.09	100.00	100.00
		8 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	14 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	95.16	96.37	97.28	98.19	99.09	100.00	100.00
		9 Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	15 Persentase Penurunan jumlah PMKS	%	2.94	2.34	2.04	1.73	1.43	1.13	1.13
		10 Meningkatnya aktivitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat	16 Persentase aktivitas Kegiatan keagamanan dimesjid	%	20.39	38.82	56.58	74.34	90.79	100.00	100.00

PILAR	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target						
						2019	2020	2021	2022	2023	Target Akhir Perencanaan	
PILAR 4	MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif											
PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54,94	62	64	66	68	70
			11 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	17 Predikat Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai	CC (58)	B (60,1)	B (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)	A (80,02)
				18 Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			12 Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	19 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,64 (Baik)	78 (Baik)	79 (Baik)	80 (Baik)	81 (Baik)	82 (Baik)	82 (Baik)
	6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		% Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	2,29	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	2,34
			13 Meningkatnya peran serta kelompok /lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	20 % lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	n/a	70	75	80	85	90	90
			14 Meningkatnya pemberdayaan perempuan	21 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76.10	77.50	78.90	80.30	81.70	83.10	83.10

Untuk melihat keselarasan pentahapan pembangunan pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Keselarasan RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025 dengan
RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG		SASARAN POKOK		SASARAN RPJMD 2018-2023	
1	Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat	a	Peningkatan program pendidikan untuk dapat mencapai mutu dan standar internasional sehingga tamatan lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.	5 8 9 10 4	Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatnya aktivitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat Menurunnya tingkat pengangguran
		b	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat sejajar dengan kondisi rata-rata pada tingkat nasional.	6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2	Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian	a	pembangunan kegiatan agroindustri, perdagangan, hotel dan restoran serta kegiatan jasa. Kesemua jenis kegiatan ini diharapkan telah mulai menggunakan teknologi produksi lebih tinggi sehingga nilai tambah yang dapat dihasilkan untuk masyarakat juga menjadi lebih tinggi, dan hal selanjutnya akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.	1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan
		b	peningkatan produktivitas dan daya saing produk agar pengusaha lokal dapat bertahan dalam situasi persaingan yang semakin mengglobal.	1 4	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan Meningkatnya pendapatan masyarakat

	ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG		SASARAN POKOK		SASARAN RPJMD 2018-2023
				5	Menurunnya tingkat pengangguran
3	Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari	a	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan	2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan
4	Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana	a	pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dalam rangka menyediakan fondasi yang kuat bagi pengembangan kegiatan Perhubungan dan Komunikasi, Perdagangan dan Jasa (lanjutan)	2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan
		b	peningkatan kualitas prasarana jalan raya, sarana pasar, pembangunan tenaga listrik dan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (lanjutan).	2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	a	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) (lanjutan)	11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		b	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan proses pembangunan daerah (lanjutan)	12 13 14	Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani Meningkatnya peran serta kelompok /lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Meningkatnya pemberdayaan perempuan

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan melayani masyarakat.

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya dijabarkan dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar pembangunan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan jangka Menengah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang antara lain :

- a. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan.
- b. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

- c. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah).
- d. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional.
- e. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- f. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2018-2023**

VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT

MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	A Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	1		
			1	Peningkatan Produktivitas Sektor Perdagangan
			2	Peningkatan Produktivitas Sektor Industri, Koperasi dan UMKM
			3	Peningkatan produktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
			4	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian
	2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur berkelanjutan	5	Meningkatkan peluang investasi dan kemitraan global
			1	Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan
			2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	
	B	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat		
	3	Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan	1	Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi
	4	Menurunnya angka Pengangguran	2	Memperluas kesempatan kerja
	5	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	3	Pengembangan Kewirausahaan
Menigkatkan Pemerataan dan Kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhhlak dan Berbudaya	C	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhhlak dan unggul		
	6	Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan	1	Meningkatkan Budaya Baca
			2	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan
			3	Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara
	7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan
			2	Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan
			3	Peningkatan kualitas infrastruktur olahraga
	D	Terwujudnya Tatapan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis		
	8	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
	9	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
	10	Meningkatnya aktifitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat	3	Mendorong Peningkatan aktifitas lembaga keagamaan, adat dan budaya
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif	E	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
	11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Penguatan Sistem Pengendalian Interen
			2	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
	12	Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani		Penguatan Reformasi Birokrasi

MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
F			
	F Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		
13	Meningkatnya peran serta kelompok/ lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan
14	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	2	Mendorong pemberdayaan perempuan

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh perangkat daerah yang terlibat di dalamnya.

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 6. 1
Fokus/Tema Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang terjadi saat ini dan hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang periode 2018-2023.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2019)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2019 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2019. Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dan Penurunan Kemiskinan”**.

Melalui tema di atas, pembangunan Kota Padang Panjang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan SDM dan peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kota Padang hidup lebih berkualitas, produktif dan lebih sejahtera.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2020)

Arah kebijakan pada tahun 2020 menitik beratkan pada peningkatan perekonomian masyarakat dimana pembangunan Kota

Padang Panjang pada tahun 2020 berfokus pada peningkatan sumberdaya potensi daerah dengan tema “**Meningkatkan Daya Saing Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan**”.

Pada tahun ini pembangunan berfokus pada pembangunan pada sektor perekonomian makro dan mikro. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya saing segala potensi daerah untuk mampu berinovasi dan melipat gandakan nilai dan kegunaannya. Sehingga produk produk unggulan daerah mampu bersaing dengan produk dari luar. Sehingga perekonomian daerah dapat menjadi lebih kuat dan tangguh. Pembangunan ekonomi ini diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup sebagai bentuk syukur atas dan dalam rangka keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan dimasa depan.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2021)

Arah kebijakan pada tahun 2021, pembangunan di Kota Padang Panjang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan Kota Padang Panjang berfokus pada Peningkatan kualitas SDM yang ditik beratkan pada pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan tujuan pembangunan tersebut maka tema pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun 2021 adalah “**Terwujudnya Padang Panjang Unggul Melalui Peningkatan Kualitas SDM**”.

Untuk menjawab tema tersebut pada tahun 2021 yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pada tahun ini diharapkan Padang Panjang meningkatkan kemampuan agar menjadi Kota Padang Panjang unggul.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2022)

Arah kebijakan pada tahun 2022, pembangunan Kota Padang Panjang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 pembangunan Kota Padang Panjang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang lebih luas dengan didukung oleh kualitas SDM masyarakat yang berkualitas dan aparatur birokrasi yang handal. Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan tersebut maka tema pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun 2022 adalah “**Terwujudnya Padang Panjang Sejahtera Melalui Peningkatan Ekonomi, Kualitas SDM**”.

Sesuai tema di atas maka pembangunan daerah dititikberatkan pada pembangunan dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian maka peningkatan kualitas dan pemasaran produk industri lokal dibutuhkan inovasi diantaranya pengembangan industri kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari lokal. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kota Padang Panjang dapat lebih mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kota Padang Panjang.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023, pembangunan Kota Padang Panjang berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ini, pembangunan Kota Padang Panjang menitikberatkan pada seluruh aspek bidang pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kota Padang Panjang pada tahun 2023 adalah **“Terwujudnya Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat”**.

Berbagai upaya yang akan dilakukan untuk menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kabupaten yang sejahtera yaitu penguatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian masyarakat makro dan mikro yang kuat sehingga mampu menciptakan peluang investasi yang cepat dan mengurangi pengangguran sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan Kota Padang Panjang akan berjaya ditahun akhir periode RPJMD ini.

Berikut ini disajikan keterkaitan strategi pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang 2018-2023.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun								
				2019	2020	2021	2022	2023				
MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan												
1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1	Peningkatan produktivitas sektor perdagangan	1	Peningkatan pengelolaan pasar, pedagang, dan barang beredar	✓	✓	✓	✓	✓
				2	Peningkatan produktivitas sektor industri, koperasi dan UMKM	1	Penguatan industri kulit, pengolahan susu dan makanan ringan	✓	✓	✓	✓	✓
					2	Penguatan sektor UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	
				3	Meningkatkan peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓		
				3	Peningkatan produktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	1	Pengembangan wisata dan kuliner (edu-eco-culture tourism)	✓	✓	✓	✓	✓
					2	Penyelenggaraan even tahunan Gelar Karya dan Prestasi Warga “ Pesona Padang Panjang Kota serambi Makah ”	✓	✓	✓	✓	✓	
				4	Peningkatan produktivitas sektor pertanian	1	Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias	✓	✓	✓	✓	✓
					2	Peningkatan produksi sub sektor peternakan	✓	✓	✓	✓	✓	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahun				
								2019	2020	2021	2022	2023
				5	Meningkatkan peluang investasi dan kemitraan global	1	Fasilitasi kemudahan investasi dan kemitraan global	✓	✓	✓	✓	✓
	2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	1	Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan	1	Pembangunan dengan kesesuaian tata ruang	Pemanfaatan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓
					2	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam		✓	✓	✓	✓	✓
				2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓
2	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	3	Menurunnya Angka Kemiskinan	1	Penanggulangan kemiskinan terintegrasi	1	Pembantuan teknis dan modal usaha bagi masyarakat miskin	✓	✓	✓	✓	✓
						2	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Menurunnya angka pengangguran	1	Memperluas kesempatan kerja	1	Membangun kerjasama dengan penyedia lapangan kerja	✓	✓	✓	✓	✓
		5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	Pengembangan kewirausahaan	1	Optimalisasi Gerakan urang mudo (generasi milenial) kreatif berwirausaha dan pengembangan rumah wirausaha	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
MISI 2: Menigkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlik dan berbudaya								
3 Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlik dan unggul	6 Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan	1 Meningkatkan Budaya Baca	1 Gerakan literasi padang panjang bergerak	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan	1 Pembangunan daya saing SDM yang unggul dan berkarakter Islami	✓	✓	✓	✓	✓
			2 Optimalisasi Wajar 9 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓
			3 Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
		3 Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara	1 Peningkatan standarisasi dan Kualitas Infrastruktur Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
	7 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan	1 Gerakan Padang Panjang Sehat	✓	✓	✓	✓	✓
			2 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan	✓	✓	✓	✓	✓
			3 Optimalisasi pengendalian penduduk	✓	✓	✓	✓	✓
	2 Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan	1 Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3 Peningkatan kualitas infrastruktur olahraga	1 Meningkatkan kualitas sarana prasarana pusat olahraga	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahun				
								2019	2020	2021	2022	2023
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis	8	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1	Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda	✓	✓	✓	✓	✓
		9	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial	✓	✓	✓	✓	✓
		10	Meningkatnya aktivitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat	1	Mendorong Peningkatan aktifitas lembaga keagamaan, Adat dan Budaya	1	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat melalui gerakan "Gelora Serambi Mekkah"	✓	✓	✓	✓	✓
						2	Pelestarian Budaya	✓	✓	✓	✓	✓
MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif												
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Penguatan Sistem Pengendalian Interen	1	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
						2	Peningkatan Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah	✓	✓	✓	✓	✓
						3	Penerapan Zona integritas dalam area pelayanan public melalui " Gerakan Kota Anti Korupsi "	✓	✓	✓	✓	✓
				2	Peningkatan Penyenggaraan Pemerintah daerah	1	Peningkatan capaian kinerja daerah	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
			2 Peningkatan peran dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	√	√	√	√	√
			3 Optimalisasi penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip	√	√	√	√	√
			4 Penyelenggaran Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi “Smart City”	√	√	√	√	√
			5 Meningkatkan profesionalisme ASN	√	√	√	√	√
	12 Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	1 Penguatan Reformasi Birokrasi	1 Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berstandar ISO	√	√	√	√	√
			2 Peningkatan Implementasi teknologi dalam pelayanan publik	√	√	√	√	√
6 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	13 Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	1 Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui “SATIMISAKE”	√	√	√	√	√
			2 Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	√	√	√	√	√
			3 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	√	√	√	√	√
	14 Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1 Mendorong pemberdayaan perempuan	1 Peningkatan pemberdayaan gender dalam pembangunan	√	√	√	√	√

6.3 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Program-program pembangunan Kota Padang Panjang untuk periode 2018-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Berikut rumusan program pembangunan daerah yang dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra PD dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah pada Tabel 6.3

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kota Padang Panjang

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					234,466,047,675		299,872,850,544		325,235,245,519		342,199,829,409		375,070,071,801		1,576,289,409,947			
MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan					71,317,229,000		100,956,810,151		96,484,859,311		105,293,372,747		120,369,013,628		493,866,939,837			
T1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,81	5,96	67,734,321,400	6,04	93,511,502,856	6,11	89,517,883,896	6,19	98,093,347,728	6,30	112,967,971,716	6,30	461,825,027,596			
	S1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	2,79	3,05	11,532,498,100	3,17	22,516,588,706	3,3	22,284,011,038	3,43	22,147,237,273	3,56	23,611,548,688	3,56	102,091,883,805			
		Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	4,57	5,02		5,24		5,47		5,69		5,92		5,92				
		Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri	2,19	2,28		2,33		2,37		2,42		2,46		2,46				
		Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,48	7,61		7,67		7,73		7,80		7,86		7,86				
	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase pasar ber-SNI dan tertib ukur	0	15.00%	197,545,000	30.00%	6,369,007,096	50.00%	6,948,342,242	75.00%	6,278,776,693	100.00%	8,112,941,093	100.00%	27,906,612,124	Dinas Koperasi, Perdagangan, UMKM	
	2	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Peningkatan produktifitas IKM	5%	5%	1,343,544,000	10.00%	1,346,070,000	15.00%	1,316,070,000	20.00%	1,366,070,000	25%	1,366,070,000	35%	6,737,824,000	Diperindag UMKM	
	3	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	30 Usaha Mikro	70 Usaha Mikro	467,000,000	120 UM	525,000,000	180 UM	350,000,000	250 UM	400,000,000	330 UM	350,000,000	330 UM	2,092,000,000	Diperindag UMKM	
	4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif berpola syariah	31.3%	37.50%	734,340,000	43.75%	1,058,400,000	62.25%	1,042,770,000	81.25%	934,158,500	89.58%	966,616,425	89.58%	4,736,284,925	Diperindag UMKM	
	5	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 objek	4 objek	2,664,316,000	5 objek	3,261,598,750	6 objek	3,083,324,340	7 objek	3,746,451,837	7 objek	3,311,777,229	7 objek	16,067,468,156	Dinas Pariwisata	
	6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	25%	33.00%	2,385,225,000	50.00%	3,537,195,000	67.00%	3,541,002,600	83.00%	3,256,847,800	100.00%	3,542,195,000	100.00%	16,262,465,400	Dinas Pariwisata	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Percentase Angka Kecukupan Energi (%) AKE)	97.83%	100%	882,304,800	100%	688,000,000	100%	717,500,000	100%	650,850,000	100%	658,685,000	100%	3,597,339,800	Dinas Pangan Pertanian
				Percentase Angka Kecukupan Protein (%) AKP)	104.04%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		8	Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan	Produksi Tanaman Hias	71,548	73,847	-	76,062	3,013,414,400	79,105	2,540,382,192	83,060	2,988,793,213	87,213	2,678,946,839	87,213	11,221,536,644	Dinas Pangan Pertanian
				Produktivitas Padi	6,42 ton/ha	5,7 ton/ha		5,8 ton/ha		6,2 ton/ha		6,3 ton/ha		6,4 ton/ha		6,4 ton/ha		
				Luas Lahan Pertanian Organik	9.7 ha	9.7 ha		10.7 ha		11.7 ha		12.7 ha		12.7 ha		12.7 ha		
		9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	720.64	650.00	590,609,000	680.00	614,195,360	700.00	641,082,374	720.00	670,405,669	750.00	703,421,896	750	3,219,714,300	Dinas Pangan Pertanian
		10	Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	Percentase Peningkatan Produktivitas Peternakan/Produk Peternakan	4%	5%	1,973,464,300	6%	1,588,708,100	7%	1,468,537,290	8%	1,239,883,561	9%	1,255,895,205	9%	7,526,488,456	Dinas Pangan Pertanian
		11	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang terdaftar	2 investor	18 investor	294,150,000	20 investor	515,000,000	23 investor	635,000,000	25 investor	615,000,000	28 investor	665,000,000	114 investor	2,724,150,000	Dinas PMPTSP
	S2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Percentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	na	0.50	56,201,823,300	0.75	70,994,914,150	1.00	67,233,872,858	1.25	75,946,110,455	1.50	89,356,423,028	1.50	359,733,143,791		
			IKLH		66.17	65.25-66.57		65.52-66.84		65.79-67.14		66.09-67.38		66.33-67.65		66.33-67.65		
		1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	Percentase Ketersediaan Sarana publik	0	20%	11,811,680,000	40%	3,600,000,000	70%	15,400,000,000	88%	23,220,660,680	100%	23,021,934,062	100%	77,054,274,742	DINAS PUPR
		2	Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Percentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	0	17%	3,729,975,000	33%	2,800,000,000	50%	2,800,000,000	83%	2,758,520,000	100%	2,800,000,000	100%	14,888,495,000	DINAS PUPR
		3	Program Pembangunan Rehabilitasi jalan dan jembatan	Percentase jalan dalam kondisi baik	88.41%	90.50%	10,119,550,000	91.50%	11,190,815,250	92.50%	12,830,098,513	93.50%	11,961,908,438	94.50%	22,717,341,673	94.50%	68,819,713,873	DINAS PUPR
		4	Program Penerangan jalan Umum	Percentase Penerangan jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota)	61.64%	71%	2,373,749,600	75%	4,065,000,000	80%	5,404,950,000	85%	5,388,945,000	90%	4,991,761,757	90%	22,224,406,357	DINAS PUPR
		5	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Percentase perlengkapan Fasilitas Keselamatan yang berkualitas	80.15%	80.40%	598,750,000	81.98%	1,064,020,000	83.03%	2,931,520,000	83.73%	1,774,020,000	84.78%	2,161,520,000	84.78%	8,529,830,000	Dinas Perhubungan
		6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Percentase RTH Publik	2.46%	2.6%	4,490,007,550	2.7%	22,605,000,000	2.8%	4,518,000,000	2.9%	3,737,400,000	3.0%	13,455,555,681	3.0%	48,805,963,231	DINAS PUPR

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	7	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan BerIMB per Satuan bangunan	0.762	0.766	728,098,800	0.767	7,698,650,000	0.768	6,346,716,147	0.769	10,727,877,484	0.770	3,651,783,060		29,153,125,491	DINAS PUPR	
	8	Program Pencegahan Dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	0	2 kelurahan	1,756,381,000	8 kelurahan	394,380,500	12 kelurahan	428,318,550	14 kelurahan	412,000,000	16 kelurahan	400,000,000	16 kelurahan	3,391,080,050	BPBD Kesbangpol	
	9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Percentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	80%	80%	7,836,171,350	75%	10,160,621,350	74%	9,123,524,260	73%	8,486,620,714	72%	8,597,715,899	72%	44,204,653,573	Dinas Perkim LH	
	10	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis Penghargaan	2 Jenis Penghargaan	1,076,520,000	2 Jenis Penghargaan	1,051,411,625	2 Jenis Penghargaan	1,066,310,912	2 Jenis Penghargaan	1,081,429,328	3 Jenis Penghargaan	1,096,770,140	3 Jenis Penghargaan	5,372,442,004	Dinas Perkim LH	
	11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Percentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang	36,84%	45-43%	1,110,975,000	43-41%	1,341,347,925	41-39%	1,294,421,102	39-37%	1,339,552,267	37-35%	1,386,842,886	37-35%	6,473,139,180	Dinas Perkim LH	
	12	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	79%	81%	10,569,965,000	84%	5,023,667,500	86%	5,090,013,375	88%	5,057,176,544	91%	5,075,197,871	91%	30,816,020,290	Dinas Perkim LH	
T2	<i>Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat</i>		PDRB Perkapita	44.12	48.19	3,582,907,600	50.42	7,445,307,295	52.80	6,966,975,415	55.34	7,200,025,019	58.05	7,401,041,912	58.05	32,041,912,240		
	S3	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	Angka Kemiskinan	6.17	5.45	2,820,095,300	5.03	5,972,835,000	4.6	5,677,428,750	4.18	5,782,252,188	3.75	5,887,316,797	3.75	26,139,928,034		
		Indeks Gini		0.30	0.28		0.27		0.26		0.25		0.24		0.24			
	1	Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin	Percentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor UMKM menerima bantuan Kewirausahaan yang digunakan untuk usaha	29%	43%	1,469,950,000	57%	1,700,000,000	71%	1,700,000,000	85%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	8,269,950,000	Diperindag UMKM	
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Pertanian	Percentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor pertanian menerima Bantuan Pertanian	18.00%	35.00%	457,395,300.00	47.00%	500,110,000.00	65.00%	500,110,000.00	82.00%	500,110,000.00	90.00%	500,110,000.00	90.00%	2,457,835,300	Dinas Pangan Pertanian	
	3	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Rasio Rumah layak Huni	92.65%	93.54%	892,750,000	94.43%	1,872,725,000	95.32%	1,477,318,750	96.21%	1,482,142,188	97.10%	1,487,206,797	97.10%	7,212,142,734	Dinas Perkim LH	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Berprestasi	Persentase Siswa miskin yang memperoleh biaya pendidikan	11.60%	11,8%	-	11,8%	1,900,000,000	11,8%	2,000,000,000	11,8%	2,100,000,000	11,8%	2,200,000,000	11,8%	8,200,000,000	Disdikpora
				Persentase Siswa berprestasi yang memperoleh beasiswa Perguruan Tinggi Luar Negeri	NA	NA		26		52		78		78		78		
	S4	Menurunnya angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.43	4.84	133,467,500	4.72	505,597,500	4.59	354,500,000	4.47	450,725,000	4.34	513,472,500	4.34	1,957,762,500	
		1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penambahan kesempatan kerja	481	494	133,467,500	507	505,597,500	520	354,500,000	535	450,725,000	551	513,472,500	2607	1,957,762,500	DPMPTSP
	S5	Meningkatnya pendapatan masyarakat		Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	10.24	10.29	629,344,800	10.31	966,874,795	10.34	935,046,665	10.36	967,047,831	10.39	1,000,252,615	10.39	3,944,221,706	
		1	Program Pengembangan Rumah Wirausaha	Persentase Cakupan Bina UMKM	1.64%	1.64%	554,345,000	2.01%	760,000,000	2.38%	775,000,000	2.76%	805,000,000	3.13%	830,000,000	3.13%	3,170,000,000	Diperindag UMKM
		2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan Pembinaan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan	45.45%	56.06%	74,999,800	66.67%	206,874,795	76.77%	160,046,665	88.89%	162,047,831	100.00%	170,252,615	100.00%	774,221,706	Dinas Pangan Pertanian
MISI 2: Menigitkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhhlak dan berbudaya							136,589,964,500		158,329,101,199		184,535,741,960		189,726,449,129		203,906,250,776		873,087,217,565	
T3	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhhlak dan unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,01	78,25	119,875,292,000	78,86	142,346,851,199	79,48	166,608,006,760	80,10	172,397,108,704	80,72	185,245,160,913	80,72	786,472,419,576		
	S6	Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan		Rata-rata lama sekolah	11,43	11,88	32,496,753,500	12,11	45,012,173,836	12,33	46,980,730,189	12,56	52,558,243,268	12,78	80,210,060,468	12,78	257,257,961,260	
		Harapan Lama Sekolah			15,03	15,27		15,38		15,50		15,62		15,74		15,74		
	1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan / jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	21.965	23,400	2,493,971,000	25,200	3,365,875,000	27,000	4,157,818,750	28,800	11,408,554,688	30,600	40,543,270,847	30,600	61,969,490,284	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	2	Program Padang Panjang Juara	Prestasi Pendidik/Tenaga Kependidikan/Peserta Didik di tingkat Provinsi dan nasional	15 prestasi Tk provinsi	17 prestasi Tk provinsi	855,800,000	20 Prestasi TK Provinsi, 1 nasional	2,739,945,250	23 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	3,025,884,873	26 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	3,405,188,875	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	4,157,676,284	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	14,184,495,281	Disdikpora	
			Rasio sekolah yang melaksanakan pembinaan Imaaq dan Program Tahfidz secara terpadu terhadap seluruh sekolah	10%	60%			70%		80%		90%		100%		100%	0	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs	99,8%	100%	2,062,488,500	100%	3,447,156,536	100%	3,393,613,884	100%	3,440,768,093	100%	3,488,629,614	100%	15,832,656,627	Disdikpora
					99,8%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD/MI/Paket A	109%	108.91	21,219,658,000	110.91	13,966,942,000	112.91	14,181,545,280	114.91	14,359,484,971	116.91	14,587,715,377	116.91	78,315,345,628	Disdikpora
				APM SD/MI/Paket A	96.72%	96.80%		97.67%		98.54%		99.41%		100%		100%		
				APK SMP/MTs/Paket B	101.18%	102.90%		103.57%		104.23%		104.90%		105.57%		105.57%		
				APM SMP/MTs/Paket B	82.05%	82.07%		83.07%		84.07%		85.07%		86.07%		86.07%		
		5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (4-6 tahun)	92,54%	95,00%	4,698,175,000	100%	6,723,992,500	100%	6,391,091,750	100%	6,542,900,925	100%	6,799,891,018	100%	31,156,051,193	Disdikpora
				Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun)	46,55%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
				Rasio PAUD yang terintegrasi Posyandu dan BKB		40%		50%		60%		70%		80%		80%		
		6	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Pendidikan Paket A/B/C	90%	90%		92%	1,166,661,000	94%	1,762,547,378	96%	1,924,497,066	100%	2,112,656,704	100%	8,589,046,698	Disdikpora
				Persentase penduduk usia 15 tahun keatas tamat SLTA/sederajat		70%		72%		74%		76%		80%		80%		
		7	Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Rasio SD/TK yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana	58%	60%	13,145,578,000	70%	14,068,228,274	80%	11,476,848,651	90%	8,520,220,625	100%	47,210,875,550	Disdikpora		
				Rasio SMP/MTs yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana	58%	65,65%		70,00%		77%		84%		90%		90%		
				Sekolah pendidikan SD/TK kondisi bangunan baik	58%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
				Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	90%	92%		94%		96%		96%		96%		96%		
	S7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (AHH)	72,46	72,47	87,378,538,500	72,47	97,334,677,363	72,48	119,627,276,572	72,48	119,838,865,436	72,49	105,035,100,445	72,49	529,214,458,315		
	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	25%	35%	15,420,484,500	45%	5,753,275,800	55%	5,092,103,634	75%	6,070,320,996	85%	6,243,453,754	85%	38,579,638,684	Dinas Kesehatan	
				Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan kesehatan	94,89	96,25		97,17		98,09		99,01		100,00		100,00		

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2	Program Pembekalan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Kurang	5.74%	5.60%	198,074,000	5.00%	322,161,250	4.60%	350,122,375	4.30%	387,867,113	3.00%	426,653,824	3.00%	1,684,878,562	Dinas Kesehatan	
	3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah tangga yang Ber PHBS	44%	44%	729,200,000	50%	1,090,815,000	55%	1,094,005,000	60%	1,097,514,000	65%	1,101,404,000	70%	5,112,938,000	Dinas Kesehatan	
	4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase UCI	81.35%	90.00%	303,523,000	91.00%	552,227,300	92.25%	570,345,640	96.25%	589,578,290	100%	609,457,338	100%	2,625,131,568	Dinas Kesehatan	
	5	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Cakupan Pembinaan Olahraga	27 cabang	28 cabang	1,474,420,000	31 cabang	1,305,000,000	34 cabang	1,500,250,000	36 cabang	11,499,000,000	36 cabang	1,450,000,000	36 cabang	17,228,670,000	Disdikpora	
			Penyelenggaraan Event Olahraga	4 Event Lokal	7 Event Lokal, 1 Event Prov													
	6	Program peningkatan mutu layanan kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	Persentase pemenuhan jenis pelayanan sesuai standar	81.00%	85.00%	52,000,000,000	90%	52,000,000,000	90%	52,000,000,000	95%	52,000,000,000	100%	52,000,000,000	95%	260,000,000,000	RSUD	
	7	Program pelayanan Kesehatan	Tingkat kepuasan pelayanan kesehatan	80.00%	81.00%	0	82.00%	11,946,918,363	83%	12,291,566,290	84%	12,567,357,223	85%	12,851,917,324	85%	49,657,759,200	Dinas Kesehatan	
	8	Program pengendalian penduduk dan KB	Angka pemakaianan kontrasepsi/CPR	58.00%	58.99	2,601,887,000	60.02	2,993,532,150	60.91	3,149,598,758	61.68	3,298,978,695	62.35	3,537,677,630	62.35	15,581,674,233	DSPPKB3A	
			Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	37.50%	41,67%													
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan RIPP	NA	100%													
	9	Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Persentase kelengkapan sarana RSUD sesuai dengan standar yang dibutuhkan	69.57%	69.57%	13,495,950,000	78.26%	14,170,747,500	79.57%	14,879,284,875	85.22%	15,623,249,119	86.96%	26,404,411,575	86.96%	84,573,643,068	RSUD	
	10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase tersedianya pusat kegiatan olah raga (Sport Centre)	0.00%	10.00%	1,155,000,000	25.00%	7,200,000,000	50.00%	28,700,000,000	100.00%	16,705,000,000	100.00%	410,125,000	100.00%	54,170,125,000	DISDIKPORA	
T4	<i>Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenram dan agamis</i>		<i>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum</i>	95.16	96.37	16,714,672,500	97.28	15,982,250,000	98.19	17,927,735,200	99.09	17,329,340,425	100.00	18,661,089,864	100.00	86,614,797,989		
	S8	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	95.16	96.37	4,558,679,000	97.28	3,655,520,000	98.19	3,575,520,000	99.09	3,580,520,000	100.00	3,665,520,000	100.00	19,035,469,000		

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani	95%	97%	4,558,679,000	99%	3,655,520,000	100%	3,575,520,000	100%	3,580,520,000	100%	3,665,520,000	98%	19,035,469,000	Satpol PP Damkar
	S9	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Persentase Penurunan jumlah PMKS	2.94	2.34	1,605,048,500	2.04	2,398,000,000	1.43	2,304,800,000	1.73	2,380,950,000	1.13	2,290,247,000	1.13	10,979,045,500	
		1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Rumah Tangga miskin	1.6%	2%	608,583,500	2.5%	837,000,000	3.0%	873,250,000	3.5%	902,950,000	4%	943,097,000	4%	4,164,880,500	Dinas Sosial PPKBPPPA
		2	Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Persentase lansia yang tertangani,	29.15%	100%	996,465,000	100%	1,561,000,000	100%	1,431,550,000	100%	1,478,000,000	100%	1,347,150,000	100%	6,814,165,000	Dinas Sosial PPKBPPPA
				persentase penyandang disabilitas yang tertangani,	25.93%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				persentase korban bencana yang tertangani,	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan,	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				persentase penanganan gelandangan, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	35%	40%		45%		50%		55%		60%		60%		
	S10	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat		Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid	20.39	38.82	10,550,945,000	56.58	9,928,730,000	74.34	12,047,415,200	90.79	11,367,870,425	100.00	12,705,322,864	100.00	56,600,283,489	
		1	Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan keagamaan	Peringkat prestasi kafilah MTQ di tingkat provinsi	9	9	9,360,475,000	-	8,668,730,000	8	10,771,415,200	-	9,924,270,425	7	11,192,362,864	100%	49,917,253,489	Bagian Kesra Setdako
			Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat provinsi	1	1	2	3	4%	5	5								
		2	Program Pemajuan Kebudayaan	Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan (10 Objek)	NA	2 Objek (Seni, Pengetahuan Tradisional)	1,190,470,000	4 Objek (+ Adat Istiadat, Permainan Rakyat)	1,260,000,000	6 Objek (+ Tradisi Lisan, Teknologi Tradisional)	1,276,000,000	8 Objek (+ Bahasa, Olahraga Tradisional)	1,443,600,000	10 Objek (+ Ritus, Manuskrip)	1,512,960,000	10 Objek (+ Ritus, Manuskrip)	6,683,030,000	Disdikpora
MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif							26,558,854,175		40,586,939,194		44,214,644,248		47,180,007,533		50,794,807,397		209,335,252,546	
T5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	54,94	62.00	18,668,455,775	64.00	16,377,878,869	66.00	17,317,743,057	68.00	15,955,435,682	70.00	16,831,643,704	70.00	85,151,157,086		

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	S11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah	CC (58)	B (60,1)	16,940,217,275	B (65)	14,164,841,819	BB (70,1)	14,170,809,404	BB (75)	13,302,151,384	A (80,02)	13,695,925,134	A (80,02)	72,273,945,016		
			Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	72.00%	80.00%	973,411,700	83.00%	897,100,000	85.00%	1,141,205,000	85.00%	937,415,250	85.00%	1,225,736,013	85.00%	5,174,867,963	BAPPEDA	
	2	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbagian.	58%	70.00%	1,515,900,000	75.00%	765,000,000	80.00%	755,000,000	85.00%	900,000,000	90.00%	575,000,000	90.00%	4,510,900,000	BAPPEDA	
	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Level Maturitas SPIP	LEVEL 2	LEVEL 3 (3.00)	965,260,000	LEVEL 3 (3.10)	479,500,000	LEVEL 3 (3.30)	537,000,000	LEVEL 3 (3.50)	593,000,000	LEVEL 3 (3.70)	645,000,000	LEVEL 3 (3.70)	3,219,760,000	Inspektorat Kota	
	4	Program Pelaksanaan Peningkatan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi	Indeks integritas (1-10)	NA	0	0	2	530,000,000	4	650,000,000	5	700,000,000	6	750,000,000	6	2,630,000,000	Inspektorat Kota	
	5	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP ≥ 50	7	8	243,346,250	10	144,000,000	12	144,000,000	14	144,000,000	16	144,000,000	16	819,346,250	Bag Organisasi	
	6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran dan perbendaharaan daerah	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	1,503,190,000	Tepat waktu	1,264,477,200	Tepat waktu	1,517,372,640	Tepat waktu	1,791,454,080	Tepat waktu	2,086,504,896	Tepat waktu	8,162,998,816	BPKD	
	7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaporan penyajian data Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	273,568,000	Tepat waktu	308,373,600	Tepat waktu	370,048,320	Tepat waktu	444,057,984	Tepat waktu	532,869,581	Tepat waktu	1,928,917,485	BPKD	
	8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip daerah	Persentase kenaikan arsip statis	4.2%	7.70%	422,897,000	11.00%	675,000,000	11.60%	860,000,000	12.10%	730,000,000	12.90%	423,000,000	13%	3,110,897,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	9	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik	NA	2.6%	2,388,755,325	2.65%	2,848,031,019	2.7%	2,909,823,444	2.85%	2,742,369,070	3%	2,783,114,645	3%	13,672,093,503	Dinas Kominfo	
	10	Program e-Government	Persentase implementasi e-government	NA	64.0%	7,990,214,000	73.00%	5,743,360,000	82.0%	4,776,360,000	91.00%	3,809,855,000	100%	4,020,700,000	100%	26,340,489,000	Dinas Kominfo	
	11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis, bimtek dan sosialisasi pertahun	NA	7%	663,675,000	8%	510,000,000	9%	510,000,000	10%	510,000,000	11%	510,000,000	11%	2,703,675,000	BKPSDM	

TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	S12	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,64 (Baik)	78 (Baik)	1,728,238,500	79 (Baik)	2,213,037,050	80 (Baik)	3,146,933,653	81 (Baik)	2,653,284,298	82 (Baik)	3,135,718,569	82 (Baik)	12,877,212,070		
	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Percentase penduduk yang memiliki dokumen adminduk	80%	85%	1,059,569,000	88%	1,333,089,550	92%	1,563,744,028	96%	1,453,866,229	98%	1,720,887,790	98%	7,131,156,597	Dinas Duk Capil	
	2	Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai rata-rata kualitas pelayanan publik	na	3,25%	438,730,000	3,3%	404,947,500	3,35%	458,189,625	3,4%	519,418,069	3,45%	589,830,779	3,45%	2,411,115,973	Bag Organisasi	
	3	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Percentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100%	100%	38,939,500	100%	30,000,000	100%	530,000,000	100%	200,000,000	100%	230,000,000	100%	1,028,939,500	DPMPTSP	
	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Percentase keakuratan data	99,65	99,75%	191,000,000	99,85%	445,000,000	99,90%	595,000,000	99,95%	480,000,000	99,98%	595,000,000	99,98%	2,306,000,000	Dinas Duk Capil	
T6	<i>Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</i>		% partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2,29	2,30	7,890,398,400	2,31	24,209,060,325	2,32	26,896,901,191	2,33	31,224,571,851	2,34	33,963,163,693	2,34	124,184,095,460		
	S13	Meningkatnya peran serta kelompok /lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	n/a	70	7,546,494,400	75	23,924,060,325	80	26,586,901,191	85	30,889,571,851	90	33,603,163,693	90	122,550,191,460		
	1	Program Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan	Percentase Nilai Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	16%	18%	3,902,350,400	19%	20,843,955,325	20%	23,361,696,191	21%	27,610,866,851	22%	30,227,108,693	22%	105,945,977,460	Kecamatan	
	2	Program peningkatan kelembagaan masyarakat	Percentase LPM Aktif	15.79%	26.32	2,186,607,000	36,84%	1,532,000,000	47,37%	1,542,000,000	63,16%	1,552,000,000	73,68%	1,562,000,000	73,68%	8,374,607,000	Dinas Sosial PPKBPPA	
			Percentase PKK Aktif	15.79%	26.32		36,84%		47,37%		63,16%		73,68%		73,68%			
			Swadaya masyarakat terhadap program		0.04%		4.50%		5.00%		5.50%		6.00%		6.00%			
			Percentase swadaya masyarakat terhadap	4%	4,5%		5.00%		5.5%		6.00%		6.00%		6.00%			
			Percentase lembaga adat yang Aktif	37.50%	50%		62.50		75.00		87.50		100.00		100.00			
	3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Percentase organisasi pemuda yang aktif	40%	60%	1,116,012,000	65%	1,250,000,000	70%	1,335,000,000	75%	1,423,500,000	80%	1,465,850,000	80%	6,590,362,000	Disdikpora	
	4	Program Pemenuhan HAK dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Percentase Forum Anak yang Aktif	5.26%	15.79%	341,525,000	26.32%	298,105,000	36.84%	348,205,000	47.37%	303,205,000	57.89%	348,205,000	57.89%	1,639,245,000	Dinas Sosial PPKBPPA	
			Percentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	na	63.00%		63.00%		65.00%		70.00%		73.00%		73.00%			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	S14	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	76.10	77.50	343,904,000	78.90	285,000,000	80.30	310,000,000	81.70	335,000,000	83.10	360,000,000	83.10	1,633,904,000		
	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase ARG terhadap APBD	8.84% 66.67%	9.00%	343,904,000	9.50%	285,000,000	10.00%	310,000,000	10.50%	335,000,000	11.00%	360,000,000	11.00%	1,633,904,000	Dinas Sosial PPKBPPA	
			Persentase organisasi perempuan yang aktif		68.00%		70.00%		73.00%		75.00%		78.00%		78.00%			

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta indikasi program Perangkat Daerah yang disertai dengan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Program yang dihabarkan tersebut merupakan program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun program untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang disusun dengan menetapkan target kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, yakni tahun 2018-2023.

Indikasi rencana program dan kegiatan disesuaikan dengan analisa kebutuhan berdasarkan perumusan permasalahan pembangunan maupun permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan serta isu strategis yang ada. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023 yang disajikan berdasarkan misi pembangunan disajikan pada Tabel 7.1:

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal bus'ness dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakan untuk beberapa dokumen, antara Lain:

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kota Padang Panjang

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indeks	5,81	5,96	6,04	6,11	6,19	6,30	6,30
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,79	3,05	3,17	3,30	3,43	3,56	3,56
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	%	4,57	5,02	5,24	5,47	5,69	5,92	5,92
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri	%	2,19	2,28	2,33	2,37	2,42	2,46	2,46
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7,48	7,61	7,67	7,73	7,80	7,86	7,86
6	Persentase kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur	%	na	0.50	0.75	1	1.25	1.50	1.50
7	IKLH	Indeks	66,17	65,25-66,57	65,62-66,84	65,79-67,14	66,33-67,65	66,33-67,65	66,33-67,65
8	PDRB Perkapita	Rp.juta	44,12	48,19	50,42	52,80	55,34	58,05	58,05
9	Indeks Gini	Indeks	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24
10	Angka Kemiskinan	%	6,17	5,45	5,03	4,60	4,18	3,75	3,75
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,43	4,84	4,72	4,59	4,47	4,34	4,34
12	Pengeluaran perkapita (Daya Beli masyarakat)	(Ribu Rupiah)	10,24	10,29	10,31	10,34	10,36	10,39	10,39
13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,01	78,25	78,86	79,48	80,10	80,72	80,72
14	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,43	11,88	12,11	12,33	12,56	12,78	12,78
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,03	15,27	15,38	15,50	15,62	15,74	15,74
16	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	72,46	72,47	72,47	72,48	72,48	72,49	72,49
17	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum	%	95,16	96,37	97,28	98,19	99,09	100	100
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54,94	62	64	66	68	70	70

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
19	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	CC (58)	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)	A (80,02)
20	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,44 (Baik)	78 (Baik)	79 (Baik)	80 (Baik)	81 (Baik)	82 (Baik)	82 (Baik)
22	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	2,29	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	2,34
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	76,10	77,5	78,9	80,3	81,7	83,1	83,1

8.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah ini didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.2 sebagai berikut:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Padang Panjang

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Pelayanan Urusan Wajib								
	Terkait Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan								
a	APK SD/MI/Paket A	%	108,89	108,91	110,91	112,91	114,91	116,91	116,91
b	APM SD/MI/Paket A	%	96,72	96,80	97,67	98,54	99,41	100,00	100,00
c	APK SMP/MTs/Paket B	%	101,18	102,90	103,57	104,23	104,90	105,57	105,57
d	APM SMP/MTs/Paket B	%	81,10	82,07	83,07	84,07	85,07	86,07	86,07
e	Prestasi Pendidik/ Tenaga Kependidikan/ Peserta Didik di tingkat Provinsi dan nasional	Prestasi	15 Prestasi Tingkat Provinsi	17 prestasi Tk provinsi	20 Prestasi TK Provinsi, 1 provinsi, 1 nasional	23 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	26 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional
f	Rasio sekolah yang melaksanakan pembinaan Imtaq dan Program Tahfidz secara terpadu terhadap seluruh sekolah	%	NA	60	70	80	90	100	100
g	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs	%	99,8	100	100	100	100	100	100
h	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	%	99,8	100	100	100	100	100	100
i	Rasio SD/TK yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana	%	58	60	70	80	90	100	100
j	Rasio SMP/MTs yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana	%	58	65,65	70	77	84	90	90
k	Sekolah pendidikan SD/TK kondisi bangunan baik	%	58	60	70	80	90	100	100
l	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	90	92	94	96	96	96	96
m	Persentase Siswa miskin yang memperoleh biaya pendidikan ke Perguruan Tinggi	%	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
n	Jumlah Siswa berprestasi yang memperoleh beasiswa perguruan tinggi luar negri	orang	na	na	26	52	78	78	78
o	APK PAUD (4-6 tahun)	%	92,54	95	100	100	100	100	100
p	Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun)	%	46,55	80	85	90	95	100	100
q	Rasio PAUD yang terintegrasi Posyandu dan BKB	%	NA	40	50	60	70	80	80
r	Angka Kelulusan Pendidikan Paket A/B/C	%	90	90	92	94	96	100	100
s	Angka Penduduk usia 15 tahun ke atas tamat SLTA/Sederajat	%	NA	70	72	74	76	80	80

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Kesehatan								
a	Persentase Keluarga Sehat	%	25	35	45	55	75	85	85
b	Persentase Balita Gizi Kurang	%	5,74	5.60	5.00	4.60	4.30	3.00	3.00
c	Persentase Rumah tangga yang Ber PHBS	%	44	50	55	60	65	70	70
d	Persentase UCI	%	81,35	90.00	91.00	92.25	96.25	100	100
e	Tingkat kepuasan pelayanan kesehatan	%	na	81	82	83	84	85	85
f	Persentase kelengkapan sarana RSUD sesuai dengan standar yang dibutuhkan	%	69.57	69.57	78.26	79.57	85.22	86.96	86.96
g	Persentase Pemenuhan Jenis Pelayanan Sesuai Standar	%	81	85	90	90	95	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
a	Persentase Ketersediaan Sarana publik	%	0	20	40	70	88	100	100
b	Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	%	na	27	44	61	81	100	100
c	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	88.41	90.50	91.50	92.50	93.50	94.50	94.50
d	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	%	0%	17	33	50	83	100	100
e	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	87.86	88	89	90	91	92	92
f	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara	%	na	90	91	92	93	94	94
g	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	%	79	81	83	85	87	89	89
h	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	%	58	62	64	66	68	70	70
i	Persentase Penerangan Jalan Umum	%	61.64	71	75	80	85	90	90
j	Persentase RTH Publik	%	2.46	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0
k	Cakupan Pelayanan Air limbah,	%	77.06	79	80	81	82	83	83
l	Cakupan Pelayanan Air minum	%	91,09	100	100	100	100	100	100
m	Rasio Bangunan BerIMB per Satuan bangunan		0.762	0.766	0.767	0.768	0.769	0.770	0.770
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
a	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	%	79	81	84	86	88	91	91
b	Rasio Rumah layak Huni	%	92.65	93.54	94.43	95.32	96.21	97.10	97.10
c	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	%	80	80	75	74	73	72	72

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
a	Persentase Pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani	%	95	97	99	100	100	100	100
b	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja satuanmas	kali	na	2	3	2	2	3	3
c	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	%	90	90	91	92	93	94	94
6	Sosial								
a	Persentase Penurunan Rumah Tangga miskin	%	1,6	2	2.5	3.0	3.5	4	4
b	Persentase lansia yang tertangani,	%	100	100	100	100	100	100	100
c	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani,	%	100	100	100	100	100	100	100
d	Persentase korban bencana yang tertangani,	%	100	100	100	100	100	100	100
e	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan,	%	100	100	100	100	100	100	100
f	Persentase penanganan gelandangan, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	%	35	40	45	50	55	60	60
g	Persentase korban bencana yang tertangani	%	na	100	100	100	100	100	100
h	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan anak jalanan	%	na	100	100	100	100	100	100
i	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	na	65	70	75	80	90	90
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
7	Tenaga Kerja								
a	Jumlah Penambahan kesempatan kerja	org	481	494	507	520	535	551	2607
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
a	Persentase Forum Anak yang Aktif	%	5,26	15.79	26.32	36.84	47.37	57.89	57.89
b	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	%	-	62.00	63.00	65.00	70.00	73.00	73.00
c	Persentase ARG terhadap APBD	%	8,84	9.00	9.50	10.00	10.50	11.00	11.00
d	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	66.67	68.00	70.00	73.00	75.00	78.00	78.00
9	Pangan								
a	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	%	97.83	100	100	100	100	100	100
b	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	%	104.04	100	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
10	Lingkungan Hidup								
a	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup	jenis penghargaan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
b	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang	%	36,84	45-43	43-41	41-39	39-37	37-35	37-35
c	Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	%	30	40	45	50	55	60	60
11	Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
a	Persentase penduduk yang memiliki dokumen adminduk	%	80	85	88	92	96	98	98
b	Persentase keakuratan data	%	99,65	99,75	99,85	98,90	98,95	98,98	98,98
12	Pemberdayaan Masyarakat								
a	Persentase LPM Aktif	%	15,79	26.32	36,84	47,37	63,16	73,68	73,68
b	Persentase PKK Aktif	%	15,79	26.32	36,84	47,37	63,16	73,68	73,68
c	Persentase lembaga adat yang Aktif	%	37,5	50	62.50	75.00	87.50	100.00	100.00
13	Pengendalian Penduduk dan KB								
a	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	58	58.99	60.08	60.91	61.68	62.35	62.35
b	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	37.5	41.67	45.83	50.00	54.17	58.33	58.33
c	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan RIPP	%	na	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Perhubungan								
a	Persentase layanan angkutan	%	na	0.0145	0.0142	0.0138	0.0136	0.0133	0.0133
b	Persentase perlengkapan Fasilitas keselamatan yang berkualitas	%	80.15	80.40	81.98	83.03	83.73	84.78	84.78
15	Komunikasi dan Informatika								
a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik	indeks	na	2.60	2.65	2.70	2.85	3.0	3.0
b	Persentase implementasi e government	%	na	64.0	73.00	82.0	91.00	100	100
c	Persentase OPD yang telah menerapkan sistem keamanan informasi	%	na	33	50	67	83	100	100
16	Koperasi dan UKM								
a	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	Usaha Mikro	30	70	120	180	250	330	330
b	Persentase Koperasi aktif berpola syariah	%	31.25	37.50	43.75	62.25	81.25	89.58	89.58
c	Persentase Cakupan Bina UMKM	%	1.64	1.80	2.01	2.38	2.76	3.13	3.13

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
17	Penanaman Modal								
a	Jumlah investor yang terdaftar	investor	2	18	20	23	25	28	114
b	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Kepemudaan dan Olah Raga								
a	Persentase Ketersediaan pusat kegiatan olah raga (sport centre)	%	0	10	25	50	100	100	100
b	Cakupan Pembinaan Olahraga (jumlah cabang yang dibina terhadap seluruh cabang olahraga)	cabang	27	28	31	34	36	36	36
c	Penyelenggaraan Event Olahraga	even	4 event lokal	7 Event Lokal, 1 Event Prov	7 Event Lokal, 2 Event Prov	8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional	8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional	8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional	8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional
d	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	40	60	65	70	75	80	80
19	Statistik								
a	Persentase elemen data statistik sektoral yang tersedia	%	80	83	87	90	95	100	100
20	Kebudayaan								
a	Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan (10 Objek)	objek	NA	2 Objek (Seni, Pengetahuan Tradisional)	4 Objek (+ Adat Istiadat, Permainan Rakyat)	6 Objek (+ Tradisi Lisan, Teknologi Tradisional)	8 Objek (+ Bahasa, Olahraga Tradisional)	10 Objek (+ Ritus, Manuskrip)	10 Objek (+ Ritus, Manuskrip)
21	Perpustakaan								
a	Jumlah kunjungan / jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	orang	21.965	23,400	25,200	27,000	28,800	30,600	30,600
22	Kearsipan								
a	Persentase kenaikan arsip statis	%	4,2	7.70	11.00	11.60	12.10	12.90	12.90
	Layanan Urusan Pilihan								
1	Pariwisata								
a	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	%	25	33	50	67	83	100	100
b	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	objek	3	4	5	6	7	7	7

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Pertanian								
a	Produksi Tanaman Hias	tangkai	71.548	73.847	76.062	79.105	83.060	87.213	87.213
b	Produktivitas Padi	ton/ha	6,42	5,7	5,8	6,2	6,3	6,4	6,4
c	Luas Lahan Pertanian Organik	ha	9.7	9.7	10.7	11.7	11.7	12.7	12.7
d	Percentase cakupan Pembinaan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan	%	45.45	56,06	66,67	76,77	88,89	100	100
3	Perdagangan								
a	Percentase pasar ber-SNI dan tertib ukur	%	0	15.00	30.00	50.00	75.00	100.00	100.00
4	Perindustrian								
a	Percentase Peningkatan produktifitas IKM	%	5.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00
b	Percentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor UMKM Menerima bantuan Kewirausahaan yang digunakan untuk usaha	%	29	45	57	71	85	100	100
5	Perikanan dan Kelautan								
a	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	(Ton)	720.64	650	680	700	720	750	750
b	Percentase Penurunan Penyakit Temak/ Hewan	%	na	5	7	7	9	10	10
c	Percentase Peningkatan Produktivitas Peternakan/ Produk Peternakan	%	4	5	6	7	8	9	9
d	Percentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor pertanian menerima Bantuan Pertanian	%	18	35	47	65	82	90	90
	Penunjang Urusan								
1	Perencanaan Pembangunan								
a	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	%	60	65	70	75	80	85	85
b	Percentase rata-rata capaian program bidang ekonomi, sumberdaya alam dan infrastruktur	%	na	75	78	80	83	85	85
c	Penjabaran konsistensi program RP JMD kedalam RKPD	%	79	80	83	85	90	90	90
d	Percentase dokumen perencanaan bidang Sosial budaya yang ditindak lanjuti	%	na	75	78	80	83	85	85
e	Percentase Rata-rata capaian Program Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	%	na	75	78	80	83	85	85

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Keuangan								
a	Penyusunan APBD / APBD P yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
b	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
c	Pelaporan penyajian data Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
d	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	na	5	5	5	5	5	25
3	Kepegawaian								
a	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, bimtek dan sosialisasi	%	na	5	6	7	8	9	9
b	Persentase jumlah pegawai yang menggunakan layanan kepegawaian berbasis IT	%	na	50	65	80	90	100	100
c	Persentase PNS berjabatan sesuai dengan kompetensinya	%	na	55	58	60	70	80	80
d	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti	%	na	70	75	80	85	90	90
4	Penelitian dan Pengembangan								
a	Persentase implementasi rencana kelitbangam.	%	na	70	75	80	85	90	90
b	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	na	20.83	30	45	60	75	75
5	Pengawasan								
a	Level Maturitas SPIP	level	na	LEVEL 3 (3.00)	LEVEL 3 (3.10)	LEVEL 3 (3.30)	LEVEL 3 (3.50)	LEVEL 3 (3.70)	LEVEL 3 (3.70)
b	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Urusan Pengawasan	%	5	20	40	60	80	100	100
d	Indeks integritas (1-10)	indeks	na	0	2	4	5	6	6
e	Persentase APIP yang memperoleh Sertifikat Pelatihan Substansi dan Penjenjangan	%	na	30	30	40	50	60	60
6	Kesekretariatan Daerah								
a	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100
b	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai target kota	OPD	7	13	13	18	18	24	24
c	Jumlah Penataan Kelembagaan	kali	na	1	3	1	1	1	7
d	Jumlah Dokumen Tata Laksana	dok	2	2	3	2	2	2	11
e	Nilai rata2 kualitas pelayanan publik	nilai	na	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45	3.45

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
f	Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan	kecamatan	2	2	2	2	2	2	2
g	Nilai LPPD	nilai	3.014	3,10 (Sangat Tinggi)	3,14 (Sangat Tinggi)	3,15 (Sangat Tinggi)	3,20 (Sangat Tinggi)	3,25 (Sangat Tinggi)	3,25 (Sangat Tinggi)
h	Nilai LKPJ	diterima/ditolak	Diterima	Diterima	Diterima	Diterima	Diterima	Diterima	Diterima
i	Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	%	90	90	90	90	100	100	100
j	Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintahan daerah yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
k	Peringkat Prestasi Kafilah MTQ di Tingkat Provinsi	peringkat	9	9	9	8	7	7	7
l	Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat provinsi	sekolah	1	1	2	3	4	5	5
m	Persentase Implementasi kebijakan perekonomian	%	na	90	90	90	90	90	90
n	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	na	95	95	95	95	95	95
7	Kesekretariatan DPRD								
a	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	%	70	72	76	77	80	80	80
b	Persentase penetapan Perda	%	na	80	80	80	85	85	85
c	Persentase penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat dan media massa	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Pemerintahan Kecamatan								
a	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	nilsi	na	80.0	80.5	81.0	81.5	82.0	82.0
b	Persentase Nilai Partisipasi Masyarakat	%	16	18	19	20	21	22	22
9	Kesatuan Bangsa dan Politik								
a	Persentase penanganan konflik sosial dikelurahan	%	na	60	70	75	80	85	85
b	Jumlah generasi muda yang ditingkatkan wawasan kebangsaannya	org	na	50	50	50	50	50	250
c	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilu Kada	%	na	Pemilu serentak 71%	Pilgup 56%	-	-	Pilkada 73 %	Pemilu Serentak 71%, Pilgub 55%, Pilkada 73 %

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
10	Penanggulangan Bencana Daerah								
a	Kelurahan Tangguh Bencana	kelurah an	0	2	8	12	14	16	16
b	Respon time tanggap darurat	menit	18	18	17	15	13	10	10
c	Lama waktu pendistribusian logistik	menit	180	170	160	155	150	145	140
d	Lama waktu pemberian rekomendasi penanganan pasca bencana	jam	na	48	48	48	48	48	
11	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)								
a	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/ hari	kkal/kap ita/ hari (menu run)	12,04	12,04	11,68	11,32	10,96	10,6	10,6
b	Persentase menaikkan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan(PPH)	%	84,1	84,87	85,65	86,42	87,2	87,98	98,98
c	Persentase peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil	%	96	96	96,5	97	97,5	98	98
d	Persentase menurunnya prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	0,74	0,674	0,608	0,542	0,476	0,41	0,41
e	Total Fertility Rate	% (menu run)	96	83,82	71,65	59,48	47,31	35,14	35,15
f	Persentase menurunnya Unmet Need pelayanan kesehatan menjadi 10,86 %	%	11,68	11,51	11,35	11,18	11,02	10,86	10,86
g	Persentase kenaikan SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	65	66,47	67,95	69,42	70,9	72,38	72,38
h	Persentase kenaikan angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/sederajat	%	108,89	111,28	113,68	116,08	118,48	111,28	111,28
i	Persentase kenaikan angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	%	101,18	101,71	102,24	102,78	103,32	103,84	103,84
j	Jumlah kenaikan kapasitas prasarana air baku	m3/dt	0,405	11,31	22,27	33,13	44,04	54,96	54,96
k	Persentase kenaikan proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minuman dan berkelanjutan	%	92,01	92,74	93,48	94,22	94,95	95,70	95,70
l	Persentase kenaikan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	71,22	73,93	76,64	79,35	82,06	84,77	84,77
m	Persentase kenaikan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (%)	%	10	12,03	14,06	16,09	18,12	20,15	20,15
n	Jumlah kenaikan timbulan sampah yang di daur ulang	Ton/hari	10,74	11,59	12,44	13,302	14,15	15,01	15,01
o	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. Miliar	88,84	94,98	104,72	115,47	127,31	140,38	140,38
p	Pengurangan timbulan sampah	%	16	20	22	24	26	27	27

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. RPJMD disusun melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, top down-bottom up dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dunia usaha/swasta maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaan RPJMD perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD kedalam RENSTRA Perangkat Daerah.
3. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang 5 (lima) tahun kedepan.
4. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, setiap Perangkat Daerah perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD tersebut dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, instansi terkait maupun masyarakat luas.
5. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan hasil kinerja kepala daerah terpilih untuk masa lima tahun dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS RPJMD YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PADANG PANJANG 2018 - 2023

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				#VALUE!		417,019,402,433		448,463,198,026		482,240,940,609		518,628,928,471		#VALUE!		
I	AN WAJIB				#VALUE!		283,885,071,409		308,948,152,892		322,537,589,465		364,932,042,331		#VALUE!		
A	LAYANAN DASAR (BL)				#VALUE!		250,292,141,245		271,517,714,732		280,226,336,034		293,302,596,343		#VALUE!	URUSAN WAJIB	
1.	PENDIDIKAN				49,947,965,750		57,594,984,836		80,695,447,439		77,415,194,580		59,839,874,621		325,493,467,226	DINAS PENDIDIKAN, PO	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA				49,947,965,750		57,594,984,836		80,695,447,439		77,415,194,580		59,839,874,621		325,493,467,226	DINAS PENDIDIKAN, PO	
	BELANJA LANGSUNG				49,947,965,750		57,594,984,836		80,695,447,439		77,415,194,580		59,839,874,621		325,493,467,226	DINAS PENDIDIKAN, PO	
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD/MI/Paket A		108,89%	108,91%	21,219,658,000	110,91%	13,966,942,000	112,91%	14,181,545,280	114,91%	14,359,484,971	116,91%	14,587,715,377	116,91%	78,315,345,628	DINAS PENDIDIKAN, PO
		APM SD/MI/Paket A		96,72%	96,80%		97,67%		98,54%		99,41%		100,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN, PO
		APK SMP/MTs/Paket B		101,18%	102,90%		103,57%		104,23%		104,90%		105,57%		105,57%		DINAS PENDIDIKAN, PO
		APM SMP/MTs/Paket B		81,10%	82,07%		83,07%		84,07%		85,07%		86,07%		86,07%		DINAS PENDIDIKAN, PO
2	Program Padang Panjang Juara	Prestasi Pendidik/ Tenaga Kependidikan/ Peserta Didik di tingkat Provinsi dan nasional		15 Prestasi Tingkat Provinsi	17 prestasi Tk provinsi	-	20 Prestasi TK Provinsi, 1 nasional	2,739,945,250	23 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	3,025,884,873	26 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	3,405,188,875	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	4,157,676,284	30 Prestasi TK provinsi, 1 nasional	13,328,695,281	DINAS PENDIDIKAN, PO
		Rasio sekolah yang melaksanakan pembinaan Imaaq dan Program Tahfidz secara terpadu terhadap seluruh sekolah		NA	60%		70%		80%		90%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PO
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs		99,8%	100%	2,062,488,500	100%	3,447,156,536	100%	3,393,613,884	100%	3,440,768,093	100%	3,488,629,614	100%	15,832,656,627	DINAS PENDIDIKAN, PO
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA		99,8%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PO
4	Program BOS	Terlaksananya Pemberian BOS untuk pendidikan dasar		1 tahun	1 tahun	7,480,000,000			-		-		-		-	7,480,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PO
5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Standar tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan		NA	70%	2,908,676,250		0		0		0		0	70%	2,908,676,250	DINAS PENDIDIKAN, PO
6	Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Rasio SD/TK yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana		58%	60%	-	70%	13,145,578,000	80%	14,068,228,274	90%	11,476,848,651	100%	8,520,220,625	100%	47,210,875,550	DINAS PENDIDIKAN, PO
		Rasio SMP/MTs yang sudah memenuhi kelengkapan standar sarana prasarana		58%	65,65%		70%		77%		84%		90%		90%		DINAS PENDIDIKAN, PO
		Sekolah pendidikan SD/TK kondisi bangunan baik		58%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PO
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		90%	92%		94%		96%		96%		96%		96%		DINAS PENDIDIKAN, PO

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
7	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin dan Berprestasi	Persentase Siswa miskin yang memperoleh biaya pendidikan ke Perguruan Tinggi		11,6%	11,8%	-	11,8%	1,900,000,000	11,8%	2,000,000,000	11,8%	2,100,000,000	11,8%	2,200,000,000	11,8%	8,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PO
		Jumlah Siswa berprestasi yang memperoleh beasiswa perguruan tinggi luar negri	na	na		26 org		52 org		78 org		78 org		78 org			DINAS PENDIDIKAN, PO
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Ketersediaan pusat kegiatan olah raga (sport centre)		0	10%	1,155,000,000	25%	7,200,000,000	50%	28,700,000,000	100%	16,705,000,000	100%	410,125,000	100%	54,170,125,000	DINAS PENDIDIKAN, PO
9	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (4-6 tahun)	92,54%	92,54%	95%	4,698,175,000	100%	6,723,992,500	100%	6,391,091,750	100%	6,542,900,925	100%	6,799,891,018	100%	31,156,051,193	DINAS PENDIDIKAN, PO
		Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun)	45/58=77,5 8%	46,55%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN, PO
		Rasio PAUD yang terintegrasi Posyandu dan BKB	20/58=34,4 8%	NA	40%		50%		60%		70%		80%		80%		DINAS PENDIDIKAN, PO
10	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Pendidikan Paket A/B/C		90%	90%	1,166,661,000	92%	1,622,684,550	94%	1,762,547,378	96%	1,924,497,066	100%	2,112,656,704	100%	8,589,046,698	DINAS PENDIDIKAN, PO
		Angka Penduduk usia 15 tahun ke atas tamat SLTA/Sederajat	NA	70%		72%		74%		76%		80%		80%			DINAS PENDIDIKAN, PO
11	Program Pemajuan Kebudayaan	Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan (10 Objek)	NA	2 Objek (Seni, Pengembangan Tradisional)	0	1,260,000,000	6 Objek (+ Adat Istiadat, Permainan Rakyat)	1,276,000,000	8 Objek (+ Tradisi Lisan, Teknologi Tradisional)	1,443,600,000	10 Objek (+ Ritus, Manusrip)	1,512,960,000	10 Objek (+ Ritus, Manusrip)	5,492,560,000			DINAS PENDIDIKAN, PO
12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kampung Budaya	0	1 kegiatan	1,190,470,000		-		-		-		-		1,190,470,000		DINAS PENDIDIKAN, PO
13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Pembinaan Olahraga (jumlah cabang yang dibina terhadap seluruh cabang olahraga)	27 cabang	28 cabang	1,474,420,000	31 cabang	1,305,000,000	34 cabang	1,500,250,000	36 cabang	11,499,000,000	36 cabang	1,450,000,000	36 cabang	17,228,670,000		DINAS PENDIDIKAN, PO
		Penyelenggaraan Event Olahraga	4 event lokal	7 Event Lokal, 1 Event Prov		7 Event Lokal, 2 Event Prov		8 Event Lokal, 2 Event Prov		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional		8 Event Lokal, 2 Event Prov, 1 Event Nasional			DINAS PENDIDIKAN, PO
14	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40%	60%	1,116,012,000	65%	1,250,000,000	70%	1,335,000,000	75%	1,423,500,000	80%	1,465,850,000	80%	6,590,362,000		DINAS PENDIDIKAN, PO
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			90%	2,271,405,000	90%	2,805,686,000	90%	2,805,686,000	90%	2,805,686,000	90%	2,805,686,000	90%	13,494,149,000	DINAS PENDIDIKAN, PO
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparat	90%		90%	3,015,000,000	90%	138,000,000	91%	165,600,000	92%	198,720,000	93%	10,238,464,000	93%	13,755,784,000	DINAS PENDIDIKAN, PO
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparat	90%		90%	75,000,000	91%	90,000,000	92%	90,000,000	93%	90,000,000	94%	90,000,000	94%	435,000,000	DINAS PENDIDIKAN, PO
18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%		100%	115,000,000									115,000,000		DINAS PENDIDIKAN, PO

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
2.	KESEHATAN				88,107,592,488		88,437,970,852		90,165,694,833		91,189,653,758		102,491,064,833		460,391,976,764	KESEHATAN	
	DINAS KESEHATAN				22,611,642,488		22,267,223,352		23,061,909,958		23,566,404,639		24,086,653,259		115,593,833,695	DINAS KESEHATAN	
	BELANJA LANGSUNG				22,611,642,488		22,267,223,352		23,061,909,958		23,566,404,639		24,086,653,259		115,593,833,695	DINAS KESEHATAN	
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan pelayanan obat ke puskesmas		4 puskesmas	886,278,000		0		0		0		0			DINAS KESEHATAN	
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	25.00%	35%	15,420,484,500	45%	5,802,225,800	55%	5,902,103,634	75%	6,070,320,996	85%	6,243,453,754	85%	39,438,588,684	DINAS KESEHATAN	
		Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan kesehatan	94,89	96,24%		97,17%		98,09%		99,01%		100%		100%			
3	Program pengawasan obat dan makanan	Persentase apotik,Toko obat,toko kosmetik dan makanan yang dilakukan pengawasan	NA	100%	96,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	96,780,000	DINAS KESEHATAN	
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga yang Ber PHBS	NA	50%	271,125,000	-	0	-	-	-	-	-	-	50%	271,125,000	DINAS KESEHATAN	
5	Program Pembekalan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Kurang	5,74%	5.60%	198,074,000	5.00%	322,161,250	4.60%	350,122,375	4.30%	387,867,113	3.00%	426,653,824	3.00%	1,684,878,562	DINAS KESEHATAN	
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah tangga yang Ber PHBS	44%	50%	729,200,000	55%	1,090,815,000	60%	1,094,005,000	65%	1,097,514,000	70%	1,101,404,000	70%	5,112,938,000	DINAS KESEHATAN	
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase UCI	81,35%	90.00%	303,523,000	91.00%	552,227,300	92.25%	570,345,640	96.25%	589,578,290	100%	609,457,338	100%	2,625,131,567	DINAS KESEHATAN	
8	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan dan kinerja melalui akreditasi		100%	100%	233,727,500		0		-		-		100%	233,727,500	DINAS KESEHATAN	
9	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Pustu dan Jaringannya	Persentase Pengadaan sarana dan Prasarana di Puskesmas		NA	100%	1,007,097,000		0		-		-		100%	1,007,097,000	DINAS KESEHATAN	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka kematian anak balita	NA	10 Balita	33,500,000		0		-		-	-	10 Balita	33,500,000	DINAS KESEHATAN		
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Angka Usia Harapan Hidup	72,45 THN	72.47 tahun	332,565,000		0		-		-	-	72.36 tahun			DINAS KESEHATAN	
12	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil Melahirkan dan Anak	Angka Kematian ibu per tahun, Angka kematian bayi per tahun	3 kasus, 1 kasus	angka kematian ibu 0, angka kematian bayi 5	401,500,000		0		-		-	-	angka kematian ibu 0, angka kematian bayi 5	401,500,000		DINAS KESEHATAN	
13	Program pelayanan Kesehatan	Tingkat kepuasan pelayanan kesehatan	na		0	82%	11,946,918,363	83%	12,291,566,290	84%	12,567,357,223	85%	12,851,917,324	85%	49,657,759,199	DINAS KESEHATAN	
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			90%	2,446,568,488	91%	2,326,975,639	92%	2,570,646,019	93%	2,570,646,018	94%	2,570,646,019	94%	12,485,482,183	DINAS KESEHATAN
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			90%	176,000,000	91%	158,400,000	91%	195,000,000	92%	195,000,000	92%	195,000,000		919,400,000	DINAS KESEHATAN
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			5%	75,000,000	8%	67,500,000	10%	88,121,000	14%	88,121,000	20%	88,121,000	20%	406,863,000	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	220,000		0		0		0		0	100%	220,000	DINAS KESEHATAN	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				65,495,950,000		66,170,747,500		67,103,784,875		67,623,249,119		78,404,411,575		344,798,143,068		
	BELANJA LANGSUNG				65,495,950,000		66,170,747,500		67,103,784,875		67,623,249,119		78,404,411,575		344,798,143,068	RSUD	
1	Program Peningkatan Sarana Prasrama Rumah Sakit	Persentase kelengkapan sarana RSUD sesuai dengan standar yang ditetapkan		69.57%	69.57%	13,495,950,000	78.26%	14,170,747,500	79.57%	14,879,284,875	85.22%	15,623,249,119	86.96%	26,404,411,575	86.96%	84,573,643,068	RSUD
2	Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	Persentase Pemenuhan Jenis Pelayanan Sesuai Standar		81%	85%	52,000,000,000	90%	52,000,000,000	90%	52,000,000,000	95%	52,000,000,000	100%	52,000,000,000	100%	260,000,000,000	RSUD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			-		-	449 stel	224,500,000		-		-	449 stel	224,500,000	RSUD	
					60,781,223,700		62,792,286,957		60,364,330,305		70,820,549,709		88,657,778,997		343,416,169,669		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				60,781,223,700		62,792,286,957		60,364,330,305		70,820,549,709		88,657,778,997		343,416,169,669	DINAS PUPR	
	BELANJA LANGSUNG				60,781,223,700		62,792,286,957		60,364,330,305		70,820,549,709		88,657,778,997		343,416,169,669	DINAS PUPR	
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik	Persentase Ketersediaan Sarana publik		0%	20%	11,811,680,000	40%	3,600,000,000	70%	15,400,000,000	88%	23,220,660,680	100%	23,021,934,062	100%	77,054,274,742	DINAS PUPR
2	Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi	Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat		na	27%	318,135,000	44%	687,917,025	61%	405,762,630	81%	419,130,190	100%	432,831,533	100%	2,263,776,378	DINAS PUPR
3	Program Pembangunan/ Rehabilitasi jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik		88.41%	90.50%	10,119,550,000	91.50%	11,190,815,250	92.50%	12,830,098,513	93.50%	11,961,908,438	94.50%	22,717,341,673	94.50%	68,819,713,873	DINAS PUPR
4	Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas	%	0%	17%	3,729,975,000	33%	2,800,000,000	50%	2,800,000,000	83%	2,758,520,000	100%	2,800,000,000	100%	14,888,495,000	DINAS PUPR
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik		87.86%	88%	300,000,000	89%	315,000,000	90%	330,750,000	91%	347,287,500	92%	364,651,875	92%	1,657,689,375	DINAS PUPR
6	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara		na	90%	12,398,855,000									12,398,855,000	DINAS PUPR	
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik		79%	81%	2,229,661,000	83%	2,231,319,537	85%	2,310,744,753	87%	2,354,351,990	89%	2,437,493,590	46 500 m	11,563,570,869	DINAS PUPR
8	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai	Persentase panjang sungai yang dikonservasi		58%	62%	702,150,000	64%	1,000,000,000	66%	1,012,500,000	68%	1,025,312,500	70%	1,038,445,313	70%	4,778,407,813	DINAS PUPR
9	Program Penerangan jalan Umum	Persentase Penerangan Jalan Umum		61.64%	71%	2,373,749,600	75%	4,065,000,000	80%	5,404,950,000	85%	5,388,945,000	90%	4,991,761,757	90%	22,224,406,357	DINAS PUPR
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH Publik		2.46%	2.6%	4,490,007,550	2.7%	22,605,000,000	2.8%	4,518,000,000	2.9%	3,737,400,000	3.0%	13,455,555,681	3.0%	48,805,963,231	DINAS PUPR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
11	Program Bangunan Air Kotor Perkotaan	Panjang bangunan air kotor yang dibangun		2 km	3,629,000,000										3,629,000,000	DINAS PUPR	
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Pelayanan Air limbah,		77.06%	79%	3,428,108,000	80%	4,900,949,820	81%	7,195,601,613	82%	6,437,425,677	83%	5,984,922,704	83%	27,947,007,815	DINAS PUPR
		Cakupan Pelayanan Air minum		91.09	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PUPR
13	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Bangunan BerlMB per Satuan bangunan		76.22%	76.57%	728,098,800	76.73%	7,698,650,000	76.80%	6,346,716,147	76.90%	10,727,877,484	77.00%	3,651,783,060	77.00%	29,153,125,491	DINAS PUPR
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	90%	4,310,878,750	90%	1,327,901,575	90%	1,563,578,750	90%	1,563,578,750	90%	1,563,828,750	90%	10,329,766,575	DINAS PUPR
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Percentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatür		90%	90%	44,175,000	90%	269,733,750	90%	145,627,900	90%	778,151,500	90%	6,097,229,000	90%	7,334,917,150	DINAS PUPR
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatür			90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	500,000,000	DINAS PUPR
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Percentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	67,200,000									100%	67,200,000	DINAS PUPR
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				23,843,729,350		21,909,376,700		20,703,458,399		20,691,802,290		20,406,671,261		107,555,038,000		DINAS PERKIMLH
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				23,843,729,350		21,909,376,700		20,703,458,399		20,691,802,290		20,406,671,261		107,555,038,000		DINAS PERKIMLH
	BELANJA LANGSUNG				23,843,729,350		21,909,376,700		20,703,458,399		20,691,802,290		20,406,671,261		107,555,038,000		DINAS PERKIMLH
1	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar		79%	81%	10,569,965,000	84%	5,023,667,500	86%	5,090,013,375	88%	5,057,176,544	91%	5,075,197,871	91%	30,816,020,290	DINAS PERKIMLH
2	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Rasio Rumah layak Huni		92.65%	93.54%	892,750,000	94.43%	1,872,725,000	95.32%	1,477,318,750	96.21%	1,482,142,188	97.10%	1,487,206,797	97.10%	7,212,142,734	DINAS PERKIMLH
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Percentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga		80%	80%	7,836,171,350	75%	10,160,621,350	74%	9,123,524,260	73%	8,486,620,714	72%	8,597,715,899	72%	44,204,653,573	DINAS PERKIMLH
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup		2 Jenis Penghargaan	2 Jenis Penghargaan	1,076,520,000	2 Jenis Penghargaan	1,051,411,625	2 Jenis Penghargaan	1,066,310,912	2 Jenis Penghargaan	1,081,429,328	3 Jenis Penghargaan	1,096,770,140	3 Jenis Penghargaan	5,372,442,004	DINAS PERKIMLH
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Percentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang		36,84%	45-43%	1,110,975,000	43-41%	1,341,347,925	41-39%	1,294,421,102	39-37%	1,339,552,267	37-35%	1,386,842,886	37-35%	6,473,139,180	DINAS PERKIMLH
6	Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan		30%	40%	21,228,000	45%	150,000,000	50%	125,750,000	55%	151,511,250	60%	277,283,919	60%	725,773,169	DINAS PERKIMLH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPIAAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPIAAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	2,090,710,000	100%	1,924,876,800	100%	2,092,535,000	100%	2,092,535,000	100%	2,092,535,000	100%	10,293,191,800	DINAS PERKIMLH
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparaturs		85%	90%	168,585,000	90%	317,226,500	90%	358,585,000	90%	925,835,000	90%	318,118,750	90%	2,088,350,250	DINAS PERKIMLH
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaturs			90%	75,000,000	90%	67,500,000	90%	75,000,000	90%	75,000,000	90%	75,000,000	90%	367,500,000	DINAS PERKIMLH
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	1,825,000									100%	1,825,000	DINAS PERKIMLH
5.	UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9,015,938,500		8,966,364,250		8,193,387,500		8,543,209,500		9,893,284,500		44,612,184,250	
	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					9,015,938,500		8,966,364,250		8,193,387,500		8,543,209,500		9,893,284,500		44,612,184,250	POL PP DAMKAR
	BELANJA LANGSUNG					9,015,938,500		8,966,364,250		8,193,387,500		8,543,209,500		9,893,284,500		44,612,184,250	POL PP DAMKAR
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani		95%	97%	4,558,679,000	99%	3,655,520,000	100%	3,575,520,000	100%	3,580,520,000	100%	3,665,520,000	100%	19,035,759,000	POL PP DAMKAR
2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja satlinmas		na	2 kali	520,962,000	3 kali	340,000,000	2 kali	205,000,000	2 kali	210,000,000	3 kali	550,000,000	3 kali	1,825,962,000	POL PP DAMKAR
3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase bencana kebakaran yang tertangani		90%	90%	1,940,280,000	91%	2,663,850,000	92%	2,165,850,000	93%	2,394,672,000	94%	3,520,747,000	94%	12,685,399,000	POL PP DAMKAR
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		60%	60%	1,849,897,500	70%	1,747,494,250	80%	1,851,017,500	90%	1,851,017,500	100%	1,851,017,500	90%	9,150,444,250	POL PP DAMKAR
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparaturs		90%	90%	70,000,000	90%	342,000,000	90%	321,000,000	90%	232,000,000	90%	231,000,000	90%	1,196,000,000	POL PP DAMKAR
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaturs			90%	75,000,000	90%	217,500,000	90%	75,000,000	90%	275,000,000	90%	75,000,000	90%	717,500,000	POL PP DAMKAR
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	1,120,000									100%	1,120,000	POL PP DAMKAR
6.	URUSAN SOSIAL					#VALUE!		10,591,157,650		11,395,396,258		11,565,926,195		12,013,922,130		#VALUE!	
	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN					#VALUE!		10,591,157,650		11,395,396,258		11,565,926,195		12,013,922,130		#VALUE!	DINAS SOSIAL, PPKB, P3A
	BELANJA LANGSUNG					#VALUE!		10,591,157,650		11,395,396,258		11,565,926,195		12,013,922,130		#VALUE!	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Rumah Tangga miskin	%	1,6%	2%	608,583,500	2.5%	837,000,000	3.0%	873,250,000	3.5%	902,950,000	4%	943,097,000	4%	4,164,880,500	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
2	Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Persentase lansia yang tertangani	%	100%	100%	996,465,000	100%	1,561,000,000	100%	1,431,550,000	100%	1,478,000,000	100%	1,347,150,000	100%	6,814,165,000 DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
		persentase penyandang disabilitas yang tertangani		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		persentase korban bencana yang tertangani,		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		persentase penanganan gelandangan, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA		35%	40%		45%		50%		55%		60%		60%		
3	Program Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani		na	100%	150,000,000		-		-		-		-		150,000,000 DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
4	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan anak jalannnn		na	100%	30,775,000	-	-	-	-	-	-	-	-		30,775,000 DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
5	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)	Persentase penanganan gelandangan , pengemis PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA		na	40%	99,505,000	-	-	-	-	-	-	-	-		99,505,000 DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif		na	65%	677,282,000	70%	750,000,000	75%	825,000,000	80%	825,000,000	90%	825,000,000	90%	3,902,282,000 DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
7	Program peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat	Persentase LPM Aktif		15,79%		0	36,84%	1,532,000,000	47,37%	1,542,000,000	63,16%	1,552,000,000	73,68%	1,562,000,000	73,68%	6,188,000,000 DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
		Persentase PKK Aktif		15,79 %			36,84%		47,37%		63,16%		73,68%		73,68%		DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
		Persentase swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				4.5%			5%		5.5%		6%		6%		
		Persentase lembaga adat yang Aktif		37,5%			62.50		75.00		87.50		100.00		100.00		DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
8	Program peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat kelurahan	Persentase LPM Aktif		15,79%	26.32	2,186,607,000											DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
		Persentase PKK Aktif		15,79 %	26.32												
		Persentase swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat			4%												
		Persentase lembaga adat yang Aktif		37,5%	50%												
9	Program Peningkatan Partisipasi dan Kemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		na	4%	274,895,000		-		-		-		-		274,895,000 DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
10	Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	Persentase lembaga adat yang aktif		38%	50%	604,800,000		-		-		-		-		604,800,000 DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
11	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Percentase Forum Anak yang Aktif		5,26%	15.79%	lingkungan	26.32%	298,105,000	36.84%	348,205,000	47.37%	303,205,000	57.89%	348,205,000	57.89%	#VALUE!	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
		Percentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar			62.00%		63.00%		65.00%		70.00%		73.00%		73.00%		DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
12	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Percentase ARG terhadap APBD		8,84%	9.00%	343,904,000	9.50%	285,000,000	10.00%	310,000,000	10.50%	335,000,000	11.00%	360,000,000	11.00%	1,633,904,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
13	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Percentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih			100%	250,800,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	570,800,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
14	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Percentase indikator KLA terpenuhi sesuai standar		60.52	62	341,525,000		-		-		-		-		341,525,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
15	Program pengendalian penduduk dan KB	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		58%	58.99%	0	60.08%	2,993,532,150	60.91%	3,149,598,758	61.68%	3,298,978,695	62.35%	3,537,677,630	62.35%	12,979,787,233	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
		Percentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB		37.5%	41.67%		45.83%		50.00%		54.17%		58.33%		58.33%		
		Percentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan RIPP		na			100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
16	Program Keluarga Berencana	Percentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB		37.5%	41.7%	2,601,887,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,601,887,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
17	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Percentase kelompok PIK Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat yang Aktif		77.14%	80.0%	322,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3%	322,145,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
18	Program Pelayanan Kontrasepsi	Angka CPR		na	58.99%	62,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	62,500,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
19	Program Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Percentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota kelompok tribina		56.49%	56.52%	213,986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.0%	213,986,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A
20	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	Percentase OPD yang menyusun dan memanfaatkan grand desain pengendalian penduduk		na	100.0%	60,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	60,125,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
21	Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga sarasan yang menjadi anggota kelompok tribina	na	56.52%	0	56.57%	550,000,000	56.62%	820,000,000	56.66%	875,000,000	56.71%	995,000,000	56.71%	3,240,000,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
		Persentase kelompok PIK R jalur pendidikan dan masyarakat yang aktif		80%		82%		85%		88%		91%		91%		DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90%	1,683,262,500	90%	1,569,970,500	90%	1,771,792,500	90%	1,771,792,500	90%	1,771,792,500	90%	8,568,610,500	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	90%	69,000,000	90%	66,600,000	90%	169,000,000	90%	69,000,000	90%	169,000,000	90%	542,600,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	90%	75,000,000	90%	67,950,000	90%	75,000,000	90%	75,000,000	90%	75,000,000	90%	367,950,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
25	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	935,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	935,000	DINAS SOSIAL,PPKB, P3A	
B	PELAYANAN DASAR (BL)				30,668,214,925		33,592,930,164		37,430,438,160		42,311,253,432		71,629,445,988		215,632,282,668		
7.	URUSAN PANGAN				8,441,894,100		10,098,534,595		9,882,764,505		10,323,911,357		10,318,134,971		49,065,239,528	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				8,441,894,100		10,098,534,595		9,882,764,505		10,323,911,357		10,318,134,971		49,065,239,528	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	BELANJA LANGSUNG				8,441,894,100		10,098,534,595		9,882,764,505		10,323,911,357		10,318,134,971		49,065,239,528	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
1	Program Peningkatan ketahanan Pangan	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)		97.83%	100%	882,304,800	100%	688,000,000	100%	717,500,000	100%	650,850,000	100%	658,685,000	100%	3,597,339,800	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)		104.04%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 tahun	1 tahun	1,783,728,000										1 tahun	1,783,728,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan	Produksi Tanaman Hias	tangkai	71.548	73847	-	76.062	3,013,414,400	79.105 tangkai	2,540,382,192	83.060 tangkai	2,988,793,213	87.213 tangkai	2,678,946,839	87.213 tangkai	11,221,536,644	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Produktivitas Padi		6,42 ton/ha	5.7 ton/ha		5,8 ton/ha		6,2 ton/ha		6,3 ton/ha		6,4 ton/ha		6,4 ton/ha		
		Luas Lahan Pertanian Organik		9.7 ha	9.7 ha		10.7 ha		11.7 ha		11.7 ha		12.7 ha		12.7 ha		
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan Pembinaan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan	%	45.45%	56.06%	74,999,800	66.67%	206,874,795	76.77%	160,046,665	88.89%	162,047,831	100%	170,252,615	100%	774,221,706	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
5	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	(Ton)	720.64 ton	650 ton	590,609,000	680 ton	614,195,360	700 ton	641,082,374	720 ton	670,405,669	750 ton	703,421,896	750 ton	3,219,714,300	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/ Hewan	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan	na	5%	307,565,000	7%	338,321,500	7%	338,321,500	9%	372,153,650	10%	409,369,015	10%	1,765,730,665	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan/ Produk Peternakan		4%	5%	1,973,464,300	6%	1,588,708,100	7%	1,468,537,290	8%	1,239,883,561	9%	1,255,895,205	9%	7,526,488,456	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Pertanian	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor pertanian menerima Bantuan Pertanian	%	18%	35%	-	47%	500,110,000,00	65%	500,110,000,00	82%	500,110,000,00	90%	500,110,000,00	90%	2,000,440,000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	2,624,989,400	100%	2,642,919,840	100%	2,886,984,824	100%	3,155,456,307	100%	3,450,774,937	100%	14,761,125,307 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100%	153,434,000	100%	460,990,600	100%	578,049,660	100%	524,698,626	100%	422,240,089	100%	2,139,412,975 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100%	50,000,000	100%	45,000,000	100%	51,750,000	100%	59,512,500	100%	68,439,375	100%	274,701,875 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	799,800	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	799,800 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
8.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2,142,170,000		2,663,328,450		3,039,308,578		3,010,330,779		3,341,452,340		14,196,590,147		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				2,142,170,000		2,663,328,450		3,039,308,578		3,010,330,779		3,341,452,340		14,196,590,147		DINAS DUKCAPIL
	BELANJA LANGSUNG				2,142,170,000		2,663,328,450		3,039,308,578		3,010,330,779		3,341,452,340		14,196,590,147		DINAS DUKCAPIL
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen adminduk		80%	85%	1,059,569,000	88%	1,333,089,550	92%	1,563,744,028	96%	1,453,866,229	98%	1,720,887,790	98%	7,131,156,597 DINAS DUKCAPIL	
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase keakuratan data		99.65%	99.75%	191,000,000	99.85%	445,000,000	99.90%	595,000,000	99.95%	480,000,000	99.98%	595,000,000	99.98%	2,306,000,000 DINAS DUKCAPIL	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	640,571,000	100%	601,653,900	100%	710,564,550	100%	710,564,550	100%	710,564,550	100%	3,373,918,550 DINAS DUKCAPIL	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100%	200,650,000	100%	238,585,000	100%	105,000,000	100%	295,900,000	100%	240,000,000	100%	1,080,135,000 DINAS DUKCAPIL	
5	Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100%	50,000,000	100%	45,000,000	100%	65,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	305,000,000 DINAS DUKCAPIL	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			90%	380,000	0%	0				0		0	90%	380,000 DINAS DUKCAPIL	
9.	URUSAN PERHUBUNGAN				3,063,259,500		3,820,215,500		6,720,663,000		5,388,080,000		4,639,026,000		23,631,244,000		
	DINAS PERHUBUNGAN				3,063,259,500		3,820,215,500		6,720,663,000		5,388,080,000		4,639,026,000		23,631,244,000		DINAS PERHUBUNGAN
	BELANJA LANGSUNG				3,063,259,500		3,820,215,500		6,720,663,000		5,388,080,000		4,639,026,000		23,631,244,000		DINAS PERHUBUNGAN
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitasi LLAJ yang layak		90%	215,600,000									90%	215,600,000		DINAS PERHUBUNGAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik		90%		202,730,000									90%	202,730,000	DINAS PERHUBUNGAN
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase layanan angkutan		na	0.0145%	825,719,500	0.0142%	672,600,000	0.0138%	1,622,600,000	0.0136%	1,922,600,000	0.0133%	622,600,000	0.0133%	5,666,119,500	DINAS PERHUBUNGAN
4	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase perlengkapan Fasilitas keselamatan yang berkualitas		80.15%	80.40%	598,750,000	81.98%	1,064,020,000	83.03%	2,931,520,000	83.73%	1,774,020,000	84.78%	2,161,520,000	84.78%	8,529,830,000	DINAS PERHUBUNGAN
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum		91,1%	93,40%	-	94,71%	320,000,000	95,36%	370,000,000	96,01%	70,000,000	96,64%	70,000,000	96,64%	830,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			90%	1,145,695,000	90%	1,075,804,500	90%	1,362,752,000	90%	1,146,669,000	90%	1,146,115,000	100%	5,877,035,500	DINAS PERHUBUNGAN
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatür			90%	23,791,000	90%	592,791,000	90%	373,791,000	90%	414,791,000	90%	578,791,000	100%	1,983,955,000	DINAS PERHUBUNGAN
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatür			18%	50,000,000	18%	95,000,000	18%	60,000,000	18%	60,000,000	18%	60,000,000		325,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
9	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			90.00%	974,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00%	974,000	DINAS PERHUBUNGAN
10.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11,464,229,325		9,901,498,019		8,739,983,444		7,782,649,070		8,575,168,645		46,463,528,504	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11,464,229,325		9,901,498,019		8,739,983,444		7,782,649,070		8,575,168,645		46,463,528,504	DINAS KOMINFO
	BELANJA LANGSUNG					11,464,229,325		9,901,498,019		8,739,983,444		7,782,649,070		8,575,168,645		46,463,528,504	DINAS KOMINFO
1	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas informasi publik	indeks	na	2.6	2,388,755,325	2.65	2,848,031,019	2.7	2,909,823,444	2.85	2,742,369,070	3.0	2,783,114,645	3.0	13,672,093,504	DINAS KOMINFO
2	Program e-Government	Persentase implementasi e government		na	64.0%	7,990,214,000	73.00%	5,743,360,000	82.0%	4,776,360,000	91.00%	3,809,855,000	100%	4,020,700,000	100%	26,340,489,000	DINAS KOMINFO
3	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Persentase elemen data statistik sektorl yang tersedia		80%	83%	58,335,000	87%	58,335,000	90%	58,335,000	95%	58,335,000	100%	58,335,000	100%	291,675,000	DINAS KOMINFO
4	Program Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah menerapkan sistem keamanan informasi		na	33%	23,520,000	50%	29,795,000	67%	31,160,000	83%	32,685,000	100%	34,370,000	100%	151,530,000	DINAS KOMINFO
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			90%	788,705,000	90%	759,477,000	90%	804,305,000	90%	809,405,000	90%	838,649,000		4,000,541,000	DINAS KOMINFO
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatür			90%	162,900,000	90%	417,500,000	90%	85,000,000	90%	250,000,000	90%	755,000,000		1,670,400,000	DINAS KOMINFO
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatür			20%	50,000,000	40%	45,000,000	60%	75,000,000	80%	80,000,000	100%	85,000,000	100%	335,000,000	DINAS KOMINFO
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			90%	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	100%	1,800,000	DINAS KOMINFO	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
11.	URUSAN PENANAMAN MODAL				1,473,337,000		1,936,072,500		2,728,182,500		2,265,165,750		2,546,377,325		10,949,135,075	DINAS PMPTSP	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU				1,473,337,000		1,936,072,500		2,728,182,500		2,265,165,750		2,546,377,325		10,949,135,075	DINAS PMPTSP	
	BELANJA LANGSUNG				1,473,337,000		1,936,072,500		2,728,182,500		2,265,165,750		2,546,377,325		10,949,135,075	DINAS PMPTSP	
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Penambahan kesempatan kerja	481 org	494 org	133,467,500	507 org	505,597,500	520 org	354,500,000	535 org	450,725,000	551 org	513,472,500	2607 org	1,957,762,500	DINAS PMPTSP	
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang terdaftar	2 investor	18 investor	294,150,000	20 investor	515,000,000	23 investor	635,000,000	25 investor	615,000,000	28 investor	665,000,000	114 investor	2,724,150,000	DINAS PMPTSP	
3	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase penerbitan izin yang dikeluaran sesuai SOP		100%	100%	38,939,500	100%	30,000,000	100%	530,000,000	100%	200,000,000	100%	230,000,000	100%	1,028,939,500	DINAS PMPTSP
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	694,855,500	100%	691,475,000	100%	759,182,500	100%	835,440,750	100%	919,904,825	100%	3,900,858,575	DINAS PMPTSP
5	Program Peningkatan Sarana dan Praasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasaranan aparatur			100%	212,536,500	100%	149,000,000	100%	399,500,000	100%	114,000,000	100%	168,000,000	100%	1,043,036,500	DINAS PMPTSP
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			80%	49,000,000		0	90%	0		0	100%	0	100%	49,000,000	DINAS PMPTSP
7	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			10 orang	50,000,000	10 orang	45,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	50,000,000	100%	245,000,000	DINAS PMPTSP
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	388,000									100%	388,000	DINAS PMPTSP
12.	URUSAN PERPUSTAKAAN				4,083,325,000		5,173,281,100		6,319,536,133		13,541,116,476		42,209,286,707		71,326,545,415		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				4,083,325,000		5,173,281,100		6,319,536,133		13,541,116,476		42,209,286,707		71,326,545,415	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	BELANJA LANGSUNG				4,083,325,000		5,173,281,100		6,319,536,133		13,541,116,476		42,209,286,707		71,326,545,415	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan / jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan pertahun	21.965	23,400	2,493,971,000	25,200	3,365,875,000	27,000	4,157,818,750	28,800	11,408,554,688	30,600	40,543,270,847	30,600	61,969,490,284	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip daerah	Persentase kenaikan arsip statis		4,2%	7.70%	422,897,000	11.00%	675,000,000	11.60%	860,000,000	12.10%	730,000,000	12.90%	423,000,000	12.90%	3,110,897,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			90%	1,005,157,000	90%	952,406,100	90%	1,007,917,383	90%	1,008,561,788	90%	1,009,215,860		4,983,258,131	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasaranan aparatur			90%	60,500,000	90%	135,000,000	90%	243,800,000	90%	344,000,000	90%	183,800,000	90%	967,100,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			49,800,000		0		0		0		0		49,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			90%	50,000,000	90%	45,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	50,000,000	90%	245,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		90%	1,000,000									90%	1,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
II	URUSAN PILIHAN				17,617,203,500		23,620,061,546		23,575,860,882		23,449,935,218		26,584,444,238		114,847,505,383		
A	PILIHAN (BL)				17,617,203,500		23,620,061,546		23,575,860,882		23,449,935,218		26,584,444,238		114,847,505,383		
13.	PARIWISATA				7,853,756,500		9,009,047,950		8,834,581,140		9,263,554,837		9,114,227,429		44,075,167,856	DINAS PARIWISATA	
	DINAS PARIWISATA				7,853,756,500		9,009,047,950		8,834,581,140		9,263,554,837		9,114,227,429		44,075,167,856	DINAS PARIWISATA	
	BELANJA LANGSUNG				7,853,756,500		9,009,047,950		8,834,581,140		9,263,554,837		9,114,227,429		44,075,167,856	DINAS PARIWISATA	
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata		25%	33%	2,385,225,000	50%	3,537,195,000	67%	3,541,002,600	83%	3,256,847,800	100%	3,542,195,000	100%	16,262,465,400	DINAS PARIWISATA
2	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 Objek	4 objek	2,664,316,000	5 objek	3,261,598,750	6 objek	3,083,324,340	7 objek	3,746,451,837	7 objek	3,311,777,229	7 objek	16,067,468,156	DINAS PARIWISATA	
3	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata		na	11 mitra	197,199,000									197,199,000	DINAS PARIWISATA	
4	Program pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah objek wisata unggulan yang ditata		na	4 objek	767,110,000									767,110,000	DINAS PARIWISATA	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			1,661,562,500		1,845,789,100		1,845,789,100		1,845,789,100		1,845,789,100		9,044,718,900	DINAS PARIWISATA	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			124,500,000		364,465,100		364,465,100		314,466,100		314,466,100		1,482,362,400	DINAS PARIWISATA	
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			50,000,000		0		0		100,000,000		100,000,000		250,000,000	DINAS PARIWISATA	
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		90%	3,844,000									90%	3,844,000	DINAS PARIWISATA	
14.	URUSAN PERDAGANGAN				9,763,447,000		14,611,013,596		14,741,279,742		14,186,380,381		17,470,216,809		70,772,337,527		
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				9,763,447,000		14,611,013,596		14,741,279,742		14,186,380,381		17,470,216,809		70,772,337,527	DINAS PERDAG, KOP, UKM	
	BELANJA LANGSUNG				9,763,447,000		14,611,013,596		14,741,279,742		14,186,380,381		17,470,216,809		70,772,337,527	DINAS PERDAG, KOP, UKM	
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	%	0	20%	2,458,863,000								15%	2,458,863,000	DINAS PERDAG,KOP, UKM	
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase pasar ber-SNI dan tertib ukur	%	0	15.00%	197,545,000	30.00%	6,369,007,096	50.00%	6,948,342,242	75.00%	6,278,776,693	100.00%	8,112,941,093	100.00%	27,906,612,124	DINAS PERINDAG,KOP, UKM

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor UMKM Menerima bantuan Kewirausahaan yang digunakan untuk usaha		29%	43%	1,469,950,000		-		-		-		-		1,469,950,000	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
4	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	30 Usaha Mikro	70 Usaha Mikro	467,000,000	120 UM	525,000,000	180 UM	350,000,000	250 UM	400,000,000	330 UM	350,000,000	330 UM	2,092,000,000	DINAS PERINDAG,KOP, UKM	
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif berpola syariah		31.25%	37.50%	734,340,000	43.75%	1,058,400,000	62.25%	1,042,770,000	81.25%	934,158,500	89.58%	966,616,425	89.58%	4,736,284,925	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
6	Program Pengembangan Rumah Wirausaha	Persentase Cakupan Bina UMKM		1.64%	1.80%	-	2.01%	760,000,000	2.38%	775,000,000	2.76%	805,000,000	3.13%	830,000,000	3.13%	3,170,000,000	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
7	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Peningkatan produktifitas IKM		5%	5%	1,343,544,000	10.00%	1,346,070,000	15.00%	1,316,070,000	20.00%	1,366,070,000	25%	1,366,070,000	35%	6,737,824,000	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
8	Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor UMKM Menerima bantuan Kewirausahaan yang digunakan untuk usaha		29%	45%	-	57%	1,700,000,000	71%	1,700,000,000	85%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	6,800,000,000	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
9	Program Pengembangan Sentra sentra industri potensial	Persentase sentra industri yang meningkat		na	5%	720,070,000		-		-		-		-		720,070,000	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	2,084,210,000	100%	1,989,641,500	100%	2,085,585,000	100%	2,085,585,000	100%	2,294,006,000	100%	10,539,027,500	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100%	211,550,000	100%	715,395,000	100%	455,000,000	100%	467,250,000	100%	1,780,000,000	100%	3,629,195,000	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah pelatihan yang diikuti			12 ok	75,000,000	12 ok	147,500,000	15 ok	68,512,500	15 ok	149,540,188	15 ok	70,583,290	12 bln	511,135,978	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	1,375,000									100%	1,375,000	DINAS PERINDAG,KOP, UKM
III PENUNJANG URUSAN (BL)					22,393,999,385		20,537,409,340		22,165,595,718		25,647,799,431		23,722,385,932			114,467,189,806	
A	PENUNJANG URUSAN				22,393,999,385		20,537,409,340		22,165,595,718		25,647,799,431		23,722,385,932			114,467,189,806	
15.	URUSAN INSPEKTORAT				2,230,420,285		2,553,566,600		2,727,964,000		2,699,064,000		2,990,164,000			13,201,178,885	
	INSPEKTORAT DAERAH				2,230,420,285		2,553,566,600		2,727,964,000		2,699,064,000		2,990,164,000			13,201,178,885	INSPEKTORAT
	BELANJA LANGSUNG				2,230,420,285		2,553,566,600		2,727,964,000		2,699,064,000		2,990,164,000			13,201,178,885	INSPEKTORAT
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Level Maturitas SPIP	na	LEVEL 3 (3.00)	965,260,000	LEVEL 3 (3.10)	479,500,000	LEVEL 3 (3.30)	537,000,000	LEVEL 3 (3.50)	593,000,000	LEVEL 3 (3.70)	645,000,000	LEVEL 3 (3.70)	3,219,760,000	INSPEKTORAT	
2	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Urusan Pengawasan		5%	20%	0	40%	337,000,000	60%	370,000,000	80%	392,000,000	100%	435,000,000	100%	1,534,000,000	INSPEKTORAT

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
3	Program Pelaksanaan Peningkatan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi	Indeks integritas (1-10)	na	0	0	2	530,000,000	4	650,000,000	5	700,000,000	6	750,000,000	6	2,630,000,000	INSPEKTORAT	
4	Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang memperoleh Sertifikat Pelatihan Substansi dan Penjenjangan	na	30%	282,886,285	30%	100,000,000	40%	175,000,000	50%	100,000,000	60%	170,000,000	60%	827,886,285	INSPEKTORAT	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase APIP yang menyatakan PUAS atas pelayanan administrasi perkantoran	na	90%	694,194,000	90%	677,066,600	90%	703,964,000	95%	704,064,000	100%	704,164,000	100%	3,483,452,600	INSPEKTORAT	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	na	90%	238,860,000	90%	430,000,000	95%	292,000,000	95%	210,000,000	100%	286,000,000	100%	1,456,860,000	INSPEKTORAT	
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	na	90%	48,500,000	90%	0	95%	0	95%	0	100%	0	100%	48,500,000	INSPEKTORAT	
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disampaikan tepat waktu	na	90%	720,000										720,000	INSPEKTORAT	
16.	URUSAN PERENCANAAN				4,390,885,500		4,125,686,020		4,525,511,894		4,198,203,050		4,338,169,813		21,578,456,277		
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				4,390,885,500		4,125,686,020		4,525,511,894		4,198,203,050		4,338,169,813		21,578,456,277	BAPPEDA	
	BELANJA LANGSUNG				4,390,885,500		4,125,686,020		4,525,511,894		4,198,203,050		4,338,169,813		21,578,456,277	BAPPEDA	
1	Program Pengembangan data/informasi	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	na	60%	65,00%	133,399,800	70%	275,000,000	75%	285,000,000	80%	155,000,000	85%	255,000,000	85%	1,103,399,800	BAPPEDA
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	na	75%	144,174,500									75%	144,174,500	BAPPEDA	
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase rata-rata capaian program bidang ekonomi, sumberdaya alam dan infrastruktur	na	75%		78%	176,205,000	80%	193,826,000	83%	153,210,000	85%	234,525,000	85%	757,766,000	BAPPEDA	
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	na	80%	973,411,700	83%	897,100,000	85%	1,141,205,000	90%	937,415,250	90%	1,225,736,013	90%	5,174,867,963	BAPPEDA	
5	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	persentase dokumen perencanaan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	na	75%	16,014,800										16,014,800	BAPPEDA	
6	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase dokumen perencanaan bidang Sosial budaya yang ditindak lanjuti	na	75%	275,046,300	78%	0	80%	0	83%	0	85%	0	85%	275,046,300	BAPPEDA	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
7	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase Rata-rata capaian Program Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	na	75%	0	78%	472,000,000	80%	278,200,000	83%	284,400,000	85%	290,600,000	85%	1,325,200,000	BAPPEDA	
8	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana ketimbangan.	na	70%	1,515,900,100	75%	765,000,000	80%	755,000,000	85%	900,000,000	90%	575,000,000	90%	4,510,900,100	BAPPEDA	
9	Penguatan Inovasi Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	na	20.83%	46,330,000	30%	225,000,000	45%	200,000,000	60%	200,000,000	75%	200,000,000	75%	871,330,000	BAPPEDA	
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		90%	1,030,547,800	91%	952,781,020	92%	1,039,470,894	93%	1,034,089,800	94%	1,034,266,800	94%	5,091,156,314	BAPPEDA	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	139,000,000	91%	222,600,000	92%	425,560,000	93%	314,088,000	94%	292,792,000	94%	1,394,040,000	BAPPEDA	
13	Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		22.86%	114,000,000	34.29%	140,000,000	45.71%	207,250,000	57.14%	220,000,000	68.57%	230,250,000	68.57%	911,500,000	BAPPEDA	
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	3,060,500									100%	3,060,500	BAPPEDA	
17.	KEUANGAN				10,677,673,600		9,558,684,520		9,951,774,824		11,450,915,381		11,225,685,138		52,864,733,463		
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				10,677,673,600		9,558,684,520		9,951,774,824		11,450,915,381		11,225,685,138		52,864,733,463	BPKD	
	BELANJA LANGSUNG				10,677,673,600		9,558,684,520		9,951,774,824		11,450,915,381		11,225,685,138		52,864,733,463	BPKD	
1	Program Peningkatan Pengelolaan penganggaran dan Perbendaharaan daerah	Penyusunan APBD / APBD P yang tepat waktu	Tepat waktu		0	Tepat waktu	1,264,477,200	Tepat waktu	1,517,372,640	Tepat waktu	1,791,454,080	Tepat waktu	2,086,504,896	Tepat waktu	6,659,808,816	BPKD	
2	Program Peningkatan Pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan APBD / APBD P yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	1,503,190,000												
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ketepatan waktu Penyusunan APBD dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	1,627,200,000		0		0		0		0		1,627,200,000	BPKD	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	0	Tepat waktu	576,376,800	Tepat waktu	655,652,160	Tepat waktu	786,782,592	Tepat waktu	944,139,110	Tepat waktu	2,962,950,662	BPKD	
5	Program Peningkatan dan pengembangan Barang Milik Daerah	Pelaporan penyajian data Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu		0	Tepat waktu	308,373,600	Tepat waktu	370,048,320	Tepat waktu	444,057,984	Tepat waktu	532,869,581	Tepat waktu	1,655,349,485	BPKD	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pelaporan penyajian data Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	273,568,000												
7	Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	na	5%	0	5%	730,000,000	5%	285,000,000	5%	335,000,000	5%	525,800,000	25%	1,875,800,000	BPKD	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			90%	6,626,619,000	91%	6,291,406,920	92%	6,610,301,704	93%	6,616,060,725	94%	6,622,971,550	94%	32,767,359,899	BPKD
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			90%	527,100,000	92%	298,050,000	94%	413,400,000	96%	1,377,560,000	98%	413,400,000	98%	3,029,510,000	BPKD
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			12%	100,000,000	25%	90,000,000	37%	100,000,000	49%	100,000,000	62%	100,000,000	62%	490,000,000	BPKD
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	19,996,600	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	19,996,600	BPKD
18.	EPEGAWAIAN					5,095,020,000		4,299,472,200		4,960,345,000		7,299,617,000		5,168,366,981		26,822,821,181	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					5,095,020,000		4,299,472,200		4,960,345,000		7,299,617,000		5,168,366,981		26,822,821,181	BKPSDM
	BELANJA LANGSUNG					5,095,020,000		4,299,472,200		4,960,345,000		7,299,617,000		5,168,366,981		26,822,821,181	BKPSDM
1	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, bimtek dan sosialisasi	na	5%	649,000,000	6%	1,654,000,000	7%	1,680,000,000	8%	1,680,000,000	9%	1,680,000,000	9%	7,343,000,000	BKPSDM	
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Kepegawai	Persentase jumlah pegawai yang menggunakan layanan kepegawaian berbasis IT	na	50%	0	65%	75,000,000	80%	75,000,000	90%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	300,000,000	BKPSDM	
3	Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah pegawai yang menggunakan layanan kepegawaian berbasis IT	na	50%	39,872,500												
4	Program Pengembangan Aparatur	Persentase PNS berjabatan sesuai dengan kompetensinya	na	55%	0	58%	1,076,110,000	60%	841,671,000	70%	858,338,000	80%	895,671,500	80%	3,671,790,500	BKPSDM	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS berjabatan sesuai dengan kompetensinya	na	55%	1,492,747,500												
6	Program Pembinaan Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti	na	70	0	75%	69,000,000	80%	69,550,000	85%	70,155,000	90%	70,820,500	90%	279,525,500	BKPSDM	
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah			0%	0	8%	510,000,000	9%	510,000,000	10%	510,000,000	11%	510,000,000	11%	2,040,000,000	BKPSDM
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah			7%	663,675,000											
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			90%	889,273,000	91%	826,862,200	92%	890,124,000	93%	890,124,000	94%	1,654,674,981	94%	5,151,058,181	BKPSDM
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			90%	1,310,000,000	91%	88,500,000	92%	894,000,000	93%	3,216,000,000	94%	282,200,000	94%	5,790,700,000	BKPSDM
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			100%	49,600,000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	49,600,000	BKPSDM

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPIAAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPIAAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
11	Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan keagamaan	Peringkat Prestasi Kafilah MTQ di Tingkat Provinsi		9	9	9,360,475,000	9	8,668,730,000	8	10,771,415,200	8	9,924,270,425	7	11,192,362,864	7	49,917,253,489 SETDAKO	
		Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat provinsi		1 sekolah	1 sekolah		2 sekolah		3 sekolah		4 sekolah		5 sekolah		5 sekolah		
12	Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		na	90%	195,000,000	90%	300,000,000	90%	235,000,000	90%	190,000,000	90%	190,000,000	90%	1,110,000,000 SETDAKO	
13	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		na	95%	453,430,000	95%	1,393,142,000	95%	1,402,988,300	95%	1,413,601,400	95%	1,426,266,610	95%	6,089,428,310 SETDAKO	
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			90%	7,279,092,000	90%	5,988,570,400	90%	6,304,892,000	90%	6,304,892,000	90%	6,304,892,000	90%	32,182,338,400 SETDAKO	
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			90%	7,821,380,000	90%	3,889,130,000	90%	4,490,793,250	90%	2,444,412,238	90%	2,536,074,073	90%	21,181,789,561 SETDAKO	
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			84%	120,000,000	85%	108,000,000	85%	200,000,000	86%	200,000,000	87%	200,000,000	87%	828,000,000 SETDAKO	
20.	URUSAN SEKRETARIAT DPRD					25,086,278,000		24,249,001,500		25,161,744,800		25,853,262,830		26,580,432,663		126,930,719,793	
	SEKRETARIAT DPRD					25,086,278,000		24,249,001,500		25,161,744,800		25,853,262,830		26,580,432,663		126,930,719,793 SET DPRD	
	BELANJA LANGSUNG					25,086,278,000		24,249,001,500		25,161,744,800		25,853,262,830		26,580,432,663		126,930,719,793 SET DPRD	
1	Program Penyelenggaraan Kelembagaan DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi		70%	70%	19,123,280,000	72%	18,965,433,000	76%	19,556,668,250	77%	20,062,431,775	80%	20,588,771,652	80%	98,296,584,677 SET DPRD	
2	Program legislasi peraturan perundang-undangan	Persentase penetapan Perda		na	80%	563,050,000	80%	891,155,000	80%	999,349,250	85%	1,091,784,175	85%	1,193,462,593	85%	4,738,801,018 SET DPRD	
3	Program kerja sama informasi dengan media massa	Persentase penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat dan media massa		100%	100%	430,600,000	100%	455,200,000	100%	465,200,000	100%	475,200,000	100%	485,200,000	100%	2,311,400,000 SET DPRD	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	3,732,018,000	100%	3,205,585,500	100%	3,328,381,500	100%	3,353,986,500	100%	3,379,652,000	100%	16,999,623,500 SET DPRD	
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			90%	824,680,000	92%	664,128,000	94%	724,360,300	96%	773,296,330	98%	827,125,963	98%	3,813,590,593 SET DPRD	
6	Program peningkatan disiplin aparatur dan DPRD	Persentase peningkatan disiplin aparatur dan DPRD			150 stel	332,650,000		0		0		0		0	150 stel	332,650,000 SET DPRD	
7	Program peningkatan SDM aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			84%	75,000,000	85%	67,500,000	85%	87,785,500	86%	96,564,050	86%	106,220,455	86%	433,070,005 SET DPRD	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD	PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB			
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	5,000,000										5,000,000	SET DPRD	
V	KEWILAYAHAN				26,220,383,350		33,325,160,675		34,026,979,341		39,211,509,871		41,885,366,861		174,669,400,098		
A	KEWILAYAHAN				26,220,383,350		33,325,160,675		34,026,979,341		39,211,509,871		41,885,366,861		174,669,400,098		
21.	KECAMATAN				26,220,383,350		33,325,160,675		34,026,979,341		39,211,509,871		41,885,366,861		174,669,400,098		
	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR				12,338,904,900		15,995,419,900		17,466,144,900		19,931,956,190		20,989,505,900		86,721,931,790	KEC.PADANG PANJANG TIMUR	
	BELANJA LANGSUNG				12,338,904,900		15,995,419,900		17,466,144,900		19,931,956,190		20,989,505,900		86,721,931,790	KEC.PADANG PANJANG TIMUR	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	na	80	318,145,500	80.5	2,120,475,000	81	2,298,175,000	81.5	2,300,675,000	82	2,527,375,000	82	9,564,845,500	KEC.PADANG PANJANG TIMUR	
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif		27%	36,2%	3,182,592,000		-		-		-	-	81,4%	3,182,592,000	KEC.PADANG PANJANG TIMUR	
3	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Persentase Nilai Partisipasi Masyarakat		16%	18%	223,228,000	19%	10,709,438,000	20%	12,222,963,000	21%	14,200,613,000	22%	15,316,963,000	22%	52,673,205,000	KEC.PADANG PANJANG TIMUR
4	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif		30%	36,2	5,612,439,500		-		-		-		-	81,40%	5,612,439,500	KEC.PADANG PANJANG TIMUR
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	90%	2,171,256,900	90%	2,173,006,900	90%	2,173,006,900	90%	2,173,006,900	90%	2,173,006,900	90%	10,863,284,500	KEC.PADANG PANJANG TIMUR
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparat		90%	90%	734,493,000	90%	897,500,000	90%	677,000,000	90%	1,162,661,290	90%	877,161,000	90%	4,348,815,290	KEC.PADANG PANJANG TIMUR
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparat		90%	90%	95,000,000	90%	95,000,000	90%	95,000,000	90%	95,000,000	90%	95,000,000	90%	475,000,000	KEC.PADANG PANJANG TIMUR
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	100%	1,750,000									100%	1,750,000	KEC.PADANG PANJANG TIMUR
	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT					13,881,478,450		17,329,740,775		16,560,834,441		19,279,553,681		20,895,860,961		87,947,468,308	
	BELANJA LANGSUNG					13,881,478,450		17,329,740,775		16,560,834,441		19,279,553,681		20,895,860,961		87,947,468,308	KEC.PADANG PANJANG BARAT
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan	na	80	327,206,000	80.5	2,655,078,000	81	2,835,755,800	81.5	3,081,834,380	82	3,355,017,818	82	12,254,891,998	KEC.PADANG PANJANG BARAT	
2	Program peningkatan pelayanan kedinasan	Cakupan pelayanan kedinasan camat		100%	100%	17,030,000											KEC.PADANG PANJANG BARAT

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
3	Program Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan	Persentase Nilai Partisipasi Masyarakat		16	18	3,679,122,400	19	10,134,517,325	20	11,138,733,191	21	13,410,253,851	22	14,910,145,693	22	53,272,772,460	KEC.PADANG PANJANG BARAT
4	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan				271,207,000			-							271,207,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
5	Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan			8 Kelurahan	6,618,655,000	8 Kelurahan	-	8 Kelurahan	-	8 Kelurahan	-	8 Kelurahan	-	8 Kelurahan	6,618,655,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	90%	1,971,058,050	90%	1,975,145,450	90%	1,975,145,450	90%	1,975,145,450	90%	1,975,145,450	90%	9,871,639,850	KEC.PADANG PANJANG BARAT
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	90%	897,200,000	90%	2,455,000,000	90%	511,200,000	90%	712,320,000	90%	555,552,000	90%	5,131,272,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		90%	90%	100,000,000	90%	110,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	510,000,000	KEC.PADANG PANJANG BARAT
VI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478	
A	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478	
22	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478	BPBD KESBANGPOL
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK					4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478	BPBD KESBANGPOL
	BELANJA LANGSUNG					4,360,099,800		4,048,075,063		4,266,960,068		4,798,080,070		5,091,798,477		22,565,013,478	BPBD KESBANGPOL
1	Program Pencegahan Dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana		0	2 kelurahan	1,756,381,000	8 kelurahan	394,380,500	12 kelurahan	428,318,550	14 kelurahan	412,000,000	16 kelurahan	400,000,000	16 kelurahan	3,391,080,050	BPBD KESBANGPOL
2	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah penurunan angka penyakit masyarakat (kriminalitas, narkoba, psikotropika zat adiktif lainnya (Napza), Miras)		na	100%	116,730,000		0		0		0		0		116,730,000	BPBD KESBANGPOL
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	persentase peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan		na	100%	178,695,000		0		0		0		0		178,695,000	BPBD KESBANGPOL
4	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Respon time tanggap darurat	20 menit	na	18 menit	0	17 menit	1,359,291,000	15 menit	1,210,416,000	13 menit	1,360,416,000	10 menit	1,210,416,000	10 menit	5,140,539,000	BPBD KESBANGPOL
		Lama waktu pendistribusian logistik	180 menit	na	170 menit		160 menit		155 menit		150 menit		145 menit		140 menit		BPBD KESBANGPOL
5	Program Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Lama waktu pemberian rekomendasi penanganan pasca bencana				0	48 jam	62,500,000	48 jam	66,000,000	48 jam	69,000,000	48 jam	74,000,000	48 jam	271,500,000	BPBD KESBANGPOL
6	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persentase penanganan konflik sosial di kelurahan		na	60%	1,091,613,000	70%	999,053,363	75%	1,070,296,750	80%	1,156,202,425	85%	1,252,148,668	85%	5,569,314,206	BPBD KESBANGPOL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM/ PRIORITAS PEMBANGUNAN/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2017	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB		
					2019		2020		2021		2022		2023				
					KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)			
		Jumlah Generasi Muda yang Ditingkatkan Wawasan Kebangsaannya	na	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250 orang		BPBD KESBANGPOL
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilu Kada			na	Pemilu serentak 71%	Pilgub 56%			0		Pilkada 73 %		Pemilu Serentak 71%, Pilgub 55%, Pilkada 73 %		BPBD KESBANGPOL	
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90%	1,019,180,800	91%	952,850,200	92%	1,259,828,768	93%	1,385,811,645	94%	1,524,392,809	94%	6,142,064,222	BPBD KESBANGPOL	
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	75,000,000	90%	212,500,000	90%	141,350,000	90%	314,825,000	90%	521,033,500	90%	1,264,708,500	BPBD KESBANGPOL	
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur		90%	46,000,000	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	46,000,000		
10	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		99%	75,000,000	99%	67,500,000	99%	90,750,000	99%	99,825,000	99%	109,807,500	99%	442,882,500	BPBD KESBANGPOL	
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	1,500,000									100%	1,500,000	BPBD KESBANGPOL	



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan:

- a. penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas Walikota serta arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD, RPJM Provinsi Sumatera Barat dan memperhatikan RPJM Nasional; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

- a. menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dengan memuat arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka menengah; dan
- b. menetapkan pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP

- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 April 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 April 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

MARTONI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT : (2/36/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan (*protection function*) fungsi perlindungan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga kegiatan pembangunan daerah Tahun 2018-2023 dapat bersinergi dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Kota Padang Panjang sudah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun 2025 adalah "Kota Yang Maju, Lestari dan Islami". Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Padang Panjang telah mengamanatkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, meliputi:

1. Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat;
2. Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian;
3. Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari;

4. Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana; dan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Selanjutnya pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 dibagi dalam 5 tahapan. RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan Tahap ke-3 dari kurun waktu 25 tahun tersebut. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, penekanan pembangunan pada tahap 3 ini lebih diarahkan pada persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian, pembentukan sumberdaya manusia berkualitas.

Kota Padang Panjang adalah kota yang secara geografis berada di kawasan regional Provinsi Sumatra Barat sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018 – 2023 harus disusun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan kendala yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Disamping itu, RPJMD ini juga harus mempedomani dan selaras dengan beberapa dokumen lain, yaitu :

1. Rencana Pembangun Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat 2016-2021:
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang 2012-2032; serta
5. regulasi lainnya, baik yang diatur secara nasional, maupun secara regional, serta pengaruh lingkungan lainnya (global, nasional, regional dan lokal).

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : 02 Tahun 2019
Tanggal : 29 April 2019
Tentang : Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2023

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2019**